

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Teori, Soal, dan Penyelesaiannya

Buku Edisi Kedua ini disempurnakan dengan penyajian yang lebih simpel dan mudah difahami yang dilengkapi dengan soal serta pembahasannya. Buku ini cocok untuk mahasiswa, dosen, dan praktisi dalam memahami konsep dasar ekonomi makro dan penerapannya dalam perekonomian. Dalam edisi kedua ini, materi dilengkapi dengan beberapa tambahan aspek, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Ekonomi Makro Daerah dan Regional (LQ, Klassen, dan *Shift-share*). Dengan penambahan materi ini, buku ini lebih komprehensif dan cocok untuk memahami ekonomi makro secara utuh.



Dr. Suparmono, M.Si. merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UGM dan Pascasarjana Ilmu Ekonomi UGM dengan predikat tercepat dan sangat memuaskan. Gelar Doktor diperoleh dari UNS dengan predikat sangat memuaskan. Lahir di Jambi, 18 Maret 1973, anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Selain sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, sejak tahun 1997 aktif sebagai Tenaga Ahli di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan publik untuk kajian pada kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah. Seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian KPDT, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia NTB dan Semarang, Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

UPP STIM YKPN
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 7
Yogyakarta 55581
Telp.: (0274) 889317,
HP/WA: 08157988210
Email: upp_stimykp@yahoo.com



Edisi
Kedua

Dr. Suparmono, M.Si.

**PENGANTAR
EKONOMI
MAKRO**



UPP STIM YKPN
IKUT MENCERDASKAN BANGSA



UPP STIM YKPN
IKUT MENCERDASKAN BANGSA

EDISI KEDUA

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Teori, Soal, dan Penyelesaiannya

Dr. Suparmono, M.Si.

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Teori, Soal, dan Penyelesaiannya

Buku Edisi Kedua ini disempurnakan dengan penyajian yang lebih simpel dan mudah difahami yang dilengkapi dengan soal serta pembahasannya. Buku ini cocok untuk mahasiswa, dosen, dan praktisi dalam memahami konsep dasar ekonomi makro dan penerapannya dalam perekonomian. Dalam edisi kedua ini, materi dilengkapi dengan beberapa tambahan aspek, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, ekonomi makro daerah dan regional (LQ, Kelas, dan Shift-share). Dengan penambahan materi ini, buku ini lebih komprehensif dan cocok untuk memahami ekonomi makro secara utuh.



Dr. Suparmono, M.Si, merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UGM dan Pascasarjana Ilmu Ekonomi UGM dengan predikat tercepat dan sangat memuaskan. Gelar Doktor di UNS dengan predikat sangat memuaskan. Lahir di Jambi, 18 Maret 1973, anak ke tujuh dari sembilan bersaudara. Selain sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, juga aktif sejak tahun 1997 sebagai Tenaga Ahli dibidang perencanaan pembangunan dan kebijakan publik untuk kajian pada kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah. Misalnya di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian KPDT, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia NTB dan Semarang, Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

UPP STIM YKPN
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 7
Yogyakarta 55581
Telp.: (0274) 889317,
HP/WA: 08157988210
Email: upp_stimykpn@yahoo.com



Edisi
Kedua

Dr. Suparmono, M.Si.

PENGANTAR **E**KONOMI MAKRO



UPP STIM YKPN
IKUT MENCERDASKAN BANGSA



UPP STIM YKPN
IKUT MENCERDASKAN BANGSA

EDISI KEDUA

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Teori, Soal, dan Penyelesaiannya

Dr. Suparmono, M.Si.

EDISI KEDUA

PENGANTAR KONOMI MAKRO

Teori, Soal, dan Penyelesaiannya

Dr. Suparmono, M.Si.



UPP STIM YKPN

IKUT MENCERDASKAN BANGSA

PENGANTAR **KONOMI** **MAKRO**

Edisi Kedua
Cetakan Pertama, Juli 2018

Dr. Suparmono, M.Si.

ISBN 978-602-1286-63-0



Penerbit/Pencetak:
UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 7, Yogyakarta 55581
Telp./Faks. (0274) 889317 SMS Hotline: 08157988210
E-mail: upp_stimykn@yahoo.com

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh direproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72:
Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DAFTAR ISI LENGKAP

KATA PENGANTAR EDISI PERTAMA	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR KURVA	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
Konsep dasar ilmu ekonomi	2
Ilmu ekonomi	3
Macam kegiatan ekonomi	4
Pengertian dasar dalam ilmu ekonomi	6
Jenis organisasi ekonomi	8
Pasar dan masalah pokok ekonomi	9
Kurva kemungkinan produksi	12
<i>Konsep Penting Bab Ini</i>	14
<i>Rangkuman</i>	15
<i>Pertanyaan untuk Latihan</i>	16
<i>Pertanyaan untuk Diskusi</i>	18
BAB II	
PENDAPATAN NASIONAL	19
Metode perhitungan pendapatan nasional	20
• Metode produksi	21
• Metode pendapatan	23
• Metode pengeluaran	24
Konsep lain dalam pendapatan nasional	25
Transaksi yang tidak dimasukkan dalam pendapatan nasional	26
Pertumbuhan pendapatan nasional	29
Kasus 1 perhitungan pendapatan nasional riil	31
Kasus 2 perhitungan pertumbuhan ekonomi	31
Perbedaan antara GNP dan GDP	32
<i>Istilah Penting Bab Ini</i>	34
<i>Rangkuman</i>	35
<i>Pertanyaan untuk Latihan</i>	36
<i>Pertanyaan untuk Diskusi</i>	39

BAB III	
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL	40
Perekonomian dua sektor	41
• Fungsi konsumsi	42
Kasus 1 menentukan MPC dan fungsi konsumsi	44
• Fungsi tabungan	45
Kasus 2 menentukan fungsi tabungan	46
• Fungsi investasi	47
Kasus 3 perekonomian dua sektor	48
Cara menggambar grafik	49
Angka pengganda perekonomian dua sektor	51
Kesenjangan (Gap)	53
Kasus 4 menghitung angka pengganda	53
Perekonomian tiga sektor	56
• Pengeluaran pemerintah	57
Kasus 5 perekonomian tiga sektor	59
Kasus 6 perekonomian tiga sektor dengan pajak tetap	60
Kasus 7 perekonomian tiga sektor dengan pajak proporsional	61
• Angka pengganda perekonomian tiga sektor	62
Perekonomian empat sektor	66
• Fungsi ekspor	67
• Fungsi impor	67
Kasus 8 perekonomian empat sektor	68
Kasus 9 perekonomian empat sektor dengan impor proporsional	69
• Angka pengganda perekonomian empat sektor	71
<i>Istilah Penting Bab Ini</i>	72
<i>Rangkuman</i>	73
<i>Pertanyaan untuk Latihan</i>	74
<i>Pertanyaan untuk Diskusi</i>	77
BAB IV	
TEORI KONSUMSI	78
Faktor yang mempengaruhi konsumsi	79
Teori konsumsi	81
• Teori Keynes	81
• Hipotesis pendapatan permanen	82
• Hipotesis pendapatan relatif	83
• Hipotesis siklus hidup	84
Faktor lain yang berpengaruh pada konsumsi	86
• Distribusi pendapatan nasional	86

• Jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk alat likuid	87
• Banyaknya barang konsumsi tahan lama	87
• Kebijakan finansial perusahaan	88
• Kebijakan pemasaran suatu perusahaan	88
• Ramalan masyarakat akan perubahan harga di masa datang	88
<i>Istilah Penting Bab Ini</i>	89
<i>Rangkuman</i>	90
<i>Pertanyaan untuk Latihan</i>	91
<i>Pertanyaan untuk Diskusi</i>	93
BAB V	
TEORI INVESTASI	94
Konsep dasar investasi	95
Faktor penentu investasi	97
• tingkat suku bunga	98
• prakiraan kondisi di masa yang akan datang	99
• inovasi teknologi	99
• tingkat kesejahteraan suatu masyarakat	100
Pasar saham dan investasi	101
Marginal efficiency of capital	101
<i>Kasus 1 (menentukan kelayakan investasi)</i>	104
<i>Istilah Penting Bab Ini</i>	106
<i>Rangkuman</i>	107
<i>Pertanyaan untuk Latihan</i>	108
<i>Pertanyaan untuk Diskusi</i>	110
BAB VI	
UANG DAN BANK SENTRAL	111
UANG	112
• Sejarah timbulnya uang	112
• Peranan Uang dalam Perekonomian	114
• Konsep uang beredar di Indonesia	116
• Proses penciptaan uang oleh bank umum	118
• Teori permintaan uang	118
a. Teori permintaan uang Keynes	118
b. Teori kuantitas Neo-Klasik	121
• Analisis IS – LM	123
• Pasar barang dan kurva IS	123
<i>Kasus 1 (menentukan fungsi IS)</i>	104
• Pasar uang dan kurva LM	124

<i>Kasus 2 (menentukan fungsi LM)</i>	127
• Keseimbangan di pasar uang dan pasar barang	127
<i>Kasus 3 (menentukan keseimbangan umum)</i>	129
BANK SENTRAL	130
• Bank sentral sebagai lembaga independen	130
• Tugas bank sentral	132
<i>Kasus 4 (menentukan antara dan target pokok)</i>	133
<i>Istilah Penting Bab Ini</i>	134
<i>Rangkuman</i>	135
<i>Pertanyaan untuk Latihan</i>	137
<i>Pertanyaan untuk Diskusi</i>	139
BAB VII	
TEORI INFLASI	140
• Konsep dasar inflasi	141
• Penyebab timbulnya inflasi	141
1. inflasi sisi permintaan dan penawaran	141
<i>Kasus 1 (pengaruh perubahan permintaan terhadap harga dan kuantitas)</i>	143
<i>Kasus 2 (pengaruh perubahan penawaran terhadap harga dan kuantitas)</i>	146
2. inflasi menurut teori kuantitas	149
• Inflasi akibat perang	150
• Inflasi menurut teori Keynes	151
• Cara perhitungan inflasi	152
• Pengaruh inflasi	153
<i>Istilah Penting Bab Ini</i>	155
<i>Rangkuman</i>	156
<i>Pertanyaan untuk Latihan</i>	157
<i>Pertanyaan untuk Diskusi</i>	458
BAB VIII	
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER	160
Tujuan kebijakan ekonomi makro	161
KEBIJAKAN FISKAL	162
• Definisi kebijakan fiskal	162
• Kebijakan fiskal yang disengaja	164
<i>Kasus 1 (pengaruh pajak pada tabungan dan konsumsi)</i>	164
<i>Kasus 2 (pengaruh transfer pada tabungan dan konsumsi)</i>	166
KEBIJAKAN MONETER	166
• Instrumen kebijakan moneter	166

KEBIJAKAN PENGENDALIAN HARGA	170
Efektivitas kebijakan fiskal dan moneter	171
• Efektivitas kebijakan fiskal	172
• Efektivitas kebijakan moneter	173
<i>Istilah Penting Bab Ini</i>	176
<i>Rangkuman</i>	177
<i>Pertanyaan untuk Latihan</i>	178
<i>Pertanyaan untuk Diskusi</i>	180
BAB IX	
PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN	181
I. PENGANGGURAN	181
• Konsep pengangguran	181
• Penyebab pengangguran	183
• Hubungan pengangguran dan inflasi	187
• Profil pengangguran di indonesia	188
• Alternatif strategi mengatasi pengangguran	192
II. KEMISKINAN	193
• Konsep dasar kemiskinan	193
• Penyebab kemiskinan	194
• Ukuran kemiskinan	195
<i>Istilah Penting Bab Ini</i>	199
<i>Rangkuman</i>	200
<i>Pertanyaan untuk Latihan</i>	202
<i>Pertanyaan untuk Diskusi</i>	205
BAB X	
TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL	206
Merkantilisme	207
Mengapa perdagangan internasional terjadi	208
Rintangan dalam perdagangan internasional	210
a. Tarif	210
b. Kuota	213
c. Aturan administratif dan karantina	214
d. Subsidi	214
Cara Pembayaran dalam perdagangan internasional	214
a. Tunai (cash)	215
b. Open account	215
c. Commercial bills of exchange	215
d. Letters of credit (LC)	216

<i>Istilah Penting Bab Ini</i>	219
<i>Rangkuman</i>	220
<i>Pertanyaan untuk Latihan</i>	221
<i>Pertanyaan untuk Diskusi</i>	223

Daftar Pustaka

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan karunianya sehingga buku Pengantar Ekonomi Makro; Teori, Soal, dan Penyelesaiannya Edisi II dapat diselesaikan.

Buku ini disusun untuk mahasiswa, dosen, dan praktisi dalam memahami konsep dasar ekonomi makro dan penerapannya dalam perekonomian. Kelebihan buku ini adalah menyajikan konsep dasar secara sederhana dan mudah di fahami oleh pembaca. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan soal latihan dan pembahasan dari soal tersebut mulai dari soal sederhana sampai dengan soal yang kompleks.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Terimakasih kepada Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) dan STIM YKPN Yogyakarta. Kepada kedua orangtua yang penulis hormati, dan Istri yang sangat saya cintai, Rina Setyanti, Ananda Shafira Mourina Yasmine dan Ananda Najwa Syazwina. Untuk Sri Astuti, Syamsuri Oramahi, dan Tiara, terimakasih atas bantuan mengedit dan mengoreksi buku ini hingga rampung.

Penulis menyadari bahwa buku ini meskipun telah dilakukan revisi, masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Penulis menerima dengan senang hati untuk kritik dan saran untuk perbaikan buku ini.

Selamat menikmati sajian menu makro ekonomi dalam buku ini.

Yogyakarta, Juli 2018

Penulis

Dr. Suparmono, M.Si

Kupersembahkan Buku Ini untuk:

Istriku, Rina Styanti, S.Sos

Ananda Shafira Mowina Yasmine dan Najwa Syazwina

Sinopsis

Buku Edisi Kedua ini disempurnakan dengan penyajian yang lebih simpel dan mudah difahami yang dilengkapi dengan soal serta pembahasannya. Buku ini cocok untuk mahasiswa, dosen, dan praktisi dalam memahami konsep dasar ekonomi makro dan penerapannya dalam perekonomian. Dalam edisi kedua ini, materi dilengkapi dengan beberapa tambahan aspek, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, ekonomi makro daerah dan regional (*LQ, Klassen, dan Shift-share*). Dengan penambahan materi ini, buku ini lebih komprehensif dan cocok untuk memahami ekonomi makro secara utuh.

1

PENDAHULUAN

1. Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi
2. Pengertian Ilmu Ekonomi
3. Macam Kegiatan Ekonomi
4. Pengertian Dasar dalam Ilmu Ekonomi
5. Jenis Organisasi Sistem Ekonomi
6. Pasar dan Masalah Pokok Ekonomi
7. Kegagalan Pasar
8. Kurva Kemungkinan Produksi

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI

Perhatian dalam bidang ekonomi sebenarnya telah dilakukan sejak masa Aristoteles (350 SM), saat itu ekonomi dipelajari pada tingkat yang mendasar secara filosofis. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sejak jaman primitif pada dasarnya juga merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan pertukaran atau barter sebelum ada alat tukar pada dasarnya melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan yang jumlahnya terbatas, sehingga timbul masalah kelangkaan (*scarcity*). Karena adanya kelangkaan sumber daya yang ada, manusia harus melakukan pilihan (*choice*) terhadap kebutuhan tersebut.

Bidang ekonomi terbentuk sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan setelah tahun 1776 dengan diterbitkannya sebuah buku oleh *Adam Smith* yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation* atau sering disingkat dengan *the Wealth of the Nation* atau negara kesejahteraan. Adam Smith mencita-citakan suatu negara yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Menurutnya, kesejahteraan dapat dicapai tanpa campur tangan (intervensi) dari pemerintah dan alokasi sumber daya yang ada diserahkan pada mekanisme pasar (*market mechanism*). Campur tangan pemerintah hanya akan mengganggu mekanisme pengalokasian sumber daya secara efektif. Gangguan pada keseimbangan pasar akan diatasi secara otomatis oleh tangan yang tidak terlihat (*invisible hand*). Ahli-ahli ekonomi yang menganut pandangan Adam Smith ini dikenal dengan Kelompok Klasik. Tradisi dari kaum klasik inilah yang menjadi dasar perkembangan ilmu ekonomi mikro (*microeconomics*). Pandangan Adam Smith pada tahun-tahun tersebut menjadi acuan bagi hampir setiap pemikiran-pemikiran ekonomi, sehingga Adam Smith dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi.

Depresi besar (*great depression*) yang terjadi pada tahun 1930-an melahirkan ekonom baru yaitu *John Maynard Keynes* dengan bukunya *General Theory of Employment, Interest, and Money* yang kemudian menjadi dasar perkembangan teori ekonomi makro. Jika kelompok klasik mendasarkan pada bekerjanya mekanisme pasar persaingan maka kelompok Keynesian menganggap perlu campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Peranan pemerintah dalam perekonomian berfungsi sebagai penyedia barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*). Penyediaan barang dan jasa publik perlu dilakukan oleh pemerintah karena sektor swasta tidak mungkin melaksanakannya karena sektor tersebut tidak menjanjikan keuntungan dan membutuhkan investasi yang sangat besar. Berikut ini secara ringkas ditampilkan perbedaan antara pandangan Klasik dan Keynesian.

Tabel 1.1 Perbandingan Dasar Pemikiran Menurut Klasik dan Keynes

Klasik	Keynes
a. Tidak perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian.	a. Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian
b. Kalaupun ada campur tangan pemerintah, maka kegiatan pemerintah hanya dibatasi pada: 1. pertahanan dan keamanan 2. hukum dan peradilan 3. penyediaan prasarana umum yang tidak dapat disediakan oleh swasta	b. Campur tangan ini bertujuan untuk mengatasi penyakit ekonomi yaitu: 1. pengangguran 2. pertumbuhan ekonomi 3. Inflasi
c. Cara mengatasi pengangguran adalah dengan mengurangi tingkat upah.	c. Cara mengurangi pengangguran adalah dengan memperbanyak investasi.
d. Pemerintah memiliki peran minimal dalam perekonomian, berfokus pada tujuan jangka panjang.	d. Pemerintah memiliki peran besar dalam perekonomian, berfokus pada tujuan jangka pendek.
e. Pengeluaran pemerintah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan meningkatkan sektor publik dan penurunan sektor usaha.	e. Pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pengeluaran konsumen/investasi bisnis.
f. Suku bunga ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk menabung dan keinginan untuk meminjam dana modal untuk investasi.	f. Suku bunga ditentukan oleh pemerintah dan penawaran uang.
g. Pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan faktor produksi dengan menghasilkan barang dan jasa.	g. Pendapatan nasional faktor produksi yang tersedia tetapi oleh pengeluaran agregat.
h. Tingkat bunga fleksibel akan menjamin keadaan permintaan tenaga kerja akan sama dengan penawaran tenaga kerja.	h. Tingkat upah tidak fleksibel karena banyak pengangguran tingkat upah tidak akan turun dan pengangguran tetap ada.

PENGERTIAN ILMU EKONOMI

Ada beberapa definisi tentang ilmu ekonomi, tetapi pada dasarnya semua definisi tersebut memiliki pengertian yang cenderung sama. Secara umum definisi ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi *kebutuhan yang bersifat tidak terbatas* dengan *alat pemuas kebutuhan yang bersifat terbatas*. Dalam definisi ilmu ekonomi, terkandung pengertian bahwa:

- a. ilmu tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan
- b. ilmu ekonomi adalah ilmu tentang pilihan (*science of choices*)
- c. ilmu tentang cara pengalokasian sumber daya yang terbatas

Didasarkan pada kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas, maka manusia harus melakukan pilihan-pilihan (*choices*). Pilihan ini adalah menentukan jenis kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan kebutuhan mana yang masih mungkin untuk ditunda karena

sumber daya yang tersedia bersifat terbatas. Dalam menentukan pilihan, hendaknya jenis kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah jenis kebutuhan primer, setelah seluruh kebutuhan primer terpenuhi, barulah kebutuhan sekunder dan setelah itu kebutuhan tersier mengikutinya. Sebagai ilustrasi, Tabel 1.2. berikut ini menunjukkan berbagai jenis kebutuhan seseorang dan harga dari masing-masing kebutuhan tersebut. Dengan pendapatan sebesar Rp4.000.000 per bulan, orang tersebut harus melakukan pilihan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Tabel 1.2 Ragam Kebutuhan Seseorang Terhadap Barang dan Jasa (rupiah)

Jenis kebutuhan	Harga
Makanan	1.250.000
Pakaian	750.000
Komunikasi	150.000
Biaya berlibur	350.000
Sewa rumah	850.000
Biaya transportasi	200.000
Nonton di bioskop	150.000
Biaya pendidikan	800.000

Dengan melakukan pilihan dan menggunakan skala prioritas, maka jenis kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah untuk makanan (1.250.000), pakaian (750.000), sewa rumah (850.000), biaya pendidikan (800.000), biaya komunikasi (150.000), dan biaya transportasi (200.000). Dengan keterbatasan pendapatan, maka orang tersebut harus melakukan penundaan terhadap kebutuhan berlibur dan nonton bioskop.

Selain itu ilmu ekonomi juga membahas tentang cara pengalokasian sumber daya, terutama sumber daya alam yang bersifat terbatas. Sumber daya alam digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable natural resources*) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable natural resources*). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa minyak bumi, gas, dan hasil tambang lainnya, sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti kehutanan, perikanan, dan pertanian. Dengan ilmu ekonomi, manusia didorong untuk mampu mengalokasikan sumber daya alam tersebut secara efisien untuk mencapai kesejahteraan.

Pembagian ilmu ekonomi secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro (*microeconomics*) dan ilmu ekonomi makro (*macroeconomics*). Dalam ilmu ekonomi mikro, analisis yang dilakukan bersifat mikro (kecil) yaitu berkaitan dengan perilaku dari pelaku-pelaku ekonomi secara individual. Sedangkan ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis perilaku dari pelaku-pelaku ekonomi secara agregat (menyeluruh). Dalam ekonomi makro dibahas faktor penentu utama dari tingkat pendapatan nasional, tingkat harga umum, laju investasi dan tabungan, dan pertumbuhan pendapatan di suatu perekonomian.

MACAM KEGIATAN EKONOMI

Menurut pandangan Klasik, masalah pokok ekonomi masyarakat dapat digolongkan kepada tiga permasalahan penting, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi.

a. Masalah Produksi

Untuk mencapai kemakmuran, barang-barang kebutuhan harus tersedia di tengah masyarakat. Karena masyarakat sangat heterogen, maka barang-barang yang tersediapun beragam jenisnya sehingga muncul permasalahan bagi produsen, yaitu barang apa saja yang harus diproduksi. Munculnya pertanyaan tersebut di atas tidak lain karena heterogennya masyarakat. Dengan demikian, tentu menimbulkan permasalahan bagi produsen dan menimbulkan kekhawatiran apabila memproduksi suatu barang tertentu, tetapi tidak dikonsumsi masyarakat.

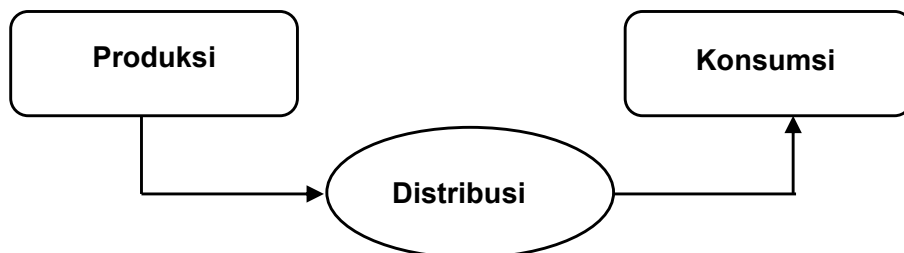
b. Masalah Distribusi

Agar barang/jasa yang telah dihasilkan dapat sampai kepada orang yang tepat, dibutuhkan sarana dan prasarana distribusi yang baik. Contoh, dari kebun hasil panen perlu alat angkut yang ditunjang prasarana jalan yang baik agar hasil panen cepat sampai ke tangan konsumen dan tidak tertimbun di produsen.

c. Masalah Konsumsi

Hasil produksi yang telah didistribusikan kepada masyarakat idealnya dapat dipakai atau dikonsumsi oleh masyarakat yang tepat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tepat pula. Persoalan yang muncul apakah barang tersebut akan dikonsumsi dengan tepat oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya atau menjadi sia-sia karena tidak terjangkau oleh masyarakat sehingga proses konsumsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Gambar 1.1
Alur Kegiatan Ekonomi Antara Produksi dan Konsumsi



Suatu proses kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa (*output*) dengan menggunakan satu set faktor produksi (*input*) merupakan pengertian umum dari produksi. Dengan kata lain, produksi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan

mengubah satu set *input* menjadi sejumlah *output* tertentu. Faktor produksi yang dimaksud di sini terdiri dari:

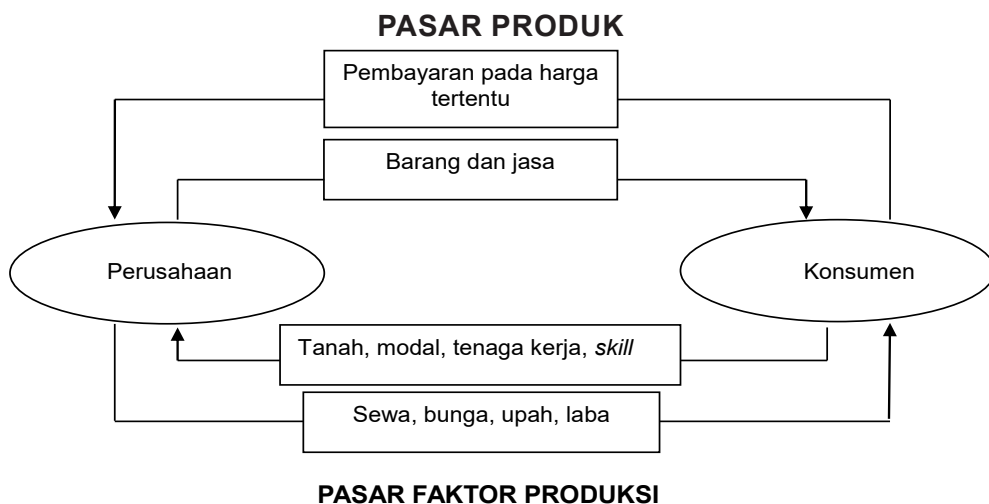
- a. Tanah (*land*)
- b. Modal (*capital*)
- c. Tenaga kerja (*labour*), dan
- d. Keahlian (*entrepreneurship*)

Di sisi lain, konsumsi merupakan suatu kegiatan yang menghabiskan fungsi barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menghubungkan kegiatan produksi dan konsumsi, maka diperlukan kegiatan distribusi untuk mengirimkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

Misalkan dalam suatu perekonomian sederhana yang terdiri dari produsen (rumah tangga perusahaan) dan konsumen. Di pasar faktor produksi, konsumen akan menjual faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan sehingga konsumen akan memperoleh pendapatan dari faktor produksi yang dijual tersebut. Pendapatan dari kepemilikan tanah berupa sewa, pendapatan dari modal adalah bunga, pendapatan dari tenaga kerja berupa upah atau gaji, sedangkan pendapatan dari keahlian adalah berupa laba atau keuntungan. Semakin banyak faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen, maka semakin besar pendapatan dari faktor produksi tersebut.

Proses produksi yang dilakukan oleh rumah tangga perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual kepada konsumen untuk dikonsumsi di pasar produk. Untuk mendapatkan barang dan jasa yang dihasilkan tersebut, maka konsumen harus membayar sejumlah uang pada tingkat harga tertentu. Proses inilah yang dikenal sebagai alur siklus (*circular flow*) kegiatan ekonomi sederhana.

Gambar 1.2
Alur Kegiatan Ekonomi Sederhana



PENGERTIAN DASAR DALAM EKONOMI

a. Ekonomi Normatif dan Ekonomi Positif

Untuk menganalisis masalah-masalah dalam perekonomian, ada dua model analisis yang digunakan, yaitu **analisis normatif** dan **analisis positif**. Analisis normatif menganalisis ekonomi kemakmuran (*welfare economics*) yang menentukan kondisi-kondisi ideal dan menentukan metode yang dapat digunakan untuk mencapai kondisi ideal tersebut. Dengan kata lain, analisis normatif merupakan kerangka analisis yang melihat suatu permasalahan atau fenomena berdasarkan **apa yang seharusnya** terjadi. Misalkan seharusnya pengangguran harus rendah, distribusi pendapatan seharusnya merata antar penduduk, dan seharusnya tidak ada masyarakat miskin dalam perekonomian. Sebaliknya analisis positif melihat suatu permasalahan berdasarkan pada **apa yang sesungguhnya** terjadi dalam perekonomian, misalnya tingkat pengangguran di Indonesia sampai tahun 2004 adalah 40 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin adalah 80 juta jiwa.

b. Barang Ekonomi dan Barang Bebas

Secara umum, ada dua pengelompokan jenis barang, yaitu barang bebas (*free goods*) dan barang ekonomi (*economic goods*). Barang bebas merupakan jenis barang yang untuk mendapatkannya tidak memerlukan *pengorbanan* dan untuk mendapatkannya tidak memerlukan persaingan atau bersinggungan dengan hak orang lain. Sebaliknya barang ekonomi merupakan barang yang untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan dan harus bersinggungan dengan hak orang lain. Pengertian pengorbanan di sini adalah berupa keharusan konsumen untuk membayar harga atas suatu barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Biasanya barang bebas jumlahnya tidak terbatas dan bukan merupakan barang langka, misalnya udara dan sinar matahari. Sebaliknya barang ekonomi biasanya jumlahnya terbatas dan dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya beras, pakaian, rumah, dan lain-lain. Selain barang ekonomi, terdapat pula barang semi ekonomi dan barang semi bebas. Untuk memahami perbedaan jenis barang dalam ilmu ekonomi, tabel di bawah ini menggambarkan keempat jenis barang tersebut.

	<i>Exclusion</i>	<i>Non Exclusion</i>
<i>Rivalry</i>	Barang Ekonomi	Barang Semi Bebas
<i>Non Rivalry</i>	Barang Semi Ekonomi	Barang Bebas

Exclusion; pengorbanan. *Rivalry*; bersinggungan dengan hak orang lain. *Non-Exclusion*; tanpa pengorbanan. *Non-Rivalry*; tanpa bersinggungan dengan hak orang lain

Barang semi ekonomi merupakan barang yang untuk menikmatinya memerlukan pengorbanan, tetapi barang tersebut tersedia dan untuk mendapatkannya harus bersinggungan dengan orang lain. Barang semi ekonomi ini tersedia bagi semua orang dan hanya orang tertentu yang mampu membayar yang dapat memanfaatkannya,

misalnya jalan tol. Barang semi bebas merupakan barang yang untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan tapi untuk mendapatkannya akan bersinggungan dengan hak orang lain. Ilmu ekonomi menitikberatkan pada barang ekonomi di mana diperlukan penalaran mengenai bagaimana orang akan memenuhi kebutuhan hidupnya harus memerlukan perhitungan dan pengorbanan secara ekonomi.

Nilai dari suatu barang tidaklah seluruhnya semata-mata hanya diukur berdasarkan kebutuhannya. Sebagai contoh adalah kasus permata dan air (*water-diamond case*). Air sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai kebutuhan pokok akan tetapi harga air lebih murah daripada permata. Hal ini dikarenakan air relatif tidak langka, sebaliknya permata meskipun bukan merupakan kebutuhan pokok tetapi harganya jauh lebih mahal daripada air. Hal ini dikarenakan permata memiliki sifat langka.

c. Analisis Ekuilibrium Parsial dan Analisis Ekuilibrium Umum

Dua metode analisis ini digunakan untuk meninjau arus barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Analisis ekuilibrium parsial (*partial equilibrium analysis*) membahas pasar secara individu dalam pembentukan harga dan jumlah barang dan jasa. Analisis ini biasanya digunakan untuk mikro ekonomi. Analisis Keseimbangan parsial menentukan keseimbangan harga dan jumlah barang dalam suatu pasar terlepas dari pengaruh luar misalnya pasar yang lain. Dalam keseimbangan parsial, dibahas mengenai keseimbangan di satu pasar saja. Tidak melihat jika satu pasar seimbang, pasar yang lain bagaimana.

Analisis ekuilibrium umum (*general equilibrium analysis*) membahas perilaku pasar secara umum dan saling berhubungan dalam suatu sistem perekonomian. Analisis ekuilibrium umum ini biasanya digunakan untuk ekonomika makro. Keseimbangan umum merupakan seimbangannya harga beli terhadap harga jual, seimbangannya permintaan barang dengan penawaran barang, juga keseimbangan antara pengeluaran uang dengan pemasukan dan juga keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi. Keseimbangan umum atau equilibrium adalah kondisi dimana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jumlah barang pada keadaan itu disebut kuantitas keseimbangan. Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu disebut harga keseimbangan. Keseimbangan umum terjadi apabila pasar uang dan pasar barang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama, dan keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat bunga.

d. Pandangan Statik dan Pandangan Dinamik

Pandangan statik. Keadaan pengetahuan saat ini dan usaha penambahannya, baik kepada keluasan pengetahuan itu sendiri maupun pada hukum, teori, hipotesis, dan kaidah-kaidahnya.

Pandangan dinamik. Pengetahuan yang sekarang adalah penting, kedudukan penting ini disebabkan oleh pengetahuan yang ada sekarang merupakan dasar bagi teori penelitian dan penemuan-penemuan yang lebih lanjut.

JENIS ORGANISASI SISTEM EKONOMI

Pemecahan masalah pokok ekonomi tergantung pada jenis sistem organisasi yang dianut oleh suatu negara. Hal ini berdampak pada jenis kebijakan pemerintah yang akan ditempuh maupun pada kesejahteraan seluruh pelaku ekonomi yang ada dalam organisasi ekonomi tersebut. Secara garis besar, organisasi ekonomi dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu perekonomian tradisional (subsisten), perekonomian pasar, perekonomian perencanaan, dan perekonomian campuran.

Perekonomian Tradisional

Perekonomian tradisional ditandai dengan corak kegiatan ekonomi yang bersifat subsisten, artinya barang-barang yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku ekonomi ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan kata lain, masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Kondisi ini ditandai dengan masih sederhananya teknologi produksi sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas. Sektor yang dominan pada organisasi ekonomi tradisional ini adalah sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan. Kegiatan ekonomi diatur berdasarkan kebiasaan dan adat-istiadat yang berlaku turun-temurun di dalam masyarakat. Kadangkala dalam masyarakat seperti ini, pemikiran yang tidak rasional masih mendominasi perilaku masyarakat, seperti animisme dan dinamisme.

Perekonomian Pasar

Dalam perekonomian pasar, ada pemisahan yang jelas antara peran masyarakat sebagai produsen dan sebagai konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen merupakan respon dari kebutuhan pasar. Dengan kata lain, pasar merupakan faktor utama yang mengatur dan menentukan jenis dan kapasitas kegiatan di masyarakat. Dalam perekonomian pasar yang murni (*pure market mechanism*), peranan pemerintah sangat kecil, bahkan tidak ada. Faktor produksi dapat dimiliki oleh perseorangan atau swasta sehingga perseorangan memiliki kebebasan yang luas untuk menggunakan faktor produksi yang dimilikinya. Semakin besar faktor produksi yang dimiliki oleh perseorangan, maka semakin besar pula kesempatan orang tersebut untuk menikmati kesejahteraan dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki faktor produksi. Kesenjangan antar kelompok masyarakat sangat dimungkinkan dalam perekonomian pasar. Perekonomian pasar sering diartikan sebagai persaingan bebas (*free-fight liberalism*) yang pada saat ini identik dengan perekonomian kapitalis.

Perekonomian Perencanaan Terpusat

Perekonomian perencanaan merupakan bentuk perekonomian yang bertolak belakang dengan perekonomian pasar. Dalam perekonomian perencanaan, pemerintah sangat dominan menentukan jumlah dan jenis barang yang dihasilkan. Untuk menguatkan peranan pemerintah dalam perekonomian, maka pemerintah membentuk badan yang berfungsi sebagai perencana kegiatan ekonomi. Faktor produksi dan sumber-sumber ekonomi yang bersifat vital bagi kehidupan masyarakat luas dikendalikan oleh pemerintah. Bidang yang bersifat vital ini diantaranya adalah bidang energi (minyak bumi, gas, dan listrik), komunikasi, transportasi, dan fasilitas publik lainnya. Dengan dikuasainya kegiatan ekonomi oleh pemerintah, maka secara teoritis pemerintah dapat mendistribusikan sumber-sumber ekonomi kepada seluruh masyarakat secara lebih merata sehingga pada akhirnya kesenjangan antar kelompok masyarakat dapat dikurangi.

Perekonomian Campuran

Jenis organisasi ekonomi campuran ini dalam kenyataannya diterapkan di sebagian besar negara di dunia. Di satu sisi, pemerintah campur tangan dalam kegiatan ekonomi, tapi lain perseorangan diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan menguasai faktor produksi sesuai dengan mekanisme pasar. Tujuan perekonomian campuran ini secara implisit adalah menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penggunaan faktor produksi dengan efisien, pemerataan distribusi pendapatan, dan perkembangan perekonomian yang stabil dari waktu ke waktu.

SISTEM EKONOMI PANCASILA

Ilmu Ekonomi Pancasila berdasar asumsi manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) dan makhluk beretika (*homo ethicus*), bukan sekadar makhluk ekonomi (*homo economicus*). Oleh karenanya, ilmu ekonomi tidaklah bebas nilai (*value free*), melainkan sarat nilai (*value ladden*), sehingga ilmu ekonomi dikembangkan secara normatif, bukan sekadar secara positif. Dengan demikian, ilmu ekonomi mempertimbangkan aspek non-ekonomi, yang harus dikaji secara multidisiplin, bukan sekadar monodisiplin. Sistem ekonomi Pancasila ini lebih ditekankan pada sila ke-4 yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Menurut Prof. Mubyarto, Sistem Ekonomi Pancasila memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral
2. Ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi
3. Nasionalisme selalu menjawai kebijaksanaan ekonomi
4. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional
5. Ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi.

Ilmu ekonomi lebih diarahkan untuk menjadi ilmu ekonomi yang banyak menggunakan logika secara matematis. Menurut Kenneth Boulding dalam bukunya yang berjudul *Economic as a Science*, ilmu ekonomi dapat dikembangkan menjadi salah satu atau gabungan dari beberapa cabang ilmu berikut: (a) ekonomi sebagai ilmu sosial (*social science*); (b) ekonomi sebagai ilmu ekologi (*ecological science*); (c) ekonomi sebagai ilmu perilaku (*behavioral science*); (d) ekonomi sebagai ilmu politik (*political science*); dan (e) ekonomi sebagai ilmu moral (*moral science*).

Sebagai sebuah gagasan besar, Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang tidak mengacu kepada paham kapitalisme, tetapi juga tidak berdasar pada paham sosialisme. Ekonomi Pancasila menawarkan garapan berupa sistem perekonomian alternatif yang bersifat komprehensif integral bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaksud dalam UUD 1945.

PASAR DAN MASALAH POKOK EKONOMI

Dalam konsep tradisional, pasar dapat diartikan sebagai **tempat** penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Konsep **tempat** yang berkaitan secara lokasi geografis (*geographic location*) pada saat ini tidak lagi sepenuhnya berlaku. Transaksi antara penjual dan pembeli tidak lagi harus bertemu secara fisik pada satu tempat. Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga konsep *tempat* sudah digantikan menjadi konsep **kesepakatan**. Penjual dan pembeli cukup bersepakat mengenai harga, jumlah, cara pengiriman, dan cara pembayaran. Media *international networking (internet)* melalui *online shopping* misalnya telah mengubah konsep pasar secara konvensional.

Pasar dalam sistem perekonomian persaingan bebas (*free enterprise capitalism*) akan menjawab permasalahan dasar ekonomi. Permasalahan dasar ekonomi dapat dibedakan menjadi:

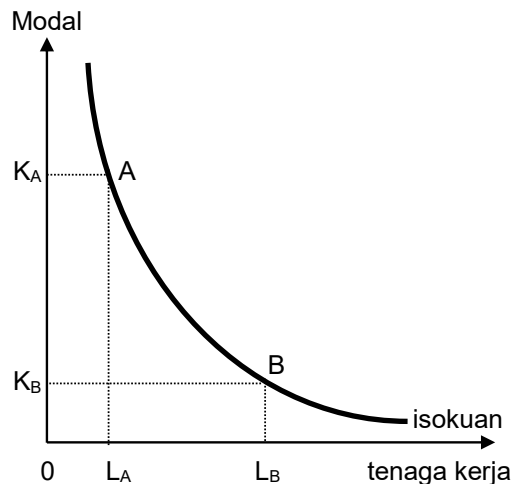
- a. *what* atau barang dan jasa apa yang akan dihasilkan
- b. *how* atau bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa tersebut
- c. *for whom* atau untuk siapa barang dan jasa itu dihasilkan

Mekanisme pasar (*market mechanism*) dapat menjawab ketiga masalah dasar tersebut melalui fungsi pasar. Fungsi pasar dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- a. **Menetapkan nilai**. Konsep yang digunakan untuk menentukan nilai suatu barang dan jasa adalah tingkat harga (*price*) dari barang dan jasa yang diperjualbelikan. Mengenai barang dan jasa apa yang akan diproduksi, pasar akan menjawab melalui permintaan konsumen. Barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan dan diminta oleh konsumen, itulah yang dihasilkan. Apabila terjadi kenaikan permintaan untuk barang dan jasa tertentu, maka pasar akan bereaksi dalam bentuk kenaikan harga, begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa tertentu, maka harga akan mengalami

penurunan. Fungsi ini sekaligus menjawab pertanyaan **barang dan jasa apa yang akan dihasilkan**.

- b. **Mengorganisasi produksi.** Dalam melakukan produksi, produsen akan memilih cara atau metode yang paling efisien. Efisiensi dapat dilakukan dengan cara memilih faktor produksi yang paling murah harganya. Produsen akan menggunakan lebih banyak faktor produksi yang harganya lebih murah dan menggunakan lebih sedikit faktor produksi yang harganya lebih mahal. Sebagai contoh, misalkan hanya ada dua faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi modal dan tenaga kerja yang akan menghasilkan *output* pada tingkat tertentu dinyatakan dalam kurva isokuan (*isoquant curve*), seperti Kurva 1.1. berikut ini.



Kurva 1.1. Kurva Isokuan pada Satu Proses Produksi

Dalam kondisi tertentu, tingkat bunga sangat tinggi sehingga harga dari modal menjadi sangat mahal dan di sisi lain upah tenaga kerja sangat murah karena kelebihan penawaran tenaga kerja, maka produsen akan memutuskan berproduksi pada titik B. Pada titik B, penggunaan tenaga kerja (L_B) jumlahnya lebih banyak daripada penggunaan modal (K_B). Sebaliknya apabila tingkat bunga rendah dan terjadi tuntutan buruh untuk menaikkan upah, maka akan menguntungkan sedikit tenaga kerja (L_A) dan menggunakan lebih banyak modal (K_A), yaitu di titik A.

- c. **Mendistribusikan produk.** Pasar merupakan media ataupun tempat untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Fungsi ini yang akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu **untuk siapa barang dan jasa tersebut**

dihasilkan. Jawabannya adalah konsumen yang memperoleh pendapatan paling besar dari faktor produksi yang dimilikinya. Semakin besar pendapatan dari faktor produksi yang dimilikinya, maka semakin besar kesempatan konsumen tersebut untuk membeli barang dan jasa yang ada di pasar. Di sisi lain, pasar juga akan menentukan harga dari masing-masing faktor produksi tersebut, semakin banyak kepemilikan suatu faktor produksi dan semakin mahal harga faktor produksi tersebut, maka semakin besar pendapatannya.

- d. **Menyelenggarakan penjatahan.** Fungsi ini berkaitan dengan jumlah barang dan jasa yang mampu dihasilkan bersifat terbatas, sehingga pasar berfungsi melakukan penjatahan (*rationing*). Harga yang terbentuk di pasar akan membatasi konsumsi yang berlebihan.

Beberapa literatur menambahkan satu masalah pokok ekonomi yang keempat, yaitu *how fast* (seberapa cepat). Maksudnya adalah seberapa cepat barang dan jasa tersebut mulai dari dihasilkan sampai dengan ke tangan konsumen. Masalah ini berkaitan dengan banyak dimensi dalam perekonomian, diantaranya yaitu jalur birokrasi, saluran distribusi, dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam perekonomian.

KEGAGALAN PASAR (MARKET FAILURE)

Pasar dalam menjalankan perannya mendistribusikan kegiatan ekonomi, juga tidak selamanya berjalan secara benar. Terdapat kegagalan pasar (*market failure*) di mana terjadi ketika sumber daya salah yang ada dialokasikan atau dialokasikan secara tidak efisien. Konsekuensinya adalah akan terjadinya pemborosan sumber daya dan hilangnya nilai ekonomi dari sumber daya tersebut. Ada empat sumber kegagalan pasar yaitu:

1. Struktur pasar yang tidak sempurna atau perilaku non kompetitif

Persaingan tidak sempurna adalah suatu industri di mana suatu perusahaan dapat mengendalikan harga dan persaingan industri. Dengan persaingan tidak sempurna menimbulkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Monopoli adalah suatu industri yang hanya terdiri dari satu perusahaan yang memproduksi produk yang tidak memiliki substansi dekat dan ada hambatan yang signifikan untuk mencegah perusahaan baru memasuki industri itu.

2. Eksistensi barang publik

Barang publik atau barang sosial adalah barang yang memberikan manfaat kolektif bagi masyarakat. Secara umum tidak ada seorang pun yang dikecualikan menikmati manfaat ini. Contohnya adalah pertahanan nasional dan taman kota. Karena biasanya pihak swasta hanya mengutamakan keuntungan dalam melakukan kegiatan ekonomi, maka biasanya pengadaan dan regulasi barang publik dilakukan oleh pemerintah.

3. Keberadaan biaya dan manfaat eksternal

Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang disebabkan oleh beberapa aktivitas atau transaksi yang ditanggung atau dibebankan pada pihak yang tidak melakukan aktivitas atau transaksi itu. Sistem harga akan bekerja dengan efisien karena harga pasar akan menyampaikan informasi kepada produsen maupun konsumen. Namun, terkadang harga pasar tidak mencerminkan kegiatan-kegiatan produsen dan konsumen. Ada suatu eksternalitas jika kegiatan konsumsi atau produksi mempunyai efek tidak langsung terhadap kegiatan konsumsi/produksi lain yang tidak tercermin langsung dalam harga pasar.

4. Informasi tidak sempurna

Informasi tidak sempurna adalah tidak adanya pengetahuan yang lengkap menyangkut karakteristik produk, harga yang berlaku dan seterusnya. Jika konsumen tidak mempunyai informasi yang akurat tentang harga pasar atau kualitas produk, sistem pasar tersebut tidak akan berjalan dengan efisien. Kekurangan informasi ini dapat memberikan insentif kepada produsen untuk menawarkan terlalu banyak beberapa produk, dan terlalu sedikit produk-produk lainnya.

Pasar dan Efisiensi Pareto

Efisiensi pareto atau pareto optimal adalah suatu kondisi dimana tidak mungkin terjadi perubahan yang akan membuat beberapa anggota masyarakat lebih beruntung, tanpa membuat anggota masyarakat lain merasa lebih merugi. Kriteria distribusi menurut pareto optimal ada 2, yaitu : (1) salah satu pihak diuntungkan, yang lain tidak dirugikan, (2) yang satu meningkat, maka yang lain tetap atau keduanya meningkat. Dengan begitu, maka kesejahteraan akan tercapai. Asumsi yang digunakan untuk mencapai pareto optimal adalah: pasar berbentuk persaingan sempurna atau tidak ada campur tangan pemerintah, dan tidak ada eksternalitas negatif. Pada kenyataannya terdapat hambatan teori Pareto tersebut, diantaranya: (1) pasar tidak berbentuk persaingan sempurna, maka dibuatlah Undang-Undang Persaingan Usaha. (2) eksternalitas Negatif, maka pemerintah harus mengambil tindakan atau kebijakan. Misalnya Kementerian Lingkungan Hidup memantau industri yang mencemarkan lingkungan dan kemudian memberikan sanksi.

KURVA KEMUNGKINAN PRODUKSI

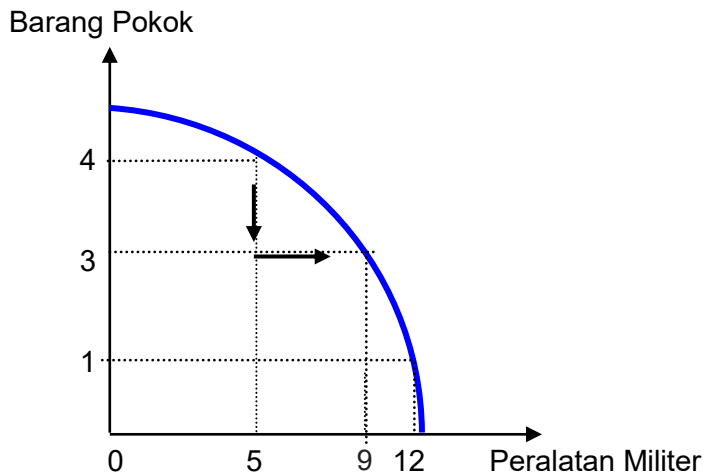
Kurva kemungkinan produksi (*production possibilities curve* atau PPC) merupakan alternatif kombinasi barang dan jasa maksimal yang dapat dihasilkan pada periode tertentu dengan menggunakan sumber daya dan teknologi yang dimiliki secara optimal. Misalnya ada dua jenis barang yang akan dihasilkan dalam perekonomian, yaitu barang pokok dan peralatan militer. Karena sumber daya yang dimiliki bersifat terbatas, maka ada putusan pilihan untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk

menghasilkan lebih banyak jenis barang yang satu dan produksi mengurangi jenis barang yang lain atau sebaliknya. Konsep ini dikenal dengan biaya oportunitas (*opportunity cost*).

Tabel 1.3
Skedul Produksi Untuk Barang Pokok dan Peralatan Militer

Barang Pokok	Peralatan Militer
5	0
4	5
3	9
2	12
1	12
0	15

Tabel 1.3. tersebut bila ditransformasikan dalam bentuk kurva kemungkinan produksi, maka digambarkan sebagai berikut:



Kurva 1.2. Kurva Kemungkinan Produksi

Kurva kemungkinan produksi memiliki kemiringan yang negatif, artinya penambahan peralatan militer dari 5 unit menjadi 12 unit akan mengakibatkan berkurangnya jumlah barang pokok yang dihasilkan dari 4 unit menjadi 3 unit. Ini membuktikan bahwa kelangkaan sumber daya dan biaya oportunitas berlaku pada perekonomian.

Kemajuan teknologi yang mengakibatkan peningkatan kapasitas perekonomian akan mengakibatkan kurva kemungkinan produksi akan mengalami pergeseran ke kanan atas. Jumlah barang dan jasa yang mampu dihasilkan dengan *input* yang sama akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

ISTILAH PENTING BAB INI

Ilmu tentang pilihan	Pareto optimal
Kegiatan utama ekonomi	Konsep pasar
Faktor produksi	Masalah pokok ekonomi
<i>Circular flow</i> kegiatan ekonomi	Kurva kemungkinan produksi
Analisa positif dan normatif	Perekonomian tradisional
Barang bebas	Perekonomian pasar
Barang ekonomi	Perekonomian perencanaan
Barang semi ekonomi	Sistem Ekonomi Pancasila
Barang semi bebas	Kegagalan Pasar
<i>Partial equilibrium analysis</i>	Perekonomian campuran
<i>General equilibrium analysis</i>	

RANGKUMAN

1. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu ekonomi adalah ilmu tentang pilihan (*science of choices*), ilmu tentang cara pengalokasian sumber daya yang terbatas, ilmu tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan.
2. Kegiatan utama dalam ekonomi ada tiga, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi merupakan suatu proses kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa (*output*) dengan menggunakan satu set faktor produksi (*input*). Konsumsi merupakan suatu kegiatan untuk menghabiskan fungsi dari suatu barang ataupun jasa. Sedangkan distribusi merupakan suatu kegiatan penyaluran atau penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, atau sebaliknya.
3. Secara garis besar, organisasi ekonomi dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu perekonomian tradisional (*subsisten*), perekonomian pasar, perekonomian perencanaan, dan perekonomian campuran. Dalam kenyataannya, jarang ada negara yang menerapkan sistem organisasi ekonomi tersebut secara murni, yang ada adalah kombinasi dari keempat jenis organisasi ekonomi tersebut.
4. Masalah pokok yang mendasar dalam perekonomian ada empat, yaitu *what* (apa), *how* (bagaimana), *for whom* (untuk siapa), *how fast* (seberapa cepat). Keempat masalah tersebut dapat diatasi dengan mekanisme pasar (*market mechanism*) melalui fungsi pasar, yaitu: menetapkan nilai, mengorganisasi produksi, mendistribusikan produk, dan menyelenggarakan penjatahan.
5. Barang bebas merupakan jenis barang yang untuk mendapatkannya tidak memerlukan *pengorbanan* dan untuk mendapatkannya tidak memerlukan persaingan atau bersinggungan dengan hak orang lain. Sebaliknya barang ekonomi merupakan barang yang untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan dan harus bersinggungan dengan hak orang lain.

6. Barang semi ekonomi merupakan barang yang untuk menikmatinya memerlukan pengorbanan, tetapi barang tersebut tersedia dan untuk mendapatkannya harus bersinggungan dengan orang lain. Barang semi ekonomi ini tersedia bagi semua orang dan hanya orang tertentu yang mampu membayar yang dapat memanfaatkannya, misalnya jalan tol. Barang semi bebas merupakan barang yang untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan tapi untuk mendapatkannya akan bersinggungan dengan hak orang lain. Ilmu ekonomi menitikberatkan pada barang ekonomi dimana diperlukan penalaran mengenai bagaimana orang akan memenuhi kebutuhan hidupnya harus memerlukan perhitungan dan pengorbanan secara ekonomi.
7. Analisis ekuilibrium parsial (*partial equilibrium analysis*) membahas pasar secara individu dalam pembentukan harga dan jumlah barang dan jasa. Analisis ini biasanya digunakan untuk mikro ekonomi. Analisis Keseimbangan parsial menentukan keseimbangan harga dan jumlah barang dalam suatu pasar terlepas dari pengaruh luar misalnya pasar yang lain.
8. Kegagalan pasar (*market failure*) di mana terjadi ketika sumber daya salah yang ada dialokasikan atau dialokasikan secara tidak efisien. Konsekuensinya adalah akan terjadinya pemborosan sumber daya dan hilangnya nilai ekonomi dari sumber daya tersebut.
9. Efisiensi pareto atau pareto optimal adalah suatu kondisi dimana tidak mungkin terjadi perubahan yang akan membuat beberapa anggota masyarakat lebih beruntung, tanpa membuat anggota masyarakat lain merasa lebih merugi.

PERTANYAAN UNTUK LATIHAN

LATIHAN SOAL PILIHAN BERGANDA

1. Ilmu ekonomi perlu untuk dipelajari dan dikembangkan karena beberapa alasan, *kecuali*:
 - a. kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas
 - b. pentingnya alokasi sumber daya yang terbatas
 - c. dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhannya
 - d. alat pemuas kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas
 - e. jawaban a, b, c, dan d benar
2. Suatu proses kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa (*output*) dengan menggunakan satu set faktor produksi (*input*) merupakan pengertian dari:
 - a. produksi
 - b. konsumsi
 - c. distribusi
 - d. *entrepreneurship*
 - e. *circular flow*

3. Pemerintah sangat dominan dalam menentukan jumlah dan jenis barang yang dihasilkan perekonomian merupakan corak utama dari:
 - a. perekonomian perencanaan terpusat
 - b. perekonomian pasar
 - c. perekonomian demokrasi
 - d. perekonomian campuran
 - e. perekonomian desentralisasi

4. Mekanisme pasar melalui fungsi pasar dapat memecahkan tiga masalah pokok ekonomi, kecuali:
 - a. mengorganisasi produksi
 - b. menetapkan nilai
 - c. mendistribusikan produk
 - d. mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan
 - e. menyelenggarakan penjatahan

5. Konsep dasar dalam ekonomi yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan berdasarkan pada **apa yang sesungguhnya** terjadi dalam perekonomian, merupakan pengertian dari:
 - a. barang bebas
 - b. barang ekonomi
 - c. analisis positif
 - d. analisis normatif
 - e. keseimbangan parsial

LATIHAN SOAL ESSAY

1. Mengapa ilmu ekonomi perlu untuk dipelajari? Apa manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari?
2. Jelaskan perbedaan pandangan ekonomi antara pandangan klasik dan pandangan Keynes!
3. Sebutkan kegiatan utama dalam sebuah perekonomian dan siapa saja yang terlibat dalam masing-masing kegiatan ekonomi tersebut!
4. Apa yang dimaksud dengan masalah pokok dalam ekonomi! Bagaimana pasar menyelesaikan masalah tersebut!
5. Apa yang dimaksud dengan biaya oportunitas! Berikan contoh biaya oportunitas dalam kehidupan sehari-hari!
6. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perekonomian yang ada! Apa perbedaan dan kesamaan dari masing-masing!
7. Apa perbedaan antara analisis positif dan analisis normatif! Untuk bidang apa lazimnya masing-masing analisis tersebut digunakan?

8. Jelaskan sebab terjadinya kegagalan pasar dan bagaimana peran pemerintah dalam mengantisipasi kegagalan pasar!
9. Apa yang dimaksud dengan pareto optimal dan mungkinkah hal ini terjadi pada sistem perekonomian pancasila!
10. Jelaskan keterkaitan antara pareto optimal dan sistem perekonomian Pancasila!

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Menurut Saudara, jenis perekonomian atau organisasi ekonomi mana yang paling baik dan efisien bagi kesejahteraan masyarakat?
2. Perekonomian Indonesia termasuk jenis organisasi ekonomi yang mana? Jelaskan alasan Saudara!
3. Diskusikan dan perbandingkan kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi pancasila dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis!
4. Mengapa negara yang menganut sistem perekonomian kapitalis lebih berhasil dalam membangun sistem ekonominya bila dibandingkan dengan negara dengan sistem perekonomian sosialis?
5. Buatlah suatu skedul dari berbagai macam kebutuhan Saudara dari skedul tersebut, susunlah macam kebutuhan itu dalam skala prioritas!
6. Mana yang lebih memungkinkan, pareto optimal terjadi pada perekonomian kapitalis, sosialis, atau sistem perekonomian pancasila?

2

PENDAPATAN NASIONAL

- 1) Konsep Dasar Pendapatan Nasional
- 2) Metode Perhitungan Pendapatan Nasional
- 3) Konsep Lain dalam Pendapatan Nasional
- 4) Transaksi yang Tidak Dimasukkan dalam Perhitungan Pendapatan Nasional
- 5) Pertumbuhan Pendapatan Nasional
- 6) Perbedaan antara GNP dan GDP
- 7) Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional
- 8) Analisis Location Quotient
- 9) Analisis Shift-Share
- 10) Tipologi Klassen

KONSEP DASAR PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa **akhir** yang dihasilkan oleh suatu negara pada **periode tertentu**, biasanya satu tahun. Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai pasar dari barang dan jasa. Nilai pasar tersebut dalam arti nilai kotor atau **bruto**, karena tidak seluruh produk yang dihasilkan pada periode tertentu merupakan penambahan pada produk yang ada, khususnya untuk barang modal. Sebagian besar dari produk baru yang dihasilkan merupakan penggantian dari produk lama yang nilai ekonomisnya telah habis pakai pada proses produksi. Jenis investasi yang merupakan penggantian barang modal yang lama merupakan pengertian dari **investasi bruto**. Untuk mengubah investasi bruto menjadi investasi neto, maka nilai investasi bruto harus dikurangi dengan penyusutan (depresiasi) barang modal tersebut.

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Selain itu, dengan pendapatan nasional, dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian di suatu negara.

Dalam perhitungan pendapatan nasional, yang dihitung hanyalah barang akhir (*final goods*) sedangkan barang antara (*intermediary goods*) tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Barang akhir merupakan barang yang langsung dikonsumsi dan tidak digunakan sebagai *input* pada proses produksi selanjutnya, sedangkan barang antara merupakan barang yang digunakan sebagai *input* pada proses produksi selanjutnya. Hal ini untuk menghindari suatu produk diperhitungkan berkali-kali dalam perhitungan pendapatan nasional. Dalam kenyataannya, sangat sulit membedakan barang antara dan barang akhir. Roti tawar misalnya, bagi rumah tangga, roti tawar merupakan barang akhir yang akan langsung dikonsumsi dan roti tawar ini tidak dipergunakan sebagai *input* untuk membuat produk lain. Sebaliknya roti tawar bagi pedagang roti bakar merupakan barang antara karena roti tawar digunakan sebagai salah satu *input* dalam membuat roti bakar.

Pendapatan nasional dihitung berdasarkan periode tertentu, biasanya periode perhitungannya secara tahunan. Dengan perhitungan periodik secara tahunan, pendapatan nasional dapat digunakan untuk menunjukkan perkembangan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu.

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PNB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara.

3. PDB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
4. Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
5. PDB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
6. Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
7. PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.
8. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk.
9. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

METODE PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Untuk menghitung nilai pendapatan nasional, ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan produksi (*production approach*)
2. Pendekatan pendapatan (*income approach*)
3. Pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*)

Ketiga pendekatan diatas, secara teoritis akan menghasilkan nilai pendapatan nasional yang sama.

1. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Cara menghitung pendapatan nasionalnya yaitu dengan mengalikan jumlah seluruh produk baik barang ataupun jasa yang telah dihasilkan atau diproduksi dalam kurun waktu satu tahun dengan harga satuan tiap produknya bisa berbentuk barang maupun jasa. Misalkan dalam setahun itu produk baik barang maupun jasa yang bisa diproduksi berjumlah seribu produk, maka hal tersebut harus dikalikan dengan harga satuan yang mereka miliki untuk mendapatkan jumlah atau besarnya pendapatan nasional negara tersebut dalam satu tahunnya. Hal ini dirumuskan dengan :

$$Y = \{(P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) + (P3 \times Q3) + \dots + (Pn \times Qn)\}$$

Keterangan :

Y : Pendapatan nasional

P : Jumlah produk yang diproduksi

Q : Harga satuan suatu produk

Di Indonesia, ada tujuh belas sektor ekonomi yang dihitung, yaitu:

Tabel 2.1
GDP Indonesia Tahun 2017 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 (miliar rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Nilai
1	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	1.174.456.80
2	Pertambangan dan Penggalian	756.239.20
3	Industri Peolahan	1.932.457.40
4	Pengadaan Listrik dan Gas	94.984.80
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	7.420.20
6	Konstruksi	881.583.90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.206.074.70
8	Transportasi dan Pergudangan	348.775.60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	269.054.50
10	Informasi dan Komunikasi	423.063.50
11	Jasa keuangan dan Asuransi	347.095.70
12	Real Estate	268.811.40
13	Jasa perusahaan	148.395.50
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	310.393.90
15	Jasa Pendidikan	283.540
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97.840.80
17	Jasa lainnya	144.902.40
Total Pendapatan Domestik Bruto		

Sumber: Statistik Indonesia, BPS

Penjumlahan nilai barang dan jasa dari sembilan sektor itulah yang merupakan pendapatan nasional Indonesia untuk tahun 2001, yaitu Rp. 411.132,2. Kontribusi dari masing-masing sektor dapat dihitung dari persentasenya. Misalnya dalam perekonomian itu, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian, yaitu 16,17 persen. Sebaliknya, sektor listrik, air dan gas merupakan kontributor terkecil bagi perekonomian dengan kontribusi sebesar 1,75 persen. Dari contoh diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pendapatan nasional dapat digunakan untuk menentukan struktur perekonomian suatu negara dari sektor yang ada, dapat pula diketahui sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian.

Selanjutnya, ketujuh belas sektor ekonomi itu digolongkan menjadi tiga kelompok berdasarkan aktivitasnya, yaitu:

1. *Sektor primer* merupakan sektor-sektor yang mengolah sumber daya alam secara langsung namun tidak menghasilkan output berupa barang akhir. Sektor ini terdiri dari:

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian

Meskipun demikian perusahaan manufaktur yang proses produksinya berhubungan erat dengan sumber daya alam juga digolongkan ke dalam sektor primer seperti industri pengepakan sumber daya alam dan penyulingan. Pada negara-negara berkembang sektor primer merupakan sektor penyumbang terbesar sebagai sumber pendapatan nasional. Namun meskipun demikian sektor ini tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

2. *Sektor sekunder*, dapat dikatakan bahwa sektor ini merupakan sektor yang mengolah output yang dihasilkan oleh sektor primer. Kemudian mengubahnya menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Industri ini dibagi menjadi dua yaitu industri berat dan industri ringan, terdiri dari:
 - a. Industri pengolahan
 - b. Listrik, air dan gas
 - c. Bangunan

Beberapa negara menjadikan sektor ini sebagai kontributor terbesar dalam pendapatan nasional mereka seperti Amerika, Singapura, serta Rusia. Negara-negara tersebut tergolong sebagai negara industri.

Kelebihan dari sektor sekunder adalah menyerap tenaga kerja yang tinggi sehingga mampu mengurangi angka pengangguran. Namun pada sisi lain, sektor ini juga merupakan penyumbang masalah kerusakan lingkungan terbesar dibanding sektor lain.

3. *Sektor tersier*, merupakan sektor jasa yang menghasilkan barang tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Pelaku pada sektor ini menawarkan pengetahuan serta jasa lain yang dapat membantu efektivitas, produktivitas maupun kinerja konsumennya. Sektor ini terdiri dari:
 - a. perdagangan, hotel, dan restoran
 - b. pengangkutan dan telekomunikasi
 - c. keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
 - d. jasa lain-lain

Dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi, kemungkinan dilakukannya kesalahan. Hal ini dikarenakan dalam perhitungannya kita menghitung nilai barang antara (*intermediary goods*) yang telah dihitung pada proses produksi sebelumnya. Kesalahan ini disebut dengan perhitungan ganda atau *double counting*. Untuk menghindari kesalahan tersebut, maka digunakan dua cara perhitungan, yaitu menghitung nilai barang akhir ataupun menghitung total nilai tambahnya (*added value*). Untuk memperjelas, perhatikan contoh sederhana proses produksi pakaian jadi pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Contoh Perhitungan Pendapatan Nasional
Dalam Suatu Proses Produksi

Produsen (1)	Produk (2)	Nilai rupiah (3)	Nilai tambah (4)
I	Kapas	1.500	1.500
II	Benang	3.250	1.750
III	Kain	6.000	2.750
IV	Pakaian jadi	9.000	3.000
Total		19.750	9.000

Dari tabel di atas, apabila kita menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai rupiah dari masing-masing produk mulai dari barang antara (kapas, benang, kain) sampai barang akhir (pakaian jadi) dengan jumlah 19.750, maka kita mengalami kesalahan berupa perhitungan ganda.

Pendapatan nasional seharusnya dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah atau selisih nilai barang antara. Pada berbagai tahapan produksi (kolom 4), nilai pendapatan nasional juga dapat ditentukan yaitu total nilai tambahnya (*total value added*) 9.000. Selain itu nilai pendapatan nasional juga dapat ditemukan dengan cara langsung menunjuk barang akhir yang ada pada kolom 2, yaitu nilai pakaian jadi 9.000.

2. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Masing-masing faktor produksi yang dimiliki akan memberikan pendapatan bagi pemilik faktor produksi tersebut. Pemilik faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh pendapatan dalam bentuk gaji, pemilik modal akan mendapatkan bunga dari modal yang dimilikinya, pemilik tanah akan memperoleh sewa, dan pemilik keahlian (*skill*) akan memperoleh laba. Perhitungan pendapatan nasional disini dirumuskan dengan :

$$Y = W + r + i + P$$

Keterangan :

- Y : pendapatan nasional
- W : wage (gaji atau upah)
- R : rent (sewa)
- i : interesrt (bunga)
- P : profit (keuntungan)

Untuk memperjelas perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, perhatikan contoh tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Contoh Perhitungan Pendapatan Nasional
dengan Pendekatan Pendapatan (dalam miliar rupiah)

Faktor Produksi	Pendapatan	Nilai Rupiah
Tenaga kerja	Upah/gaji	Rp.400
Modal	Bunga	Rp.250
Tanah	Sewa	Rp.425
Keahlian	Laba	Rp.125
		Rp1.200

Dengan menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi, dapat diketahui bahwa besarnya pendapatan nasional adalah Rp1.200. Laba dalam perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi dua, yaitu laba yang diperoleh pengusaha perorangan dan laba yang diterima perusahaan berbadan hukum. Laba perusahaan terdiri dari laba yang dibagikan kepada pemilik saham atau dividen. Sedangkan bagian laba yang dibayarkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak disebut dengan pajak perseroan dan laba yang tidak dibagi. Laba yang tidak dibagi merupakan cadangan untuk ditanamkan kembali untuk memperbesar perusahaan.

Dalam perhitungan pendapatan nasional pendekatan pendapatan, ada dua hal yang harus diperhitungkan meskipun tidak menjadi penerimaan, yaitu penyusutan (depresiasi) dan pajak tidak langsung. Penyusutan dimasukkan dalam perhitungan karena merupakan bagian pendapatan yang tidak dibagikan kepada pemilik faktor produksi. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan kepada pihak lain oleh wajib pajak, misalnya pajak pertambahan nilai. Produsen yang menjadi wajib pajak akan menggeserkan pajak pertambahan nilai kepada konsumen dalam bentuk menambahkannya pada harga barang dan jasa yang dijual. Dengan demikian, maka dalam perhitungan pendapatan nasional pendekatan pendapatan, variabel yang diperhitungkan terdiri dari:

1. penyusutan barang modal
2. pajak tidak langsung
3. upah dan gaji
4. bunga
5. sewa
6. laba perusahaan perorangan
7. dividen
8. pajak perseroan
9. laba tidak dibagi

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Dalam pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode

tertentu. Pengeluaran konsumen untuk membeli barang dan jasa disebut dengan konsumsi (*consumption*). Pengeluaran produsen untuk membeli alat dan bahan produksi disebut investasi (*investment*). Pengeluaran pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan negara disebut pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Transaksi perdagangan internasional yang diwujudkan dalam bentuk selisih nilai ekspor (*export*) dan impor (*import*) disebut dengan ekspor bersih (*net export*).

Tabel 2.4
GDP Indonesia atas Dasar Harga Konstan 2018 dengan Pendekatan Pengeluaran
(milyar rupiah)

Pelaku Ekonomi	Pendapatan Pelaku Ekonomi	Nilai Rupiah
Konsumen	Konsumsi (C)	298.703,6
Produsen	Investasi (I)	97.057,7
Pemerintah	Pengeluaran pemerintah (G)	31.138,1
Sektor luar negeri	Ekspor (X)	118.377,0
	Impor (M)	102.772,7
= C + I + G + (X - M)		442.503,7

Data Hipotetik

Dengan menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi, pendapatan nasional diperoleh sebesar 442.503,7. Pengertian investasi disini mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Pembelian mesin, peralatan pabrik, dan barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi
2. Pembelian dan pembangunan gedung, pabrik dan konstruksi
3. Perubahan nilai barang cadangan sebagai akibat perubahan harga maupun jumlah pada tahun yang sama.

Dari 3 hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud investasi adalah konsumsi yang dilakukan untuk mendapatkan return atau pengembalian kembali di masa yang akan datang. Baik kembali dalam arti sesungguhnya sebagaimana barang modal kembali dapat diuangkan setelah dijual ataupun pengembalian lain dalam bentuk manfaat sebagaimana gedung yang digunakan untuk operasi.

Sedangkan konsumsi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menghabiskan nilai guna dari barang tanpa adanya return atau feedback yang diharapkan dimasa yang akan datang. Sebagai contoh yaitu pengeluaran untuk makan, pembelian rumah untuk hunian, dan mobil untuk kendaraan pribadi.

Dalam hubungannya dengan perhitungan pendapatan nasional, ada beberapa bentuk investasi yang tidak digolongkan sebagai pengeluaran investasi, yaitu: investasi finansial yang berupa pembelian surat berharga dan pembelian barang

bekas. Investasi finansial tidak digolongkan sebagai pengeluaran investasi karena investasi finansial hanya berupa perpindahan aktiva dari satu pemilik kepada pemilik lain. Begitu pula halnya dengan pembelian mobil bekas yang digunakan untuk taksi tidak digolongkan sebagai investasi.

Dalam perhitungan pendapatan nasional pendekatan pengeluaran, pengeluaran investasi yang digunakan adalah pengeluaran investasi domestik swasta bruto. Pengertian bruto disini menunjukkan bahwa pengeluaran investasi menyangkut seluruh pengeluaran untuk membeli barang modal, baik pengeluaran untuk membeli penambahan barang modal maupun pembelian barang modal untuk menggantikan barang modal yang rusak.

KONSEP LAIN DALAM PENDAPATAN NASIONAL

Ada beberapa konsep pendapatan nasional diantaranya yaitu pendapatan nasional bruto, pendapatan nasional neto, pendapatan nasional, pendapatan perseorangan, dan pendapatan siap pakai. Masing-masing konsep tersebut dalam perhitungannya saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya, keterkaitan masing-masing pengertian, dapat dilihat pada contoh berikut ini:

Gross National Product (GNP)

Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam 1 periode, biasanya 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara yang berada di luar negeri. Namun, tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pihak asing yang beroperasi dalam negara tersebut. Hal ini berguna untuk menghindari penghitungan ganda karena pihak asing tersebut sudah dihitung oleh negaranya sendiri.

Net National Product (NNP)

Net National Product (NNP) atau produk nasional neto (PNN) adalah jumlah barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara, baik masyarakat maupun pemerintah, pada tahun buku yang bersangkutan dikurangi dengan penyusutan alat-alat produksi yang digunakan. NNP secara umum masih kurang mencerminkan pendapatan nasional karena depresiasi merupakan tafsiran yang belum tentu benar sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam penerapannya. Dapat di rumuskan sebagai berikut

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{Penyusutan}$$

Net National Income (NNI)

Net National Income (NNI) atau pendapatan nasional neto (PNN) meliputi pendapatan rumah tangga, bisnis dan pemerintah yang dihitung berdasarkan manfaat atau balas

jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI diperoleh dengan rumus sebagai berikut

$$NNI = C + I + G + (X - M) + \text{Pendapatan Bersih Luar Negeri} - \text{Pajak Tidak Langsung} - \text{Penyusutan}$$

Atau secara lebih sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut

$$NNI = NNP - IT - Tr - GCS$$

Dimana:

IT = Pajak Tidak Langsung

Tr = Transfer atau subsidi dari perusahaan

GCS = Surplus Perusahaan Pemerintah

Personal Income (PI)

Personal Income (PI) atau pendapatan perorangan merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam suatu negara. Pendapatan ini dapat diperoleh dari pekerjaan sebagai balas jasa namun juga dapat diperoleh tanpa usaha seperti hadiah undian. Dalam penghitungan pendapatan perorangan juga mempertimbangkan Transfer Payment, yaitu penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa dari produksi tahun ini melainkan diambil dari pendapatan nasional tahun sebelumnya, misalnya Dana Pensiun dan bunga utang pemerintah.

Untuk memperoleh jumlah pendapatan perorangan yaitu dengan mengurangi Pendapatan Bersih Nasional dengan ;

- (-) pajak laba perusahaan
- (-) laba perusahaan tidak dibagikan
- (-) penyesuaian nilai persediaan
- (-) iuran dana jaminan sosial

Kemudian NNI ditambah dengan;

- (+) pembayaran transfer perusahaan
- (+) pembayaran transfer pemerintah
- (+) bunga hutang pemerintah

Disposable Income (Yd)

Disposable Income (Yd) atau pendapatan siap pakai, merupakan pendapatan yang siap atau langsung dapat digunakan untuk konsumsi barang dan jasa ataupun ditabung. *Disposable Income* diperoleh dengan cara

$$Yd = PI - DT$$

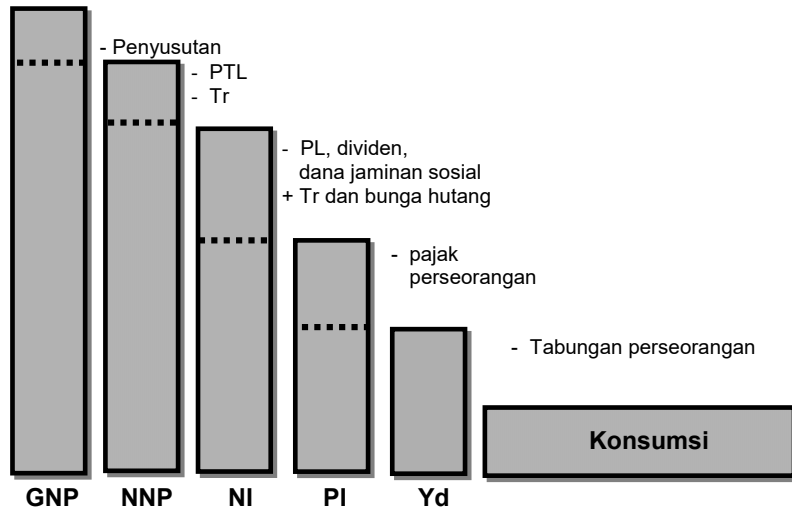
Direct Tax (DT) atau pajak langsung merupakan pajak yang tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, sehingga langsung mengurangi pendapatan orang tersebut. contohnya adalah pajak penghasilan karyawan.

Consumption (C)

Merupakan jumlah pendapatan yang siap dimanfaatkan dikurangi dengan tabungan yang dilakukan oleh konsumen atau dapat di rumuskan sebagai berikut

$$C = Y_d - S$$

Keterkaitan antara masing-masing konsep dalam perhitungan pendapatan nasional seperti yang telah dibahas di atas adalah sebagai berikut:



Pendapatan Per kapita

Konsep pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan nasional adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional (biasanya dalam PDB) dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Semakin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan angka PDB per kapita untuk menyusun kategori tingkat kemakmuran suatu negara. Berdasarkan standar tahun 1992, sebuah negara dikatakan miskin, jika PDB per kapitanya lebih kecil dari US\$450. Berdasarkan standar tersebut, sebagian besar negara-negara di dunia adalah negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur, jika PDB per kapitanya lebih besar dari US\$8.000.

Dengan menggunakan standar tersebut, hanya sebagian kecil negara di dunia yang dianggap kaya/makmur. Negara-negara tersebut umumnya terdapat di Eropa Barat dan Amerika Utara. Bank Dunia (World Bank) pada tahun 2001 telah mengelompokkan negara-negara di seluruh dunia menjadi lima kelompok berdasarkan pendapatan per kapitanya, yaitu:

1. Kelompok negara berpendapatan rendah (*low-income economies*), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita US\$520 atau kurang.
2. Kelompok negara berpendapatan menengah bawah (*lower middle income economies*), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US\$1.740.
3. Kelompok negara berpendapatan menengah (*middle-income economies*), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US\$ 2.990.
4. Kelompok negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle income economies*), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US\$ 4.870.
5. Kelompok negara berpendapatan tinggi (*high-income economies*), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US\$ 25.480.

TRANSAKSI YANG TIDAK DIMASUKKAN DALAM PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Dalam perhitungan pendapatan nasional, belum seluruh kegiatan ekonomi yang ada dimasukkan dan diperhitungkan dalam pendapatan nasional, sehingga pendapatan nasional belum dapat dikatakan sebagai cerminan kinerja perekonomian suatu negara. Untuk itu, diperlukan koreksi-koreksi untuk paling tidak membuatnya lebih baik. Ada dua macam koreksi berkaitan dengan transaksi yang belum dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu *koreksi positif* dan *koreksi negatif*. Koreksi positif dilakukan dengan cara menambahkan transaksi yang belum dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional, misalnya, transaksi yang tidak melalui pasar (*unorganized market transaction*) dan waktu luang (*leisure*), sedangkan koreksi negatif dilakukan dengan cara mengurangi nilai pendapatan nasional dengan transaksi tertentu yang seharusnya tidak dimasukkan dalam pendapatan nasional, misalnya biaya kerusakan lingkungan atau eksternalitas negatif.

1. Unorganized market transaction

Tanpa disadari, sebagian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tidak melalui pasar. Kegiatan yang tidak melalui pasar ini berakibat tidak adanya ukuran harga untuk kegiatan tersebut sehingga tidak dicatat pada perhitungan pendapatan nasional. Barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan sendiri oleh pelakunya tidak dihitung berapa harganya dan berapa jumlahnya, misalnya memperbaiki rumah sendiri, membuat jalan desa, dan perbaikan saluran irigasi. Seharusnya kegiatan-kegiatan itu diukur berapa nilai ekonomisnya dan dicatat sebagai pendapatan tenaga kerja. Terlebih lagi untuk negara berkembang seperti Indonesia yang unsur gotong-royongnya masih mewarnai kehidupan masyarakat, hampir seluruh kegiatan ekonomi terutama yang berkaitan dengan barang publik tidak pernah diperhitungkan nilainya dalam pendapatan nasional.

Akibat dari tidak dicatatnya kegiatan yang tidak melalui pasar tersebut, maka nilai pendapatan nasional akan lebih kecil daripada nilai yang sesungguhnya. Dengan

kata lain, pendapatan nasional belum dapat digunakan sebagai gambaran ataupun ukuran kinerja suatu perekonomian. Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan sering tidak rasional sebagai akibat tidak masuknya transaksi-transaksi tersebut.

2. Transaksi barang bekas

Seperti telah dibahas sebelumnya, investasi barang bekas tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional seperti halnya investasi finansial. Transaksi barang bekas tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional karena transaksi tersebut hanya bersifat transaksi transfer (*transfer transaction*) dan tidak secara langsung menambah produksi barang dan jasa pada waktu yang bersamaan. Pembelian mobil bekas yang digunakan untuk taksi tidaklah dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional karena transaksi jual beli pada saat mobil tersebut masih baru sudah dicatat dalam perhitungan pendapatan nasional. Apabila transaksi mobil bekas dicatat lagi dalam perhitungan pendapatan nasional, maka akan terjadi kesalahan pencatatan ganda.

3. Kualitas produk

Nilai yang dihitung dalam pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh seluruh sektor yang ada. Pengertian "jumlah" disini berkaitan dengan kuantitas barang dan jasa yang diukur dari harga dalam mata uang tertentu tanpa memperhitungkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Kadangkala kenaikan kualitas produk belum tentu diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa tersebut, sehingga apabila faktor kualitas tidak diperhitungkan dalam pendapatan nasional, maka kesejahteraan sesungguhnya dari masyarakat belum terwakili dari indikator pendapatan nasional tersebut.

4. Waktu luang

Dalam mengalokasikan waktunya, setiap orang memiliki pertimbangan tersendiri sesuai dengan kondisi dan tujuan hidupnya. Ini berakibat pada perbedaan proporsi waktu yang digunakan untuk bekerja dan memanfaatkan waktu luang (*leisure time*). Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar nilai waktu (yang diukur dengan uang) yang disediakan. Misalnya pendapatan A Rp500.000,- per bulan, kerja lembur dengan upah Rp2.000,- per jam mungkin cukup berharga untuk dijalani. Hal ini tidak berlaku bagi B yang pendapatannya Rp15.000.000,- perbulan, lembur Rp2.000,- per jam sangat tidak menarik untuk dijalani. Bagi B mungkin waktu yang tersedia tersebut tidak digunakan untuk lembur, tapi digunakan untuk istirahat, rekreasi ataupun menyalurkan hobinya. Dengan demikian waktu luang seharusnya diperhitungkan dalam pendapatan nasional karena ketersediaan waktu luang menunjukkan tingkat kesejahteraan dari suatu masyarakat dan waktu luang itu dapat dikompensasikan dalam bentuk harga.

5. *Transaksi yang semata-mata menyangkut uang*

Seperti halnya transaksi barang bekas, investasi finansial atau transaksi yang semata-mata menyangkut uang tidaklah dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional karena tidak secara langsung menambah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan transaksi itu hanya berupa transfer.

6. *Eksternalitas*

Eksternalitas merupakan dampak yang diterima atau ditanggung oleh pihak lain sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak tertentu. Dalam ilmu ekonomi, ada dua macam eksternalitas yaitu *eksternalitas negatif* dan *eksternalitas positif*. Eksternalitas negatif adalah dampak merugikan yang ditimbulkan dari suatu kegiatan ekonomi, misalnya menurunnya kualitas air dan tanah akibat pencemaran, polusi udara dan air, serta kerusakan lingkungan lain yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi. Eksternalitas negatif ini seharusnya digunakan sebagai pengurang nilai pendapatan nasional. Sedangkan eksternalitas positif merupakan keuntungan atau manfaat yang diterima sebagai akibat dari suatu kegiatan ekonomi, misalnya dibangunnya sarana transportasi yang baik karena di daerah tersebut dibangun pabrik.

7. *Komposisi dan distribusi produk*

Komposisi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional tidak dibedakan berdasarkan komposisinya, apakah berdampak baik atau buruk terhadap masyarakat. Penilaian “baik” ataupun “buruk” disini tentunya ditinjau dari segi sosial, etika, agama, dan kesehatan. Untuk produk seperti minuman keras dan rokok mungkin untuk sebagian besar masyarakat berdampak buruk dari segala sisi, tapi hal ini tidak dipertimbangkan dalam pendapatan nasional.

Dari segi distribusi, pendapatan nasional juga tidak memperhitungkan apakah barang dan jasa tersebut telah terdistribusi dengan merata kepada masyarakat yang membutuhkan atau belum. Apabila distribusi tidak merata dan mengakibatkan sebagian masyarakat menderita, maka pendapatan nasional tidaklah akurat sebagai ukuran kesejahteraan suatu masyarakat.

PERTUMBUHAN PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi yang mampu dicapai pada tahun tertentu, karena perhitungan pendapatan nasional biasanya dilakukan setiap tahun. Pertumbuhan pendapatan nasional dapat dihitung dari tahun ke tahun. Untuk melakukan perbandingan antar tahun, ada kendala yang dapat menyebabkan ukuran tersebut bias, yaitu perubahan kondisi ekonomi dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Paling tidak ada dua kondisi yang selalu mengalami perubahan, yaitu:

- a. perubahan tingkat kegiatan ekonomi
- b. perubahan harga

Untuk mengatasi kedua perubahan tersebut, maka perubahan tingkat harga antar tahun harus diperhitungkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Dengan kata lain, pengaruh perubahan harga terhadap nilai pendapatan nasional harus dihilangkan atau dinetralkan. Cara ini dilakukan agar nilai pendapatan antar tahun dapat digunakan untuk mengukur perkembangan dan perbandingan kegiatan ekonomi secara benar. Suatu perekonomian mengalami pertumbuhan apabila kegiatan ekonomi yang diukur dari kemampuannya menghasilkan barang dan jasa lebih besar nilainya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

- a. Pendapatan nasional menurut harga konstan
- b. Pendapatan nasional menurut harga berlaku

Pendapatan nasional menurut harga konstan atau sering juga disebut dengan pendapatan nasional riil dapat dihitung dengan cara mendeflasikan pendapatan nasional harga berlaku (pendapatan nasional nominal). Cara mendeflasikannya yaitu dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar (*base year*). Tahun dasar merupakan tahun awal perhitungan sebagai dasar perhitungan nilai tahun lainnya.

Variabel yang digunakan untuk mendeflasikan pendapatan nasional nominal adalah indeks harga konsumen (IHK) atau *consumer price index (CPI)*. Nilai IHK pada tahun dasar adalah 100 dan nilai ini dapat digunakan untuk membandingkan perubahan harga antar tahun, mengalami kenaikan atau penurunan. Misalnya tahun IHK nilainya 100 dan tahun berikutnya menjadi 115, maka dapat dikatakan bahwa harga mengalami kenaikan sebesar 15 persen. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional riil adalah:

$$Yr_t = \frac{100}{IHK_t} \times Yb_t$$

- Yr_t : pendapatan nasional tahun t
 IHK_t : indeks harga konsumen tahun t
 Yb_t : pendapatan nasional nominal tahun t

Dari rumus tersebut, nilai pendapatan nasional riil dari tahun ke tahun dapat dihitung. Dari perhitungan tersebut, kita dapat pula menghitung laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dengan rumus:

$$G_t = \frac{Yr_t - Yr_{t-1}}{Yr_{t-1}} \times 100$$

- G_t : pertumbuhan ekonomi tahun t
 Yr_t : pendapatan nasional tahun t
 Yr_{t-1} : pendapatan nasional tahun t-1 (tahun sebelumnya)

SOAL 1 (perhitungan pendapatan nasional riil)

Berikut adalah data tentang pendapatan nasional Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2018.

Tahun	Y harga nominal	IHK	Y harga riil
2015	125,500	115	
2016	147,250	125	
2017	185,000	140	
2018	210,500	155	

Ditanya:

Hitunglah pendapatan nasional riil dari tahun 2015 sampai dengan 2018.

Jawab:

Dengan menggunakan rumus perhitungan pendapatan nasional riil:

$$Yr_t = \frac{100}{IHK_t} \times Yb_t$$

maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tahun	Y harga nominal	IHK	Y harga riil
2015	125.500	115	$(100/115) \times 125.500 = 109.130$
2016	147.250	125	$(100/125) \times 147.250 = 117.800$
2017	185.000	140	$(100/140) \times 185.000 = 132.143$
2018	210.500	155	$(100/155) \times 210.500 = 135.807$

SOAL 2 (perhitungan pertumbuhan ekonomi)

Berikut adalah data tentang pendapatan nasional riil Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018.

Tahun	Y harga riil	Pertumbuhan ekonomi (G)
2014	95.500	
2015	109.130	
2016	117.800	
2017	132.143	
2018	135.806	

Ditanya:

Hitunglah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Jawab:

Dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi:

$$G_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100$$

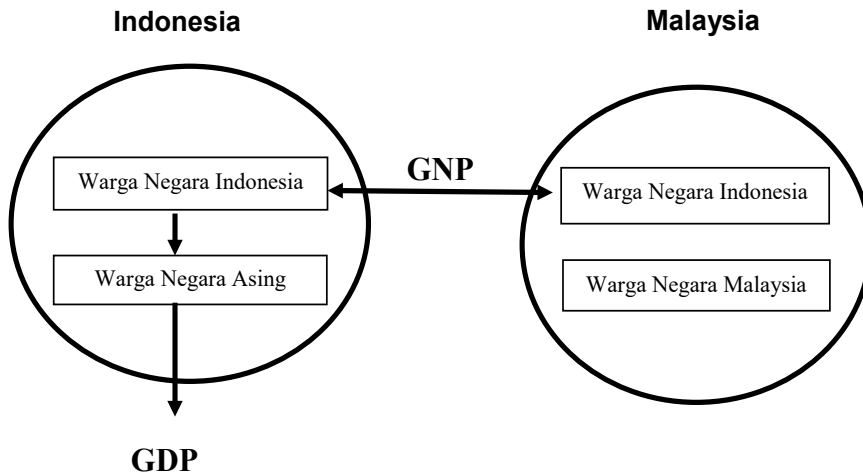
maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tahun	Y harga riil	Pertumbuhan ekonomi (G)
2014	95.500	
2015	109.130	$\frac{109.130 - 95.500}{95.500} \times 100\% = 14,27$
2016	117.800	$\frac{117.800 - 109.130}{109.130} \times 100\% = 7,95$
2017	132.143	$\frac{132.143 - 117.800}{117.800} \times 100\% = 12,18$
2018	135.806	$\frac{135.806 - 132.143}{132.143} \times 100\% = 2,77$

PERBEDAAN ANTARA GNP DAN GDP

Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pengertian ini sering juga disebut dengan konsep kewarganegaraan, karena perhitungannya didasarkan pada jumlah *output* yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara. Sedangkan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang berada di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa memperhatikan apakah penduduk tersebut warga negara dari negara yang bersangkutan ataupun warga negara dari negara yang bersangkutan. Pengertian ini sering disebut sebagai konsep kewilayahan. Kedua konsep inilah yang sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kemajuan ataupun kemunduran perekonomian suatu negara. Untuk memperjelas perbedaan kedua konsep ini, perhatikan Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Perbedaan Konsep antara GNP dan GDP



Karena perbedaan dalam perhitungannya, maka nilai dari GNP dan GDP ini juga berbeda, tergantung pada kondisi perekonomian makro suatu negara. Biasanya untuk negara berkembang seperti Indonesia, nilai GDP lebih besar daripada GNP. Hal ini disebabkan oleh perbedaan nilai pendapatan dari faktor produksi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dengan nilai pendapatan dari faktor produksi milik warga negara asing di dalam negeri. Selisih nilai pendapatan faktor produksi milik dalam negeri di luar negeri dengan nilai pendapatan faktor produksi milik warga negara asing di dalam negeri disebut dengan *net factors income from abroad*. Sebaliknya bagi negara maju yang memiliki investasi di luar negeri, misalnya dalam bentuk perusahaan multinasional (*multinational corporation*), nilai GNP lebih besar dari pada GDP. Dengan demikian, maka secara matematis hubungan antara GNP dan GDP dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{GDP} = \text{GNP} - \text{net factors income from abroad}$$

MANFAAT PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Karena menggunakan banyak faktor dalam penghitungannya, pihak-pihak terkait seperti pemerintah maupun pelaku ekonomi swasta, dapat menjadikan pendapatan nasional sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebutuhan mereka.

Melalui pendapatan nasional dapat diketahui besarnya peningkatan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi pendapatan suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan negara tersebut. Dengan mengetahui kemajuan suatu negara, para pelaku ekonomi dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menanamkan investasi. Dengan resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan berinvestasi pada negara yang tingkat perekonomiannya rendah. Hal ini dikarenakan *return of investment*-nya akan lebih cepat.

Melalui pendapatan nasional juga dapat diidentifikasi faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan maupun mengurangi pendapatan nasional pada periode tersebut sehingga pihak yang bersangkutan seperti pemerintah dapat mengambil tindakan ataupun membuat kebijakan untuk menangani masalah tersebut.

Pendapatan nasional dapat dijadikan tolak ukur dalam perencanaan pembangunan suatu daerah ataupun negara. Dalam penghitungan pendapatan nasional dapat diidentifikasi lapangan usaha ataupun faktor ekonomi apa yang berkontribusi paling besar dalam pendapatan nasional. Sehingga dapat merencanakan tindakan apa yang sesuai untuk mengoptimalkan kontribusi lapangan usaha maupun faktor ekonomi tersebut.

Selain itu dapat diketahui sektor ekonomi suatu negara, apakah tergolong negara industri seperti Amerika ataupun negara dengan pelayanan publik yang baik seperti Singapore. Dengan diketauinya hal tersebut akan memudahkan bagi pihak terkait dalam mengambil keputusan.

Pendapatan nasional juga mencerminkan tingkat produktivitas negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara maka semakin tinggi tingkat produktivitas pada negara tersebut. Hal ini tentu dapat digunakan oleh perusahaan asing sebagian acuan untuk berinvestasi di negara tersebut atau menggunakan tenaga kerja dari negara lain.

MANFAAT PDRB DALAM PEREKONOMIAN DAERAH

Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan perhitungan pendapatan nasional pada tataran nasional. Untuk perhitungan pada tataran daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, maka PNB dijadikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk masing-masing Provinsi maupun kabupaten/kota. Metode perhitungan dan sector yang digunakan untuk perhitungan juga sama dengan perhitungan pada tataran nasional.

PDRB dapat digunakan untuk melihat potensi dan kondisi perekonomian suatu daerah melalui sektor-sektor yang ada pada PDRB tersebut dengan menggunakan beberapa alat analisis terapan. Adapun alat analisis yang dapat digunakan untuk melihat manfaat PDRB dalam menganalisis potensi dan kondisi perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

- a. Location quotient (LQ)
- b. Shift-share analysis
- c. Klassen analysis

Location Quotient

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran

untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah tenaga kerja per-sektor ekonomi, jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria.

Sektor basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Sektor basis mampu menghasilkan produk/jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Itu berarti daerah secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain. Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan.

Sektor basis dapat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Hal ini dikarenakan perbedaan geografis, kondisi masyarakat, sumber daya manusia maupun alam. Sektor basis dapat diketahui dengan beberapa metode pendekatan. Salah satu metode yang biasa dipakai adalah *Location Quotients* (LQ), metode LQ digunakan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan di suatu wilayah. Terdapat 2 jenis alat analisis yaitu SLQ dan DLQ.

1. Static Location Quotient

Static Location Quotient (SLQ) merupakan suatu indeks yang mengukur apakah suatu sektor merupakan sektor unggulan (sektor basic) atau tidak bagi suatu daerah dalam suatu waktu. Berikut merupakan rumus SLQ:

$$SLQ = \frac{V_{ik}/V_k}{V_{ip}/V_p}$$

Keterangan:

V_{ik} = Nilai output (PDRB) sektor i di kabupaten

V_k = PDRB total semua sektor di kabupaten

V_{ip} = Nilai output (PDRB) sektor i di Provinsi yang menjadi acuan di atasnya

V_p = PDRB total semua sektor di di Provinsi yang menjadi acuan di atasnya

Asumsi metode LQ ini adalah penduduk di wilayah yang bersangkutan mempunyai pola permintaan wilayah sama dengan pola permintaan wilayah acuan. Asumsi lainnya adalah permintaan wilayah akan suatu barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain.

Dengan hasil perhitungan LQ menghasilkan tiga (3) kriteria yaitu:

1. Bila $LQ > 1$ memberikan indikasi bahwa sektor tersebut tergolong sektor basis di wilayah tersebut, dimana produksi sektor sudah melebihi konsumsi lokal sehingga kelebihanannya dapat dijual ke luar wilayah
2. Bila $LQ < 1$ memberikan indikasi bahwa sektor tersebut tergolong sektor non basis di wilayah tersebut, dimana produksi sektor belum mencukupi konsumsi lokal sehingga harus didatangkan dari luar wilayah
3. Bila $LQ = 1$ menunjukkan keswasembadaan (*self-sufficiency*) sektor tersebut di wilayah tersebut, dimana produksi sektor hanya mencukupi kebutuhan wilayah tersebut.

2. Dynamic Location Quotient

Dynamic Location Quotient (DLQ) adalah Indeks yang melihat laju pertumbuhan suatu sektor unggulan di suatu wilayah. Berikut rumus DLQ:

$$DLQ_{ij} = \left[\frac{(1 + g_{ij}) / (1 + g_j)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right]^t$$

Keterangan:

DLQ_{ij} = Indeks potensi sektor i di kabupaten i

g_{ij} = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di kabupaten i

g_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di kabupaten i

G_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di Provinsi yang menjadi acuan di atasnya

G = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di Provinsi yang menjadi acuan di atasnya

t = Selisih tahun akhir dan tahun awal

kabupaten i adalah kabupaten yang akan kita hitung nilai LQ ya, sedangkan provinsi yang menjadi acuan di atasnya adalah provinsi yang dimana kabupaten tersebut berada. Misalnya kita akan melakukan perhitungan LQ Kabupaten Sleman, maka provinsi yang menjadi acuan adalah DI. Yogyakarta.

Dengan hasil perhitungan DLQ menghasilkan dua (2) kriteria yaitu :

1. Jika $DLQ > 1$, maka potensi perkembangan sektor i di kabupaten i lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di provinsi yang menjadi acuan di atasnya
2. Jika $DLQ < 1$, maka potensi perkembangan sektor i di kabupaten i lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di provinsi yang menjadi acuan di atasnya

Keunggulan Analisis LQ:

Location Quotient merupakan suatu alat analisa yang digunakan dengan mudah dan cepat. LQ dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya. Karena demikian sederhananya, LQ dapat dihitung berulang kali untuk setiap perubahan spesialisasi dengan menggunakan berbagai peubah acuan dan periode waktu. Perubahan tingkat spesialisasi dari tiap sektor dapat pula diketahui dengan membandingkan LQ dari tahun ke tahun.

Kelemahan Analisis LQ:

Perlu diketahui bahwa nilai LQ dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nilai hasil perhitungannya bias, karena tingkat disagregasi peubah spesialisasi, pemilihan peubah acuan, pemilihan entity yang diperbandingkan, pemilihan tahun dan kualitas data.

Masalah paling mendasar pada model ekonomi basis ini adalah masalah *time lag*. Hal ini diakui, bahwa *base multiplier* atau pengganda tidak berlangsung

secara tepat, karena membutuhkan time lag antara respon dari sektor basis terhadap permintaan dari luar wilayah dan respon dari sektor non basis terhadap perubahan sektor basis. Pendekatan yang biasanya dilakukan terhadap masalah ini adalah mengabaikan masalah time lag ini, namun dalam jangka panjang masalah ini pasti terjadi.

Metode ini digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor unggulan daerah dalam kaitannya dengan perekonomian wilayah acuan (wilayah yang lebih luas) dalam dua atau lebih kurun waktu. Asumsinya adalah bahwa pertumbuhan sektor daerah sama dengan pada tingkat wilayah acuan, membagi perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi daerah (lokal) dalam tiga komponen :

- 1) Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPW), yaitu mengukur kinerja perubahan ekonomi pada perekonomian acuan. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan secara umum.
- 2) Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP), yaitu mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti sektor tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.
- 3) Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK), yaitu mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan. Apabila komponen ini pada salah satu sektor positif, maka daya saing sektor lokal meningkat dibandingkan sektor yang sama pada ekonomi acuan, dan apabila negatif terjadi sebaliknya.

Shift Share Analysis

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah perlu diketahui agar dapat mengetahui arah pertumbuhan kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi wilayah dapat diketahui dengan menggunakan alat analisis *Shift-share*. Berikut merupakan rumus *Shift-share*:

$$PE = KPN + KPP + KPPW$$

Keterangan:

PE : Pertumbuhan Ekonomi

KPN : Komponen Pangsa Regional

KPP : Komponen Pertumbuhan Proporsional

KPPW: Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah

- a. KPN (Komponen Pertumbuhan Nasional)

$$KPP = \frac{Y_{it}}{Y_{io}} - 1$$

Keterangan:

Y_t : indikator ekonomi Provinsi, akhir tahun analisis

Y_o : indikator ekonomi Provinsi, awal tahun analisis

Sehingga,

b. KPP (Komponen Pertumbuhan Proporsional)

$$KPP = \frac{Y_{it}}{Y_{io}} - \frac{Y_t}{Y_o}$$

Dimana:

Y_{it} : indikator ekonomi kabupaten i sektor i, akhir tahun analisis

Y_{io} : indikator ekonomi kabupaten i sektor i, awal tahun analisis

Y_t : indikator ekonomi provinsi yang menjadi acuan di atasnya, akhir tahun analisis

Y_o : indikator ekonomi provinsi yang menjadi acuan di atasnya, awal tahun analisis

c. KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah)

$$KPPW = \frac{y_{it}}{y_{io}} - \frac{Y_{it}}{Y_{io}}$$

Keterangan:

Y_{it} : indikator ekonomi provinsi yang menjadi acuan di atasnya sektor i, akhir tahun analisis

Y_{io} : indikator ekonomi provinsi yang menjadi acuan di atasnya sektor i, awal tahun analisis

y_{it} : indikator ekonomi Kabupaten i sektor i, akhir tahun analisis

y_{io} : indikator ekonomi Kabupaten i sektor i, awal tahun analisis

Keunggulan Shift – Share Analysis:

- Digunakan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai pergeseran struktur ekonomi
- Menggambarkan posisi relatif masing-masing sektor perekonomian daerah terhadap wilayah acuan
- Menggambarkan sektor-sektor unggulan yang dapat dipacu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- Menggambarkan sektor yang posisinya relatif lemah, namun dianggap strategis untuk dipacu (pertimbangan penyerapan tenaga kerja)

Kelemahan Shift – Share Analysis:

- Asumsi yang digunakan bahwa sektor-sektor ekonomi acuan tumbuh dengan tingkat yang sama,
- Pergeseran posisi sektor dianggap linier.

Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan sebagai alat analisis yang menjelaskan apakah suatu sektor dalam struktur perekonomian daerah dikatakan sektor maju, sektor berkembang, sektor potensial, dan sektor terbelakang. Tipologi tersebut diperlukan oleh daerah untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan sektor usaha dalam perekonomian daerah sehingga pendapatan atau produksi daerah dapat meningkat, dan akhirnya target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Sektor pertanian dan sektor lain yang dianggap merupakan sektor unggulan dapat diidentifikasi pada produk domestik regional bruto (PDRB).

Perhitungan analisis kelas didasarkan pada dua hal yaitu proporsi output sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan total produk domestik bruto dan pertumbuhan dari masing-masing sektor. Proporsi merupakan kontribusi sektor tersebut pada perekonomian daerah yang bersangkutan. Proporsi ataupun kontribusi dihitung dari nilai sektor i pada PDRB dibagi dengan nilai seluruh sektor pada PDRB daerah tersebut. Sedangkan pertumbuhan sektor i merupakan penambahan atau penurunan peran sektor i pada PDRB daerah tersebut (cara perhitungan pertumbuhan dapat menggunakan rumus pada contoh soal 2 di atas). Dari perhitungan proporsi dan pertumbuhan tersebut sektor dapat diklasifikasikan menjadi kelompok maju, berkembang, potensial, dan terbelakang. Contoh, apabila sektor pertanian masuk dalam kelompok maju tentu perlu dipertahankan dan ditingkatkan, artinya daerah tersebut mempunyai kemampuan dalam pengelolaan pertanian. Tetapi jika tergolong kelompok terbelakang tentu upaya pemerintah daerah harus maksimal dilakukan untuk pengembangan sektor tersebut dengan menganalisis berbagai faktor yang ada seperti lahan, pembibitan dan sebagainya.

Growth \ Proporsi	$\frac{X_i}{\bar{X}} \geq 1$	$\frac{X_i}{\bar{X}} \leq 1$
	$\frac{\Delta X_i}{\Delta \bar{X}} \geq 1$	I. Sub Sektor Maju
$\frac{\Delta X_i}{\Delta \bar{X}} \leq 1$	III. Sub Sektor Potensial	IV. Sub Sektor Terbelakang

Keterangan :

X_i = Nilai produksi sektor i

\bar{X} = Rata-rata nilai total produksi semua sektor produksi

ΔX_i = Pertumbuhan produksi sektor

$\Delta \bar{X}$ = Rata-rata pertumbuhan produksi semua sektor produksi

ISTILAH PENTING BAB INI

Barang akhir	Analisis Klassen
Barang antara	<i>National income</i>
Nilai tambah	<i>Personal income</i>
Double counting	Disposable income
Investasi bruto	<i>Unorganized market transaction</i>
Investasi neto	<i>Leisure</i>
Sektor primer	Eksternalitas
Sektor sekunder	Pendapatan nasional harga berlaku
Sektor tersier	Pendapatan nasional harga konstan
<i>Gross national product</i>	<i>Consumer price index</i>
<i>Net national product</i>	Konsep kewilayahan
Analisis Location Quotient	Konsep kewarganegaraan
Analisis Shift Share	

RANGKUMAN

1. Pendapatan nasional merupakan jumlah barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya satu tahun.
2. Ada tiga pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai pendapatan nasional yang sama.
3. Pengertian investasi disini mencakup beberapa hal, yaitu (1) pembelian mesin, peralatan pabrik, dan barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi (2) pembelian dan pembangunan gedung, pabrik, dan konstruksi, dan (3) perubahan nilai cadangan akibat perubahan harga pada tahun yang sama.
4. Transaksi yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional terdiri dari *unorganized market transaction*, transaksi barang bekas, kualitas produk, waktu luang, transaksi yang semata-mata menyangkut uang, eksternalitas, dan komposisi dan distribusi produk.
5. *Gross National Product* (GNP) atau konsep kewarganegaraan merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sedangkan *Gross Domestic Product* (GDP) atau konsep kewilayahan merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang berada di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa memperhatikan apakah penduduk tersebut warga negara dari negara yang bersangkutan ataupun warga negara dari negara yang bersangkutan.

PERTANYAAN UNTUK LATIHAN

SOAL LATIHAN PILIHAN BERGANDA

1. Pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu, merupakan cara perhitungan pendapatan nasional menurut dari pendekatan:
 - a. pendekatan produksi
 - b. pendekatan pendapatan
 - c. pendekatan pengeluaran
 - d. pendekatan *total value added*
 - e. jawaban a dan d benar

2. Berikut ini variabel yang diperhitungkan dalam menghitung pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan, *kecuali*:
 - a. laba perusahaan perseorangan
 - b. pajak perseroan
 - c. dividen
 - d. penyusutan
 - e. konsumsi rumah tangga konsumen

3. Berikut ini adalah bentuk-bentuk investasi, *kecuali*:
 - a. pembelian mesin, pabrik dan barang modal
 - b. pembelian bangunan dan gedung
 - c. perubahan cadangan
 - d. pembelian kendaraan ekspedisi
 - e. menyimpan dana dalam bentuk deposito

4. Memasukkan dan menambahkan variabel yang seharusnya ada dalam perhitungan pendapatan nasional, merupakan pengertian dari:
 - a. unorganized market transaction
 - b. koreksi positif
 - c. koreksi negatif
 - d. leissure
 - e. transfer transaction

5. Dalam menghitung Produk Nasional, kita mengenal istilah *net factors income from abroad*. Arti dari istilah ini adalah:
 - a. selisih pendapatan konsumen dan produsen
 - b. selisih pendapatan WNI di luar negeri dengan WNA di dalam negeri
 - c. selisih pendapatan faktor produksi WNA dengan WNI di dalam negeri
 - d. selisih pendapatan dari masing-masing faktor produksi milik WNI
 - e. selisih pendapatan dari masing-masing faktor produksi milik WNA

SOAL LATIHAN ESSAY

1. Berikut ini adalah data pendapatan nasional riil tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tahun	Y harga riil	Pertumbuhan ekonomi (G)
2014	1.450.000	
2015	1.825.000	
2016	1.200.000	
2017	2.725.500	
2018	4.250.000	

Ditanya:

- a. Dari data tersebut, hitunglah pertumbuhannya.
 - b. Apa arti dari hasil perhitungan tersebut
2. Berikut ini adalah data dan transaksi ekonomi yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018.

Bunga modal	:	Rp.2.000.000,-
Laba usaha	:	Rp.3.000.000,-
Konsumsi pemerintah	:	Rp.3.000.000,-
Investasi	:	Rp.2.000.000,-
Gaji karyawan	:	Rp. 500.000,-
Sewa tanah	:	Rp. 1.500.000,-
Ekspor	:	Rp. 7000.000,-
Impor	:	Rp. 5.000.000,-

Ditanya:

Berapakah besarnya Pendapatan Nasional dengan pendekatan penerimaan

3. Suatu negara mempunyai pendapatan nasional sebagai berikut:

Konsumsi masyarakat	:	Rp. 80.000.000
pendapatan laba usaha	:	Rp. 40.000.000
pengeluaran negara	:	Rp. 250.000.000
pendapatan sewa	:	Rp. 25.000.000
Pengeluaran Investasi	:	Rp. 75.000.000
Ekspor	:	Rp. 50.000.000
Impor	:	Rp. 35.000.000

Ditanya:

Dari data diatas hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran

4. Berikut ini adalah data pendapatan nasional riil selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Tahun	Y harga nominal	IHK	Y harga riil
2015	15.750.000	105	
2016	16.100.500	115	
2017	11.250.000	102	
2018	22.120.000	195	

Ditanya:

- a. Hitunglah pendapatan nasional riil setiap tahunnya.
 - b. Jelaskan hubungan antara pendapatan nasional nominal, riil dan IHK
5. a. Apa perbedaan antara GNP dan GDP dalam proses perhitungannya.
b. Jelaskan keterkaitannya dengan *net factors income from abroad*
6. Variabel apa saja yang perlu dimasukkan dan dikeluarkan dalam perhitungan pendapatan nasional agar pendapatan nasional dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan penduduk suatu negara.

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti perikanan, kesuburan tanah, sumber minyak dan gas bumi, serta bahan-bahan tambang selalu mengalami *Net factor income from abroad* yang negatif. Mengapa hal itu dapat terjadi selama bertahun-tahun.
2. Buatlah contoh suatu proses produksi untuk memperjelas konsep tentang perhitungan ganda, barang antara, barang akhir, dan nilai tambah.
3. Dari 17 sektor dalam pendapatan nasional, bagaimanakah kita mengetahui bahwa kontrobusi masing-masing sektor tersebut mengalami pergeseran dari tahun ke tahun.

3

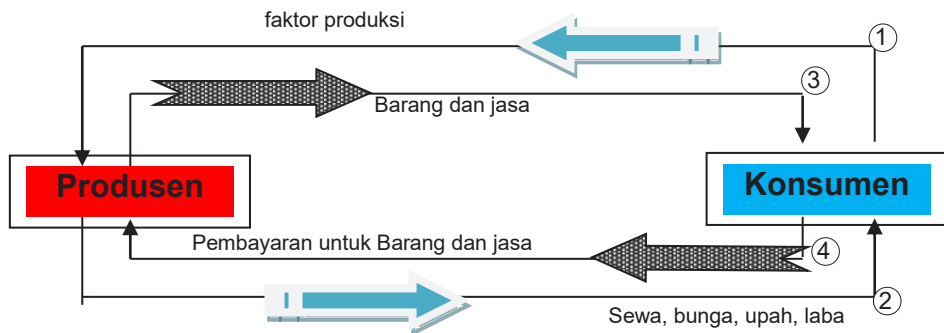
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

1. Perekonomian Dua Sektor
2. Fungsi Konsumsi
3. Fungsi Tabungan
4. Fungsi Investasi
5. Cara Menggambar Grafik
6. Kesenjangan (*Gap*)
7. Perekonomian Tiga Sektor
8. Pengeluaran Pemerintah
9. Angka Pengganda Perekonomian Tiga Sektor
10. Perekonomian Empat Sektor
11. Fungsi Ekspor
12. Fungsi Impor
13. Angka Pengganda Perekonomian Empat Sektor

PEREKONOMIAN DUA SEKTOR

Perekonomian dua sektor disebut juga sebagai perekonomian yang **tertutup sederhana**. **Tertutup** artinya perekonomian ini diasumsikan tertutup terhadap perdagangan internasional, sedangkan *sedehana* artinya adalah dalam perekonomian diasumsikan tanpa adanya peranan (**intervensi**) pemerintah. Dalam perekonomian dua sektor ini, produsen menghasilkan barang dan jasa yang akan dikonsumsi hanya oleh konsumen. Sektor rumah tangga akan menerima pendapatan (sewa, bunga, upah, dan laba) dari faktor produksi yang dimilikinya (tanah, modal, tenaga kerja, dan *skill*). Pendapatan inilah yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut. Berikut gambar alur melingkar kegiatan perekonomian dua sektor.

Gambar 3.1. Alur Melingkar Kegiatan Perekonomian Dua Sektor



Untuk menghitung pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor, dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Dengan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional keseimbangan (Y_e) tercapai pada saat:

$$Y = C + I$$

Y : pendapatan nasional

C : konsumsi

I : investasi

2. Pendekatan Injeksi Kebocoran (*Injection-Leakages*)

Dengan pendekatan injeksi kebocoran, keseimbangan tercapai pada saat jumlah tabungan sama dengan jumlah investasi, atau dapat dituliskan:

$$I = S$$

Investasi akan memperbesar kapasitas perekonomian dengan menimbulkan efek pada bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Sebaliknya apabila

masyarakat menabung atau memegang uangnya, maka ini berdampak sebaliknya yaitu mengurangi akumulasi modal dalam perekonomian. Kedua pendekatan ini, baik pendekatan pengeluaran maupun pendekatan injeksi kebocoran akan menghasilkan nilai pendapatan nasional keseimbangan yang sama.

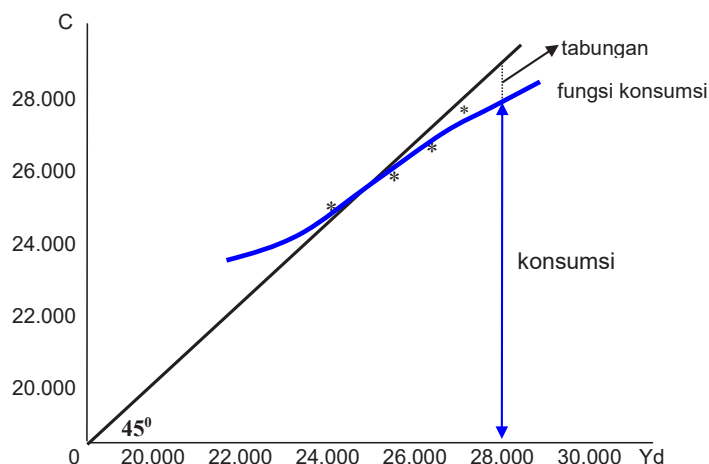
FUNGSI KONSUMSI

Menurut Keynes, ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan, di mana hubungan tersebut bersifat positif. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Begitu pula dengan tabungan yang juga berhubungan dengan pendapatan.

Tabel 3.1
Hubungan Pendapatan, Konsumsi dan Tabungan

Pendapatan Disposibel (Yd)	Net Saving (+) atau Dissaving (-)	Pengeluaran Konsumsi
24.000	- 110	24.110
25.000	0	25.000
26.000	+ 150	25.850
27.000	+ 400	26.600
28.000	+ 760	27.240
29.000	+ 1.170	27.830
30.000	+ 1.640	28.360
	+1.640	1.640

Hubungan antara konsumsi (C), pendapatan disposibel (Yd), dan tabungan (S) dapat dilihat pada Kurva 3.1 berikut ini.



Kurva 3.1 Kurva Konsumsi Menurut Keynes

Sumbu horizontal menunjukkan tingkat pendapatan dan sumbu vertikal menunjukkan pengeluaran konsumsi. Garis bantu 45° membagi dua area di atas dan di bawah garis bantu yang sama besarnya. Pada titik A, pengeluaran konsumsi yaitu 24.110 lebih besar daripada pendapatan yang hanya 24.000, sehingga terjadi *dissaving*. Di titik B, pengeluaran konsumsi sama dengan pendapatan, yaitu 25.000, sehingga terjadi *break-even point*. Setelah titik C, pendapatan selalu lebih besar daripada pengeluaran konsumsi sehingga konsumen dapat menabung (*saving*). Sederhananya orang akan menabung jika pendapatan lebih besar daripada konsumsi. Namun di sisi lain, konsumsi juga dipengaruhi oleh tabungan. Di mana jika seseorang menabung pada pendapatan tertentu akan mengurangi jumlah uang yang akan digunakan untuk konsumsi sehingga konsumsi akan berkurang. Begitu pula jika seseorang mengurangi tabungan, baik menarik tabungan ataupun memutuskan untuk tidak menabung, maka pendapatan akan bertambah sehingga konsumsi akan bertambah. Dapat dituliskan sebagai berikut:

$$C = Y - S \text{ atau } C = Y + S$$

Namun dengan mengabaikan variabel tabungan serta variabel lain (*Ceteris Paribus*), dapat dikatakan bahwa besarnya pengeluaran konsumsi (C) salah satunya dipengaruhi oleh pendapatan konsumen (Y), sehingga dapat dituliskan:

$$C = f(Y_d), \text{ ceteris paribus}$$

Secara matematis, fungsi konsumsi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$C = C_0 + c Y_d$$

- C : pengeluaran konsumsi
- C_0 : konsumsi otonom
- c : hasrat mengkonsumsi marginal
- Y_d : tingkat pendapatan *disposibel* ($Y_d = Y - T_x + T_r$)

C_0 merupakan konsumsi otonom (*autonomous consumption*), yaitu besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan konsumen sebesar nol atau tanpa ada pendapatan. Walaupun tanpa pendapatan, konsumen harus tetap melakukan konsumsi karena konsumen harus tetap mempertahankan hidupnya. Dana yang digunakan dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu: mengambil tabungan, menjual aset, dan hutang. Ketiga sumber pembiayaan konsumsi itu hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek karena kita tidak mungkin terus menerus mengambil tabungan dan menjual aset (karena akan habis), begitu pula konsumen tidak dapat selamanya membiayai konsumsi dari hutang kepada pihak lain. Impas pendapatan terjadi pada saat seluruh pendapatan dihabiskan untuk membiayai pengeluaran konsumsi, atau secara matematis dapat dituliskan:

$$Y = C$$

Hasrat mengkonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) yang disimbolkan dengan c atau MPC merupakan besarnya tambahan konsumsi (ΔC) sebagai akibat dari kenaikan pendapatan (ΔY). Adanya tambahan pendapatan akan mengakibatkan konsumsi bertambah, begitu pula sebaliknya. Secara matematis, MPC dapat dirumuskan sebagai berikut:

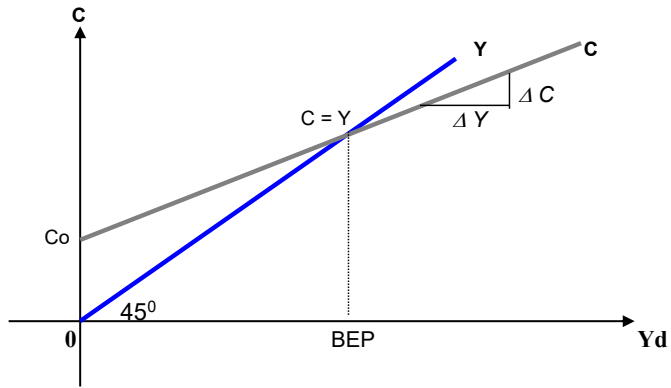
$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}, \text{ dimana } MPC < = 1$$

Semakin mendekati 1, maka semakin besar proporsi pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi. Misalnya $MPC = 0,8$, berarti setiap ada tambahan pendapatan sebesar 1 juta rupiah, maka 800 ribu rupiah digunakan untuk menambah konsumsi. Namun meskipun secara teori orang akan terus meningkatkan konsumsi karena pendapatan semakin meningkat, kenyataannya MPC malah akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan, pada pendapatan yang tinggi tidak semuanya akan digunakan untuk konsumsi. Pendapatan yang tinggi akan menutup semua kebutuhan yang diperlukan, sehingga sudah tidak perlu lagi untuk menambah konsumsi sedangkan tingkat pendapatan meningkat sehingga penyebut akan semakin besar dan menyebabkan MPC semakin kecil. Berikut sebagai contoh:

Kondisi	Pendapatan	ΔY	C	ΔC	$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$
A	Rp 500.000	-	Rp 110.000		-
B	Rp 1.000.000	RP 500.000	Rp 400.000	Rp 330.000	0,66
C	Rp 7.000.000	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.600.000	0,60
D	Rp 15.000.000	Rp 9.000.000	Rp 7.000.000	Rp 3.000.000	0,33

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya MPC akan semakin naik apabila tingkat pendapatan lebih besar dibandingkan dengan konsumsinya.

Untuk menggambarkan kurva konsumsi, sumbu vertikal menunjukkan tingkat konsumsi dan sumbu horizontal menunjukkan tingkat pendapatan nasional. C_0 pada fungsi konsumsi merupakan titik penggal (*intercept*) sumbu vertikal, sedangkan MPC ditunjukkan kemiringan (*slope*) kurva konsumsi, yaitu $\Delta C/\Delta Y$. perpotongan antara kurva C dan Y menunjukkan tingkat BEP (*break event point*), yaitu pendapatan sama dengan konsumsi ($Y = C$).



Kurva 3.2 Kurva Konsumsi dan Pendapatan Nasional

Soal 1 (menentukan MPC dan fungsi konsumsi)

Pada saat pendapatan konsumen Rp1.250,- pengeluaran konsumsinya Rp500,.
Setelah ada kenaikan gaji sebesar Rp500,-, pengeluaran konsumsinya menjadi Rp600,-.

Ditanya:

- tentukan berapa MPC nya
- tentukan fungsi konsumsinya

Jawab:

- Menghitung MPC adalah sebagai berikut:

$$C_1 = 500, Y_1 = 1.250$$

$$C_2 = 600, Y_2 = 1.750$$

$$c = \frac{C_2 - C_1}{Y_2 - Y_1}$$

$$c = \frac{600 - 500}{1.750 - 1.250}$$

$$c = \frac{100}{500}$$

$$c = 0,2$$

- Menentukan fungsi konsumsi:

$$C_1 = 500$$

$$c = 0,2$$

$$Y_1 = 1.250$$

$$C = C_0 + c Y$$

$$500 = C_0 + 0,2 (1.250)$$

$$500 = C_0 + 250$$

$$C_0 = 500 - 250$$

$$C_0 = 250$$

Jadi fungsi konsumsinya $C = 250 + 0,2 Y$

FUNGSI TABUNGAN

Tabungan (S) atau *saving* merupakan sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh konsumen, atau secara matematis dapat dituliskan:

$$S = Y - C$$

S : tabungan
 Y : besarnya pendapatan
 C : konsumsi

Dengan kata lain, besarnya pendapatan merupakan jumlah yang dikeluarkan untuk konsumsi ditambah dengan jumlah yang ditabung, atau secara matematis dapat dituliskan:

$$Y = C + S$$

Karena $S = Y - C$, maka fungsi tabungan dapat dituliskan sebagai berikut:

$$S = Y - (C_0 + c Y)$$

$$S = Y - C_0 - c Y$$

$$S = -C_0 + Y - c Y$$

$$S = -C_0 + (1 - c) Y$$

Sehingga fungsi tabungan dapat dituliskan:

$$S = -C_0 + (1 - c) Y$$

Keterangan:

S : besarnya tabungan
 $-C_0$: tabungan otonom
 $1 - c$: hasrat menabung marginal
 Y : tingkat pendapatan

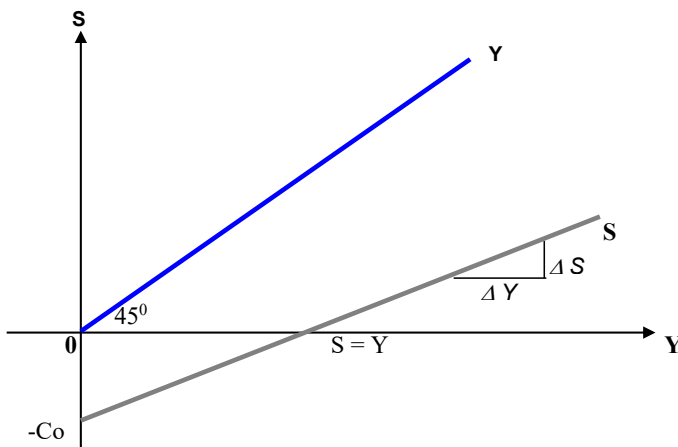
$-C_0$ yang merupakan tabungan otonom (*autonomous consumption*), yaitu besarnya tabungan pada saat pendapatan konsumen sebesar nol. Tanpa adanya pendapatan, konsumen tidaklah mungkin dapat menabung sehingga besarnya tabungan otonom pasti negatif (karena dananya digunakan untuk mengkonsumsi). Hasrat menabung

marginal (*marginal propensity to save*) yang disimbolkan dengan $(1-c)$ atau MPS merupakan besarnya tambahan tabungan (ΔS) sebagai akibat dari kenaikan pendapatan (ΔY). Seperti halnya MPC, nilai MPS juga antara nol sampai satu. Secara matematis, MPS dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

Karena $MPS = 1 - MPC$, maka $MPS + MPC = 1$

Fungsi tabungan ini dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik. Secara grafis, sumbu vertikal merupakan tingkat tabungan dan sumbu horizontal menunjukkan tingkat pendapatan nasional. $-C_0$ pada persamaan fungsi tabungan merupakan titik penggal sumbu vertikal, sedangkan MPS ditunjukkan kemiringan kurva tabungan $\Delta S / \Delta Y$.



Kurva 3.3 Kurva Tabungan dan Pendapatan Nasional

Soal 2 (menentukan fungsi tabungan)

Apabila fungsi konsumsi adalah $C = 250 + 0,2 Y$, tentukanlah fungsinya!

Jawab:

Karena $C_0 = 250$, maka $-C_0 = -250$

Besarnya MPC adalah 0,2

$MPS = 1 - MPC$

$MPS = 1 - 0,2$

$MPS = 0,8$

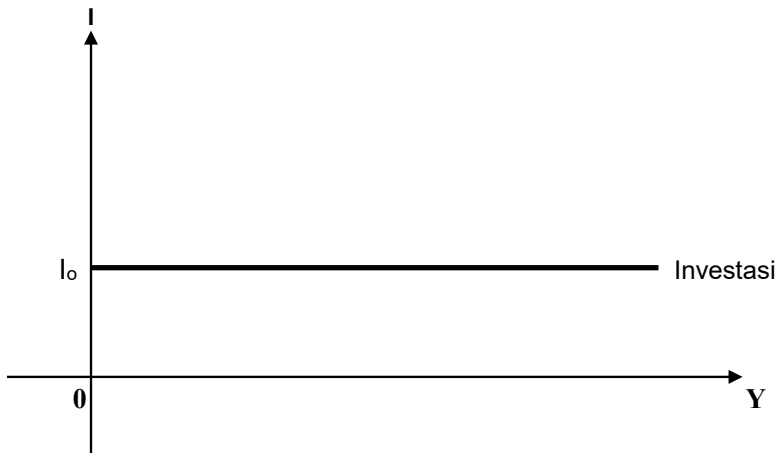
Sehingga fungsi tabungannya yaitu $S = -250 + 0,8 Y$

FUNGSI INVESTASI

Menurut teori investasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi, diantaranya yaitu tingkat suku bunga. Dalam teori pendapatan nasional, variabel investasi diasumsikan sebagai variabel yang bersifat eksogen (*exogeneous variable*), yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel investasi itu sendiri. Sebaliknya, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan merupakan variabel endogen (*endogeneous variable*) atau variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel konsumsi dan tabungan, yaitu pendapatan. Karena investasi merupakan variabel eksogen, maka persamaannya dapat ditulis:

$$I = I_0$$

Dalam bentuk grafik, kurva investasi berbentuk garis horizontal karena kemiringan kurva investasi adalah nol. Hal ini dikarenakan investasi sebagai variabel eksogen.



Kurva 3.4 Kurva Investasi Sebagai Variabel Eksogen

Soal 3 (perekonomian dua sektor)

Diketahui:

Data hipotetis perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

fungsi konsumsi $C = 120 + 0,75 Y$

investasi $I = 40$

Ditanya:

- Hitunglah pendapatan nasional keseimbangan dengan pendekatan pengeluaran dan pendekatan injeksi kebocoran!
- Tentukan konsumsi dan tabungan keseimbangannya!
- Hitunglah impas pendapatannya!

Jawab:

- a. Pendapatan nasional keseimbangan:

Pendekatan pengeluaran $Y = C + I$

$$Y = 120 + 0,75 Y + 40$$

$$Y = 160 + 0,75 Y$$

$$Y - 0,75 Y = 160$$

$$0,25 Y = 160$$

$$Y_e = \mathbf{640}$$

Pendekatan injeksi kebocoran $I = S$

$$40 = -120 + 0,25 Y$$

$$40 + 120 = 0,25 Y$$

$$160 = 0,25 Y$$

$$Y_e = \mathbf{640}$$

Besarnya pendapatan nasional keseimbangan, baik dengan pendekatan pengeluaran maupun pendekatan injeksi kebocoran adalah 640.

- b. **Konsumsi keseimbangan (C_e) dan tabungan keseimbangan (S_e)**

Untuk menghitung konsumsi keseimbangan dan tabungan keseimbangan, dapat dilakukan dengan memasukkan nilai pendapatan nasional keseimbangan (Y_e) ke dalam fungsi konsumsi, sehingga:

Konsumsi keseimbangan (C_e)

$$C_e = C_0 + c Y_e$$

$$C_e = 120 + 0,75 Y$$

$$C_e = 120 + 0,75 (640)$$

$$C_e = 120 + 480$$

$$C_e = \mathbf{600}$$

Jadi besarnya konsumsi keseimbangan (C_e) adalah 600.

Tabungan keseimbangan (S_e)

$$S_e = -C_0 + (1 - c) Y_e$$

$$S_e = -120 + 0,25 Y$$

$$S_e = -120 + 0,25 (640)$$

$$S_e = -120 + 160$$

$$S_e = \mathbf{40}$$

Jadi besarnya tabungan keseimbangan (S_e) adalah 40.

- c. **Impas pendapatan**

Impas pendapatan terjadi pada pendapatan sama dengan konsumsi, atau $Y = C$. Karena $C = 120 + 0,75 Y$, maka Y juga sama, yaitu:

$$\begin{aligned}
Y &= 120 + 0,75 Y \\
Y - 0,75Y &= 120 \\
0,25 Y &= 120 \\
Y &= 120/0,25 \\
Y &= 480
\end{aligned}$$

CARA MENGGAMBAR GRAFIK

Setelah perhitungan pendapatan nasional dilakukan secara matematis, maka untuk memperjelas hasil perhitungan tersebut divisualisasikan dalam bentuk grafik. Untuk perekonomian dua sektor, sumbu vertikal menunjukkan konsumsi (C), investasi (I), dan tabungan (S) sumbu horizontal menunjukkan pendapatan nasional (Y). Untuk garis bantu Y dibuat dengan sudut kemiringan 45 derajat.

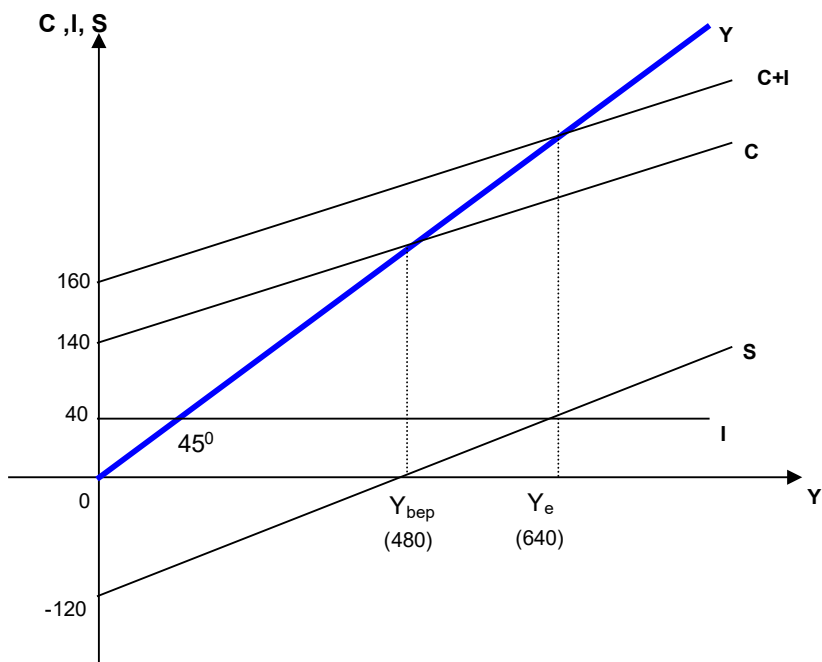
Kurva fungsi konsumsi (C). Untuk menggambarkan kurva konsumsi disesuaikan dengan fungsi konsumsi. C_0 merupakan titik potong pada sumbu horizontal, yaitu 120 dan MPC merupakan kemiringannya (*slope*) yaitu 0,75.

Kurva fungsi investasi (I). Investasi merupakan variabel eksogen, sehingga kurvanya berbentuk garis horizontal dengan titik potong sumbu horizontal sesuai dengan nilai investasi tersebut, yaitu 40.

Kurva fungsi tabungan (S). Menggambarkan kurva tabungan juga disesuaikan dengan fungsinya. $-C_0$ merupakan titik potong pada sumbu horizontal, yaitu -120 dan MPC merupakan kemiringannya (*slope*) yaitu 0,25.

Kurva fungsi konsumsi dan investasi (C+I). Titik potong kurva C+I pada sumbu horizontal merupakan penjumlahan dari C_0 dan I ($120+40=160$), sedangkan kemiringannya sama dengan kemiringan kurva konsumsi, yaitu MPC sebesar 0,75.

Titik potong antara kurva Y dan C menunjukkan besarnya impas pendapatan (Y_{dep}), yaitu 480 (sesuai dengan perhitungan sebelumnya). Titik potong antara Y dan C+I maupun antara I dan S merupakan pendapatan nasional keseimbangan (Y_e), yaitu sebesar 640.



Kurva 3.5 Kurva Keseimbangan Perekonomian Dua Sektor

Angka Pengganda Perekonomian Dua Sektor

Angka pengganda (*multiplier*) merupakan rasio yang menunjukkan perubahan pendapatan nasional sebagai akibat dari perubahan salah satu atau seluruh variabel pengeluaran pada persamaan pendapatan nasional. Dari angka pengganda ini dapat dihitung berapa perubahan pendapatan nasional sebagai akibat berubahnya konsumsi ataupun tabungan.

Pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor:

$$Y = C + I$$

sehingga

$$Y = C_0 + cY + I$$

$$Y - cY = C_0 + I$$

$$(1 - c)Y = C_0 + I$$

$$Y = \frac{C_0 + I}{(1 - c)}$$

$$Y = \frac{1}{(1 - c)} (C_0 + I)$$

Angka pengganda pengeluaran (kE) dapat dirumuskan:

$$kE = \frac{\Delta Y}{\Delta E}$$

Angka pengganda pengeluaran tersebut menunjukkan besarnya perubahan pendapatan nasional sebagai akibat terjadinya perubahan pengeluaran secara keseluruhan. Persamaan ini dapat dijabarkan untuk masing-masing variabel pengeluaran (C dan I) sebagai berikut:

$$Y = \frac{1}{(1-c)} (C_0) + \frac{1}{(1-c)} (I)$$

Dari persamaan tersebut dapat ditentukan angka pengganda pengeluaran konsumsi otonom dan angka pengganda investasi sebagai berikut:

$$kC_0 = \frac{\Delta Y}{\Delta C_0} \qquad kI_0 = \frac{\Delta Y}{\Delta I_0}$$

$$kC_0 = \frac{1}{(1-c)} \qquad \text{dan} \qquad kI_0 = \frac{1}{(1-c)}$$

Untuk mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional (ΔY) sebagai akibat dari perubahan pengeluaran konsumsi otonom (ΔC_0) dan perubahan investasi sektor swasta (ΔI) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\Delta Y = kC_0 \cdot \Delta C_0 \qquad \Delta Y = kI \cdot \Delta I$$

$$\Delta C_0 = \frac{\Delta Y}{kC_0} \qquad \Delta I = \frac{\Delta Y}{kI}$$

KESENJANGAN (GAP)

Untuk melihat ada atau tidaknya kesenjangan (*gap*), dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Apabila permintaan sama dengan penawaran, maka perekonomian dalam keadaan stabil atau tidak terdapat kesenjangan. Dari sisi permintaan tercermin dari besarnya pengeluaran masyarakat yang ada dalam perekonomian tersebut (Y_{eq}). Dari sisi penawaran tercermin dari kemampuan perekonomian dalam memproduksi dengan menggunakan seluruh kapasitas yang ada atau dalam kondisi *full-employment* (Y_{fe}).

Seperti halnya dalam teori inflasi, apabila permintaan lebih besar daripada penawaran, maka akan terjadi kenaikan harga atau inflasi sehingga perekonomian mengalami kesenjangan inflasi (*inflationary gap*). Sebaliknya apabila penawaran melebihi permintaan, maka akan terjadi penurunan harga (*deflationary gap*). Besarnya kesenjangan pada perekonomian dua sektor, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Gap = \frac{1}{kE} x \Delta Y = \frac{1}{\frac{1}{(1-c)}} x \Delta Y$$

atau

$$Gap = MPS \cdot \Delta Y$$

Untuk ΔY adalah selisih antara Y_{fe} dan Y_{eq} .

Soal 4 (menghitung angka pengganda)

Diketahui:

Lihat Soal 3

Ditanya:

- Hitunglah angka pengganda untuk pengeluaran investasi!
- Apabila investasi menjadi 50, hitunglah besarnya pendapatan nasional yang baru!
- Apabila Y_{fe} sebesar 680, perekonomian tersebut mengalami kesenjangan inflasi atau kesenjangan deflasi
- Berapa investasi yang dibutuhkan untuk menutupi kesenjangan tersebut?

Jawab:

- Angka pengganda pengeluaran investasi*

$$k_I = \frac{1}{(1-c)}$$

$$k_I = \frac{1}{(1-0,75)}$$

$$k_I = \frac{1}{0,25}$$

$$k_I = 4$$

Jadi angka pengganda pengeluaran investasi adalah 4

- b. *Besarnya Y baru apabila investasi menjadi 50*

$$I_{\text{awal}} = 40$$

$$I_{\text{baru}} = 50$$

$$\Delta I = 10$$

$$\Delta Y = k_1 \cdot \Delta I$$

$$\Delta Y = 4 \cdot \Delta I$$

$$\Delta Y = 40$$

Jadi besarnya perubahan pendapatan nasional adalah 40

Sehingga:

Besarnya pendapatan nasional yang baru (Y') yaitu:

$$Y' = Y + \Delta Y$$

$$Y' = 640 + 40$$

$$Y' = \mathbf{680}$$

Besarnya pendapatan nasional yang baru adalah: 680

- c. *Menentukan kesenjangan inflasi atau kesenjangan deflasi*

Apabila

$$Y_{\text{eq}} = 640 \text{ dan } Y_{\text{fe}} = 680,$$

$$\mathbf{\text{maka } Y_{\text{eq}} < Y_{\text{fe}},}$$

Sehingga

perekonomian mengalami kesenjangan deflasi (*deflationary gap*).

- d. *Menentukan investasi yang dibutuhkan untuk menutupi kesenjangan*

$$\Delta Y = k_1 \cdot \Delta I$$

$$\Delta I = \frac{\Delta Y}{kI}$$

$$\Delta Y = Y_{\text{fe}} - Y_{\text{eq}}$$

$$= 680 - 640$$

$$\Delta Y = 40$$

Jika angka pengganda investasi = 4 sehingga:

$$\Delta I = \frac{40}{4}$$

$$\Delta I = 10$$

$$I_{\text{baru}} = I_{\text{lama}} + \Delta I$$

$$= 40 + 10$$

$$= 50$$

Untuk menghilangkan kesenjangan deflasi, maka investasi baru yang dibutuhkan adalah 50.

PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

Perekonomian tiga sektor disebut perekonomian yang tertutup. **Tertutup** artinya dalam perekonomian tiga diasumsikan tertutup terhadap perdagangan internasional sehingga tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Berbeda dengan perekonomian dua sektor, dalam perekonomian tiga sektor telah memasukkan unsur pemerintah. Dengan adanya pemerintah, maka akan memunculkan dua variabel baru dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu:

a. Pajak (*Tax*)

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pajak adalah perpindahan dari sektor pribadi, baik pribadi maupun badan, ke sektor publik. Dalam hal ini pihak yang bertanggung untuk mendistribusikannya adalah pemerintah. Dimana pemerintah selain sebagai pihak penarik pajak namun juga merupakan pihak yang mendistribusikannya kepada masyarakat luas dalam bentuk pelayanan umum. Seperti transportasi, pendidikan maupun kesehatan yang dapat berguna bagi kepentingan umum. Meskipun pada kenyataannya pihak yang membayar pajak tidak mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari mereka yang tidak membayar pajak.

Pajak dikenakan bagi subyek pajak, baik pribadi maupun badan, atas penghasilan yang diperolehnya. Sehingga pajak dianggap sebagai pengeluaran untuk mengurangi pendapatan mereka. Baru setelah itu akan diketahui jumlah *disposable income*-nya untuk konsumsi.

Berdasarkan tarifnya, pajak dibedakan menjadi 2 yaitu;

1. Pajak Tetap (*Lump-Sum Tax*)

Pajak tetap adalah pajak yang besarnya tidak tergantung pada besarnya pendapatan. Dengan kata lain, berapapun besarnya pendapatan, maka beban pajaknya akan selalu sama atau bersifat *lump-sum*. Pajak jenis ini sebenarnya dibagi lagi dalam tarif yaitu pajak tetap jumlahnya dan pajak tetap tarifnya. Pajak dengan jumlah tetap merupakan pajak yang berapapun nilai objek pajak jumlah pajak yang dipungut tetap

sama. Contohnya adalah bea materai yaitu sebesar 6000 serta 3000. Sedangkan untuk pajak tetap tarifnya adalah jumlah pajak yang tarifnya tetap. Contohnya adalah PPN yang ditetapkan sebesar 10% dari nilai barang kena pajak. Persamaan pajak tetap adalah:

$$T_x = T_0$$

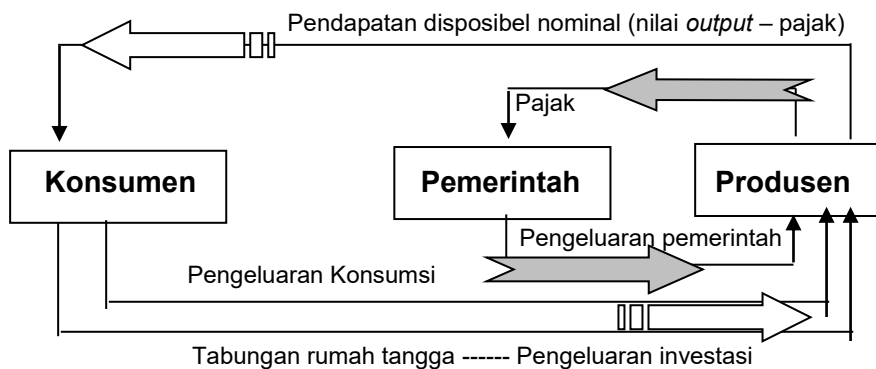
2. Pajak Proporsional (*Built-In Stabilizer*)

Pajak proporsional besarnya merupakan proporsi tertentu dari tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar proporsi pendapatan yang kena pajak. Contoh penerapan pajak jenis ini adalah PPh pasal 21 yang dikenakan untuk pegawai dengan jumlah gaji di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jumlah pajaknya akan tergantung pada jumlah penghasilannya. Persamaan pajak proporsional adalah:

$$T_x = T_0 + t Y$$

Pajak yang dipungut terhadap *output* akan mengurangi aliran uang ke sektor konsumen. Pungutan pajak ini apabila tidak dibelanjakan, maka akan menjadi kebocoran dalam alur melingkar. Nilai *output* akan berkurang apabila pengeluaran agregat ($C + I + G$) lebih kecil daripada nilai barang dan jasa yang dihasilkan, sebaliknya nilai *output* akan bertambah apabila pengeluaran agregat lebih besar daripada nilai *output*.

Gambar 3.2. Alur Melingkar Kegiatan Perekonomian Tiga Sektor



b. Transfer (*Transfer Payment*)/Subsidi

Transfer merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk tujuan tertentu, dimana masyarakat tidak berkewajiban untuk melaksanakannya atas dana yang diterimanya. Bagi masyarakat atau konsumen, transfer akan menambah pendapatan. Transfer dapat berupa tunjangan pengangguran, jaminan sosial, hibah (*grant*), bantuan (*aid*), hadiah

(*gift*), dan pemberian lainnya. Transfer merupakan variabel yang bersifat eksogen, sehingga bentuk persamaannya dapat dituliskan:

$$Tr = Tr_0$$

Dalam penghitungan pendapatan nasional, pajak dan transfer digunakan untuk mengetahui jumlah *Disposable income*. Pendapatan disposibel (*disposable income*) adalah besarnya pendapatan setelah dikurangi dengan pajak (Tx) dan ditambah dengan transfer (Tr), atau secara matematis dapat dituliskan:

Untuk pajak tetap:

$$Yd = Y - Tx + Tr$$

Untuk pajak proporsional:

$$Yd = Y - (T_0 + t Tx) + Tr$$

PENGELUARAN PEMERINTAH

Seperti halnya investasi, dalam teori pendapatan nasional, variabel pengeluaran pemerintah (G) merupakan variabel yang bersifat eksogen (*exogeneous variable*), yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel investasi itu sendiri. Persamaannya dapat ditulis:

$$G = G_0$$

Seperti halnya perekonomian dua sektor, pendapatan nasional keseimbangan perekonomian tiga sektor, dapat dihitung dengan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional keseimbangan (Y) dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, yaitu pengeluaran konsumen (konsumsi), pengeluaran produsen (investasi), dan pengeluaran pemerintah. Secara matematis, pendekatan pengeluaran dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G$$

Keterangan:

C : konsumsi

I : investasi

G : pengeluaran pemerintah (*government expenditure*)

2. Pendekatan Injeksi-kebocoran

Keseimbangan dari sisi pengeluaran (E) dan pendapatan (Y) dapat juga dituliskan:

$$E = C + I + G$$

$$Y = C + Tx + S - Tr$$

Keseimbangan tercapai pada saat pengeluaran sama dengan pendapatan, yaitu:

$$\begin{aligned} Y &= E \\ C + Tx + S - Tr &= C + I + G \\ S + Tx - Tr &= I + G \\ S + Tx &= I + G + Tr \quad \text{atau dapat juga ditulis} \end{aligned}$$

$$S - I = G - Tx + Tr$$

$(S - I)$ merupakan surplus sektor swasta dan $G - Tx + Tr$ merupakan defisit anggaran belanja. Sehingga keseimbangan tercapai apabila surplus sektor swasta sama dengan defisit anggaran belanja. Rumus tersebut akan menghasilkan perhitungan pendapatan nasional keseimbangan sama dengan penggunaan rumus $Y = C + I + G$.

Fungsi konsumsi untuk perekonomian tiga sektor yaitu:

$$C = C_0 + c Y_d$$

- C : pengeluaran konsumsi
- C_0 : konsumsi otonom
- c : hasrat mengkonsumsi marginal
- Y_d : pendapatan disposibel

Soal 5 (perekonomian tiga sektor)

Diketahui:

Data perekonomian suatu negara adalah sebagai berikut:

fungsi konsumsi $C = 150 + 0,60 Y$

investasi $I = 30$

pengeluaran pemerintah $G = 25$

Ditanya:

Hitunglah pendapatan nasional keseimbangan tiga sektor dengan pendekatan pengeluaran dan pendekatan injeksi kebocoran!

Jawab:

Pendekatan pengeluaran $Y = C + I + G$
 $Y = 150 + 0,60 Y + 30 + 25$
 $Y = 205 + 0,60 Y$

$$\begin{aligned}
 Y - 0,60 Y &= 205 \\
 0,40 Y &= 205 \\
 \mathbf{Y_e} &= \mathbf{512,5}
 \end{aligned}$$

Pendekatan injeksi kebocoran $\mathbf{S + Tx = I + G + Tr}$

$$\begin{aligned}
 -150 + 0,40 Y + 0 &= 30 + 25 + 0 \\
 0,4 Y &= 30 + 25 + 150 \\
 0,4 Y &= 30 + 25 + 150 \\
 0,4 Y &= 205 \\
 Y &= 205/0,4 \\
 \mathbf{Y} &= \mathbf{512,5}
 \end{aligned}$$

Soal 6 (perekonomian tiga sektor dengan pajak tetap)

Diketahui:

Fungsi konsumsi	$C = 150 + 0,60 Y_d$
Investasi	$I = 30$
Pengeluaran pemerintah	$G = 25$
Pajak	$T_x = 12$
Transfer	$T_r = 8$

Ditanya:

Hitunglah pendapatan nasional keseimbangan untuk perekonomian tiga sektor!

Jawab:

$$\begin{aligned}
 Y &= C + I + G \\
 Y &= 150 + 0,60 Y_d + 30 + 25 \\
 Y &= 205 + 0,60 Y_d
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Untuk } Y_d &= Y - T_x + T_r \\
 &= Y - 12 + 8 \\
 &= Y - 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{sehingga } Y &= 205 + 0,60 Y_d \\
 Y &= 205 + 0,6 (Y - 4) \\
 Y &= 205 + 0,6 Y - 2,4 \\
 Y &= 202,6 + 0,6 Y \\
 Y - 0,6 Y &= 202,6 \\
 0,4 Y &= 202,6 \\
 \mathbf{Y_e} &= \mathbf{506,5}
 \end{aligned}$$

Pendapatan nasional keseimbangan perekonomian tiga sektor = 506,5

Soal 7 (perekonomian tiga sektor dengan pajak proporsional)

Diketahui:

$$\text{Fungsi konsumsi} \quad C = 225 + 0,35 Y_d$$

$$\text{Investasi} \quad I = 120$$

$$\text{Pengeluaran pemerintah} \quad G = 95$$

$$\text{Pajak} \quad T_x = 12 + 0,2 Y$$

$$\text{Transfer} \quad T_r = 15$$

Ditanya:

- Hitunglah pendapatan nasional keseimbangan!
- Tentukan konsumsi dan tabungan keseimbangannya!

Jawab:

- Pendapatan nasional keseimbangan

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 225 + 0,35 Y_d + 120 + 95$$

$$Y = 440 + 0,35 Y_d$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk } Y_d &= Y - (T_0 + tY) + T_r \\ &= Y - (12 + 0,2Y) + 15 \\ &= Y - 12 - 0,2Y + 15 \\ &= \mathbf{0,8 Y + 3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{sehingga} \quad Y &= 440 + 0,35 Y_d \\ Y &= 440 + 0,35 (0,8Y + 3) \\ Y &= 440 + 0,28 Y + 1,05 \\ Y &= 441,05 + 0,28 Y \\ Y - 0,28 Y &= 441,05 \\ 0,72 Y &= 441,05 \\ \mathbf{Y_e} &= \mathbf{612,57} \end{aligned}$$

- Konsumsi dan tabungan keseimbangan**

Konsumsi keseimbangan (C_e)

$$C = 225 + 0,35 Y_d$$

$$C = 225 + 0,35 (0,8 Y + 3)$$

$$C = 225 + 0,28 Y + 1,05$$

$$C = 226,05 + 0,28 Y$$

$$C = 226,05 + 0,28 (612,57)$$

$$C = 226,05 + 171,52$$

$$\mathbf{C_e = 397,57}$$

Konsumsi keseimbangan adalah = 397,57

Tabungan keseimbangan (S_e)

$$S = -225 + 0,65 Y_d$$

$$C = -225 + 0,65 (0,8 Y + 3)$$

$$C = -225 + 0,52 Y + 1,95$$

$$C = -223,05 + 0,52 Y$$

$$C = -223,05 + 0,52 (612,57)$$

$$C = -223,05 + 318,54$$

$$C_e = \mathbf{95,49}$$

Tabungan keseimbangan adalah = 95,49

ANGKA PENGGANDA PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

Pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian dua sektor:

$$Y = C + I + G$$

$$\text{Fungsi konsumsi } C = C_0 + c Y_d$$

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

1. *Angka pengganda untuk pajak yang bersifat tetap*

$$Y = C_0 + c (Y - T_x + T_r) + I + G$$

$$Y = C_0 + cY - cT_x + cT_r + I + G$$

$$Y - cY = C_0 - cT_x + cT_r + I + G$$

$$(1 - c)Y = C_0 - cT_x + cT_r + I + G$$

$$Y = \frac{C_0 - cT_x + cT_r + I + G}{(1 - c)}$$

$$Y = \frac{1}{(1 - c)} (C_0 - cT_x + cT_r + I + G)$$

Angka pengganda pengeluaran adalah:

$$kE = \frac{1}{(1 - c)}$$

Persamaan ini dapat dijabarkan untuk masing-masing variabel C, I, G, T_x , dan T_r sebagai berikut:

$$Y = \frac{1}{(1 - c)} (C_0) - \frac{-c}{(1 - c)} (T_x) + \frac{c}{(1 - c)} (T_r) + \frac{1}{(1 - c)} (I) + \frac{1}{(1 - c)} (G)$$

Angka pengganda untuk masing-masing variabel adalah:

$$kC_0 = \frac{1}{(1-c)} \quad kI = \frac{1}{(1-c)}$$

$$kTx = \frac{-c}{(1-c)} \quad kG = \frac{1}{(1-c)}$$

$$kTr = \frac{c}{(1-c)}$$

Untuk mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional (ΔY) sebagai akibat dari perubahan pengeluaran konsumsi otonom (ΔC_0), perubahan pajak (ΔTx), perubahan transfer (ΔTr), perubahan pengeluaran pemerintah (DG), dan perubahan investasi sektor swasta (ΔI) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Delta Y &= kC_0 \cdot \Delta C_0 & \Delta Y &= kI \cdot \Delta I \\ \Delta Y &= kTx \cdot \Delta Tx & \Delta Y &= kG \cdot \Delta G \\ \Delta Y &= kTr \cdot \Delta Tr \end{aligned}$$

Untuk menentukan terjadinya kesenjangan inflasi maupun kesenjangan deflasi dapat dilihat dari sisi permintaan (Y_{eq}) dan penawaran (Y_{fe}). Apabila permintaan lebih besar daripada penawaran, maka terjadi *inflationary gap*, sebaliknya apabila penawaran melebihi permintaan, maka akan terjadi *deflationary gap*. Besarnya kesenjangan pada perekonomian tiga sektor dengan pajak tetap, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Gap = \frac{1}{kE} \times \Delta Y = \frac{1}{(1-c)} \cdot \Delta Y$$

atau

$$Gap = MPS \cdot \Delta Y$$

Untuk Y adalah selisih antara Y_{fe} dan Y_{eq} .

2. Angka pengganda untuk pajak yang bersifat proporsional

$$Tx = T_0 - tY$$

$$Y_d = Y - T_0 - tY + Tr$$

$$\begin{aligned} Y &= C_0 + c(Y - T_0 - tY + Tr) + I + G \\ Y &= C_0 + cY - cT_0 - ctY + cTr + I + G \\ Y - cY + ctY &= C_0 - cT_0 + cTr + I + G \\ (1 - c + ct)Y &= C_0 - cTx + cTr + I + G \end{aligned}$$

$$Y = \frac{C_0 - cT_0 + cTr + I + G}{(1 - c + ct)}$$

$$Y = \frac{1}{(1 - c + ct)} (C_0 - cT_0 + I + G)$$

Perubahan pendapatan nasional sebagai akibat dari perubahan pengeluaran secara total adalah:

$$kE = \frac{\Delta Y}{\Delta E}$$

$$kE = \frac{1}{(1 - c + ct)}$$

Persamaan ini dapat dijabarkan untuk masing-masing variabel C, I, G, Tx, dan Tr sebagai berikut:

$$Y = \frac{1}{(1 - c + ct)} (C_0) - \frac{c}{(1 - c + ct)} (T_0) + \frac{c}{(1 - c + ct)} (Tr) + \frac{1}{(1 - c + ct)} (I) + \frac{1}{(1 - c + ct)} (G)$$

Angka pengganda untuk masing-masing variabel adalah:

$$kC_0 = \frac{1}{(1 - c + ct)} \quad kI = \frac{1}{(1 - c + ct)}$$

$$kTx = \frac{-c}{(1 - c + ct)} \quad kG = \frac{1}{(1 - c + ct)}$$

$$kTr = \frac{c}{(1 - c + ct)}$$

Untuk mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional (ΔY) sebagai akibat dari perubahan masing-masing variabel, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\Delta Y = kC_0 \cdot \Delta C_0 \quad \Delta Y = kI \cdot \Delta I$$

$$\Delta Y = kTx \cdot \Delta Tx \quad \Delta Y = kG \cdot \Delta G$$

$$\Delta Y = kTr \cdot \Delta Tr$$

Besarnya kesenjangan pada perekonomian tiga sektor dengan pajak proporsional, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Gap = \frac{1}{kE} \times \Delta Y = \frac{1}{\frac{1}{1-c+ct}} \cdot \Delta Y$$

atau

$$Gap = (1 - c - ct) \cdot \Delta Y$$

Untuk Y adalah selisih antara Y_{fe} dan Y_{eq} .

Cara Menggambar Grafik 3 Sektor

Diketahui:

$$C = 1200 + 0,23Y_d \quad T_x = 30 + 0,2Y$$

$$I = 700 \quad T_r = 45$$

$$G = 1500$$

Tentukan: a. Keseimbangan 3 sektor

b. Gambarkan Kurvanya

a. Y keseimbangan (y_e)

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G \\ &= 1.200 + 0,23Y_d + 700 + 1.500 \\ &= 3.400 + 0,23Y_d \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_d &= Y - T_x + T_r \\ &= Y - (30 + 0,2Y) + 45 \\ &= Y - 30 - 0,2Y + 45 \\ &= 15 + 0,8Y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_e &= 3.400 + 0,23Y_d \\ &= 3.400 + 0,23(15 + 0,8Y) \\ &= 3.400 + 3,45 + 0,18Y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y - 0,18Y &= 3.400 + 3,45 \\ 0,82Y &= 3.403,45 \\ Y &= 4.150,55 \end{aligned}$$

b. Konsumsi Keseimbangan

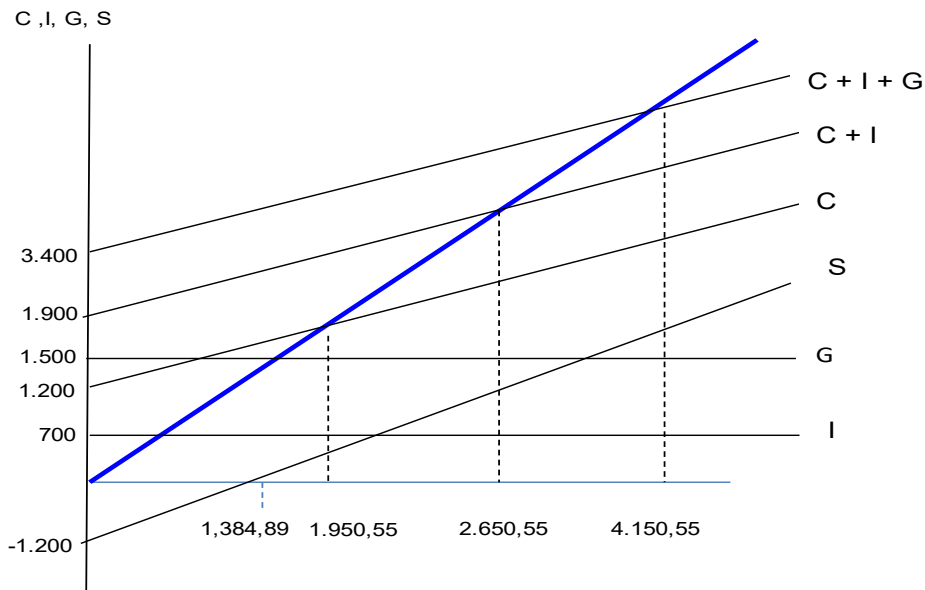
$$\begin{aligned} Y &= C \\ Y &= 1200 + 0,23Y_d \\ Y &= 1200 + 0,23(15 + 0,8Y) \\ Y &= 1200 + 3,45 + 0,18Y \\ Y &= 1.203,45 + 0,18(4.150,55) \\ Y &= 1.203,45 + 747,10 \\ Y &= 1.950,55 \end{aligned}$$

c. Tabungan Keseimbangan

$$\begin{aligned}
 S &= -1200 + 0,77Y_d \\
 &= -1200 + 0,77(15 + 0,8Y) \\
 &= -1200 + 11,55 + 0,62Y \\
 &= -1.188,45 + 0,62(4.150,55) \\
 &= -1.188,45 + 2,573,34 \\
 &= 1,384,89
 \end{aligned}$$

d. $Y = C + I$

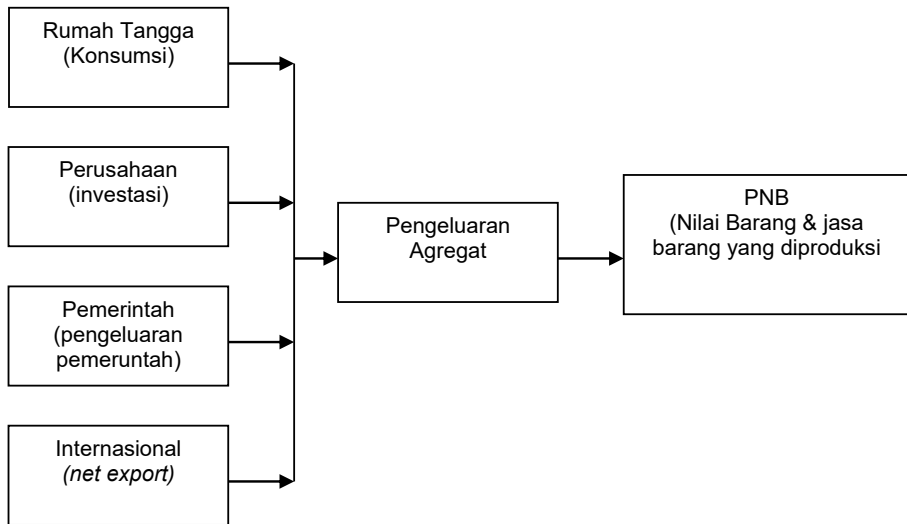
$$\begin{aligned}
 &= 1200 + 0,23Y_d + 700 \\
 &= 1.900 + 0,23(15 + 0,8Y) \\
 &= 1.900 + 3,45 + 0,18Y \\
 &= 1.903,45 + 0,18(4.150,55) \\
 &= 1.903,45 + 747,10 \\
 &= 2.650,55
 \end{aligned}$$



PEREKONOMIAN EMPAT SEKTOR

Perekonomian empat sektor disebut perekonomian yang terbuka (*open economy*). Disebut sebagai perekonomian terbuka karena telah terbuka terhadap perdagangan dengan negara lain, dalam bentuk ekspor dan impor barang dan jasa, serta ada peranan pemerintah. Dengan adanya perdagangan internasional, maka akan memunculkan dua variabel baru dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu:

1. Ekspor (X)
2. Impor (M)



FUNGSI EKSPOR

Seperti halnya variabel investasi, pengeluaran pemerintah, dan pajak tetap, variabel ekspor merupakan **variabel yang bersifat eksogen**. Sebenarnya ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendapatan nasional, cadangan devisa, kapasitas perekonomian, dan lain-lain. Dalam perhitungan pendapatan nasional, variabel ekspor diasumsikan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Dalam bentuk persamaan, fungsi ekspor dapat dituliskan:

$$X = X_0$$

FUNGSI IMPOR

Fungsi impor dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Impor otonom atau impor yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain

$$M = M_0$$

2. Impor yang nilainya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan

$$M = M_0 + m Y$$

M : besarnya impor

M_0 : impor otonom (besarnya impor pada saat pendapatan nol)

m : *marginal propensity to import* (MPM)

Impor otonom dapat terjadi karena tidak semua negara mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh negara tersebut sehingga harus mengimpor

dari negara lain. Selain itu, impor dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, dalam arti apabila terjadi kenaikan pendapatan, maka impor akan meningkat karena semakin bervariasinya kebutuhan akan barang dan jasa. Besarnya kenaikan impor (ΔM) sebagai akibat kenaikan pendapatan (ΔY) dapat dihitung dengan rumus:

$$MPM = \frac{\Delta M}{\Delta Y}$$

Menurut pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional keseimbangan dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, yaitu pengeluaran konsumen (konsumsi), pengeluaran produsen (investasi), dan pengeluaran pemerintah, serta ekspor bersih. Secara matematis, pendekatan pengeluaran dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

C	: konsumsi
I	: investasi
G	: pengeluaran pemerintah
X	: ekspor
M	: Impor

Soal 8 (perekonomian empat sektor)

Diketahui:

Fungsi konsumsi	C = 30 + 0,7 Y
Investasi	I = 10
Pengeluaran pemerintah	G = 15
Ekspor	X = 25
Impor	M = 20

Ditanya:

Hitunglah pendapatan nasional keseimbangan untuk perekonomian empat sektor!

Jawab:

Pendapatan nasional keseimbangan

$$\begin{aligned}
 Y &= C + I + G + (X - M) \\
 Y &= 30 + 0,7 Y + 10 + 15 + (25 - 20) \\
 Y &= 60 + 0,7 Y \\
 Y - 0,7 Y &= 60 \\
 0,3 Y &= 60 \\
 Y &= 60/0,3 \\
 Y_e &= \mathbf{200}
 \end{aligned}$$

Konsumsi keseimbangan

$$C = 30 + 0,7 Y$$

$$C = 30 + 0,7 (200)$$

$$C = 30 + 140$$

$$C_e = 170$$

Tabungan keseimbangan

$$S = -30 + 0,3 Y$$

$$S = -30 + 0,3 (200)$$

$$S = -30 + 60$$

$$S_e = 30$$

Soal 9 (perekonomian empat sektor dengan impor proporsional)

Diketahui:

Fungsi konsumsi $C = 30 + 0,7 Y_d$

Investasi $I = 10$

Pengeluaran pemerintah $G = 15$

Ekspor $X = 25$

Impor $M = 20 + 0,3 Y_d$

Transfer $Tr = 5$

Ditanya:

- Hitunglah pendapatan nasional keseimbangan perekonomian empat sektor
- Hitunglah impor keseimbangan

Jawab:

- Pendapatan nasional keseimbangan

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = 30 + 0,7 Y_d + 10 + 15 + \{25 - (20 + 0,3 Y_d)\}$$

$$Y = 55 + 0,7 Y_d + (25 - 20 - 0,3 Y_d)$$

$$Y = 55 + 0,7 Y_d + 5 - 0,3 Y_d$$

$$Y = 60 + 0,7 Y_d - 0,3 Y_d$$

$$Y = 60 + 0,4 Y_d$$

Pendapatan disposibel atau *Disposable income* dihitung dengan cara:

$$Y_d = Y - T_x + Tr$$

$$Y_d = Y - 0 + 5$$

$$Y_d = Y + 5$$

Dengan memasukkan pendapatan disposibel ke dalam persamaan pendapatan nasional, akan diperoleh:

$$\begin{aligned}
Y &= 60 + 0,4(Y + 5) \\
Y &= 60 + 0,4Y + 2 \\
Y - 0,4Y &= 62 \\
0,6Y &= 62 \\
\mathbf{Y_e} &= \mathbf{103,33}
\end{aligned}$$

Pendapatan nasional keseimbangan perekonomian empat sektor adalah = 103,33.

b. Mencari impor keseimbangan

$$\begin{aligned}
M &= M_0 + mY \\
M &= 20 + 0,3Y_d \\
M &= 20 + 0,3(Y + 5) \\
M &= 20 + 0,3Y + 1,5 \\
M &= 21,5 + 0,3(103,33) \\
M &= 21,5 + 30,99 \\
\mathbf{M_e} &= \mathbf{52,49}
\end{aligned}$$

Atau bisa dicari dengan cara lain, yaitu:

$$\begin{aligned}
Y_d &= Y + 5 \\
Y_d &= 103,33 + 5 \\
Y_d &= 108,33
\end{aligned}$$

Masukkan pendapatan disposibel ke dalam persamaan impor, sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned}
M &= 20 + 0,3(108,33) \\
M &= 20 + 32,49 \\
\mathbf{M_e} &= \mathbf{52,49}
\end{aligned}$$

ANGKA PENGGANDA PEREKONOMIAN EMPAT SEKTOR

1. Untuk impor eksogen

a. Apabila pajak tetap

$$kE = \frac{1}{(1-c)}$$

b. Apabila pajak proporsional

$$kE = \frac{1}{(1-c+ct)}$$

2. Untuk impor proporsional

a. Apabila pajak tetap

$$kE = \frac{1}{(1-c+m)}$$

b. Apabila pajak proporsional

$$kE = \frac{1}{(1 - c + ct + m)}$$

Soal 10 (perekonomian empat sektor dengan variasi)

Diketahui:

Dalam suatu perekonomian terbuka pada tahun 2018 terdapat catatan perekonomian sebagai berikut:

- Fungsi konsumsi adalah $C = 500 + 0,8Y_d$.
- Pajak adalah 25 persen dari pendapatan nasional ($T = 0,25Y$).
- Investasi swasta bernilai $I = 500$, dan pengeluaran pemerintah bernilai $G = 1000$.
- Ekspor bernilai $X = 800$ ketika impor adalah 10% dari pendapatan nasional ($M = 0,1Y$).
- Selanjutnya diasumsikan dalam perekonomian terbuka ini akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional sebanyak 6000.

Ditanya:

- Tentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y !
- Tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan!
- Untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan yang bagaimanakah perlu dibuat jika apabila:
 - Pajak saja yang diturunkan
 - Pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan
- Nyatakan kedudukan *budget* pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh! Nyatakan fungsi pajak yang baru!
- Adakah ekspor selalu melebihi impor pada kedua keseimbangan tersebut?
- Tentukan nilai multiplier dalam perekonomian terbuka tersebut!

Jawab:

- Fungsi Konsumsi sebagai Fungsi dari Y :

$$\begin{aligned} C &= 500 + 0,8Y_d \\ C &= 500 + 0,8(Y - T) \\ C &= 500 + 0,8(Y - 0,25Y) \\ C &= 500 + 0,6Y \end{aligned}$$

- Pendapatan Nasional pada Keseimbangan:

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G + (X - M) \\ Y &= 500 + 0,6Y + 500 + 1000 + (800 - 0,1Y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Y &= 500 + 0,6Y + 500 + 1000 + 800 - 0,1Y \\
Y &= 2800 + 0,5Y \\
0,5Y &= 2800 \\
Y &= 5600
\end{aligned}$$

3. Perubahan untuk Mencapai Kesempatan Kerja Penuh:

- a) Dengan menurunkan pajak. Oleh karena formula multiplier tidak diketahui, perubahan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh tidak dapat ditentukan dengan menggunakan formula multiplier. Oleh karena itu nilai pajak pada kesempatan kerja penuh perlu dihitung dengan memisalkan pajak yang diterima pada kesempatan kerja penuh adalah T_0 dan seterusnya menyelesaikan persamaan keseimbangan pada pendapatan nasional = 6000 (pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh)

$$\begin{aligned}
Y &= C + I + G + (X - M) \\
6000 &= 500 + 0,8Y_d + 500 + 1000 + (800 - 0,1Y) \\
6000 &= 500 + 0,8(Y - T_0) + 500 + 1000 + 800 - 0,1Y \\
6000 &= 2800 + 0,8Y - 0,8T_0 - 0,1Y \\
6000 &= 2800 + 0,8(6000) - 0,8T_0 - 0,1(6000) \\
6000 &= 2800 + 4800 - 0,8T_0 - 600 \\
0,8T_0 &= 1000 \\
T_0 &= 1250
\end{aligned}$$

Apabila pajak tidak berubah, pada pendapatan nasional 6000 jumlah pajak adalah:

$$\begin{aligned}
T &= 0,25Y \\
T &= 0,25(6000) \\
T &= 1500
\end{aligned}$$

Pengurangan pajak menyebabkan pada kesempatan kerja penuh, pajak yang diterima adalah 1250, manakala tanpa pengurangan pajak jumlahnya adalah 1500. Dengan demikian untuk mencapai kesempatan kerja penuh pajak diturunkan sebanyak **1500 - 1250 = 250**.

- b) Dengan menambah pengeluaran pemerintah. Apabila pengeluaran pemerintah ditambah misalkan jumlah pengeluaran pemerintah yang baru, sebesar G_0 . Nilai G_0 ini dapat diselesaikan dengan persamaan keseimbangan:

$$\begin{aligned}
Y &= C + I + G + (X - M) \\
Y &= 500 + 0,6Y + 500 + G_0 + 800 - 0,1Y \\
6000 &= 500 + 0,6(6000) + 500 + G_0 + 800 - 0,1(6000) \\
6000 &= 500 + 3600 + 500 + G_0 + 800 - 600 \\
G_0 &= 6000 - 4800 \\
G_0 &= 1200
\end{aligned}$$

Sehingga untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pengeluaran pemerintah perlu ditambah sebanyak **1200 - 1000 = 200**.

4. *Budget* Pemerintah dan Fungsi Pajak:

Pada Keseimbangan Asal. Pada keseimbangan asal ($Y = 5600$), pajak adalah sebesar $T = 0,25Y = 0,25 (5600) = 1400$. Pengeluaran pemerintah adalah $G = 1000$. Maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus yakni sebanyak $1400 - 1000 = 400$.

Kasus pengurangan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Pajak telah berkurang sebesar 1250. Manakala pengeluaran pemerintah tetap 1000 maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus, yakni sebanyak $T - G = 1250 - 1000 = 250$.

Kasus menambah pengeluaran pemerintah untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Dalam perhitungannya pengeluaran pemerintah meningkat 1200. Oleh karena tiada perubahan dalam fungsi pajak, yakni tetap $T = 0,25Y$ maka pada $Y = 6000$, pajak yang diterima adalah $T = 0,25 (6000) = 1500$. Sehingga *budget* pemerintah surplus sebanyak $T - G = 1500 - 1200 = 300$.

Fungsi pajak yang baru. Apabila kesempatan kerja penuh dicapai dengan mengurangi pajak secara sekaligus, fungsi pajak akan berubah menjadi $T = T_0 + 0,25Y$. Dalam kasus pengurangan pajak diperoleh 1250 maka dapat membantu menentukan nilai T_0 yaitu:

$$\begin{aligned} T &= T_0 = 0,25Y \\ 1250 &= T_0 + 0,25 (6000) \\ T_0 &= 1250 - 1500 \\ T_0 &= -250 \end{aligned}$$

Dengan demikian fungsi pajak yang baru adalah $T = -250 + 0,25Y$.

5. Keseimbangan Ekspor dan Impor:

Pada keseimbangan asal $Y = 5600$. Impor adalah $M = 0,1Y = 0,1 (5600) = 560$. Maka ekspor lebih besar (800) dari impor. Maka terdapat surplus dalam neraca perdagangan.

Pada $Y = 6000$. Impor adalah $0,1Y = 0,1 (6000) = 600$. Maka ekspor tetap lebih besar (800) dari impor. Dan ini menunjukkan bahwa pada kesempatan kerja penuh terdapat surplus dalam neraca perdagangan.

6. Nilai Multiplier:

Dalam penghitungannya penambahan pendapatan nasional adalah $6000 - 5600 = 400$. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk menambah pendapatan nasional adalah 200 (naik dari 1000 menjadi 1200). Dengan demikian dalam perekonomian yang diasumsikan ini, nilai multiplier adalah: $400 / 200 = 2$.

Multiplier dalam Perekonomian Terbuka

Penghitungan multiplier dalam perekonomian terbuka lebih kecil daripada perekonomian tertutup. Dan keadaan ini selalu berlaku karena impor selalu diasumsikan secara proporsional dari pendapatan nasional ($M = mY$).

Mengacu pada kasus perekonomian terbuka di atas diketahui $C = 500 + 0,8Y_d$. Dan $T = 0,25Y$ sedangkan $I = 500$ dan $G = 1000$ maka dalam perekonomian tertutup ini nilai multipliernya:

$$M_{tp} = \frac{1}{1 - b(1 - t)} = \frac{1}{1 - 0,8(1 - 0,25)} = \frac{1}{0,4} = 2,5$$

Dan ini menunjukkan bahwa nilai nilai multiplier dalam perekonomian terbuka lebih kecil yakni 2 dari nilai multiplier dalam perekonomian tertutup yakni sebesar 2,5.

ISTILAH PENTING BAB INI

Perekonomian tertutup sederhana	Impas pendapatan
Perekonomian tertutup	<i>Multiplier</i>
Perekonomian terbuka	<i>Inflationary gap</i>
<i>Injection-leakages approach</i>	<i>Deflationary gap</i>
<i>Expenditure approach</i>	Pajak <i>lump-sum</i>
<i>Autonomous consumption</i>	Pajak <i>built-in stabilizer</i>
<i>Autonomous saving</i>	<i>Transfer payment</i>
<i>Marginal propensity to consume</i>	<i>Disposable income</i>
<i>Marginal propensity to save</i>	<i>Marginal propensity to import</i>
Variabel eksogen dan endogen	

RANGKUMAN

1. Perekonomian dua sektor disebut juga sebagai perekonomian tertutup sederhana karena belum ada perdagangan internasional dan diasumsikan tidak ada peranan pemerintah. Keseimbangan perekonomian dua sektor dihitung dengan pendekatan pengeluaran dan pendekatan injeksi kebocoran.
2. Hasrat mengkonsumsi marginal (MPC) merupakan besarnya tambahan konsumsi (ΔC) sebagai akibat dari kenaikan pendapatan (ΔY). Sedangkan hasrat menabung marginal (MPS) merupakan besarnya tambahan tabungan (ΔS) sebagai akibat dari kenaikan pendapatan (ΔY).

3. Konsumsi otonom adalah besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan sebesar nol. Orang harus melakukan konsumsi walaupun tidak ada pendapatan karena harus bertahan hidup, pengeluaran ini dibiayai dari hutang, menjual aset, maupun mengorek tabungan.
4. Kesenjangan inflasi (*inflationary gap*) terjadi apabila permintaan lebih besar daripada penawaran sehingga mengakibatkan terjadi kenaikan harga. Sebaliknya apabila penawaran melebihi permintaan, maka akan terjadi penurunan harga (*deflationary gap*). Sisi permintaan tercermin dari besarnya pengeluaran masyarakat yang ada dalam perekonomian tersebut (Y_{eq}). Dari sisi penawaran tercermin dari kemampuan perekonomian dalam memproduksi dengan menggunakan seluruh kapasitas yang ada atau *full-employment* (Y_{fe}).
5. Angka pengganda (*multiplier*) merupakan rasio yang menunjukkan perubahan pendapatan nasional sebagai akibat dari perubahan salah satu atau seluruh variabel pengeluaran pada persamaan pendapatan nasional. Dari angka pengganda ini dapat dihitung berapa perubahan pendapatan nasional sebagai akibat berubahnya konsumsi ataupun tabungan.

Perekonomian dua sektor

$$Y = \frac{1}{(1-c)}(C_0 + I)$$

Perekonomian tiga sektor

$$Y = \frac{1}{(1-c)}(C_0 - cTx + cTr + I + G)$$

Perekonomian empat sektor

$$Y = \frac{1}{(1-c)}(C_0 - cTx + cTr + I + G + X + M)$$

PERTANYAAN UNTUK LATIHAN

SOAL LATIHAN PILIHAN BERGANDA

1. Besarnya pengeluaran konsumsi seorang konsumen pada saat konsumen tersebut tidak memiliki pendapatan, merupakan pengertian dari:
 - a. *autonomous consumption*
 - b. *marginal propensity to consume*
 - c. *consumption multiplier*
 - d. *equilibrium consumption*
 - e. *inflationary gap*
2. Apabila permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat, maka akan terjadi kenaikan harga sehingga perekonomian mengalami:
 - a. *inflationary gap*

- b. *deflationary gap*
 - c. *equilibrium*
 - d. *budget defisit*
 - e. *excess supply*
3. *Disposable income* merupakan:
- a. pendapatan setelah ditambah dengan hutang
 - b. pendapatan bersih setelah dikalikan persentase pajak
 - c. pendapatan setelah dikurangi pajak dan ditambah transfer
 - d. pendapatan setelah dikurangi pajak dan transfer
 - e. pendapatan yang diperoleh dari bunga tabungan atau deposito
4. Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak *lump-sum* dan pajak *built-in stabilizer*. Pajak *lump-sum* adalah:
- a. pajak yang nilainya ditentukan oleh besarnya pendapatan
 - b. pajak yang dibebankan pada pembelian barang mewah
 - c. pajak yang nilainya ditentukan oleh besarnya konsumsi
 - d. pajak yang nilainya tidak ditentukan oleh besarnya pendapatan
 - e. pajak atas penjualan barang mewah
5. Dalam kondisi keseimbangan, $(S - I)$ merupakan surplus sektor swasta dan $G - Tx + Tr$ merupakan:
- a. pengeluaran konsumen dan sektor swasta
 - b. defisit anggaran belanja
 - c. penerimaan pemerintah dan konsumen dari bunga
 - d. surplus anggaran pemerintah
 - e. keseimbangan konsumen, produsen, dan pemerintah

SOAL LATIHAN ESSAY

1. Diketahui data hipotetis dari suatu perekonomian adalah sebagai berikut:
- Fungsi konsumsi per tahun
 $C = 0,75 Y + 20.000,-$
 Investasi per tahun:
 $I = Rp40.000,-$
- Dari data sederhana tersebut, hitunglah:
- a. Pendapatan nasional keseimbangan pendekatan pengeluaran
 - b. Pendapatan nasional keseimbangan pendekatan injeksi-kebocoran.
 - c. Konsumsi dan tabungan keseimbangan
 - d. Buatlah grafiknya.

2. Dengan menggunakan fungsi konsumsi soal no. 1 diatas, investasi tahun berikutnya berubah menjadi Rp65.000,-. Jawablah soal berikut ini:
 - a. Dengan menggunakan angka pengganda, hitunglah pendapatan nasional keseimbangan yang baru.
 - b. Konsumsi dan tabungan keseimbangan yang baru

3. Pada saat pendapatan nasional pertahunnya Rp1.00,- pengeluaran konsumsinya Rp90,- per tahun. Setelah pendapatan nasional naik sebesar Rp20,-, pengeluaran konsumsinya menjadi Rp105,-.

Dari data tersebut, hitunglah:

 - a. Tentukan fungsi konsumsinya
 - b. BEP (*break even point*) tercapai pada tingkat pendapatan nasional sebesar berapa.

4. Suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka memiliki data sebagai berikut:

Fungsi konsumsi	$C = 45 + 0,65 Y_d$
Investasi pemerintah	$I_G = 15$
Investasi swasta	$I_P = 25$
Pengeluaran pemerintah	$G = 65$
Ekspor	$X = 25$
Impor	$M = 30 + 0,45 Y_d$
Transfer	$Tr = 5$
Tax	$T_x = 3 - 0,15Y$

Dari data diatas, hitunglah:

 - a. Hitunglah pendapatan nasional keseimbangan
 - b. Hitunglah impor keseimbangan
 - c. Buatlah kurvanya

5. Apa perbedaan antara pendapatan nasional bruto dan produk domestik bruto. Untuk Indonesia, mana yang lebih besar.

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Dilihat dari pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), variabel apa saja yang seharusnya lebih dirangsang untuk meningkatkan pendapatan nasional Indonesia? Mengapa variabel tersebut yang dipilih, jelaskan alasannya!
2. Dilihat dari indikator makro ekonomi, kondisi perekonomian seperti saat ini Indonesia mengalami *inflationary gap* atau *deflationary gap*. Jelaskan alasannya!

4

TEORI KONSUMSI

1. Konsep Konsumsi
2. Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi
3. Teori Konsumsi
4. Faktor Lain yang Berpengaruh terhadap Konsumsi

KONSEP KONSUMSI

Konsumsi merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Sedangkan menurut Drahm Bannoch, konsumsi yaitu merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (dalam satu tahun) pengeluaran.

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumption*. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi (Dumairy, 2004). Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (pendapatan disposabel) perekonomian tersebut.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI

Teori konsumsi merupakan suatu bentuk refleksi dari perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang menentukan tingkat konsumsi untuk barang normal, yaitu:

- a. Pendapatan konsumen
- b. Tingkat harga
- c. Tingkat bunga
- d. Sosial ekonomi
- e. Selera
- f. Lain-lain

Faktor utama yang menentukan konsumsi seorang konsumen akan barang dan jasa adalah tingkat pendapatan konsumen tersebut. Tingkat pendapatan berpengaruh secara positif, dalam arti apabila pendapatan konsumen naik, maka pengeluaran konsumsinya juga akan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya. Perilaku ini terutama untuk barang normal atau barang yang perilakunya mengikuti hukum permintaan dan penawaran.

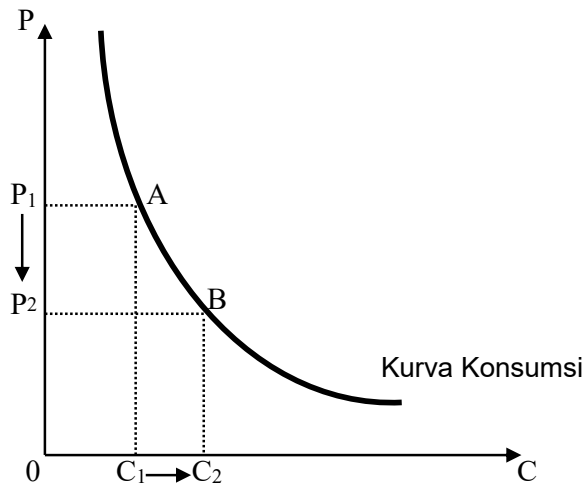
Pendapatan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu **pendapatan nominal** dan **pendapatan riil**. Pendapatan nominal merupakan pendapatan yang konsumen terima dalam jumlah nominal (nilai yang tercantum pada uang). Sedangkan pendapatan riil merupakan pendapatan yang jumlahnya telah dideflasikan dengan perubahan harga barang dan jasa. Pendapatan riil dapat dihitung dengan cara membagi pendapatan nominal dengan indeks harga barang dan jasa (indeks harga konsumen). Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_r = \frac{Y_n}{IHK}$$

Y_r : pendapatan riil
 Y_n : pendapatan nominal
 IHK : indeks harga konsumen

Pendapatan riil merupakan indikator yang paling realistis digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan seorang konsumen, karena dalam pendapatan riil telah memperhitungkan kenaikan ataupun penurunan harga.

Tingkat harga barang dan jasa di pasar juga menentukan pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Hal ini berkaitan dengan pendapatan riil yang diterima oleh konsumen tersebut. Secara nominal, pendapatan konsumen mungkin sama setiap periodenya akan tetapi apabila harga mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, maka hal ini akan mengakibatkan menurunnya daya beli seseorang. Dengan kata lain, tingkat harga berhubungan negatif dengan pengeluaran konsumsi. Apabila harga mengalami kenaikan, maka pengeluaran konsumsi akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Secara grafis, hubungan antara tingkat harga dan pengeluaran konsumsi dapat dijelaskan sebagai berikut:



Kurva 4.1. Hubungan Antara Konsumsi dan Tingkat Harga

Sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga barang dan jasa sedangkan sumbu horizontal menunjukkan tingkat pengeluaran konsumsi konsumen. Pada saat harga sebesar OP_1 , pengeluarannya OC_1 . Apabila terjadi penurunan harga menjadi OP_2 , maka pengeluarannya akan mengalami peningkatan menjadi OC_2 . Dari Kurva 4.1. di atas dapat dilihat hubungan berkebalikan (negatif) antara tingkat harga dan pengeluaran konsumsi.

Tingkat bunga, terutama bunga simpanan, juga mempengaruhi pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Apabila tingkat bunga tinggi, konsumen cenderung untuk tidak membelanjakan uangnya dan lebih suka untuk menyimpan uangnya di bank. Hal ini dikarenakan konsumen tidak menginginkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan bunga dari uang yang dimilikinya. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat suku bunga rendah, maka konsumen cenderung untuk tidak menyimpan uangnya dan membelanjakannya untuk membeli barang dan jasa.

Selain faktor ekonomi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi pengeluaran konsumen dan jenis barang yang dibelinya. Seorang konsumen yang tinggal di lingkungan sederhana, pengeluarannya cenderung lebih rendah daripada konsumen yang tinggal di lingkungan yang lebih mewah. Kondisi psikologis ini mempengaruhi konsumen dalam membeli jenis barang yang tidak begitu diperlukannya. Selain itu kondisi geografis, seperti iklim dan cuaca juga mempengaruhi pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Konsumen yang tinggal di daerah pegunungan dengan iklim dingin dan jauh dari pusat kota, harus mengeluarkan konsumsi yang lebih besar, misalnya untuk biaya transportasi dan konsumsi untuk menahan hawa dingin, dibandingkan dengan konsumen yang tinggal di dekat pusat kota.

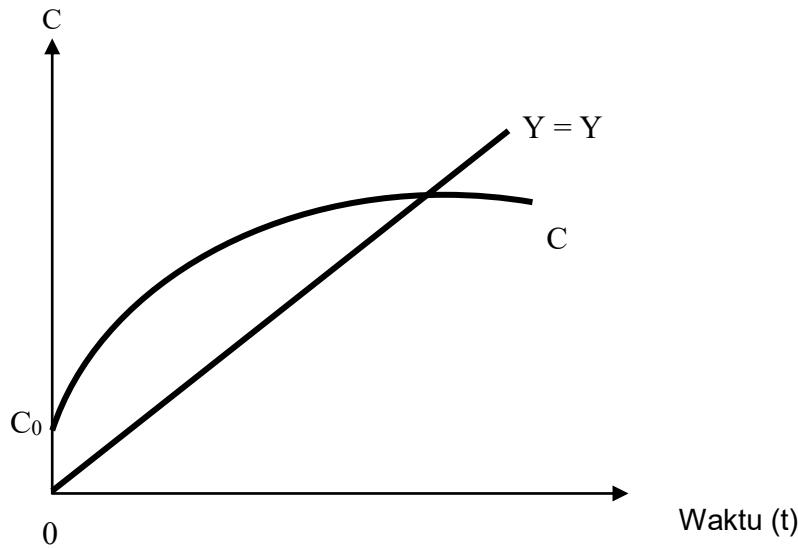
TEORI KONSUMSI

Ada beberapa teori konsumsi yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsumen berperilaku dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Secara garis besar, ada empat teori konsumsi, yaitu **teori konsumsi Keynes, teori hipotesis pendapatan permanen, hipotesis pendapatan relatif, dan teori konsumsi daur hidup.**

Teori Konsumsi Keynes

Menurut Keynes konsumsi saat ini amat sangat dipengaruhi oleh *disposable income* saat ini, bukan akumulasi dari pendapatan yang lalu maupun masa depan. Konsumsi akan sangat bergantung pada pendapatan yang dimilikinya. Meskipun demikian manusia akan tetap memenuhi kebutuhannya meskipun tidak memiliki pendapatan. Oleh karena itu Keynes menjadikan batas minimal konsumsi ini bukan 0 melainkan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai manusia. Sedangkan apabila pendapatan *disposable*-nya meningkat maka konsumsinya akan meningkat meski tidak sama dengan pendapatannya. Bunyi teori Keynes adalah:

“ pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin banyak tingkat konsumsinya pula, dan tingkat tabungannya pun akan semakin bertambah. Dan sebaliknya apabila tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi sehingga tingkat tabungannya nol”



Kurva 4.2. Teori Konsumsi Keynes

Menurut Keynes, kurva konsumsi berbentuk garis lengkung dan memotong sumbu vertikal. Apabila menggambarkan kurva konsumsi berbentuk garis lurus, hal itu hanyalah untuk penyederhanaan saja. Berpotongan dengan sumbu vertikal berarti bahwa nilainya pasti positif dan dalam bentuk persamaan, perpotongan ini disimbolkan C_0 .

Hipotesis Pendapatan Permanen

Teori konsumsi hipotesis pendapatan permanen (*permanent income hypothesis*) dikemukakan oleh Milton Friedman dalam bukunya *A Theory of Consumption Function*. Menurut Friedman, pendapatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Pendapatan permanen (*permanent income*)
- b. Pendapatan sementara (*transitory income*)

Pendapatan permanen merupakan bentuk pendapatan yang di terima secara periodik dan jumlahnya dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan gaji. Pendapatan sementara merupakan bentuk pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pendapatan sementara ini bisa berbentuk **tambahan** (bonus dan menang lotre) ataupun berbentuk **pengurangan**, misalnya biaya pengobatan sakit yang tiba-tiba pada pendapatan permanen. Pengeluaran konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pendapatan permanen secara proporsional. Apabila terjadi kenaikan pendapatan sementara yang positif (*positive transitory income*), maka pengeluaran konsumsinya juga akan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya.

Dengan menggunakan asumsi bahwa konsumen bersikap rasional dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh semasa hidupnya diantara kurun waktu

yang dihadapinya serta menghendaki pola konsumsi yang kurang lebih merata dari waktu ke waktu. Menurut teori ini, konsumsi permanen seorang konsumen mempunyai hubungan yang positif dan proporsional dengan pendapatannya. Dalam bentuk persamaan dapat dituliskan:

$$C_p = k Y_p$$

C_p : konsumsi permanen
 Y_p : pendapatan permanen
 k : angka konstan

k atau angka konstan menunjukkan bagian atau proporsi pendapatan permanen yang dikonsumsi yang nilainya antara nol sampai satu ($0 < k < 1$). Nilai k ini relatif stabil dan merupakan fungsi dari suku bunga (r), kesukaan konsumen (u), dan rasio antara kekayaan manusiawi dan kekayaan non manusiawi (w). Hubungan ini dapat dituliskan:

$$k = f(r, u, w)$$

Hipotesis Pendapatan Relatif

Teori konsumsi hipotesis pendapatan relatif dikemukakan oleh James Duesenberry dalam bukunya *Income, Saving and The Theory of Consumer Behavior* (1949). Menurut teori ini, pola konsumsi seseorang ditentukan oleh 2 hal yaitu

1. Pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya

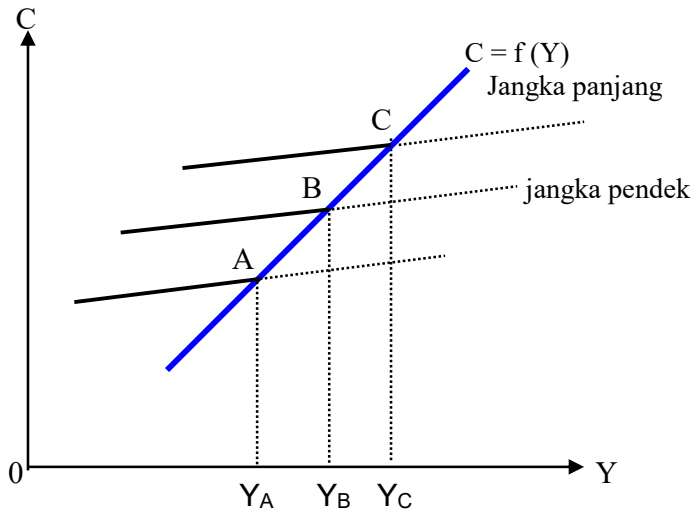
Apabila pendapatan berkurang pada periode tertentu, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran konsumsi, untuk menutupnya, mereka mengurangi tabungannya. Dalam jangka panjang konsumsi berubah secara proporsional dengan pendapatan, akan tetapi dalam jangka pendek konsumsi berubah dalam proporsi yang lebih kecil dari perubahan pendapatan.

2. Kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal

Selain tingkat pendapatan, kondisi lingkungan disekitar tempat tinggal konsumen juga mempengaruhi pola konsumsi seorang konsumen. Seseorang akan selalu berusaha hidup seperti tetangganya, maka ketika pendapatan turun, maka orang tersebut tidak akan menurunkan konsumsinya seperti apabila pendapatannya naik, tetapi akan mempertahankan tingkat konsumsinya tidak terlalu jauh dengan tingkat konsumsi tertinggi yang pernah dicapainya.

Pola konsumsi jangka pendek akan menunjukkan hubungan tingkat konsumsi dan pendapatan, tetapi dalam jangka panjang konsumsi akan berubah secara proporsional dengan perubahan pendapatan. Bila kurva konsumsi jangka pendek digambarkan bersamaan dengan kurva konsumsi jangka panjang, bentuknya akan menyerupai gergaji. Teori Duesenberry tentang efek lingkungan tempat tinggal konsumen terhadap pola konsumsi ini disebut juga dengan “*ratchet effect*” atau efek

gaji dan hipotesisnya disebut dengan hipotesis pendapatan relatif. Bentuk kurva teori Duesenberry ini adalah sebagai berikut:



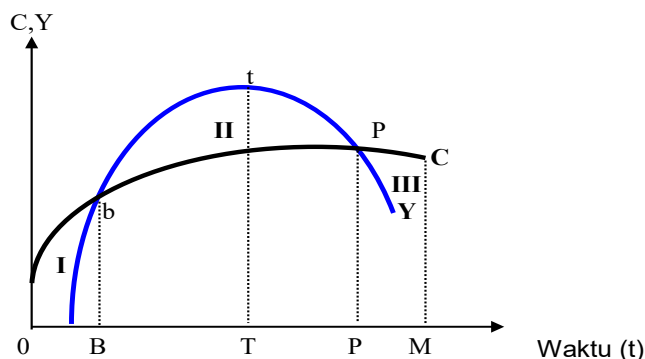
Kurva 4.3 Teori Konsumsi Hipotesis Pendapatan Relatif

Tingkat pendapatan awal adalah sebesar OY_A kemudian mengalami peningkatan sehingga konsumsi akan meningkat pula pada proporsi yang sama dari A ke B di sepanjang kurva konsumsi jangka panjang. Apabila pendapatan turun, konsumen tidak akan menurunkan konsumsinya melalui fungsi konsumsi jangka panjang ke A, tetapi penurunannya melalui titik B. Bila pendapatannya naik lagi, konsumen tidak akan meningkatkan konsumsinya secara proporsional, tetapi justru bergerak dari C ke B untuk mengembalikan tabungannya yang diambil selama pendapatannya turun. Jika pendapatannya masih meningkat, barulah konsumen akan meningkatkan konsumsinya sebanding dengan meningkatnya pendapatan. Dengan demikian terjadilah efek gergaji seperti gambar di atas.

Hipotesis Siklus Hidup

Teori konsumsi siklus hidup atau *life cycle* dikemukakan oleh A. Ando, R. Brumberg dan F. Modigliani. Teori ini mencoba menjelaskan tentang perilaku konsumsi seseorang berdasarkan pada umur dalam siklus hidupnya. Secara umum, siklus hidup seseorang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

- Usia 0 – 15 tahun : usia belum produktif
- Usia 16 – 60 tahun : usia produktif
- Di atas 60 tahun : usia tidak produktif



Kurva 4.4 Teori Konsumsi Hipotesis Daur Hidup

Sumbu vertikal menunjukkan pengeluaran konsumsi (C) dan besarnya pendapatan (Y) sedangkan sumbu horizontal menunjukkan fungsi dari waktu. Y merupakan kurva pendapatan dan C merupakan kurva konsumsi. Pada siklus I, dimulai dari usia nol tahun, setelah dilahirkan, seseorang membutuhkan pengeluaran untuk konsumsi, seperti untuk susu, pakaian, biaya dokter, dan makanan tambahan. Di sisi lain, pada masa ini, pendapatan nol sehingga pengeluaran lebih besar daripada pendapatan sehingga terjadi *dissaving*. Setelah melalui tahap B dimana orang tersebut sudah memasuki usia produktif dan memasuki fase angkatan kerja (*labor force*) sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Pada tahap II ini orang tersebut telah dapat membiayai konsumsinya dan dapat menabung (*saving*) apabila pendapatan lebih besar daripada konsumsinya. Seiring dengan waktu, tingkat pendapatan meningkat sampai dengan puncaknya di titik t dan setelah itu mengalami penurunan sampai akhirnya mencapai tahap III. Pada tahap III ini, orang tersebut kembali mengalami *dissaving* karena memasuki usia non-produktif.

Dalam model analisisnya, teori ini menggunakan asumsi bahwa konsumen bersikap rasional. Artinya konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan dari aliran pendapatan yang diterimanya selama fase tertentu dengan batasan anggaran (*budget constraint*).

Sumber pendapatan menurut Ando-Brumberg-Modigliani dibedakan menjadi dua sumber pendapatan, yaitu:

1. **Tenaga kerja** sebagai sumber *labor income*
2. **Kekayaan** sebagai sumber *property income*

Dari dua sumber pendapatan tersebut, dapat dibuat suatu fungsi konsumsi sebagai berikut:

$$C_t = cY_t^L + cA_t$$

- C : jumlah pengeluaran konsumsi
 Y_t^L : *labor income* atau pendapatan dari tenaga kerja
A : kekayaan bersih konsumen
c : *marginal propensity to consume*
t : waktu

Teori Konsumsi Gossen

Menurut Gossen, terdapat dua asumsi yang mendasari seseorang untuk melakukan konsumsi, yaitu konsumsi vertikal dan konsumsi horizontal. Konsumsi vertikal adalah ketika seseorang memprioritaskan pemenuhan suatu kebutuhan pada level tertinggi sehingga ketika hal itu tercapai, maka akan menimbulkan kepuasan yang tinggi pula. Hal ini berakibat kurangnya perhatian pada kebutuhan yang lain sehingga kebutuhan yang lain akan dianggap tingkat kepuasannya rendah. Sedangkan konsumsi horizontal adalah ketika seseorang memperhatikan semua kebutuhannya secara sama penting dan merata dengan memperhatikan sekaligus banyak kebutuhan. Sehingga seseorang tersebut berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya dan berusaha memperoleh tingkat kepuasan yang sama rata dengan semua jenis pemenuhan kebutuhan tersebut.

Kedua asumsi tersebut dapat melahirkan fungsi dan variabel konsumsi dalam ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan melalui contoh. Untuk konsumsi vertikal, misalnya ketika kita makan satu ayam goreng, akan terasa enak. Namun ketika Anda memakan ayam goreng kedua, Anda akan kehilangan perasaan yang sama seperti ketika memakan ayam goreng yang pertama. Dan ketika Anda memakan ayam goreng ketiga, Anda sudah tidak merasakan sama sekali rasa enak memakan ayam, bahkan justru bosan dan tidak mendapat kesenangan apapun. Hal ini sesuai dengan hukum Gossen I yang berbunyi “Jika pemenuhan satu kebutuhan dilakukan secara terus menerus, tingkat kenikmatan atas pemenuhan itu semakin lama akan semakin berkurang hingga akhirnya mencapai titik kepuasan tertentu”.

Kepuasan dari mengkonsumsi menurut Gossen, dapat digambarkan dengan menggunakan contoh sebagai berikut:

Minuman Gelas Ke	Total Kepuasan	Tambahan Kepuasan
0	0	0
1	30	30
2	50	20
3	65	15
4	65	0
5	55	-10
6	45	-20

Dari contoh tabel di atas dapat dilihat bahwa, pada saat orang tersebut belum mengkonsumsi minuman atau pada gelas ke nol, maka kepuasan total dan tambahan kepuasannya belum ada atau nol. Pada saat orang tersebut sangat haus dan meminum pada gelas pertama, maka kepuasan yang diperoleh sangat tinggi yaitu 30 unit, begitu juga tambahan kepuasannya. Apabila orang tersebut menambah minuman gelas kedua, maka kepuasan totalnya akan bertambah dari 30 menjadi 50, akan tetapi tambahan kepuasan dari mengkonsumsi gelas kedua adalah turun dari 30 menjadi 20. Tingkat kepuasan total akan tercapai pada gelas ke-4, di mana total kepuasannya

adalah 45 dan tambahan kepuasannya adalah nol. Tambahan konsumsi pada gelas berikutnya akan mengakibatkan kepuasan totalnya menurun dari 65 menjadi 55 dan tambahan kepuasannya negatif. Artinya setelah gelas keempat dikonsumsi, orang tersebut sudah tidak lagi mendapat kepuasan dari konsumsi tersebut.

Dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa bila jumlah barang yang dikonsumsi pada waktu tertentu terus ditambah, maka guna total yang diperoleh akan bertambah, tetapi guna marginal akan semakin berkurang. Bahkan bila konsumsi terus dilakukan, guna total akan menurun dan guna marginal menjadi nol, bahkan di bawah nol atau negatif.

FAKTOR LAIN YANG BERPENGARUH TERHADAP KONSUMSI

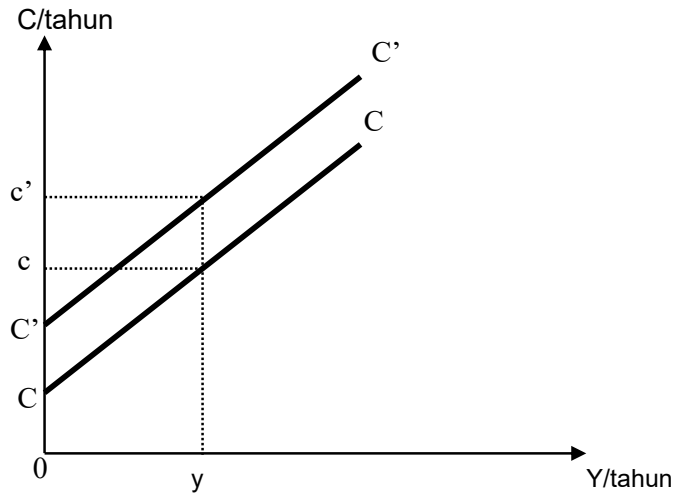
Adanya anggapan bahwa pengeluaran konsumsi ditentukan oleh pendapatan hanyalah bersifat untuk penyederhanaan analisis. Dalam kenyataannya, pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh faktor yang bersifat ekonomi, sosial, dan budaya. Selain lima faktor yang telah dibahas di awal bab ini, ada beberapa faktor yang ikut menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi suatu masyarakat, yaitu:

- a. Distribusi pendapatan nasional
- b. Jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk alat likuid
- c. Banyaknya barang konsumsi tahan lama
- d. Kebijakan finansial perusahaan
- e. Kebijakan pemasaran suatu perusahaan
- f. Ramalan masyarakat akan perubahan harga di masa datang

Distribusi Pendapatan Nasional

Apabila besarnya MPC seluruh masyarakat sama, maka bagaimanapun distribusi pendapatan tidak akan berpengaruh terhadap fungsi konsumsi masyarakat tersebut. Dalam kenyataannya tidak ada satu negarapun di dunia ini yang distribusi pendapatannya sama dan merata antar penduduk. Biasanya penduduk yang berpendapatan tinggi MPC nya lebih rendah daripada penduduk yang berpendapatan rendah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang bertujuan pemerataan distribusi pendapatan akan mengakibatkan **naiknya** MPC masyarakat.

C merupakan kurva konsumsi sebelum adanya kebijakan distribusi pendapatan dan C' adalah kurva konsumsi setelah kebijakan distribusi pendapatan. Dengan tingkat pendapatan nasional sebesar y pengeluaran konsumsi masyarakat sebelum kebijakan distribusi pendapatan adalah Oc dan setelah kebijakan distribusi pendapatan adalah Oc' . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk pemerataan distribusi pendapatan, dapat dicapai dengan menggunakan sistem *pajak progresif*.



Kurva 4.5. Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi

Jumlah Kekayaan Masyarakat dalam Bentuk Alat Likuid

Dengan asumsi tingkat pendapatan sama, semakin banyak alat likuid yang ada dalam masyarakat, maka semakin besar pengeluaran konsumsi masyarakat tersebut dibandingkan dengan keadaan masyarakat yang memiliki alat likuid lebih sedikit. Secara psikologis, kekayaan yang dipegang dalam bentuk likuid akan mendorong orang tersebut dalam melakukan konsumsi, sebaliknya semakin tidak likuid kekayaan yang dimiliki, maka semakin rendah hasrat orang untuk melakukan konsumsi.

Pada saat orang memegang uang tunai, orang akan lebih terdorong untuk membelanjakan uang tersebut untuk melakukan konsumsi dibandingkan apabila orang tersebut memiliki aset dalam bentuk yang kurang atau tidak likuid, misalnya dalam bentuk tabungan, emas, rumah, atau tanah. Hal ini dikarenakan untuk melakukan konsumsi, orang tersebut harus mencairkan kekayaannya dalam bentuk aset likuid yaitu uang, sehingga dapat membelanjakannya.

Dalam perkembangan sektor keuangan, memungkinkan aset yang kurang likuid menjadi lebih likuid sehingga orang tersebut terdorong untuk melakukan konsumsi. Misalnya dengan adanya kartu kredit, kartu debit, dan bentuk lainnya yang lebih memudahkan untuk melakukan transaksi, meskipun sifat likuiditasnya tidak sefleksibel uang tunai.

Banyaknya Barang Konsumsi Tahan Lama

Kepemilikan barang-barang tahan lama (*consumers durables*) akan mempengaruhi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi. Barang tahan lama seperti mobil, vcd, lemari es, rumah, dan lain-lain. Pengaruh kepemilikan barang tahan lama terhadap pengeluaran konsumsi adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi pengeluaran masyarakat

sebagai contoh adalah kepemilikan vcd yang dapat mengurangi pengeluaran masyarakat untuk menonton film di bioskop.

b. Menambah pengeluaran masyarakat

sebagai contoh adalah kepemilikan mobil. Semakin banyak memiliki mobil, maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan, pajak, bensin, dan asuransi.

c. *Consumers durables* biasanya harganya relatif mahal

Biasanya jenis barang tahan lama harganya relatif lebih mahal daripada barang tidak tahan lama. Harga rumah, mobil dan perabot rumah biasanya lebih mahal harganya bila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi untuk makan.

Kebijakan Finansial Perusahaan

Untuk penjelasan kasus ini diambil contoh seseorang yang memiliki saham. Pendapatan seseorang dari kepemilikan saham adalah berupa dividen dari perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Pendapatan orang tersebut tergantung pada kebijakan perusahaan dalam membayarkan dividen yang dibagikan kepada pemilik saham. Bagi orang tersebut, kebijakan perusahaan akan mempengaruhi pola pendapatannya yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsi orang tersebut.

Kebijakan Pemasaran Suatu Perusahaan

Untuk meningkatkan pemasaran suatu produk, banyak cara dapat ditempuh oleh perusahaan, diantaranya dengan iklan yang menarik, distribusi yang efisien, dan pemberian bonus. Keberhasilan suatu perusahaan dalam memasarkan produknya akan mempengaruhi pola konsumsi seseorang.

Ramalan Masyarakat akan Perubahan Harga di Masa Datang

Harapan konsumen mengenai perubahan harga di masa yang akan datang sangat berpengaruh dalam pola pengeluaran konsumsi. Apabila konsumen memperkirakan akan terjadi kenaikan harga di masa yang akan datang, maka konsumen tersebut akan meningkatkan permintaannya atas barang dan jasa tersebut melebihi yang dibutuhkan walaupun pendapatannya tetap. Sebaliknya apabila konsumen memperkirakan akan terjadi penurunan harga di masa datang, maka konsumen tersebut akan menunda untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan.

ISTILAH PENTING BAB INI

Pendapatan riil	<i>Negative transitory income</i>
Pendapatan nominal	<i>Ratchet effect</i>
Indeks harga konsumen (IHK)	<i>Labor income</i>
<i>Permanent income</i>	<i>Budget constraint</i>
Transitory income	Hipotesis siklus hidup
Positive transitory income	

RANGKUMAN

1. Konsumsi merupakan pengeluaran konsumen untuk membeli barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang menentukan konsumsi seseorang, diantaranya yaitu pendapatan konsumen, tingkat harga, tingkat bunga, kondisi sosial ekonomi, dan selera.
2. Ada beberapa teori konsumsi, yaitu teori konsumsi Keynes, teori hipotesis pendapatan permanen, hipotesis pendapatan relatif, dan teori konsumsi daur hidup. Seluruh teori beranggapan bahwa pengeluaran konsumsi seseorang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima.
3. Selain lima faktor penentu konsumsi yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi pengeluaran konsumsi suatu masyarakat, yaitu: distribusi pendapatan nasional, jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk alat likuid, banyaknya barang konsumsi tahan lama, kebijakan finansial perusahaan, kebijakan pemasaran suatu perusahaan, dan ramalan masyarakat akan perubahan harga di masa datang.

PERTANYAAN UNTUK LATIHAN

SOAL LATIHAN PILIHAN BERGANDA

1. Jenis pendapatan yang jumlahnya telah dideflasikan dengan perubahan harga barang dan jasa adalah:
 - a. pendapatan permanen
 - b. pendapatan riil
 - c. pendapatan sementara
 - d. pendapatan nominal
 - e. pendapatan rata-rata

2. Hubungan antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan nasional yang dinyatakan dalam **tingkat harga konstan**, merupakan teori konsumsi menurut:
 - a. teori hipotesis pendapatan permanen
 - b. teori Keynes
 - c. teori konsumsi daur hidup
 - d. teori konsumsi pendapatan relatif
 - e. teori Duesenberry

3. “*Ratchet effect*” atau efek gergaji merupakan pola konsumsi jangka panjang yang dikemukakan oleh:
 - a. teori hipotesis pendapatan permanen
 - b. teori Keynes
 - c. teori konsumsi daur hidup
 - d. teori konsumsi pendapatan relatif
 - e. teori Duesenberry

4. Berikut ini termasuk *positive transitory income*, kecuali:
 - a. biaya rumah sakit
 - b. hadiah undian
 - c. bonus penjualan
 - d. biaya kecelakaan
 - e. jawaban a dan d benar

5. Masa dimana dalam siklus hidup seseorang mengalami *dissaving* adalah:
 - a. 0 tahun – 15 tahun
 - b. 15 tahun – 60 tahun
 - c. 60 tahun ke atas
 - d. jawaban a dan c benar
 - e. jawaban a dan benar

SOAL LATIHAN ESSAY

1. Jelaskan perbedaan konsumsi menurut Keynes dan Duesenberry!
2. Adakah perbedaan pola konsumsi masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan? Jelaskan!
3. Jelaskan hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan inflasi!
4. Jelaskan bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan mempengaruhi pola pengeluaran konsumsi seseorang!
5. Jelaskan hubungan antara pengeluaran konsumsi dengan kepemilikan barang tahan lama (*durables goods*)!

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Menurut Saudara, manakah dari teori konsumsi yang telah dibahas di bab ini yang paling sesuai dengan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia saat ini. Jelaskan alasan Saudara!
2. Ada lima faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu pendapatan konsumen, tingkat harga, tingkat bunga, kondisi sosial ekonomi, dan selera. Menurut saudara, faktor mana yang paling berpengaruh secara signifikan dalam menentukan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia?
4. Adakah perbedaan perilaku dalam berkonsumsi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah berkaitan dengan kondisi tingginya suku bunga bank?
5. Diskusikan dalam hal perkembangan sektor keuangan yang memudahkan orang untuk melakukan transaksi dengan perilaku konsumen seseorang!
6. Bagaimana mengatur pola konsumsi terkait pendapatan yang dimiliki agar pola konsumsi dapat berperilaku sesuai dengan keterbatasan pendapatan?

5

TEORI INVESTASI

1. Konsep Dasar Investasi
2. Faktor Penentu Investasi
3. Pasar Saham dan Investasi
4. Metode Analisis Kelayakan Investasi
5. Manfaat Studi Kelayakan Bisnis
6. Analisis Profitabilitas

KONSEP DASAR INVESTASI

Ada banyak pengertian tentang investasi, dalam teori ekonomi secara umum, investasi diartikan sebagai penanaman dalam bentuk barang modal riil maupun dalam bentuk surat berharga. Pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan juga didefinisikan sebagai investasi. Investasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang menunda konsumsi atau penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Selain itu, beberapa pendapat ahli terkait pengertian investasi adalah:

1. Investasi adalah pembelian oleh perorangan atau institusi yang berhubungan dengan keuangan atau kepemilikan yang menghasilkan pengembalian yang sepadan karena mengambil risiko selama periode atau waktu yang panjang
2. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk penyelenggaraan kegiatannya, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran tersebut dapat berupa pengeluaran untuk pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin untuk produksi, dan bentuk pengeluaran lainnya
3. Investasi adalah suatu kegiatan yang menunda konsumsi/penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.
4. Investasi adalah penanaman dana dalam berbagai jenis portofolio surat berharga.
5. Investasi adalah penggunaan untuk objek-objek tertentu dengan tujuan bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu investasi akan meningkat, paling tidak bertahan dan selama jangka waktu itu pula memberikan hasil secara teratur.

Ada beberapa bentuk investasi yang dibedakan dalam berbagai bentuknya, yaitu:

1. Investasi tetap perusahaan
2. Perubahan persediaan
3. Investasi perumahan
4. Sekuritas
5. Emas
6. Deposito dan Tabungan

Investasi Tetap Perusahaan

Investasi tetap perusahaan dapat berupa mesin, peralatan pendukung produksi, bangunan kantor dan pabrik. Investasi tetap perusahaan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk aset tetap yang bersifat jangka panjang. Untuk itu, perusahaan harus mempertimbangkan secara cermat seberapa besar dana yang harus diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap ini. Apabila dana yang dibutuhkan untuk aktiva tetap ini sangat besar, maka akan lebih baik apabila perusahaan mempertimbangkan dengan

cara menyewa, misalnya menyewa gedung kantor ataupun pabrik dalam jangka waktu tertentu.

Perlu diperhitungkan stok barang modal yang diinginkan (*desire capital stock*) agar perusahaan dapat menentukan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk aktiva tetap tersebut dengan tingkat pengembaliannya. Stok barang modal yang diinginkan merupakan jumlah modal yang ingin dimiliki oleh perusahaan dalam jangka panjang, jika perusahaan tidak memperhitungkan penundaan yang mereka hadapi dalam menyesuaikan penggunaan modal mereka.

Perubahan Persediaan

Pengertian investasi juga berkaitan dengan perubahan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Perubahan persediaan tersebut dapat berupa perubahan persediaan bahan baku, perubahan kepemilikan barang setengah jadi, dan perubahan barang jadi yang disimpan perusahaan untuk dijual pada waktu tertentu. Perusahaan biasanya memiliki persediaan yang disimpan untuk memenuhi permintaan yang akan meningkat di masa yang akan datang. Persediaan ini perlu dilakukan karena bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang akhir belum tentu selalu tersedia di pasar, selain itu harganya pun kadang berfluktuasi. Apabila perusahaan mengandalkan bahan baku utama pada persediaan di pasar, sementara ketersediaan bahan baku itu memiliki ketidakpastian, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperkirakan biaya produksi yang dibutuhkan.

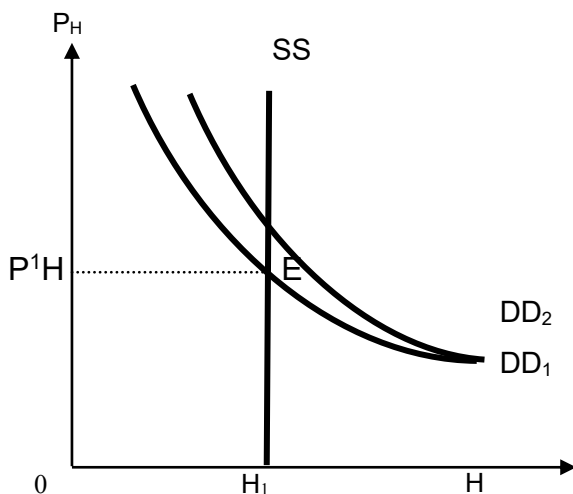
Jumlah persediaan perusahaan dipengaruhi oleh **faktor internal** maupun **faktor eksternal**. Faktor internal dapat berupa kapasitas gudang penyimpanan yang dimiliki perusahaan, gudang pengawet (bila produk tidak tahan lama), dan tenaga pengelola persediaan. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa ketersediaan bahan baku di pasar, fluktuasi harga bahan baku, dan ketidakpastian terhadap musim (bila produk pertanian).

Perusahaan akan membandingkan antara biaya persediaan dengan spekulasi menguntungkan ketersediaan bahan baku di pasar. Memiliki persediaan yang besar berarti perusahaan harus menginvestasikan sebagian modalnya dalam bentuk aktiva tidak lancar dan besarnya persediaan ini dipengaruhi tingkat suku bunga. Jumlah persediaan perusahaan biasanya akan mengalami penurunan apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikan.

Investasi Perumahan

Perumahan merupakan suatu aktiva atau harta yang umur ekonomisnya panjang, sehingga bentuk aktiva ini dapat digolongkan sebagai investasi. Perhatikan Kurva 5.1, stok perumahan diperlihatkan oleh kurva DD_1 yang memiliki kemiringan negatif, artinya semakin rendah harga perumahan (P_H) semakin besar kuantitas perumahan yang diminta. Permintaan perumahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, *pertama*, jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin besar jumlah kekayaan yang dimiliki, maka

semakin besar jumlah perumahan yang diminta atau dimiliki. Terjadinya tambahan kekayaan, akan menggeser kurva permintaan dari DD_1 ke DD_2 . *Kedua*, perubahan harga jenis investasi lain akan berpengaruh pada permintaan perumahan. Rendahnya harga obligasi akan mengalihkan orang untuk menginvestasikan hartanya ke bentuk perumahan karena *return* dari obligasi tidak menarik bagi pemilik kekayaan. *Ketiga*, tingkat **pengembalian riil neto** yang diperoleh dengan memiliki perumahan. Apabila tingkat keuntungan yang diterima dari investasi perumahan sangat rendah, maka orang enggan menginvestasikan hartanya dalam bentuk perumahan. Pengembalian bruto sebelum memperhitungkan biaya-biaya yang terdiri dari sewa (bila disewakan), hasil implisit yang diterima pemilik rumah apabila ditempati sendiri ditambah dengan keuntungan modal yang kemungkinan diterima bila rumah tersebut naik harganya. Sebaliknya biaya yang harus ditanggung oleh pemilik rumah terdiri dari biaya bunga, pajak, dan penyusutan. **Pengembalian bruto** dikurangi dengan biaya-biaya yang ditanggung merupakan pengembalian neto.



Kurva 5.1. Keseimbangan di Pasar Uang

Sekuritas

Sekuritas merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak milik kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari proseppek atau kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi untuk melaksanakan hak tersebut. Sekuritas dibagi menjadi 2 yaitu sekuritas saham dan obligasi.

Obligasi merupakan pernyataan utang dari pihak yang menerbitkan obligasi kepada pihak yang membeli atau pemegang obligasi tersebut. Dalam hal ini, penerbit obligasi harus memberikan bunga kepada pemegang obligasi sebesar *Coupon Rate* (CR) yang tercantum dalam obligasi tersebut, namun bunga yang dibayarkan tidak termasuk angsuran pelunasan. Pelunasan terhadap obligasi dilakukan setelah obligasi

jatuh tempo sebesar harga obligasi tersebut. Selain mengenai keterangan mengenai obligasi, di dalam obligasi juga termuat batasan-batasan hukum yang dilakukan oleh penerbit.

Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Misalnya saja pada obligasi pemerintah Amerika yang disebut “*U.S. Treasury securities*” diterbitkan untuk masa jatuh tempo 10 tahun atau lebih. Surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun disebut “surat utang” dan utang di bawah 1 tahun disebut “Surat Perbendaharaan. Di Indonesia, surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun yang diterbitkan oleh pemerintah disebut Surat Utang Negara (SUN) dan utang di bawah 1 tahun yang diterbitkan pemerintah disebut Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Selain SUN, di Indonesia sendiri pemerintah menerbitkan obligasi dalam bentuk lain yaitu

1. Obligasi Rekap, diterbitkan guna suatu tujuan khusus yaitu dalam rangka Program Rekapitalisasi Perbankan;
2. Surat Utang Negara (SUN), diterbitkan untuk membiayai defisit APBN;
3. Obligasi Ritel Indonesia (ORI), sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun dengan nilai nominal yang kecil agar dapat dibeli secara ritel;
4. Surat Berharga Syariah Negara atau dapat juga disebut “obligasi syariah” atau “obligasi sukuk”, sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun berdasarkan prinsip syariah.

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga investor memiliki hak suara untuk didengarkan dalam rapat tersebut. Keuntungan yang diperoleh karena membeli saham selain kepemilikan atas perusahaan adalah dividen dan *capital gain*.

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut untuk setiap saham yang dijualnya.

Tabungan dan Deposito

Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan.

Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu (tersedia pilihan antara satu, tiga, enam, dua belas, sampai dua puluh empat bulan, tetapi ada juga yang harian). Suku bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh tempo, uang tersebut tidak akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di bank.

Emas

Emas merupakan bentuk logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang fungsinya dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya sebagai perhiasan, penyimpan nilai, alat pembayaran, dan fungsi lain yang disepakati oleh pelaku ekonomi. Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran emas, dan juga dipengaruhi oleh ketersediaan emas di dunia. Dalam kaitannya dengan nilai mata uang, semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Seringkali kenaikan harga emas melampaui kenaikan inflasi itu sendiri.

Dalam melakukan investasi, ada lima prinsip dalam manajemen investasi yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Legalitas

Dalam melakukan investasi, legalitas merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh investor, karena hal ini berkaitan dengan jaminan keamanan dana yang ditanamkan. Misalnya investasi dalam bentuk investasi keuangan, aspek legalitasnya paling tidak berkaitan erat dengan apakah investasi tersebut sudah terdaftar dan memenuhi syarat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bila berkaitan dengan investasi fisik, hal yang terpenting apakah aktivitas investasi tersebut legal secara hukum yang berlaku.

2. Keamanan

Setelah prinsip legalitas, hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan investasi adalah masalah keamanan. Memang keamanan berkaitan erat dengan masalah legalitas, akan tetapi prinsip keamanan disini lebih diarahkan pada bagaimana keputusan investasi harus didasarkan pada analisis investasi yang memadai agar dana yang diinvestasikan terbatas dari risiko kerugian.

3. Likuiditas

Prinsip ketiga ini berkaitan dengan seberapa mudah suatu investasi dapat dicairkan kembali apabila dana yang telah diinvestasikan tersebut dibutuhkan bila sewaktu-waktu terdapat kejadian atau yang membutuhkan dana secara mendadak.

4. Keuntungan

Sumber dana investasi yang berasal dari dana pinjaman bank memiliki unsur biaya yang harus ditanggung, yaitu tingkat bunga pinjaman yang harus dibayarkan. Untuk itu, investasi yang dilakukan haruslah memberi keuntungan dalam tingkat paling tidak lebih besar dari tingkat suku bunga yang harus dibayarkan tersebut.

5. Kesesuaian

Pemilihan jenis dan bentuk investasi sebaiknya juga menyesuaikan dengan kesesuaian tujuan dari investor, baik investor secara perseorangan maupun perusahaan. Pemilihan bentuk investasi dalam perspektif jangka pendek maupun jangka panjang, tentunya juga harus disesuaikan dengan dana yang digunakan untuk investasi, dan ini yang dapat diperkirakan adalah investor itu sendiri.

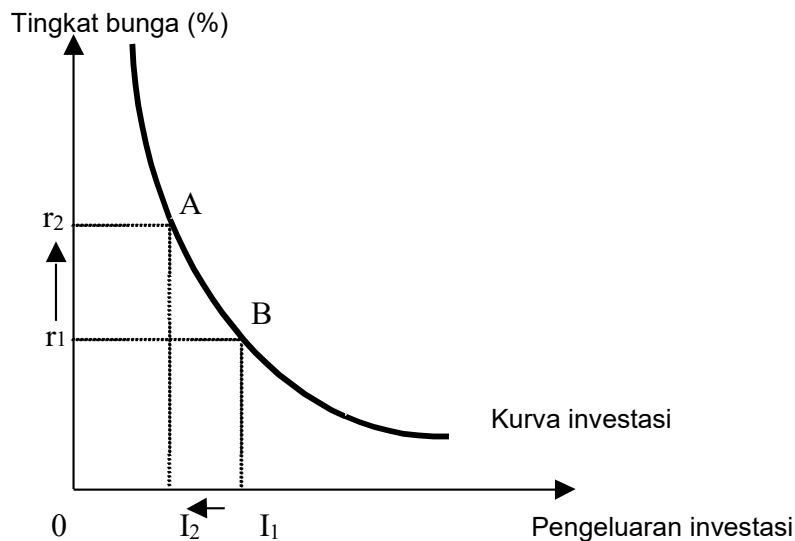
FAKTOR PENENTU INVESTASI

Dalam dunia nyata, ada banyak faktor yang mempengaruhi pengeluaran investasi, baik faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi. Stabilitas politik, corak kepemimpinan negara, dan kondisi sosial kemasyarakatan juga menentukan keputusan investor untuk melakukan investasi. Investor tidak akan menanamkan modalnya di negara yang kondisi stabilitas politiknya tidak stabil, begitu pula dengan corak kepemimpinan yang menimbulkan keraguan pada investor. Oleh karenanya, para ekonom setuju bahwa investasi merupakan indikator ekonomi yang paling sensitif terhadap perubahan dan kondisi sosio-ekonomi. Secara ekonomi, investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Tingkat bunga
- b. Prakiraan kondisi di masa yang akan datang
- c. Inovasi teknologi
- d. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat
- e. Tingkat keuntungan yang diharapkan
- f. Kondisi politik dan keamanan
- g. Kualitas sumber daya manusia
- h. Kebijakan ketenagakerjaan
- i. Pengaruh Nilai tukar
- j. Tingkat Inflasi

Tingkat bunga

Salah satu sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran investasinya yaitu pinjaman kepada bank. Biaya atas pinjaman pengusaha kepada bank dinilai dari besarnya suku bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada bank setiap periodenya. Pengusaha akan mempertimbangkan dan membandingkan beban bunga yang harus dibayarkannya dengan harapan keuntungan yang akan diperoleh dari investasi yang dilakukannya tersebut. Apabila tingkat suku bunga sedemikian tingginya, pengusaha akan menunda pinjaman tersebut sampai tingkat suku bunganya turun. Dengan kata lain terdapat hubungan berkebalikan antara tingkat suku bunga dengan pengeluaran investasi, yaitu semakin tinggi suku bunga pinjaman, maka semakin rendah keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Sebaliknya apabila tingkat suku bunga rendah, maka pengusaha akan meminjam dana dari bank untuk membiayai pengeluaran investasinya dengan harapan investasi tersebut menghasilkan keuntungan yang nilainya lebih besar daripada bunga yang harus ditanggungnya. Secara grafis, hubungan antara tingkat suku bunga dan pengeluaran investasi adalah sebagai berikut:



Kurva 5.2 Hubungan antara Investasi dan Suku Bunga

Pada saat tingkat suku bunga sebesar r_1 , pengeluaran konsumsi adalah I_1 . Pada saat tingkat suku bunga mengalami kenaikan menjadi r_2 , maka pengeluaran investasi akan mengalami penurunan menjadi I_2 . Tingginya tingkat suku bunga perbankan di suatu negara merupakan salah satu cerminan baiknya sistem perbankan di negara yang bersangkutan. Dengan tingginya tingkat suku bunga, akan berdampak pada rendahnya minat investor untuk melakukan investasi sehingga akan mengakibatkan kelesuan di sektor riil yang pada akhirnya mengurangi jumlah barang dan jasa yang

dihasilkan. Kondisi ini akan berdampak pada permasalahan ekonomi lainnya, yaitu inflasi yang disebabkan turunnya jumlah barang yang dihasilkan dan juga terjadinya pengangguran karena sektor riil mengalami kelesuan.

Kondisi ini pernah dialami oleh Indonesia pada saat krisis moneter tahun 1998 dan 1999 dengan suku bunga mencapai 35 persen. Pada saat itu, sektor riil mengalami kelesuan dan dampak yang jelas terjadi adalah pengangguran besar-besaran.

Prakiraan kondisi di masa yang akan datang

Prakiraan mengenai kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang sangat mempengaruhi keputusan seorang investor untuk melakukan investasi. Ketidakpastian mengenai kondisi di masa yang akan datang dapat menimbulkan risiko terhadap investasi karena investasi memiliki *gestation period* atau senjang waktu menunggu dari mulai menanamkan modal sampai dengan pengembalian modal tersebut.

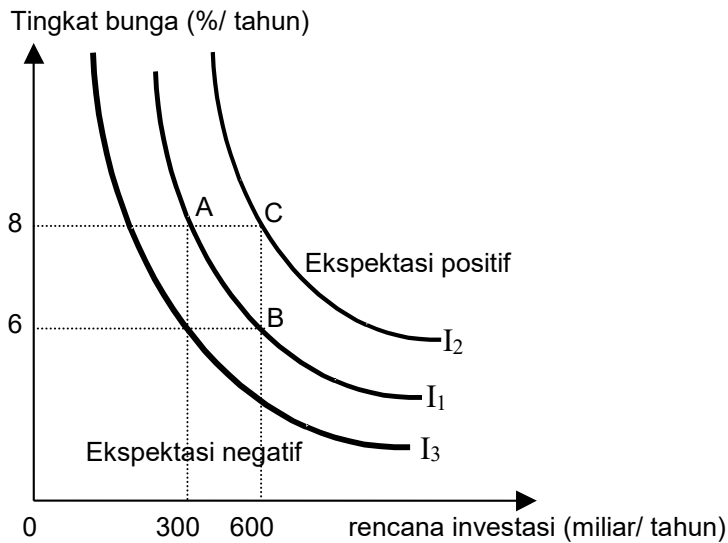
Investor tidak akan menanamkan modalnya pada saat terjadi kelesuan kegiatan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat. Menanamkan modal pada kondisi seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi atas pengembalian modalnya. Beberapa variabel yang perlu diperhitungkan mengenai prakiraan di masa datang diantaranya adalah: prakiraan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong naiknya daya beli.

Inovasi teknologi

Terjadinya penemuan teknologi baru dan penggunaan teknologi yang lebih maju merupakan faktor pendorong terjadinya investasi, karena investor menganggap penemuan teknologi dan terjadinya inovasi mampu meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya produksi. Dengan peningkatan produktivitas dan penurunan biaya produksi, maka tingkat pengembalian atas investasi diharapkan lebih tinggi daripada apabila proses produksi yang sama dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih sederhana.

Bila dilihat secara simultan, investasi dipengaruhi oleh harapan di masa datang, tingkat suku bunga, dan inovasi. Berubahnya ekspektasi investor akan menggeser kurva permintaan, di sisi lain perubahan tingkat suku bunga akan mengakibatkan pergeseran pada seluruh kurva investasi (dari I_1 ke I_2).

Dari Kurva 5.3 terlihat bahwa perubahan suku bunga dan ekspektasi investor akan mengakibatkan perubahan pada rencana investasi. I_1 menunjukkan bahwa pengeluaran investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, tanpa dipengaruhi oleh ekspektasi investor terhadap keuntungan di masa datang. Pada kondisi ini, terlihat bahwa rendahnya suku bunga akan mendorong terjadinya investasi, yaitu dengan membandingkan titik A dan titik B. Penurunan suku bunga dari 8 persen menjadi 6 persen akan mengakibatkan investasi mengalami kenaikan dari 300 menjadi 600.



Kurva 5.3 Keterkaitan Investasi, Ekspektasi, dan Suku Bunga

Kurva I_2 dan I_3 menunjukkan dampak perubahan ekspektasi investor pada pengeluaran investasi. Apabila ekspektasi investor positif terhadap keuntungan di masa datang, maka investor akan meningkatkan pengeluaran investasinya ke I_2 . Kenaikan pengeluaran investasi ini akan dibiayai dari meminjam dana untuk membiayai investasi tersebut, dan ini ditunjukkan dengan pergeseran dari I_1 ke I_2 . Sebaliknya apabila ekspektasi investor negatif terhadap keuntungan di masa datang, maka investor akan mengurangi atau paling tidak menahan investasinya dan ini ditunjukkan oleh pergeseran dari I_1 ke I_3 .

Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi besarnya pengeluaran investasi. Semakin meningkat tingkat kesejahteraan, maka semakin besar bagian dari kekayaannya yang digunakan untuk investasi. Ada beberapa pilihan bentuk investasi yang tersedia, yaitu investasi dalam bentuk perumahan, tanah, saham, tabungan ataupun deposito. Masing-masing bentuk investasi akan memberikan tingkat pengembalian yang berbeda-beda tergantung pada tingkat risikonya. Biasanya, investasi yang memiliki risiko lebih besar akan memberikan tingkat pengembalian yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Investasi dalam bentuk surat berharga akan memberikan pengembalian yang lebih besar daripada tabungan, tetapi investasi saham memungkinkan terjadinya kerugian (*capital loss*) dibandingkan dalam bentuk tabungan.

Bila tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dari GNP, maka kenaikan GNP akan diikuti dengan kenaikan investasi. Secara rata-rata, pengeluaran investasi biasanya

kurang dari 20 persen dari GNP. Dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi biasanya lebih berfluktuasi.

Tingkat keuntungan yang diharapkan

Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor akan mempengaruhi jumlah dana dan sumber daya yang akan diinvestasikan, semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, maka semakin besar dana dan sumber daya yang dialokasikan untuk investasi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut, maka akan semakin sedikit jumlah dana dan sumber daya yang diinvestasikan oleh investor tersebut.

Kondisi politik dan keamanan

Kondisi politik dan keamanan ditempat investasi tersebut dilakukan, akan sangat mempengaruhi keputusan investor. Keyakinan investor terhadap kondisi politik dan keamanan akan mempengaruhi keputusan melakukan investasi tersebut. Semakin tinggi keyakinan investor terhadap kondisi politik yang terkendali dan keamanan yang terjamin akan meningkatkan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Sebaliknya apabila investor tidak yakin terhadap kondisi politik dan keamanan, maka investor akan menunda keputusan investasinya.

Kualitas sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan daya tarik investasi yang cukup penting, hal ini disebabkan karena teknologi yang digunakan makin lama makin modern. Teknologi modern tersebut menuntut keterampilan lebih dari tenaga kerja.

kebijakan ketenagakerjaan

Kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, akan sangat mempengaruhi keputusan investasi yang akan dilakukan oleh investor. Kebijakan ketenagakerjaan tersebut meliputi Peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.

Pengaruh Nilai tukar

Pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik atau yang dikenal dengan *expenditure reducing effect*. Penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala di atas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada alokasi modal pada investasi.

Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.

PASAR SAHAM DAN INVESTASI

Dalam analisis sebelumnya, kita mengasumsikan bahwa perusahaan akan membiayai investasinya melalui pinjaman. Ada alternatif lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk membiayai investasinya, yaitu dengan menjual sahamnya di pasar saham. Perusahaan akan mendaftarkan sahamnya dan menjual saham tersebut di pasar saham melalui *listing*. Masyarakat umum dapat membeli saham yang dikeluarkan tersebut pada harga tertentu. Pihak yang membeli saham perusahaan tersebut akan ikut memiliki perusahaan dalam persentase tertentu dan apabila perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, maka pemegang saham akan memperoleh bagian dari keuntungan tersebut (*capital gains*).

Semakin tinggi harga saham yang dijual dan semakin banyak investor membeli saham tersebut, maka semakin besar dana yang dapat diperoleh oleh perusahaan untuk membiayai investasinya. Sebaliknya apabila harga saham rendah, maka perusahaan tersebut harus menjual lebih banyak saham untuk menutupi kebutuhan investasinya.

METODE ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI

Penentuan kelayakan suatu proyek dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode perhitungan. Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut:

Marginal Efficiency of Capital

Marginal Efficiency of Capital (MEC) adalah tingkat pengembalian dari suatu proyek investasi. Angka MEC ini adalah angka yang menyamakan harga investasi dengan nilai sekarang (*present value*) dari semua penerimaan yang diharapkan dari pengoperasian suatu proyek investasi ditambah nilai sekarang dari nilai sisa (*residu*) investasi tersebut.

Rumus MEC adalah:

$$C = \frac{R_1}{(1+r)} + \frac{R_2}{(1+r)^2} + \frac{R_3}{(1+r)^3} \dots \dots \dots + \frac{R_n}{(1+r)^n} + \frac{S}{(1+r)^n}$$

- C : pengeluaran untuk memperoleh investasi hingga siap dipakai
- R_1, R_2, \dots, R_n : penerimaan yang diperkirakan dari investasi
- 1, 2, 3, ... : periode waktu dari masing-masing penerimaan
- S : nilai residu
- r : MEC atau *internal rate of return*

Untuk menentukan nilai MEC, maka dilakukan dengan coba-coba (*trial and error*) hingga diperoleh sisi kiri sama dengan sisi kanan, atau:

$$C = \text{nilai sekarang dari pendapatan investasi} + \text{residu}$$

Keputusan menjalankan investasi:

- Bila $r > i$: proyek dijalankan
- Bila $r = i$: proyek dijalankan atau tidak sama saja
- Bila $r < i$: proyek tidak dijalankan

Dimana

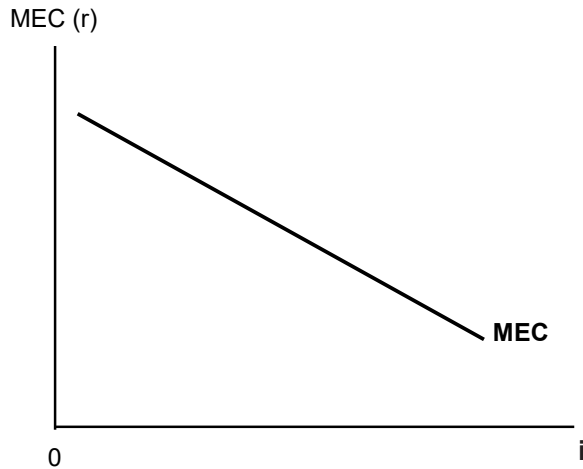
$$i = \text{tingkat suku bunga} = \text{external rate of return}$$

Suatu usulan investasi dalam peralatan atau mesin baru dapat dinilai dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan pengeluaran kas sekarang dengan nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas di masa depan. Karena perusahaan mempunyai lebih dari satu usulan untuk dipertimbangkan maka suatu skedul MEC dapat dibuat hingga besarnya usulan-usulan investasi dapat disusun berdasarkan tingkat hasil (*rate of return*) dari yang terbesar sampai terkecil.

Tabel 5.1
Skedul MEC perusahaan

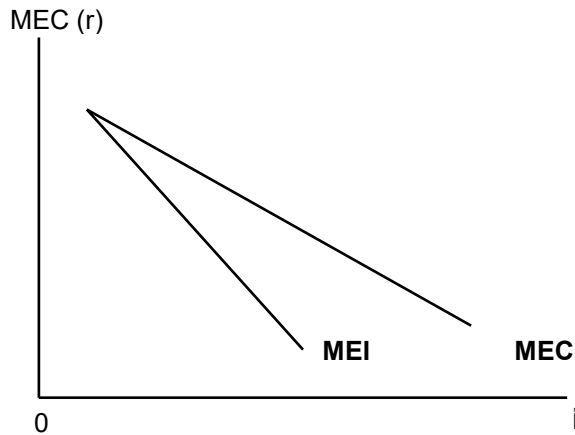
Hasil Investasi (MEC)	Usulan Investasi	Besarnya Investasi
0,20	A	50
0,18	A, B	100
0,16	A, B, C	150
0,14	A, B, C, D	200
0,12	A, B, C, D	250
0,10	A, B, C, D, F	300

Kemudian disusun suatu kurva MEC untuk seluruh perekonomian dengan menjumlahkan skedul MEC dari seluruh perusahaan.



Kurva 5.4 Kurva MEC

Kurva *MEC* tersebut mengandung asumsi bahwa industri barang modal mampu menawarkan peralatan-peralatan dalam jumlah tak terbatas dengan biaya rata-rata konstan. Tetapi jika rata-rata biaya penawaran barang modal baru naik akibat naiknya penggunaan fasilitas produksi maka kurva *MEC* akan lebih rendah dan curam dari sebelumnya (biaya rata-rata penawaran konstan). Kurva yang lebih curam ini disebut dengan *marginal efficiency of investment (MEI)*.



Kurva 5.5 Kurva MEC dan MEI

Keputusan menjalankan investasi:

- Bila $r > i$: proyek dijalankan
- Bila $r = i$: proyek dijalankan atau tidak sama saja
- Bila $r < i$: proyek tidak dijalankan

Keputusan Investasi

Keputusan investasi terkait dengan berbagai pertimbangan, baik pertimbangan secara ekonomi maupun pertimbangan non-ekonomi. Paling tidak, secara ekonomi, sebelum melakukan keputusan investasi, haruslah dilakukan penilaian kelayakan investasi tersebut melalui studi kelayakan investasi. Studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan pertimbangan akan mendapatkan manfaat ekonomis suatu bisnis. Pengertian tersebut mempunyai tendensi bagi pelaku bisnis yang profit. Artinya, jika hasil penelitian dari bisnis yang dilakukan memberikan tambahan kekayaan bagi pelaku bisnis maka bisnis dianggap menguntungkan, dengan demikian ia akan mengambil bisnis tersebut. Sebaliknya, jika hasil penelitian cenderung menunjukkan pengurangan kekayaan bagi pelaku bisnis.

Menurut Subagyo (2008:6), studi kelayakan bisnis adalah studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan usaha. Menurut Kashmir dan Jakfar (2010:9), studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang dijalankan guna menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan.

Berdasarkan beberapa definisi tentang studi kelayakan bisnis, maka dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah sebuah penelitian bisnis yang menganalisis layak tidaknya suatu bisnis dan juga apakah bisnis tersebut dapat memberikan keuntungan kepada pemilik bisnis dalam jangka waktu tertentu.

Ada lima tujuan mengapa sebelum suatu bisnis atau proyek dijalankan perlu adanya dilakukan studi kelayakan, yaitu:

1. Menghindari risiko kerugian

Untuk menghindari risiko kerugian di masa yang akan datang, karena di masa yang akan datang ada situasi ketidakpastian. Kondisi ini yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan.

2. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang dapat dikerjakan. Kemudian pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematis sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun.

3. Memudahkan perencanaan

Jika kita dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencana meliputi beberapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha atau proyek akan dijalankan, dimana lokasi proyek akan dibangun, siapa-siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara menjalankan, berapa besar keuntungan yang diperoleh, serta bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan.

4. Memudahkan pengawasan

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana yang disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Pengawasan dan pengendalian dalam operasi sebuah perusahaan besar perlu dilakukan secara berkesinambungan. Proses yang salah dari keduanya akan memberikan dampak buruk baik untuk kesehatan lingkungan maupun masalah sosial lainnya. Adanya studi kelayakan bisnis akan lebih memudahkan bagi pihak yang berwenang atau perusahaan terkait untuk melakukan pengawasan serta pengendalian.

MANFAAT STUDI KELAYAKAN BISNIS

Manfaat yang ditimbulkan dari adanya studi kelayakan bisnis adalah:

(1) Manfaat Finansial

Artinya bisnis tersebut akan menguntungkan bagi pelaku bisnis sendiri apabila bisnis dibandingkan dengan risiko yang ditanggung.

(2) Manfaat ekonomi nasional

Artinya bisnis tersebut jika dijalankan mampu menunjukkan manfaat yang lebih luas bagi daerah, misalnya banyak tenaga kerja yang terserap, pendapatan masyarakat meningkat, dsb.

(3) Manfaat sosial

Artinya masyarakat sekitar lokasi bisnis tersebut memperoleh manfaat atas bisnis yang dilakukan tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

Tahapan Studi Kelayakan Bisnis

(1) Tahap penemuan ide

Tahap di mana wirausaha memiliki ide usaha yang kemudian dirumuskan dan diidentifikasi. Ide yang akan dijalankan mempunyai potensi yang menguntungkan.

(2) Tahap penelitian

Setelah ide proyek dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode ilmiah. Dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah data berdasarkan teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang sesuai, menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil penelitian tersebut.

(3) Tahap evaluasi

Tahap dimana evaluasi terhadap usulan bisnis untuk perkiraan saat dibangun dan saat dioperasionalkan secara rutin. Hal yang dibandingkan dalam evaluasi bisnis adalah seluruh biaya yang akan ditimbulkan oleh usulan tersebut serta manfaat

yang diperkirakan akan diperoleh.

- (4) Tahap pengurutan usulan yang layak
Tahap di mana melakukan penelitian rencana bisnis yang dianggap paling penting direalisasikan. Kemudian menentukan rencana yang diprioritaskan, di mana rencana tersebut memiliki skor tertinggi jika dibandingkan dengan usulan yang ada berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang ditentukan.
- (5) Tahap rencana pelaksanaan
Tahap untuk membuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek. Mulai dari menentukan jenis pekerjaan, waktu pengerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksanaan, ketersediaan dana, kesiapan manajemen dan lain-lain.
- (6) Tahap pelaksanaan
Tahap merealisasikan pembangunan proyek kemudian melaksanakan operasional bisnis secara rutin yang berupa fungsi keuangan, pemasaran, produksi atau operasi, SDM dan manajemen agar selalu bekerja efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba perusahaan.

Aspek Studi Kelayakan Bisnis

1. Aspek Pasar dan Aspek Pemasaran

Dalam sebuah studi kelayakan bisnis aspek pasar dan pemasaran merupakan salah satu aspek yang paling penting, karena aspek pasar dan pemasaran menentukan hidup atau tidaknya sebuah perusahaan di dalam industri. Apabila aspek pasar dan pemasaran tidak diteliti secara benar maka prospek kedepan sebuah perusahaan tidak akan terciptakan secara benar yang akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan.

Pengertian pasar secara sederhana adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Menurut Umar Husein (2005:35), pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga.

Dalam menjalankan sebuah pemasaran bagi produk perusahaan, manajemen pemasaran menjalankan 4 strategi pemasaran yang dikenal dengan bauran pemasaran (*marketing mix*) atau 4p dalam pemasaran yang terdiri dari 4 empat komponen, yaitu produk (*product*), harga (*price*), distribusi (*place*) dan promosi (*promotion*), yaitu:

1. *Product* (Produk)
Barang atau jasa yang ditawarkan dipasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau komisi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan.
2. *Price* (Harga)
Sejumlah kompensasi (uang maupun barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa.
3. *Place* (Tempat)
Saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampe ke

konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen.

4. *Promotion* (Promosi)

Promosi adalah kegiatan yang secara aktif dilakukan perusahaan untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan.

2. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Dalam menganalisis studi kelayakan bisnis, aspek manajemen dan SDM penting dianalisis karena dalam menjalankan sebuah organisasi, manajemen satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan pekerjaan. Suatu organisasi selalu diibaratkan dengan sebuah tubuh, apabila akan melakukan sebuah perubahan namun sebagian dari organ tubuh tidak siap untuk menerima perubahan tersebut maka perubahan yang telah direncanakan tidak akan dapat dijalankan.

(1) Macam-macam perencanaan

Proses perencanaan untuk menghasilkan suatu rencana atau rencana rencana dapat dilihat dari beberapa sisi penting, antara lain dari sisi jangka waktu manfaat rencana serta dari sisi tingkat manajemen, yaitu dari sisi strategis dan operasional sebagai berikut:

(a) Sisi jangka waktu

Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk pengaplikasian suatu rencana, dikenal tiga bentuk perencanaan, yaitu:

a. Perencanaan jangka panjang

perencanaan semacam ini menjangkau waktu sekitar 20 sampai 30 tahun ke depan. Rencana-rencananya masih berbentuk garis besar yang bersifat strategis dan umum.

b. Perencanaan jangka menengah

menjangkau sekitar 3 sampai 5 tahun kedepan. Perencanaan jangka panjang dipecah-pecah menjadi beberapa kali pelaksanaan rencana jangka menengah sehingga setiap tahap hendaknya disesuaikan dengan prioritas.

c. Perencanaan jangka pendek

perencanaan ini menjangkau waktu paling lama 1 tahun. Perencanaan ini lebih konkret dan lebih terperinci, karena lebih jelas sasaran yang harus dicapai termasuk dalam hal penggunaan sumber daya.

(b) Sisi tingkatan manajemen

Pada umumnya perencanaan bila digolongkan ke dalam tingkatan manajemen akan terbagi dua, yaitu:

a. Perencanaan strategis

Perencanaan ini merupakan bagian dari manajemen strategis. Perencanaan strategis lebih berfokus pada bagaimana puncak menentukan visi, misi, falsafah, dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang.

b. Perencanaan operasional

Merupakan bagian dari strategi operasional yang lebih mengarah pada

bidang fungsional perusahaan.

(c) Struktur organisasi

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan produksi dalam perusahaan. Struktur organisasi menjelaskan pembagian aktifitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktifitas tersebut sampai batas-batas tertentu. Ada empat elemen dalam struktur, yaitu:

a. Spesialisasi aktifitas

mengacu dapat spesifikasi tugas-tugas perorangan dan kelompok kerja di seluruh organisasi.

b. Standarisasi aktifitas

merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menuju kelayakan aktifitas.

c. Koordinasi aktifitas

adalah prosedur yang digunakan dalam memadukan fungsi-fungsi sub-unit dalam organisasi. hubungan dengan jumlah pegawai yang berada dalam suatu kelompok kerja.

(2) Sumber Daya Manusia

Aspek selanjutnya yang perlu dianalisis adalah kesiapan perusahaan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia mulai dari pengadaan karyawan sampai penempatan di jabatan tertentu.

3. Aspek Keuangan

Aspek keuangan merupakan muara dari semua aspek sebab keuangan implikasi dari seluruh program proyek yang harus diperhitungkan. Berbagai hal yang menyangkut keuangan perlu dibahas mulai dari awal perencanaan, periode persiapan, pelaksanaan pembangunan proyek dan periode operasi ketika usaha berjalan. Kita bedakan periode tersebut menjadi dua yaitu Periode Persiapan dan Periode Operasi. Implikasi keuangan periode persiapan akan ter-cover dalam kebutuhan dana investasi, sedangkan dalam masa operasi tercermin pada proyeksi rugi-laba, proyeksi neraca, proyeksi arus kas dan proyeksi kemampuan melunasi pinjaman serta tingkat pengembalian.

Penentuan kelayakan suatu proyek dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode perhitungan. Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut:

(1) *Payback period (PP)*

Metode pemulihan investasi (*Payback method*) adalah metode analisis kelayakan investasi yang berusaha untuk menilai persoalan kelayakan investasi menurut jangka waktu pemulihan modal yang diinvestasikan. Jangka waktu pemulihan modal (*payback period*) adalah jangka waktu yang di perlukan, biasanya dinyatakan dalam satuan tahun, untuk mengembalikan seluruh modal yang diinvestasikan.

(2) *Net present value (NVP)*

Metode nilai sekarang adalah metode penilaian kelayakan investasi yang

menyelaraskan nilai yang akan datang arus kas menjadi nilai sekarang dengan melalui pemotongan arus kas dengan faktor pengurangan (diskon) pada tingkat biaya modal tertentu yang diperhitungkan. Rumus dalam Metode *Net Present Value* adalah:

$$\text{Net Present Value} = \text{PV Proceed} - \text{PV Outlay}$$

(3) *Profitability index (PI)*

Profitability Indeks adalah rasio atau perbandingan antara jumlah nilai sekarang arus kas selama umur ekonomisnya dan pengeluaran awal proyek. Jumlah nilai sekarang arus kas selama umur ekonomisnya hanya memperhitungkan arus kas pada tahun pertama hingga akhir tahun, dan tidak termasuk pengeluaran awal. Rumus yang digunakan dalam *Profitability Indeks* adalah:

$$\text{Profitability Indeks} = \text{PV Proceed} / \text{PV Outlays}$$

Kriteria keputusan dengan menggunakan indeks keuntungan adalah menerima proyek jika *Profitability Index* lebih besar atau sama dengan 1,00 dan menolak proyek jika *Profitability Index* kurang dari 1,00.

Kelemahan dan keuntungan dalam *Profitability Index* yaitu:

- Kelemahan:
Membutuhkan peramalan jangka panjang yang detail mengenai pertambahan keuntungan dan biaya.
- Keuntungan:
 - a. Menggunakan arus kas.
 - b. Memakai nilai waktu luang.

(4) *Internal rate or return (IRR)*

Metode tingkat pengembalian internal (IRR) adalah rasio laba dari penanaman modal dalam jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu, dimana nilai sekarang arus kas masuk adalah sama dengan nilai sekarang pengeluaran investasi inisial. Pada tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya *Internal Rate of Return* dari usul investasi tersebut, cara ini dinamakan interpolasi. Cara menghitung IRR:

$$\text{IRR} = P1 - C1 \times \frac{P2 - P1}{C2 - C1}$$

Dimana:

IRR = *Internal Rate of Return* yang dicari

P1 = Tingkat bunga ke- 1

P2 = Tingkat bunga ke- 2

C1 = NPV ke- 1

C2 = NPV ke- 2

4. Aspek Hukum

Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek, ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku.

ANALISIS PROFITABILITAS

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja didalamnya. Selain itu, rasio profitabilitas dapat pula menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menjaga stabilitas finansialnya untuk selalu berada dalam kondisi yang stabil dan profit. Rasio ini mengukur perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.

Analisis Profitabilitas adalah merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Analisis ini mengukur kinerja secara keseluruhan, yaitu perusahaan dan efisiensi dalam pengelolaan aktiva, kewajiban dan kekayaan. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan, yaitu

a. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan pengukuran kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba. *Return On Equity* (ROE) juga merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham, di mana persentase rasio ini dinyatakan oleh rumus sebagai berikut :

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

b. *Return On Total Asset* (ROA)

Return On Total Asset (ROA) adalah dimana rasio ini merupakan perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average asset*), di mana persentase rasio ini dinyatakan oleh rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Total Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

c. *Return On Investment* (ROI).

Return On Investment (ROI) merupakan rasio perbandingan antara pendapatan bersih (*earning before interest and tax*) dengan total aktiva (*total asset*).

Return On Total Asset (ROA), dan *Return On Investment* (ROI) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan, namun disini perbedaan antara *Return On Investment* (ROI) dan *Return On Total Asset* (ROA) adalah dimana *Return On Total Asset* (ROA) dipergunakan untuk menghitung kemampuan dari rata-rata aset perusahaan dalam mencapai keuntungan, sementara *Return On Investment* (ROI) dipergunakan untuk menghitung kemampuan seluruh aset perusahaan dalam pencapaian keuntungan serta untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam dalam tingkat kemampuan investasi.

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat dibedakan antara *Return On Total Asset* (ROA), dan *Return On Investment* (ROI) merupakan kemampuan menghasilkan laba dengan mempergunakan aset dari perusahaan sementara *Return On Equity* (ROE) merupakan modal dimiliki oleh pemegang saham atau pemilik saham. Investor yang potensial akan menganalisis dan dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan (profit) karena mereka mengharapkan dividen dan harga pasar dari sahamnya.

ISTILAH PENTING BAB INI

Investasi tetap perusahaan	<i>Listing</i>
Perubahan persediaan	<i>Present value</i>
Investasi perumahan	Residu
Sekuritas	<i>Internal rate of return</i>
<i>Desire capital stock</i>	<i>External rate of return</i>
Pengembalian riil neto	<i>Marketing Mixed</i>
Pengembalian riil neto	<i>Payback period (PP)</i>
Inovasi teknologi	<i>Net present value (NVP)</i>
Gestation period	<i>Profitability Indeks</i>
<i>expenditure reducing effect</i>	<i>Return On Equity (ROE)</i>
<i>Marginal Efficiency of Capital</i>	<i>Return On Total Asset (ROA)</i>
Ekspektasi positif	<i>Return On Investment (ROI).</i>
Ekspektasi negatif	
<i>Capital loss</i>	
<i>Capital gains</i>	

RANGKUMAN

1. Investasi diartikan sebagai penanaman dalam bentuk barang modal riil maupun dalam bentuk surat berharga. Pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.
2. Secara umum, investasi dibedakan menjadi enam jenis, Investasi tetap perusahaan, Perubahan persediaan, Investasi perumahan, Sekuritas, Emas, Deposito dan Tabungan
3. Secara ekonomi, investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: tingkat suku bunga, prakiraan kondisi di masa yang akan datang, inovasi teknologi, dan tingkat

kesejahteraan suatu masyarakat, Tingkat keuntungan yang diharapkan, Kondisi politik dan keamanan, Kualitas sumber daya manusia, Kebijakan ketenagakerjaan, Pengaruh Nilai tukar, dan Tingkat Inflasi.

4. Manfaat yang ditimbulkan dari adanya studi kelayakan bisnis adalah manfaat finansial, manfaat nasional, dan manfaat sosial
5. Pasar saham merupakan alternatif sumber untuk membiayai investasi perusahaan. Perusahaan akan mendaftarkan sahamnya dan menjual saham tersebut di pasar saham melalui *listing*. Masyarakat umum dapat membeli saham yang dikeluarkan tersebut pada harga tertentu. Pihak yang membeli saham perusahaan tersebut akan ikut memiliki perusahaan dalam persentase tertentu dan apabila perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, maka pemegang saham akan memperoleh bagian dari keuntungan tersebut (*capital gains*).
6. Tahapan studi kelayakan bisnis adalah tahap penemuan ide, tahap penelitian, tahap evaluasi, tahap pengurutan usulan yang layak, tahap rencana pelaksanaan, dan tahap pelaksanaan.
7. Aspek studi kelayakan bisnis adalah aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek hukum.

PERTANYAAN UNTUK LATIHAN

SOAL LATIHAN PILIHAN BERGANDA

1. Berikut ini adalah jenis investasi, *kecuali*:
 - a. pembelian mesin, bangunan, dan tanah
 - b. perubahan persediaan bahan baku
 - c. kepemilikan barang setengah jadi untuk dijual pada waktu tertentu
 - d. pembelian aset tetap perusahaan
 - e. hutang bahan baku dari perusahaan lain
2. Investasi perumahan (*residential investment*) dipengaruhi oleh beberapa faktor, *kecuali*:
 - a. jumlah kekayaan yang dimiliki
 - b. tingkat pengembalian riil neto
 - c. perubahan harga jenis investasi lain
 - d. tingkat keuntungan atas investasi rumah
 - e. perubahan harga material bangunan
3. Angka yang menyamakan harga investasi dengan nilai sekarang (*present value*) dari semua penerimaan yang diharapkan dari pengoperasian suatu proyek investasi ditambah nilai sekarang dari nilai sisa investasi, merupakan pengertian dari:
 - a. tingkat pengembalian riil neto

- b. *marginal efficiency of capital*
 - c. *gestation period*
 - d. penyusutan atau depresiasi
 - e. tingkat pengembalian riil bruto
4. Investasi merupakan indikator ekonomi yang paling sensitif terhadap perubahan dan kondisi sosio-ekonomi. Investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, *kecuali*:
- a. tingkat suku bunga
 - b. prakiraan kondisi di masa yang akan datang
 - c. inovasi teknologi
 - d. tingkat kesejahteraan suatu masyarakat
 - e. semua jawaban diatas adalah benar
5. Syarat kelayakan dari suatu keputusan investasi adalah:
- a. bila r lebih kecil daripada i
 - b. bila r sama dengan i
 - c. bila MEC lebih besar daripada suku bunga
 - d. bila r lebih besar daripada I
 - e. jawaban c dan d benar

SOAL LATIHAN ESSAY

1. Suatu rencana proyek pembangunan jembatan di Selat Sunda membutuhkan dana 12 triliun rupiah dengan umur jembatan diperkirakan 20 tahun. Pada 10 tahun pertama, keuntungan dari jembatan tersebut sebesar 2,1 triliun rupiah dan 5 tahun berikutnya 1.1 triliun rupiah dan 10 tahun terakhir 750 miliar rupiah. Nilai residu dari proyek tersebut adalah 2 triliun.
Ditanya:
 - a. Tentukan besarnya MEC dari proyek tersebut
 - b. Jika suku bunga pinjaman 8 persen, apakah investasi ini layak dilaksanakan.
2. Apa keterkaitan antara kemajuan teknologi dan minat investasi. Jelaskan jawaban Saudara dengan menggunakan contoh!
3. Selain hutang dari bank, investor dapat membiayai investasinya dari pasar modal. Bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia saat ini sebagai alternatif pembiayaan investasi?
4. Jelaskan keterkaitan antara investasi perumahan dan suku bunga bank!
5. Sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar Rp 50.000.000 dengan umur penggunaan 10 tahun tanpa nilai sisa, keuntungan neto setelah pajak dari proyek tersebut adalah:

TAHUN	LABA SETELAH PAJAK (EAT)
1	15.000.000
2	14.000.000
3	13.000.000
4	12.000.000
5	11.000.000
6	10.000.000
7	9.000.000
8	8.000.000
9	7.000.000
10	6.000.000

Ditanya, hitunglah

- a. ARR atas dasar *Initial Investment*
- b. *Payback Period*
- c. NPV
- d. IRR
- e. PI
- f. Berikan kesimpulan masing-masing hasil analisa yang didapat.

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Untuk Indonesia pada kondisi seperti saat sekarang ini, menurut Saudara, apa saja yang menjadi pertimbangan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia?
2. Menurut Saudara, sektor apa saja yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya?
3. Selain faktor ekonomi, investasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat non-ekonomi, jelaskan pernyataan ini!

6

UANG DAN BANK SENTRAL

1. Sejarah Timbulnya Uang
2. Peranan Uang dalam Perekonomian
3. Konsep Uang Beredar di Indonesia
4. Proses Penciptaan Uang oleh Bank Umum
5. *BI Rate*
6. Teori Permintaan Uang
7. Analisis IS dan LM
8. Keseimbangan di Pasar Barang dan Pasar Uang
9. Bank Sentral sebagai Lembaga Independen
10. Tugas Bank Sentral
11. Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Sejarah Timbulnya Uang

Dalam perekonomian tradisional, masyarakat hidup secara subsisten dan belum mengenal uang dalam kegiatan ekonominya. Kegiatan perekonomian dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang lain yang dibutuhkan. Orang yang memiliki beras dan membutuhkan pakaian akan melakukan pertukaran dengan orang yang memiliki pakaian dan membutuhkan beras dengan nilai tukar tertentu, misalnya dasar pertukarannya adalah 1 kilogram beras ditukarkan dengan 2 potong pakaian. Kegiatan barter ini dapat dilakukan apabila jumlah dan jenis kebutuhan setiap anggota masyarakat masih sederhana dan terbatas jumlahnya. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, maka jumlah kebutuhan semakin bervariasi dan semakin banyak jumlahnya. Dalam kondisi seperti ini, cara barter akan sulit untuk dilakukan karena kesulitan menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan membutuhkan barang yang kita miliki. Kesulitan untuk mencari kesesuaian antara orang yang membutuhkan dan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan ini dikenal dengan istilah *double coincidence of want* atau kesesuaian ganda dari keinginan.

Dengan keterbatasan sistem barter ini, orang membutuhkan alat atau media yang dapat berfungsi sebagai alat pertukaran yang sah dan disepakati secara bersama. Media yang digunakan untuk melakukan pertukaran ini pada awalnya berupa uang barang (*commodity money*). Pada waktu itu, uang barang dibuat dari komoditi tertentu, seperti emas, perak maupun kulit kayu. Jenis komoditi ini digunakan sebagai media pertukaran karena memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Diterima secara umum karena sifat kelangkaannya
2. Mutu antar emas dengan emas lainnya relatif sama dan homogen
3. Tidak mudah rusak dan relatif mudah dibagi-bagi
4. Nilainya relatif stabil
5. Disukai oleh orang banyak karena dapat digunakan sebagai perhiasan

Dengan adanya uang barang, untuk sementara waktu kesulitan sistem barter dapat diatasi. Pelaku-pelaku ekonomi tidak lagi harus mencari kesesuaian ganda dari masing-masing pelaku ekonomi, tetapi barang dan jasa yang mereka miliki diperdagangkan dan dipertukarkan dengan menggunakan uang. Meskipun uang barang ini lebih baik daripada sistem barter, tapi ada beberapa kelemahan dari uang barang, yaitu:

1. Nilainya tidak stabil

Nilai yang terkandung pada komoditi yang dijadikan sebagai uang tidak stabil. Ketidakstabilan ini berkaitan dengan jumlah persediaan komoditas yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan uang itu dalam masyarakat. Misalnya uang terbuat dari emas, apabila jumlah emas meningkat dengan ditemukannya tambang emas

baru, maka nilai emas akan mengalami penurunan. Sebaliknya apabila emas yang terbatas tersebut digunakan sebagai perhiasan ataupun dilebur untuk peralatan tertentu, maka nilai emas akan menjadi semakin mahal. Fluktuasi nilai uang yang terbuat dari komoditi ini tidak stabil dan tidak ada yang menjamin.

2. Kesulitan untuk membaginya (*undivisible*)

Uang yang terbuat dari komoditi tertentu, sulit untuk melaksanakan perdagangan dalam jumlah yang sangat besar maupun sangat kecil. Hal ini dikarenakan uang barang sulit untuk dipecah atau dibagi menjadi satuan-satuan hitung yang lebih kecil. Misalnya satu gram emas dapat digunakan untuk membeli 50 kilogram beras. Untuk membeli 10 kilogram beras, maka hanya dibutuhkan 0,2 gram emas. Betapa sulitnya memecah nilai emas dalam satuan-satuan kecil.

3. Keamanannya tidak terjamin

Karena uang yang terbuat dari barang ukurannya biasanya terlalu besar atau kadang terlalu kecil, maka ini akan mengakibatkan keamanannya tidak terjamin. Orang lain akan mengetahui secara pasti berapa jumlah dana yang kita miliki.

4. Tidak fleksibel

Ketidakfleksibelan uang yang terbuat dari barang, diantaranya adalah dikarenakan uang tersebut sulit untuk dibawa. Kesulitan ini dikarenakan ukurannya yang relatif besar apabila satuan unitnya besar dan sangat kecil untuk satuan unit yang kecil. Hal ini dikarenakan nilai uang barang ditentukan oleh nilai dari barang tersebut bukan nilai nominal seperti pada uang kertas.

Dari kelemahan-kelemahan tersebut, maka orang mulai berpikir untuk menciptakan alat tukar yang lebih simpel dan dapat meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut. Maka diciptakanlah uang yang terbuat dari kertas dan logam atau uang **kartal** seperti yang digunakan saat ini. Paling tidak dengan uang kartal, maka sebagian kelemahan uang barang dapat diatasi, misalnya uang kartal lebih fleksibel, nilainya relatif stabil karena dijamin oleh pemerintah, dan mudah dibagi-bagi dalam satuan unit kecil maupun besar. Meskipun demikian, ada beberapa kelemahan uang kartal, yaitu:

1. Keamanannya yang tidak terjamin

Apabila seseorang memiliki uang dan uang tersebut hilang, maka orang tersebut tidak dapat mengklaim bahwa uang tersebut miliknya apabila ditemukan oleh orang lain. Walaupun setiap uang terdapat nomor seri uang yang berbeda, tapi orang tidak mungkin ingat nomor seri yang dimilikinya.

2. Rentan terhadap pemalsuan

Uang kartal, terutama uang kertas, nilai bahan pembuat uang biasanya lebih murah daripada nilai uang tersebut, maka uang kertas rentan terhadap pemalsuan. Kemajuan teknologi memungkinkan orang untuk membuat tiruan uang kertas.

3. Mudah rusak

Perputaran uang yang selalu berpindah kepemilikannya antar pemegang uang, terutama uang kertas mengakibatkan uang tersebut mudah rusak dan sobek. Untuk mengatasi masalah ini, maka bahan pembuat uang kertas harus dibuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti uang kertas satuan seratus ribu yang terbuat dari bahan campuran plastik.

Meskipun terdapat beberapa kelemahan seperti yang disebutkan di atas, yang jelas uang kertas dan uang logam lebih baik fungsinya daripada uang barang, apalagi dibandingkan dengan sistem barter. Tujuan awal diciptakan uang adalah untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan tukar menukar. Paling tidak, suatu media dapat dijadikan sebagai uang apabila memenuhi syarat:

- a. Nilainya relatif stabil dan tidak fluktuatif
- b. Mudah dibawa dan mudah dibagi
- c. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
- d. Tahan lama
- e. Jumlahnya terbatas (tidak berlebihan)
- f. Media yang dijadikan uang memiliki kualitas yang sama.

Seiring makin berkembangnya kegiatan ekonomi, muncul media transaksi yang bersifat menggantikan ataupun melengkapi fungsi uang, yaitu *uang giral*. Ada beberapa bentuk uang ini, yaitu *time deposit* (deposito berjangka), cek, rekening giro, dan kartu kredit. Uang ini memiliki kelebihan, yaitu keamanannya lebih terjamin karena kita tidak membawa dalam bentuk uang tunai. Di sisi lain, kelemahannya yaitu likuiditasnya rendah atau dengan kata lain, tidak semua transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan uang giral, terutama transaksi yang bersifat tradisional dan dalam jumlah kecil.

Peranan Uang dalam Perekonomian

Tanpa adanya uang dalam perekonomian, tentu akan muncul kesulitan-kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Uang diciptakan oleh pemerintah melalui otoritas moneter (Bank Sentral atau Bank Indonesia) berperanan sebagai berikut:

1. Alat tukar
2. Satuan nilai
3. Ukuran bayaran yang tertunda
4. Penyimpan nilai

1. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Dengan adanya uang, kegiatan perdagangan tidak mengharuskan dipenuhinya syarat *double coincidence of want* seperti yang terjadi pada perekonomian barter. Dengan adanya uang sebagai alat tukar, kita tidak harus menemukan orang yang

memiliki barang yang kita butuhkan dan membutuhkan barang yang kita miliki. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa dapat dipenuhi dengan membeli dari pedagang barang dan jasa tersebut dengan menggunakan uang.

2. Uang sebagai satuan nilai (*unit of account*)

Maksud uang sebagai satuan nilai adalah bahwa uang dapat dijadikan sebagai ukuran yang menentukan seberapa besar nilai dari suatu barang ataupun jasa. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dan jasa dengan mudah ditentukan, yaitu dengan cara mengukur seberapa banyak uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Dengan kata lain, nilai antar barang dapat dibandingkan dengan mengukur nilai uang yang terkandung dalam barang tersebut. Dalam perekonomian barter, misalnya untuk menentukan nilai seekor ayam dapat diukur dengan cara membandingkan dengan berapa kilo beras yang dibutuhkan untuk memperoleh satu ekor ayam tersebut.

3. Uang sebagai standar pembayaran yang tertunda

Dalam perdagangan, seringkali transaksi pembayaran tidak dilakukan pada saat pembelian barang. Penundaan pembayaran ini bagi pedagang tidak menjadi masalah karena pembayaran yang dilakukan pada waktu yang akan datang dapat diukur dengan satuan uang. Uang yang akan diterimanya dapat dibeli dengan barang yang sama seperti yang dijual kepada pembeli sebelumnya. Kondisi ini mungkin dilakukan apabila nilai uang yang digunakan relatif stabil dan penundaan pembayarannya tidak terlalu lama. Bila nilai mata uang tersebut tidak stabil, maka kondisi ini akan merugikan bagi pedagang (bila terjadi inflasi) dan bagi pembeli (bila terjadi deflasi)

4. Uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*)

Kekayaan seseorang dapat disimpan dalam bentuk uang maupun diwujudkan dalam bentuk barang. Apabila diasumsikan harga barang-barang relatif stabil, mewujudkan kekayaan dalam bentuk uang akan lebih menguntungkan dibandingkan mewujudkannya dalam bentuk barang karena barang bisa rusak dan nilainya akan turun. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka muncul lembaga perbankan. Apabila seseorang tidak ingin memegang uang tunai karena keamanannya tidak terjamin, maka orang tersebut dapat menyimpannya di bank. Selain keamanannya terjamin, jumlah uangnya dapat bertambah karena mendapatkan bunga dari uangnya tersebut. Sebaliknya, hal ini tidak dapat dilakukan pada saat terjadi inflasi yang sangat tinggi karena menyimpan uang di bank akan mengalami kerugian penurunan nilai uang, akan lebih baik bila diwujudkan dalam bentuk barang, misalnya emas, tanah, ataupun rumah yang nilainya terus mengalami kenaikan.

Konsep Uang Beredar Di Indonesia

Di Indonesia, Uang Beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). Kewajiban yang menjadi komponen Uang Beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun. Konsep uang beredar dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*)
- b. Uang beredar dalam arti luas (*broad money*)

Uang beredar dalam arti sempit. (M_1) Uang beredar dalam arti sempit yaitu jumlah uang beredar yang terdiri dari **uang kartal** dan **uang giral** yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dalam istilah ekonomi moneter, konsep ini dikenal dengan istilah *narrow money*, yang secara matematis dapat dituliskan:

$$M_1 = C + D$$

- M_1 : uang beredar dalam arti sempit
C : uang kartal (*currency*)
D : uang giral (*demand deposit*)

Uang kartal adalah jenis uang yang dikeluarkan oleh otoritas moneter (Bank Indonesia) yang digunakan oleh masyarakat secara umum. Uang kartal ini terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- a. *Uang kertas*
- b. *Uang logam*

Uang kartal yang digolongkan dalam jumlah uang beredar (JUB) hanya uang kartal yang beredar di masyarakat. Uang kertas dan uang logam yang masih berada di Bank Indonesia dan belum beredar di masyarakat, bukan digolongkan sebagai uang kartal, karena tidak digunakan oleh masyarakat umum. Nilai uang logam yang ada saat ini nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya, hal ini untuk menghindari bila terjadi inflasi maka nilai logamnya lebih besar daripada nilai nominalnya. Bila hal ini terjadi, maka akan mendorong orang untuk melebur uang koin menjadi logam biasa, karena ini lebih menguntungkan.

Uang giral atau giro adalah jenis uang dalam bentuk saldo rekening giro atau rekening koran yang berada di bank umum dan milik masyarakat. Konsep uang giral digolongkan sebagai uang beredar karena dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat yang memilikinya dapat menggunakannya. Saldo rekening koran milik bank umum yang disimpan pada bank lain tidaklah digolongkan sebagai uang giral. Rekening koran atau *demand deposit* yaitu rekening pada sebuah bank yang dapat diambil

dengan cara menerbitkan cek dengan maksimum sejumlah uang yang disimpan atas permintaan pemegang cek.

Tabel 6.1
Jumlah Uang Beredar Dalam Arti Sempit dan Luas
Tahun 2013 - 2015 (Miliar rupiah)

Rincian	2013	2014	2015
Uang Kartal (<i>currency</i>)	399.632	419.185	423.101
Uang Giral (<i>demand deposit</i>)	487.475	522.960	603.222
Uang Beredar M1	887.107	942.145	1.026.323
Uang Kuasi	2.817.974	3.206.956	3.362.148
Surat Berharga Selain Saham	22.805	21.630	15.615
Uang Beredar M2	3.727.887	4.170.731	4.404.085

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2015.

Uang beredar dalam arti luas. Uang beredar dalam arti luas atau *broad money* adalah jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi (*quasi money*). Dengan kata lain, uang beredar dalam arti luas terdiri dari uang beredar dalam arti sempit ditambah dengan uang kuasi. Secara matematis uang beredar dalam arti luas dapat dituliskan:

$$M_2 = C + D + T$$

Atau

$$M_2 = M1 + T$$

M2 : uang beredar dalam arti luas (*broad money*)

T : deposito berjangka (*time deposit*)

Uang kuasi merupakan suatu bentuk aset yang fungsi dan cirinya “mendekati” fungsi uang tunai. Disebut mendekati karena uang kuasi dapat digunakan untuk melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi, tetapi bentuk aset ini tidak memiliki tingkat likuiditas seperti uang tunai. Bentuk uang kuasi yaitu deposito berjangka (*time deposit*), dalam rupiah dan valas serta giro dalam dalam valuta asing, dan tabungan. Untuk mengubah uang kuasi menjadi uang tunai, maka pemilik akan mengalami kesulitan karena harus mencairkannya dari bank dan pemilik akan kehilangan kesempatan mendapatkan bunga. Selain itu, uang kuasi juga mencakup surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Faktor yang mempengaruhi Uang Beredar adalah Aktiva Luar Negeri Bersih (*Net Foreign Assets/NFA*) dan Aktiva dalam Negeri Bersih (*Net Domestic Assets /NDA*). Aktiva dalam Negeri Bersih antara lain terdiri dari Tagihan Bersih Kepada Pemerintah Pusat (*Net Claims on Central Government /NCG*) dan Tagihan kepada sektor lainnya

(sektor swasta, pemerintah daerah, lembaga keuangan dan perusahaan bukan keuangan) terutama dalam bentuk Pinjaman yang diberikan.

Proses Penciptaan Uang Oleh Bank Umum

Giro atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan giral utama pada saat bank umum tersebut menerima setoran dari nasabahnya dalam bentuk uang tunai atau cek yang di kliring dari bank umum lain. Setelah menerima uang tunai atau cek tersebut, bank akan menambahkan nilai tabungan giral dari nasabah yang menyetorkan uang tunai ataupun cek tadi.

Tabungan giral derivatif dapat berupa pemberian pinjaman dari bank umum kepada debitur (peminjam). Pinjaman tersebut akan dibukakan simpanan giral atas nama debitur sejumlah pinjamannya dan pinjamannya tersebut dapat diambil oleh debitur dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk cek. Penciptaan tabungan giral derivatif ini akan menambah jumlah uang giral dalam perekonomian.

BI Rate

Dalam laman Bank Indonesia, yang dimaksud dengan *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Fungsi *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7-Day Repo Rate*, yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain *BI Rate* yang digunakan saat ini, pengenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang diterapkan.

Teori Permintaan Uang

a. Teori Permintaan Uang Keynesian

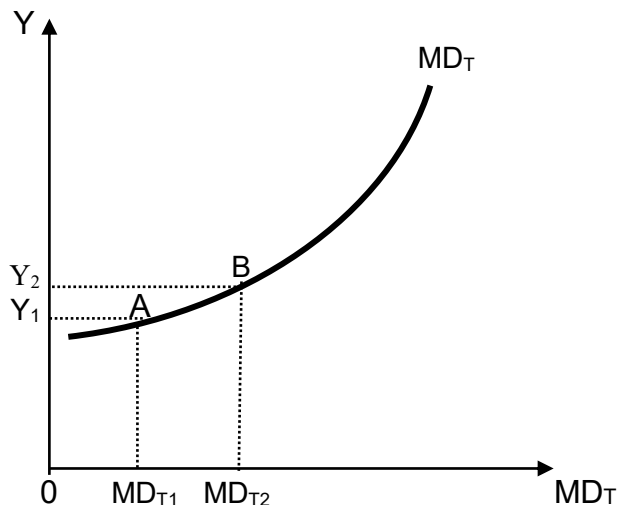
Uang diinginkan bukan karena uang itu sendiri, melainkan karena fungsi uang tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi. Teori permintaan uang menurut Keynes, menyatakan bahwa permintaan uang yang dilakukan oleh masyarakat didasari oleh tiga macam motif, yaitu:

1. Motif untuk transaksi (*transaction motive*)
2. Motif untuk spekulasi (*speculative motive*)
3. Motif untuk berjaga-jaga (*precautionary motive*)

Motif transaksi (MD_T). Motif ini dilakukan karena orang membutuhkan uang tunai untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Jumlah uang yang diminta untuk motif transaksi ini tergantung pada jumlah pendapatan (Y) orang tersebut, atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$MD_T = f(Y)$$

Semakin besar jumlah pendapatannya, maka semakin besar jumlah uang tunai yang diminta untuk melakukan transaksi, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, hubungan antara permintaan uang untuk transaksi dan pendapatan adalah positif atau searah. Hubungan antara kedua faktor ini dapat dilihat pada Kurva 6.1 berikut ini:



Kurva 6.1. Permintaan Uang untuk Transaksi

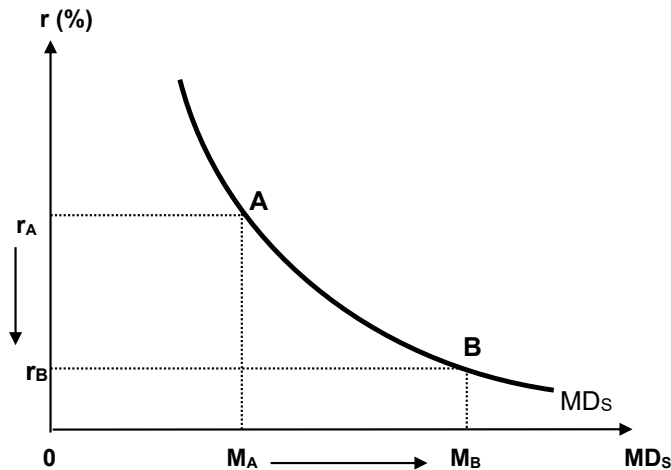
Pada saat pendapatan konsumen sebesar Y_1 , maka jumlah uang tunai yang diminta untuk melakukan transaksi adalah sebesar MD_{T1} . Apabila pendapatan naik menjadi

Y_2 , maka permintaan uang untuk transaksi juga akan mengalami kenaikan dari MD_{T1} menjadi MD_{T2} . Besarnya kenaikan permintaan uang untuk transaksi ini tentunya tidaklah sama antar orang, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor sosial, budaya, dan faktor psikologis masing-masing orang. Proporsi kenaikan pendapatan yang digunakan untuk menambah transaksinya dapat dilihat dari kemiringan kurva MD_T . Semakin landai kurva MD_T maka semakin besar proporsi kenaikan pendapatan yang digunakan untuk membiayai transaksi. Sebaliknya semakin curam kurva MD_T , maka semakin kecil proporsi kenaikan pendapatan yang digunakan untuk membiayai transaksinya.

Motif spekulasi (MD_s). Permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pendapatan, tingkat bunga, jumlah kekayaan, keuntungan, sikap optimisme dan pesimisme seseorang. Tujuan utama dari motif transaksi ini adalah untuk mencari keuntungan dari permintaan uang tersebut. Dalam kegiatan perekonomian yang semakin maju, pasar uang dan pasar modal merupakan sarana untuk melakukan spekulasi. Orang bisa memaksimalkan fungsi uang dan mengharapkan memperoleh keuntungan dari jual beli saham di pasar modal. Keterkaitan permintaan uang untuk spekulasi dengan tingkat bunga dapat dituliskan dalam persamaan berikut ini:

$$MD_s = f(r)$$

Secara grafis, hubungan antara permintaan untuk spekulasi dan tingkat bunga, dapat dilihat pada Kurva 6.2 berikut ini.



Kurva 6.2 Permintaan Uang untuk Spekulasi

Hubungan antara permintaan uang untuk spekulasi dan tingkat bunga ditunjukkan dengan kemiringan (*slope*) yang **negatif**, artinya penurunan tingkat bunga akan mendorong orang untuk meningkatkan permintaan uang untuk spekulasi, begitu

pula sebaliknya. Pada tingkat bunga r_A jumlah uang yang diminta untuk spekulasi sejumlah M_A , sedangkan apabila tingkat bunga mengalami penurunan menjadi r_B , maka permintaan uang untuk spekulasi akan mengalami peningkatan menjadi M_B .

Tingkat bunga (r) yang sangat rendah akan mengakibatkan harga obligasi sangat tinggi sehingga orang cenderung akan tidak menginvestasikan uangnya untuk membeli obligasi. Selain itu tingkat bunga di masa lalu juga akan mempengaruhi orang dalam menginvestasikan uangnya. Misalnya pada masa lalu tingkat bunga sangat tinggi dan kemudian turun sangat rendah dan setelah itu orang berekspektasi suku bunga tidak akan turun lagi maka orang akan berekspektasi suku bunga akan mengalami kenaikan di masa depan. Orang yang memiliki obligasi pada saat naiknya suku bunga akan mengalami kerugian modal (*capital loss*). Dengan sendirinya jika ada ekspektasi suku bunga di masa datang akan mengalami kenaikan, maka orang akan memilih untuk memegang uang tunai. Sebaliknya apabila ada ekspektasi bahwa tingkat bunga di masa yang akan datang mengalami penurunan, maka orang akan membeli obligasi dan mengurangi memegang uang tunai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan kapital (*capital gain*) berupa kenaikan harga obligasi yang dibelinya. Dari perilaku ini dapat disimpulkan bahwa harapan konsumen terhadap tingkat bunga di masa datang akan mempengaruhi permintaan uang untuk motif spekulasi.

Motif berjaga-jaga (MD_p). Seperti halnya permintaan uang untuk transaksi, motif berjaga-jaga berhubungan erat dengan tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan maka semakin besar jumlah uang yang digunakan untuk berjaga-jaga. Keterkaitan permintaan uang untuk berjaga-jaga dengan tingkat pendapatan dapat dituliskan dalam bentuk persamaan berikut ini:

$$MD_p = f(Y)$$

Motif ini didasari adanya suatu yang tidak pasti (*uncertainty*) dan orang tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, sehingga pengeluaran untuk peristiwa tidak pasti itu tidak dapat diperkirakan pula. Ilustrasi sederhana, seseorang yang akan melakukan perjalanan bisnis dari Yogyakarta ke Jakarta dengan kereta api, dapat memperkirakan pengeluaran yang bersifat pasti, misalnya ongkos tiket, ongkos taksi, dan biaya penginapan. Di sisi lain ada kemungkinan pengeluaran yang tidak dapat diperkirakan, misalnya apabila dia sakit. Untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak pasti itu, seseorang memerlukan uang tunai untuk berjaga-jaga. Selain tingkat pendapatan, permintaan uang untuk berjaga-jaga juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Kenaikan tingkat bunga yang sedemikian tinggi akan mengakibatkan orang untuk mengurangi memegang uang tunai dengan konsekuensi orang tersebut bersedia mengambil risiko yang lebih besar apabila terjadi peristiwa yang tidak diperkirakan sebelumnya karena mengharapkan pendapatan bunga.

b. Teori Kuantitas Uang Neo-Klasik

Menurut pandangan kelompok neoklasik, uang tidak dapat memberi kepuasan secara langsung. Uang akan berarti setelah ditukarkan dengan barang-barang yang dapat memberi kepuasan secara langsung kepada pemegang uang. Uang dapat dipergunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan sehingga semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang tersebut. Menurut pandangan neo klasik, jumlah uang beredar dikalikan dengan kecepatan peredaran uang (*velocity of money*) sama dengan tingkat harga rata-rata dikalikan dengan jumlah transaksi pada periode yang bersangkutan. Secara matematis, teori kuantitas uang menurut pandangan neo klasik dapat dituliskan sebagai berikut:

$$MV = PT$$

Keterangan:

M = jumlah uang beredar pada satu periode (M1)

V = kecepatan peredaran uang

P = harga rata-rata satu periode

T = banyaknya transaksi per periode.

Tabel 6.2
Indikator Moneter Indonesia Periode Mei 2016
(dalam miliar Rp)

No	Items	31 Mei 2016
1	Uang Primer	898,768
	antara lain:	
	Saldo Giro Bank pada BI	260,686
	Uang Kertas dan Uang Logam yang Diedarkan	534,715
2	Posisi Aktiva Luar Negeri Bersih 1)	1,371,925
3	Aktiva Domestik Bersih 2)	-473,157
	antara lain:	
	Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat	143,982
	antara lain : Obligasi Pemerintah	143,982
	Kredit Likuiditas 3)	58
	antara lain : BULOG	58
	Operasi Pasar Terbuka	-192,634
4	Memorandum item: Cadangan Devisa (konsep IRFCL) 4) dalam juta USD	103,591

Sumber: Laporan Bank Indonesia, 2015

Analisis IS dan LM

Pasar Barang dan Kurva IS

Variabel yang diperhitungkan di pasar barang, ditentukan oleh jenis perekonomian suatu negara. Dalam bab perhitungan pendapatan nasional, perekonomian dibagi menjadi empat bentuk, yaitu:

- a. Perekonomian tertutup sederhana
- b. Perekonomian tertutup
- c. Perekonomian terbuka.

Dalam perekonomian tertutup, ada empat variabel yang menentukan yaitu pengeluaran konsumsi (C), tabungan (S), pengeluaran investasi (I), dan pendapatan nasional (Y). Untuk perekonomian tertutup, ada peranan pemerintah sehingga variabel yang digunakan bertambah tiga variabel, yaitu pajak (Tx), transfer (Tr), dan pengeluaran pemerintah (G). Apabila perekonomian berbentuk perekonomian terbuka, maka dua variabel tambahannya adalah impor (M) dan ekspor (X). Tidak seperti pada analisis pendapatan nasional, dalam analisis IS-LM, variabel investasi diperlakukan sebagai variabel endogen, yaitu variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel diluar variabel tersebut. Secara teoritis, pengeluaran investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (r), atau dapat dituliskan:

$$I = f(r)$$

$$I = I_0 - k r$$

Keterangan:

I : besarnya investasi

I_0 : besarnya investasi saat tingkat bunga nol

k : nilai konstanta

r : tingkat bunga

Kurva IS adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional (Y) pada berbagai tingkat bunga (r) dimana pasar barang berada pada posisi keseimbangan. Jadi kurva IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang.

Dalam perekonomian sederhana, perekonomian dalam kondisi keseimbangan apabila investasi sama dengan tabungan ($S = I$) atau konsumsi ditambah dengan investasi ($Y = C + I$). Dengan adanya tingkat suku bunga yang mempengaruhi investasi, maka pendapatan nasional keseimbangan untuk perekonomian tertutup dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y = C + I$$

$$Y = (C_0 + c Y) + (I + r)$$

$$Y = C_0 + c Y + I + r$$

$$Y - c Y = C_0 + I + r$$

$$(1 - c) Y = C_0 + I + r$$

sehingga:

$$Y \frac{C_0 + I + r}{1 - c}$$

Contoh 1 (menentukan fungsi IS)

Diketahui:

$$C = 200 + 0,50 Y$$

$$I = 50 - 10 r$$

Ditanya:

- Tentukan keseimbangan di pasar barang
- Gambarkan kurvanya serta penjelasannya

Jawab:

- Keseimbangan di pasar barang

$$Y = C + I$$

$$Y = 200 + 0,50 Y + 50 - 10 r$$

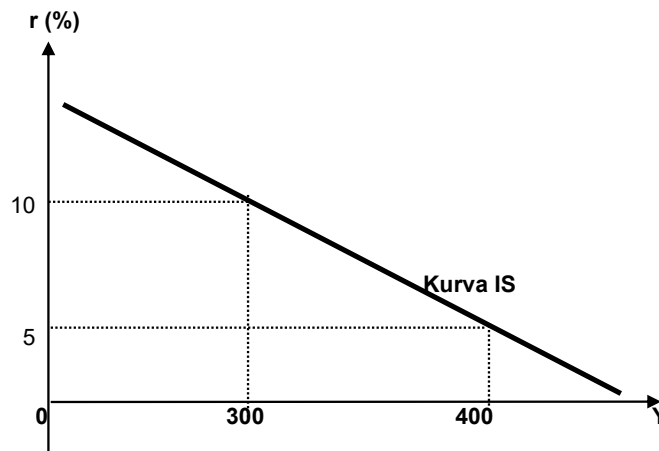
$$Y - 0,50 Y = 200 + 50 - 10 r$$

$$0,50 Y = 250 - 10 r$$

$$Y = 500 - 20 r$$

- Kurva dan penjelasannya

Dari kasus tersebut diperoleh persamaan kurva IS, yaitu $Y = 500 - 20 r$, dan ini merupakan keseimbangan di pasar barang. Persamaan ini dapat digambarkan dalam kurva berikut ini:



Kurva 6.3 Keseimbangan di Pasar Barang

Dengan menggambarkan kasus 1 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat bunga mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional, kenaikan tingkat bunga akan mengakibatkan turunnya tingkat pendapatan nasional keseimbangan. Pada tingkat suku bunga 5 persen, maka pendapatan nasional $Y = 500 - 20 (5) = 400$. Kenaikan

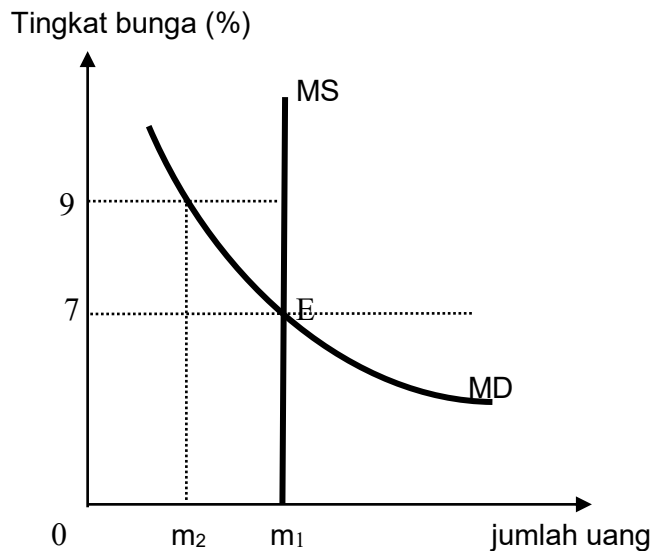
tingkat suku bunga menjadi 10 persen akan mengubah pendapatan nasional menjadi $Y = 500 - 20(10) = 300$.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pergeseran kurva IS menjauhi titik origin (titik O), yaitu:

- Kenaikan pengeluaran pemerintah (G)
- Kenaikan transfer pemerintah (Tr)
- Penurunan tingkat pajak (Tx)
- Meningkatnya pengeluaran masyarakat (C)
- Meningkatnya nilai ekspor (X)

Pasar uang dan Kurva LM

Keseimbangan di pasar uang (*money market equilibrium*) terjadi pada saat jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif, sama dengan jumlah uang beredar atau penawaran uang. Secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah uang yang diinginkan dan mampu diminta meningkat seiring dengan penurunan tingkat suku bunga. Dalam jangka pendek, jumlah uang beredar diasumsikan tetap (*given*), sehingga keseimbangan tersebut dapat digambarkan secara grafis sebagai berikut.



Kurva 6.4. Keseimbangan di Pasar Uang

MD atau permintaan uang menunjukkan berbagai kombinasi jumlah uang yang akan diminta pada berbagai tingkat suku bunga di pasar. MS merupakan kurva jumlah penawaran uang atau jumlah uang beredar yang berbentuk garis vertikal, yang berarti bahwa jumlah uang beredar tetap berapapun tingkat suku bunganya. Pada saat tingkat suku bunga sebesar 7 persen, jumlah uang adalah m_1 . Apabila suku bunga mengalami kenaikan dari 7 persen menjadi 9 persen, maka jumlah uang yang diminta

akan mengalami penurunan menjadi m_2 . Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga akan mengakibatkan orang akan mengurangi memegang aset dalam bentuk uang tunai dan menggantikannya dalam bentuk portofolio. Apabila dalam kondisi tingkat suku bunga tinggi orang memegang asetnya dalam bentuk uang tunai, maka orang tersebut akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga. Keseimbangan tercapai pada saat kurva permintaan uang berpotongan dengan kurva penawaran uang, yaitu di titik E.

Menurut teori permintaan uang Keynes, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

$$\begin{aligned} MD_T &= f(Y) \\ MD_P &= f(Y) \\ MD_S &= f(r) \end{aligned}$$

Sehingga dapat dituliskan:

$$\begin{aligned} M1 &= MD_T + MD_P \\ M2 &= MD_S \\ Md &= M1 + M2 \end{aligned}$$

Permintaan uang secara keseluruhan adalah:

$$Md = f(Y) + f(r)$$

Keseimbangan di pasar uang dapat digambarkan oleh kurva LM. Kurva LM adalah kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya tingkat pendapatan nasional (Y) pada berbagai tingkat bunga (r), di mana pasar uang berada pada posisi keseimbangan.

Contoh 2 (menentukan fungsi LM)

Diketahui:

Jumlah uang beredar adalah 650. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga adalah $M1 = 0,25 Y$. Permintaan uang untuk spekulasi adalah $M2 = 400 - 50 r$

Ditanya:

- Tentukan keseimbangan di pasar uang
- Gambarkan kurvanya serta penjelasannya

Jawab:

- Keseimbangan di pasar uang

$$\begin{aligned} M_s &= 650 \\ M_d &= M1 + M2 \\ &= 0,25 Y + 400 - 50 r \end{aligned}$$

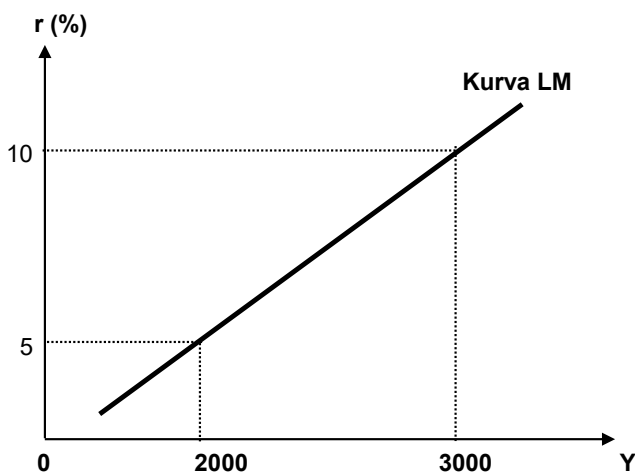
Kondisi keseimbangan terjadi apabila

$$M_s = M_d$$

$$\begin{aligned}
650 &= 0,25 Y + 400 - 50 r \\
650 - 400 + 50 r &= 0,25 Y \\
250 + 50 r &= 0,25 Y \text{ atau dibalik menjadi} \\
0,25 Y &= 250 + 50 r \\
Y &= 1000 + 200 r
\end{aligned}$$

b. Kurva dan penjelasannya

Dari penyelesaian kasus tersebut diperoleh persamaan kurva LM, yaitu $Y = 1000 - 200 r$, dan ini merupakan keseimbangan di pasar uang. Persamaan ini dapat digambarkan dalam kurva berikut ini:



Kurva 6.5 Keseimbangan di Pasar Uang

Dari Kurva 6.5 terlihat bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan mengakibatkan kenaikan tingkat pendapatan nasional riil (Y). Dengan tingkat bunga sebesar 5 persen, pendapatan nasional sebesar 2000. Kenaikan tingkat suku bunga menjadi 10 persen akan mengakibatkan pendapatan nasional naik menjadi 3000.

Keseimbangan di Pasar Barang dan Pasar Uang

Keseimbangan umum (*general equilibrium*) terjadi pada saat besarnya pendapatan nasional (Y) dan tingkat suku bunga (r) mencerminkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga keseimbangan, baik di pasar barang maupun pasar uang. Secara grafis, kondisi ini tercapai pada saat perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Untuk memperjelas kondisi keseimbangan umum ini, perhatikan Contoh 3 berikut ini.

Contoh 3 (menentukan keseimbangan umum)

Diketahui:

Keseimbangan di pasar barang dan pasar uang ditunjukkan fungsi berikut ini:

$$\text{Persamaan kurva IS} \quad Y = 1.750 - 20r$$

$$\text{Persamaan kurva LM} \quad Y = 1.100 + 2000r$$

Ditanya:

- Tentukan keseimbangan umum di pasar barang dan pasar uang
- Gambarkan kurvanya

Jawab:

a. Keseimbangan umum

$$Y = 1.750 - 20r$$

$$Y = 1.100 + 2.000r$$

$$0 = 650 - 1.980r$$

$$1.980r = 650$$

$$r = 650 / 1.980$$

$$r = \mathbf{0,328}$$

Dengan mensubstitusikan ke salah satu persamaan IS ataupun LM, diperoleh tingkat pendapatan nasional keseimbangan adalah:

$$Y = 1.100 + 2000r$$

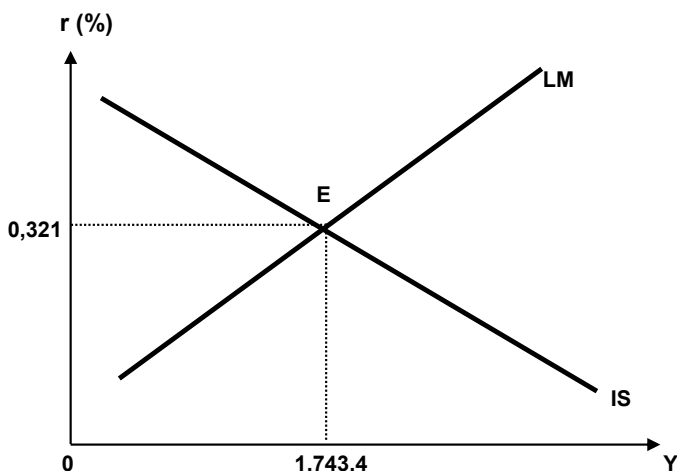
$$Y = 1.100 + 2000(0,328)$$

$$Y = 1.100 + 656$$

$$Y = 1.756$$

Dari perhitungan tersebut diperoleh tingkat keseimbangan umum dengan tingkat bunga sebesar 0,328 dan tingkat pendapatan nasional adalah 1.756.

b. Gambar kurvanya



Kurva 6.6 Keseimbangan Umum di Pasar Uang dan Pasar Barang

BANK SENTRAL

Bank Sentral Sebagai Lembaga Independen

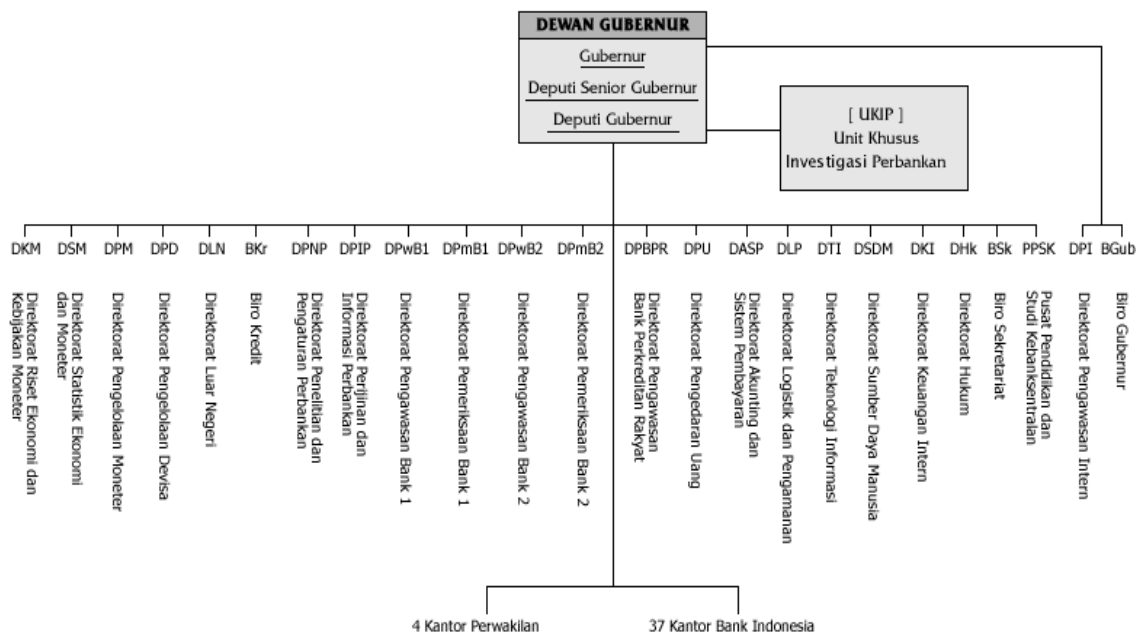
Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan lembaga negara yang independen didasarkan pada undang-undang UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, yang dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. UU ini memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan, baik dari pemerintah maupun pihak lainnya.

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun, baik dari pemerintah, swasta, maupun asing.

Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan

hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Struktur organisasi bank sentral adalah:



Sumber: Bank Indonesia, 2004

Tugas Bank Sentral

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh dua pilar yang merupakan dua bidang tugasnya. Kedua bidang tugas ini adalah:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Kedua tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Bank sentral akan menetapkan target yang ingin dicapainya untuk mengendalikan kondisi perekonomian, misalnya mengenai jumlah uang beredar, suku bunga, dan laju pertumbuhan hutang. Target dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu target pokok (*ultimate target*) dan target antara (*intermediate target*). Target pokok terdiri dari berbagai variabel, misalnya laju inflasi dan pengangguran ataupun *output* riil di mana variabel tersebut berdampak langsung pada perekonomian. Target antara terdiri dari laju tingkat suku bunga dan pertumbuhan jumlah uang beredar di mana variabel ini hanya digunakan oleh bank sentral untuk alat pencapaian tujuan pokok secara lebih akurat. Target antara ini tidaklah berdampak langsung pada kondisi perekonomian seperti halnya target pokok. Mekanisme keterkaitan antara instrumen kebijakan, target antara, dan target pokok dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6.1. Target dan Instrumen Kebijakan Bank Sentral

Instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai target antara dan target pokok biasanya adalah instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan terdiri dari penetapan cadangan wajib, tingkat suku bunga diskonto, operasi pasar terbuka, dan kebijakan pemberian kredit. Mekanisme instrumen kebijakan moneter dalam mengendalikan jumlah uang beredar dibahas secara rinci pada Bab 7 mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Target antara memberikan arah kebijakan yang bersifat konkrit pada bank sentral yang seharusnya dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang. Penetapan target antara ini juga penting bagi konsumen dan pelaku bisnis untuk menentukan pola pengeluaran konsumsi dan keputusan investasi. Dalam kondisi yang ideal, target antara dapat sepenuhnya dikendalikan oleh bank sentral sehingga target pokok dengan lebih mudah dapat dicapai. Kondisi ini sulit terjadi pada perekonomian yang kondisi sosial politiknya tidak stabil, sehingga target antara yang ditetapkan berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu yang relatif singkat. Target antara yang biasanya akurat untuk dicapai adalah jumlah uang primer.

Contoh 4 (menentukan target antara dan target pokok)

Target bank sentral adalah mencapai pertumbuhan GNP nominal 10 persen setiap tahunnya. Perhitungkan target antara yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan target pokok tersebut!

Jawab:

Bila otoritas moneter, dalam hal ini bank sentral menetapkan pertumbuhan GNP nominal sebesar 10 persen setiap tahunnya, maka bank sentral seharusnya menentukan target antara berupa stok uang beredar untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui pertumbuhan GNP riil, maka bank sentral juga mampu mencapai target pokok yang lainnya, yaitu laju inflasi maupun *output* riil.

Dari kasus di atas dalam kenyataannya sering menimbulkan *trade-off* antara laju inflasi dan pertumbuhan *output*. *Trade-off* merupakan kondisi yang saling meniadakan satu dengan yang lainnya. Bila laju inflasi cenderung meningkat, maka bank sentral akan mengurangi laju pertumbuhan *output* dari yang seharusnya. Banyaknya target antara ataupun target pokok memberikan fleksibilitas pada bank sentral untuk mengubah kebijakan moneternya dalam kondisi perekonomian yang kurang menentu. Dengan kata lain, fleksibilitas ini mengurangi kesalahan bank sentral dalam menetapkan suatu kebijakan.

Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan akan jasa keuangan.

Konsep dibentuknya lembaga pengawasan di Indonesia yang dipilih adalah otoritas penuh. Kewenangan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan LKBB berada dalam satu lembaga, sehingga tiga otoritas pengawasan yaitu pasar modal, perbankan, dan LKBB akan bergabung menjadi satu otoritas yang bersifat independen. Artinya Bank Sentral hanya memiliki kebijakan moneter tanpa berwenang melakukan pengawasan bank. Agar Bank Sentral tetap mendapatkan informasi mengenai kondisi bank, maka Bank Sentral berkoordinasi dengan otoritas pengawasan tersebut dengan cara Bank Sentral menempatkan pejabatnya secara *ex officio* sebagai anggota Dewan Komisiner otoritas pengawasan sekaligus sebagai *Chief Supervisory Officer (CSO)*.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

- c mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam menjalankan tugas tersebut OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia. Berikut bentuk kerjasama antar keduanya:

- a Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan, antara lain
 1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- b OJK menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan kesulitan likuiditas atau memburuknya kesehatan pada bank. Adapun yang dimaksud dengan langkah-langkah tersebut yaitu pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai "*lender of the last resort*" (LoLR).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa OJK mengambil alih tugas, wewenang, dan fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan yang dipegang oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini OJK melakukan pengawasan dan pengaturan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan. Yang merupakan aspek mikro. Sedangkan Bank Indonesia akan melakukan pengaturan dan pengawasan dalam aspek makronya. Keduanya akan saling berkoordinasi. Di mana Bank Indonesia yang menentukan kebijakan moneter sedangkan OJK melaksanakan teknis mikronya. Hal ini tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal tersebut, jelas bahwa tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK, karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan.

ISTILAH PENTING BAB INI

Double coincidence of wants

Money commodity

Undivisible

Time deposit

Medium of exchange

Unit of account

Store of value

Narrow money

Demand deposit

Broad money

Currency

Quasy money

General equilibrium

Tabungan giral utama

Tabungan giral deposit

Transaction motive

Speculative motive

Precautionary motive

Capital loss dan capital gain

Equilibrium of money market

Keseimbangan IS dan LM

General equilibrium

Tiga tugas Bank Indonesia

Ultimate target

Intermediate target

RANGKUMAN

1. Sebelum adanya uang yang terbuat dari kertas dan logam, uang terbuat dari barang tertentu (*commodity money*), misalnya emas dan perak. Emas dan perak digunakan sebagai uang karena memiliki sifat: diterima secara umum karena sifat kelangkaannya, mutu antar emas dengan emas lainnya relatif sama dan homogen, tidak mudah rusak dan relatif mudah dibagi-bagi, nilainya relatif stabil, disukai oleh orang banyak karena dapat digunakan sebagai perhiasan
2. Fungsi dasar uang selain sebagai alat transaksi berfungsi juga sebagai alat tukar, satuan nilai, ukuran pembayaran yang tertunda, dan penyimpan nilai. Konsep uang beredar di Indonesia terdiri dari *narrow money* (kartal dan giral), *broad money* (*narrow money* dan *time deposit* serta uang kuasi).
3. Motif permintaan uang ada tiga yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Motif transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh pendapatan, sedangkan motif spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.
4. Kurva IS adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional (Y) pada berbagai tingkat bunga (r) dimana pasar barang berada pada posisi keseimbangan. Keseimbangan di pasar uang (*money market equilibrium*) terjadi pada saat jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif, sama dengan jumlah uang beredar atau penawaran uang. Kurva LM menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional (Y) pada berbagai tingkat bunga (r) di mana pasar uang berada pada posisi keseimbangan.
5. Keseimbangan umum (*general equilibrium*) terjadi pada saat besarnya pendapatan nasional (Y) dan tingkat suku bunga (r) mencerminkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga keseimbangan, baik di pasar barang maupun pasar uang.

6. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pergeseran kurva IS menjauhi titik origin (titik O), yaitu:
 - a. Kenaikan pengeluaran pemerintah (G)
 - b. Kenaikan transfer pemerintah (Tr)
 - c. Penurunan tingkat pajak (Tx)
 - d. Meningkatnya pengeluaran masyarakat (C)
 - e. Meningkatnya nilai ekspor (X).
7. Tugas bank sentral ada tiga, yaitu: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta, dan mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya dikenal dengan tiga pilar utama bank sentral.
8. Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, Bank Indonesia menetapkan target utama (*ultimate target*) dan target antara (*intermediate target*). Target antara memberikan arah kebijakan yang bersifat konkrit pada bank sentral yang seharusnya dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang. Penetapan target antara ini juga penting bagi konsumen dan pelaku bisnis untuk menentukan pola pengeluaran konsumsi dan keputusan investasi. Target utama yang sepenuhnya dalam kendali Bank Indonesia adalah uang primer.

PERTANYAAN UNTUK LATIHAN

SOAL LATIHAN PILIHAN BERGANDA

1. Uang komoditas (*money commodity*) harus memiliki sifat paling tidak, *kecuali*:
 - a. tidak mudah rusak dan dapat dibagi-bagi menjadi unit-unit kecil
 - b. nilainya relatif stabil
 - c. jumlahnya tetap sepanjang masa
 - d. diterima secara umum oleh masyarakat sebagai pengguna
 - e. jawaban a dan c benar
2. Berikut ini adalah bentuk aktiva yang dapat digolongkan sebagai uang giral, *kecuali*:
 - a. deposito berjangka
 - b. rekening giro
 - c. kartu kredit
 - d. uang kertas dan uang koin
 - e. cek
3. Merupakan suatu bentuk aset yang fungsi dan cirinya “mendekati” fungsi uang tunai karena aset ini dapat digunakan untuk transaksi ekonomi meskipun harus melalui proses tertentu, merupakan pengertian dari:

- a. uang kuasi
 - b. uang kartal
 - c. *broad money*
 - d. *narrow money*
 - e. semua jawaban diatas benar
4. Berikut ini yang merupakan faktor penyebab bergesernya kurva IS menjauhi titik origin, *kecuali*:
- a. kenaikan pengeluaran pemerintah (G)
 - b. kenaikan transfer pemerintah (Tr)
 - c. meningkatnya nilai impor (M)
 - d. penurunan tingkat pajak (Tx)
 - e. meningkatnya pengeluaran masyarakat (C)
5. Berikut ini merupakan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, *kecuali*:
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
 - b. menjaga kelancaran sistem pembayaran serta
 - c. mengawasi perbankan di Indonesia
 - d. merencanakan, menentukan Anggaran dan Belanja Pemerintah
 - e. membuat aturan tentang perbankan nasional

SOAL LATIHAN ESSAY

1. Jenis uang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Jelaskan!
2. Jelaskan dengan menggunakan kurva, konsep *money market equilibrium*!
3. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan umum? Jelaskan dengan menggunakan kurva!
3. Apa keterkaitan antara *ultimate target*, *intermediate target*, dan *instrument* untuk mengatasi inflasi di Indonesia?
4. Apa yang dimaksud dengan kurva IS dan kurva LM? Jelaskan dengan menggambarkan kurvanya!

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Menurut Saudara, mengapa independensi Bank Indonesia perlu ditegakkan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Campur tangan pemerintah yang bagaimana yang dapat mengganggu tugas dan peran Bank Indonesia?
2. Di negara berkembang seperti Indonesia, motif permintaan uang untuk spekulasi relatif masih rendah. Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi?

3. Apa saja kelemahan uang kartal. Menurut Saudara, bagaimana sebaiknya cara untuk mengatasi kelemahan tersebut agar masyarakat merasa aman untuk menggunakan uang sesuai fungsinya?



TEORI INFLASI

1. Konsep Dasar Inflasi
2. Penyebab Timbulnya Inflasi
3. Cara Perhitungan Inflasi
4. Dampak Inflasi
5. Kebijakan Mengatasi Inflasi
6. Sejarah Inflasi Indonesia
7. Pengendalian Inflasi antara BI dan Pemerintah

KONSEP DASAR INFLASI

Inflasi merupakan permasalahan ekonomi yang dapat terjadi, baik di negara maju ataupun di negara berkembang seperti Indonesia. Dinamika dan perkembangan ekonomi yang berdampak pada peningkatan permintaan akan barang dan jasa pada kapasitas perekonomian yang terbatas merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara **umum** dan **terus-menerus**. “umum” berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, terlebih lagi kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar. **Terus-menerus** berarti bahwa kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja, misalnya kenaikan harga barang menjelang hari raya. Kenaikan harga pada kondisi tertentu tidak menjadi permasalahan karena harga akan kembali normal. Jenis barang yang digolongkan untuk perhitungan inflasi, diantaranya adalah harga barang kelompok makanan, kelompok perumahan, dan kelompok pakaian.

Secara umum, inflasi merugikan bagi sebagian besar masyarakat. Untuk mengatasi dan mengantisipasi kerugian ini, maka masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi lainnya harus mampu membaca gejala dan tren inflasi yang telah terjadi sebelumnya. Jika berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya rata-rata inflasi 10 persen per tahun, maka pengusaha dapat memasukkan perubahan harga itu dalam struktur harga barang yang dihasilkannya. Begitu pula dengan kelompok masyarakat yang berpendapatan tetap dapat menuntut kenaikan gaji atau upah sebesar rata-rata inflasi yang terjadi sehingga pendapatannya secara riil tidak mengalami penurunan.

Dengan memperhitungkan inflasi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, kebijakan-kebijakan ekonomi dapat lebih bersifat rasional. Bila masyarakat memahami bahwa rata-rata inflasi yang terjadi selama beberapa tahun belakangan, misalnya 20 persen, maka masyarakat akan memutuskan untuk tidak menabung apabila pendapatan bunga dari tabungan tersebut lebih rendah dari pada inflasi. Kondisi ini akan berbahaya apabila masyarakat mewujudkan uangnya untuk membeli barang sehingga meningkatkan permintaan efektif dan di sisi lain penawaran tetap. Hal ini akan menjadi “bahan bakar” terjadinya inflasi di periode berikutnya.

PENYEBAB TIMBULNYA INFLASI

Laju inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian sasaran pembangunan, laju inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat serta tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi juga akan mempengaruhi garis batas angka kemiskinan. Dalam kaitan ini, pemerintah akan terus menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah sehingga tidak terjadi tekanan pada jumlah masyarakat miskin.

Dengan memperhatikan pentingnya tingkat inflasi tersebut, pemerintah akan menyusun program-program kerja yang mampu menjaga inflasi di tingkat yang rendah

dan stabil. Dalam kaitannya dengan penyusunan APBN, tingkat inflasi akan menjadi faktor penting dalam perhitungan dan penyusunan penerimaan dan belanja negara.

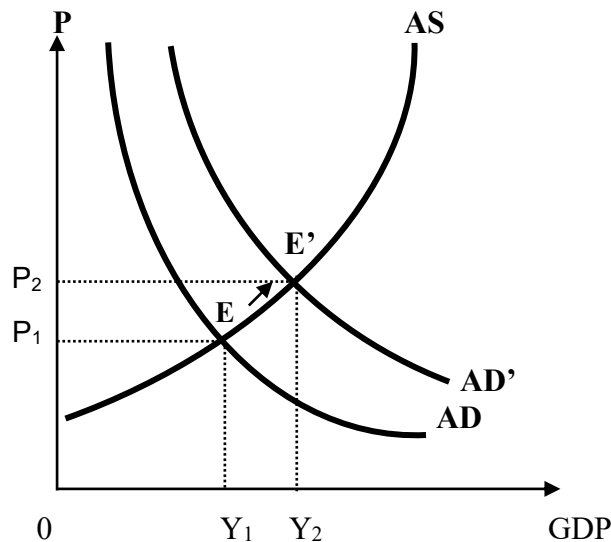
1. Inflasi Akibat Tarikan Permintaan dan Dorongan Biaya Produksi

Penyebab terjadinya inflasi dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu:

- a. Inflasi akibat tarikan permintaan (*demand-pull inflation*)
- b. Inflasi akibat dorongan biaya produksi (*cost-push inflation*)

a. Inflasi akibat tarikan permintaan

Inflasi terjadi karena jumlah barang yang diminta secara total (*aggregate demand* atau AD) melebihi jumlah barang yang ditawarkan dalam perekonomian (*aggregate supply* atau AS). Dengan kata lain, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa tertentu selalu mengalami peningkatan sementara di sisi lain kapasitas produksi tetap atau tidak dapat ditingkatkan. Kapasitas produksi yang lebih rendah daripada yang dibutuhkan masyarakat tersebut dapat diakibatkan karena dua hal. *Pertama*, kapasitas produksi yang ada sudah optimal (*full-employment*) sehingga tidak dapat ditingkatkan lagi. *Kedua*, kapasitas produksi tidak digunakan secara penuh karena keterbatasan sumber daya yang ada atau teknologinya tidak memadai (*under-employment*). Peningkatan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan harga. Jenis inflasi ini sering disebut dengan *demand pull inflation* atau inflasi yang disebabkan oleh besarnya permintaan.



Kurva 7.1 Inflasi Akibat Tarikan Permintaan

Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan secara total oleh suatu perekonomian ditunjukkan oleh kurva AS. Mula-mula permintaan masyarakat terhadap barang dan

jasa yang dihasilkan tersebut ditunjukkan oleh kurva permintaan AD, sehingga di pasar terjadi harga keseimbangan awal (P_1) dan jumlah keseimbangan awal (Q_1). Karena kapasitas perekonomian tidak mampu menghasilkan barang dan jasa melebihi penawaran awal AS dan di sisi lain permintaan meningkat menjadi AD' , maka harga akan naik dari P_1 menjadi P_2 . Kenaikan permintaan inilah yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga, sehingga menyebabkan terjadinya inflasi dari sisi permintaan. Kenaikan permintaan ini dapat diakibatkan oleh pertambahan jumlah penduduk maupun semakin bertambahnya jenis dan jumlah kebutuhan masyarakat.

Contoh 1 (Pengaruh perubahan permintaan terhadap harga dan kuantitas)

Diketahui:

$$\begin{array}{l} \text{Fungsi AD} \quad QD = 150 - 2 P \\ \text{Fungsi AS} \quad QS = 120 + 0,5 P \end{array}$$

Ditanya:

- Hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan!
- Bila AD naik yang ditunjukkan oleh fungsi permintaan menjadi $QD = 200 - 2 P$ dan AS tetap, bagaimana pengaruhnya terhadap harga?
- Tunjukkan pengaruh tersebut secara grafis!

Jawab:

- Harga dan kuantitas keseimbangan

$$\begin{array}{l} \text{Fungsi AD} \quad QD = 150 - 2 P \\ \text{Fungsi AS} \quad QS = 120 + 0,5 P \end{array}$$

Keseimbangan terjadi saat $QD = QS$

$$\begin{array}{l} 150 - 2 P = 120 + 0,5 P \\ 150 - 120 = 0,5 P + 2 P \\ 30 = 2,5 P \\ P = \frac{30}{2,5} \end{array}$$

$$P_e = 12$$

Jadi harga keseimbangan adalah 12

Dengan mensubstitusikan P_e kedalam fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran, akan diperoleh kuantitas keseimbangan:

Fungsi permintaan: $QD = 150 - 2 P$ $= 150 - 2 (12)$ $= 150 - 24$	Fungsi penawaran : $Qs = 120 + 0,5 P$ $= 120 + 0,5 (12)$ $= 120 + 6$ $Qe = 126$
--	---

Kuantitas keseimbangan adalah 126

- b. Perubahan harga apabila permintaan naik dan penawaran tetap

Jika fungsi permintaan konsumen berubah menjadi $QD=200-2P$ dan penawarannya tetap sehingga fungsi penawarannya juga tetap. Pengaruhnya terhadap harga keseimbangan adalah:

$$\begin{array}{lcl} \text{Fungsi permintaan} & QD & = 200 - 2P \\ \text{Fungsi penawaran} & QS & = 120 + 0,5P \end{array}$$

Keseimbangan terjadi saat $QD = QS$

$$\begin{array}{lcl} 200 - 2P & = & 120 + 0,5P \\ 200 - 120 & = & 0,5P + 2P \\ 80 & = & 2,5P \\ P & = & \frac{80}{2,5} \\ \text{Pe} & = & \mathbf{32} \end{array}$$

Kuantitas keseimbangan yang baru dapat dihitung dengan mensubstitusikan ke fungsi AD atau fungsi AS:

Fungsi AD:

$$\begin{array}{l} QD = 200 - 2P \\ = 200 - 2(32) \\ = 200 - 64 \end{array}$$

$$Q_e = 136$$

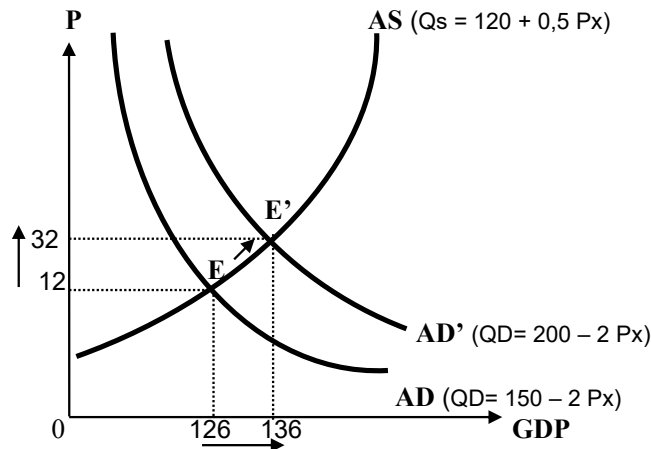
Fungsi AS :

$$\begin{array}{l} Q_s = 120 + 0,5P \\ = 120 + 0,5(32) \\ = 120 + 16 \end{array}$$

$$Q_e = 136$$

Kuantitas keseimbangan adalah 136

- c. Pengaruh terhadap harga dan kuantitas secara grafis

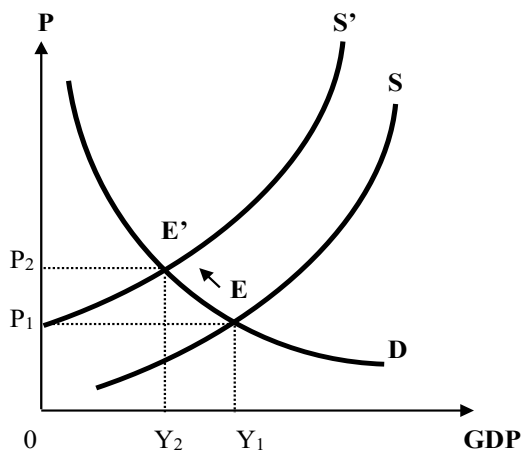


Kurva 7.2 Perubahan Harga dan Kuantitas Sisi Permintaan

Dari contoh 1 tersebut, terlihat bahwa kenaikan permintaan yang tidak diikuti oleh kenaikan penawaran akan mengakibatkan harga naik dari 12 menjadi 32.

b. Sisi penawaran (*supply side*)

Dari sisi penawaran, kenaikan harga dapat terjadi karena turunnya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya jumlah produksi beras menurun pada musim tanam tertentu yang disebabkan oleh kegagalan panen. Turunnya produksi beras dan di sisi lain permintaannya tetap akan dapat mengakibatkan kenaikan harga. Selain kegagalan panen, penurunan jumlah barang yang ditawarkan juga bisa disebabkan oleh semakin mahalnya biaya produksi. Dengan asumsi jumlah modal perusahaan tetap, maka kenaikan biaya produksi akan berdampak pada pengurangan kapasitas produksi. Jenis inflasi ini sering disebut dengan *cost-push inflation* atau inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi.



Kurva 7.3 Inflasi dari Sisi Penawaran

Dalam kondisi normal, produksi beras ditunjukkan oleh kurva penawaran awal (AS) dengan permintaan awal (AD). Keseimbangan terjadi dititik E dengan harga keseimbangan P_1 dan jumlah keseimbangan Q_1 . Apabila terjadi kegagalan panen, ini akan mengakibatkan turunnya jumlah produksi beras sehingga kurva penawarannya bergeser ke kiri atas dari AS ke AS'. Kondisi ini mengakibatkan keseimbangan bergeser dari E ke E' dan harga naik menjadi P_2 .

Contoh 2 (Pengaruh perubahan penawaran terhadap harga dan kuantitas)

Diketahui:

Fungsi AD	QD	=	$500 - 2,5 P$
Fungsi AS	QS	=	$140 + 0,5 P$

Ditanya:

- Hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan!
- Bila penawaran turun yang ditunjukkan oleh fungsi penawaran menjadi $Q_S = 30 + 1,25 P$ dan penawaran tetap, bagaimana pengaruhnya terhadap harga?
- Tunjukkan pengaruh tersebut secara grafis!

Jawab:

- Harga dan kuantitas keseimbangan
 Fungsi AD $Q_D = 500 - 2,5 P$
 Fungsi AS $Q_S = 140 + 0,5 P$

Keseimbangan terjadi saat $Q_D = Q_S$

$$\begin{aligned} 500 - 2,5 P &= 140 + 0,5 P \\ 500 - 140 &= 2,5 P + 0,5 P \\ 360 &= 3 P \end{aligned}$$

$$P_x = \frac{360}{3}$$

$$P_e = 120$$

Jadi harga keseimbangan adalah 120

Fungsi AD:

$$\begin{aligned} Q_D &= 500 - 2,5 P \\ &= 500 - 2,5 (120) \\ &= 500 - 300 \end{aligned}$$

$$Q_e = 200$$

Fungsi AS:

$$\begin{aligned} Q_s &= 140 + 0,5 P \\ &= 140 + 0,5 (120) \\ &= 140 + 60 \end{aligned}$$

$$Q_e = 200$$

Kuantitas keseimbangan adalah 200

- Perubahan harga apabila penawaran naik dan permintaan tetap

$$\begin{aligned} \text{Fungsi AD} \quad Q_D &= 500 - 2,5 P \\ \text{Fungsi AS} \quad Q_S &= 30 + 1,25 P \end{aligned}$$

Keseimbangan terjadi saat $Q_D = Q_S$

$$\begin{aligned} 500 - 2,5 P &= 30 + 1,25 P \\ 500 - 30 &= 2,5 P + 1,25 P \\ 470 &= 3,75 P \end{aligned}$$

$$P_x = \frac{470}{3,75}$$

$$P_e = 125,33$$

Fungsi AD:

$$\begin{aligned} QD &= 500 - 2,5 P \\ &= 500 - 2,5 (125,33) \\ &= 500 - 313,33 \end{aligned}$$

$$Q_e = 186,66$$

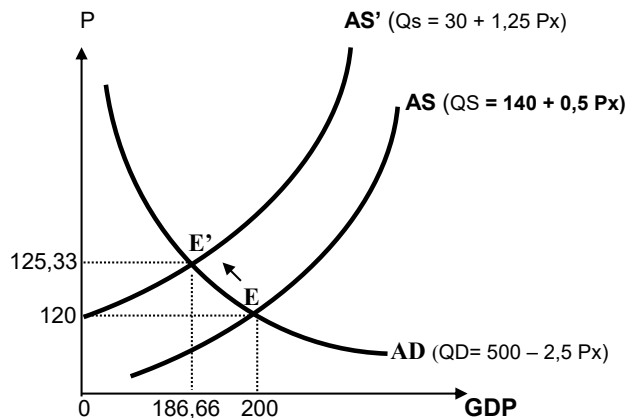
Fungsi AS:

$$\begin{aligned} Q_s &= 30 + 1,25 P \\ &= 30 + 1,25 (125,33) \\ &= 30 + 156,66 \end{aligned}$$

$$Q_e = 186,66$$

Kuantitas keseimbangan adalah 186,66

c. Pengaruh terhadap harga dan kuantitas secara grafis



Kurva 7.4. Perubahan Harga dan Kuantitas Sisi Penawaran

Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa penurunan penawaran di satu sisi dan dengan permintaan yang tetap, akan mengakibatkan harga naik dari 120 menjadi 125,33.

2. Inflasi Menurut Teori Kuantitas

Kenaikan harga akan terjadi apabila kuantitas uang ditingkatkan, itu pernyataan sederhana dari teori kuantitas uang. Menurut teori ini, harga-harga adalah proporsi langsung dari jumlah uang, atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$P = k \cdot M$$

Keterangan:

- P : tingkat harga (*price*)
- k : proporsi tertentu (konstan)
- M : jumlah uang

Jika P dan M dinyatakan dalam angka indeks 100 untuk tahun dasar (*based year*) tertentu dan nilai k adalah 0,75, maka menurut teori kuantitas: bila jumlah uang beredar dinaikkan sebesar satu persen dari jumlah semula, maka tingkat harga akan naik $\frac{1}{2}$ persen.

Menurut teori kuantitas, ada dua penyebab terjadinya inflasi:

- a. Jumlah uang yang beredar (JUB) melebihi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Harapan psikologis akan terjadinya kenaikan harga di masa yang akan datang memperparah terjadinya inflasi

Jumlah uang beredar yang berlebihan merupakan pendorong utama terjadinya inflasi, baik uang kartal maupun uang giral. Ada beberapa sebab terjadinya kelebihan JUB, diantaranya karena terjadinya defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dari mencetak uang. Semakin besar defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dari mencetak uang, maka inflasi yang terjadi semakin parah.

Selain jumlah uang beredar, harapan psikologis masyarakat mengenai harga di masa datang juga akan mengakibatkan inflasi. Apabila masyarakat mengharapkan dan memperkirakan bahwa harga di masa mendatang akan mengalami kenaikan, maka penambahan jumlah uang beredar akan direspon dengan membelanjakan uang yang diterima tersebut. Tindakan ini dilakukan masyarakat untuk menghindari kerugian dari memegang uang tunai dan membelanjakannya dalam bentuk barang. Kondisi ini akan makin parah apabila masyarakat sudah meyakini bahwa kenaikan harga dari waktu ke waktu makin besar sehingga masyarakat akan merespon dengan membelanjakan uangnya melebihi dari tambahan jumlah uang beredar. Kondisi ini bila tidak segera diatasi, dapat berakibat terjadinya hiperinflasi.

Ada beberapa **kelemahan** teori ini, yaitu tidak jelasnya mekanisme alur pengaruh penambahan jumlah uang beredar dan pertambahan pengeluaran yang diakibatkannya dan jenis pengeluaran apa yang bisa mengakibatkan terjadinya inflasi. Respon masyarakat untuk menambah pembelian barang dan jasa akibat penambahan jumlah uang beredar tidak akan terjadi apabila perekonomian sudah mencapai kapasitas penuh (*full employment*). Dalam kondisi kapasitas optimal, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tidak dapat ditambah lagi melebihi kapasitas optimal tersebut.

Kelemahan ini disempurnakan oleh Wicksell. Menurutnya mengalirnya uang dalam perekonomian dalam bentuk pinjaman bank kepada para pengusaha guna membiayai kelebihan investasi yang tidak dapat dibiayai dari tabungan yang ada. Pembiayaan kelebihan investasi tersebut merupakan tambahan neto terhadap permintaan barang, di mana jumlahnya tidak berubah karena perekonomian dalam kondisi *full-employment*. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga barang dan harga faktor produksi.

3. Inflasi Akibat Perang

Kenaikan jumlah uang beredar juga dapat disebabkan perang atau ketidakstabilan politik suatu negara. Dalam kondisi perang dan ketidakstabilan politik, pemerintah membutuhkan biaya yang besar. Apabila pendanaannya dibiayai dengan mencetak uang baru, maka ini akan memicu terjadinya inflasi. Inflasi jenis ini disebut juga dengan inflasi perang (*war inflation*). Contoh konkrit dari inflasi perang ini pernah dialami oleh Amerika Serikat. Pada saat perang dunia II, Amerika Serikat telah mengambil **tindakan moneter**

untuk mencegah terjadinya ekspansi kredit bank. Ini berarti bahwa untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah membiayainya dengan menjual obligasi kepada masyarakat, dan bukan pada bank. Akibatnya hal ini menimbulkan tekanan yang kuat pada suku bunga, karena masyarakat hanya akan bersedia membeli obligasi dengan tingkat suku bunga yang sedemikian tinggi (harga obligasi menjadi murah).

Tindakan fiskal dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan cara meningkatkan pajak untuk memperkecil defisit anggaran pemerintah. Kenaikan pajak dapat berakibat pada menurunnya permintaan efektif masyarakat sehingga harga dapat lebih dikendalikan daripada melalui peningkatan suku bunga. Akan tetapi perlu pula diingat bahwa kenaikan pajak akan berpengaruh negatif pada perekonomian secara makro. Masalah makro yang timbul diantaranya adalah menurunkan motivasi masyarakat untuk bekerja karena tingginya pajak yang harus mereka tanggung apabila mereka memperoleh penghasilan. Dengan kata lain, peningkatan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat dan ini akan menurunkan kapasitas perekonomian secara keseluruhan.

Di sisi lain memang tidak dapat dipungkiri bahwa inflasi yang diakibatkan perang ini tidak meliputi seluruh barang yang ada dalam perekonomian. Biasanya jenis barang yang mengalami kenaikan yang fantastis hanyalah untuk jenis barang yang diperlukan secara mutlak dalam kondisi perang tersebut, misalnya peralatan militer, perlengkapan perang, dan kebutuhan logistik perang. Dalam kondisi seperti ini, tindakan fiskal dan moneter tidak dapat mengendalikan harga barang keperluan pokok perang.

4. Inflasi menurut teori Keynes

Menurut Keynes, inflasi terjadi karena beberapa kelompok masyarakat ingin “hidup di luar batas kemampuannya” secara ekonomi. Kelompok masyarakat ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Pemerintah
- b. Pengusaha swasta
- c. Serikat buruh

Pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan pada inflasi menurut teori kuantitas, pemerintah dapat menyebabkan inflasi apabila defisit anggaran pemerintah dibiayai dengan cara mencetak uang baru. Semakin besar defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dari mencetak uang baru, akan semakin memperparah terjadinya inflasi. Pemerintah ingin memperoleh bagian yang lebih besar dari *output* masyarakat dengan cara menjalankan defisit anggaran yang dilakukan dengan meningkatkan anggaran pengeluaran pemerintah.

Pengusaha. Pengusaha dapat juga menyebabkan timbulnya inflasi dengan cara memaksakan diri untuk melakukan investasi baru secara besar-besaran dan investasi itu diperoleh dari kredit bank.

Serikat buruh. Serikat buruh yang menuntut kenaikan gaji mereka diatas tingkat produktivitasnya, juga salah satu penyebab timbulnya inflasi menurut teori Keynes.

Bila semua kelompok tersebut bersinergi menjalankan perilakunya, maka yang terjadi adalah *inflationary gap*. *Inflationary gap* adalah permintaan efektif dari seluruh kelompok masyarakat, pada harga berlaku, melebihi jumlah barang yang mampu dihasilkan oleh perekonomian. Selain itu, tuntutan kenaikan upah juga akan berakibat pada kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini juga dapat mendorong terjadinya inflasi.

5. Inflasi Menurut Teori Moneterisme

Teori ini berpendapat bahwa, inflasi disebabkan oleh kebijaksanaan moneter dan fiskal yang ekspansif, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat sangat berlebihan. Kelebihan uang beredar di masyarakat akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan barang dan jasa di sektor riil. Menurut golongan moneteris, inflasi dapat diturunkan dengan cara menahan dan menghilangkan kelebihan permintaan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang bersifat kontraktif, atau melalui kontrol terhadap peningkatan upah serta penghapusan terhadap subsidi atas nilai tukar valuta asing. Sehingga teori inflasi menurut Moneterisme dapat dinotasikan sebagai berikut:

Inflasi = f (kebijakan moneter ekspansif, kebijakan fiskal ekspansif)

6. Inflasi Menurut Lapangan Usaha

Dalam menyusun IHK, data harga konsumen diperoleh dari 82 kota, mencakup antara barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran yaitu:

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose - COICOP*), yaitu :

1. Kelompok Bahan Makanan
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
3. Kelompok Perumahan
4. Kelompok Sandang
5. Kelompok Kesehatan
6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga

Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok, dan dalam setiap sub kelompok terdapat beberapa komoditas. Lebih jauh, komoditas-komoditas tersebut memiliki beberapa kualitas atau spesifikasi. Beberapa pasar tradisional, pasar modern, dan outlet di setiap kota dipilih untuk mewakili harga-harga dalam kota tersebut. Data harga masing-masing komoditi diperoleh melalui wawancara.

7. Jenis Inflasi Berdasarkan Sumbernya

Penggolongan inflasi juga bisa dilihat dari asal sumber inflasi tersebut. Secara umum, ada dua jenis inflasi dilihat dari sumbernya

1. Inflasi dalam negeri, misalnya terjadi karena peningkatan permintaan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar untuk memenuhinya
2. Inflasi luar negeri, misalnya timbul karena inflasi yang terjadi pada negara lain yang menyebabkan harga barang-barang impor meningkat, dan ketika barang

impor tersebut digunakan sebagai bahan baku industri, maka inflasi akan mempengaruhi harga akhir barang-barang tersebut nantinya.

CARA PERHITUNGAN INFLASI

Indeks Laspeyres

Inflasi pada dasarnya mengukur perubahan kenaikan harga dari waktu ke waktu, baik bulanan, triwulanan, kuartalan, maupun tahunan. Angka indeks biaya hidup mencatat perubahan harga barang-barang dan jasa-jasa sehingga dapat menentukan kondisi inflasi (kenaikan harga) ataupun deflasi (penurunan harga). Salah satu angka indeks yang dipakai untuk menghitung inflasi adalah angka *indeks Laspeyres*:

$$L = \frac{\sum P_n Q_0}{\sum P_0 Q_0} \times 100$$

- L : indeks Laspeyres
- P_n : indeks harga barang tahun perhitungan
- P_0 : harga barang dan jasa tahun dasar (*base year*)
- Q_0 : jumlah barang dan jasa pada tahun dasar

Tahun dasar merupakan tahun basis yang digunakan sebagai dasar perhitungan perubahan harga, yang biasanya diberi nilai 100. Pada tahun berikutnya, apabila indeksnya lebih besar dari 100 berarti terjadi kenaikan harga, sebaliknya apabila nilainya kurang dari 100 berarti terjadi penurunan harga. Penentuan tahun dasar haruslah memiliki alasan yang sangat rasional karena digunakan sebagai tahun dasar perhitungan.

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

- a. Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- b. Indeks biaya hidup atau *cost-of-living index* (COLI).
- c. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
- d. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- e. Indeks harga barang-barang modal
- f. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Angka indeks Paasche

Angka indeks Paasche adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun n (tahun yang dihitung angka indeksnya) atau Q_n .

$$IP = \frac{\sum(P_n \cdot Q_n)}{\sum(P_o \cdot Q_n)} \times 100$$

IP = angka indeks Paasche
P_n = harga tahun yang dihitung angka indeksnya
P_o = harga pada tahun dasar
Q_n = kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya

Metode Drobisch and Bowley

Metode Drobisch and Bowley merupakan indeks tertimbang yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$ID = \frac{IL + IP}{2}$$

Keterangan:

D = angka indeks Drobisch
IL = angka indeks Laspeyres
IP = angka indeks Paasche

Metode Irving Fisher

Penghitungan angka indeks dengan Metode Irving Fisher merupakan angka indeks yang ideal. Irving Fisher menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Laspeyres dan indeks Paasche.

$$IF = \sqrt{IL \times IP}$$

Metode Marshal Edgewarth

Menurut metode ini, angka indeks ditimbang dihitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun n, kemudian mengalikannya dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun n. Angka indeks Marshal Edgewarth dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$IM = \frac{\sum(Q_o + Q_n)P_n}{\sum(Q_o + Q_n)P_o} \times 100$$

Contoh 3 (menghitung inflasi)

Diketahui:

Diperoleh nilai IHK tahun 2018 adalah 123,62 dan IHK tahun 2017 adalah 118,71, maka untuk mengetahui besarnya laju inflasi tahun 2018

Ditanyakan:

Hitunglah laju inflasi tahun 2018!

Jawab:

Sebelum menghitung laju inflasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana konsep penentuan nilai IHK yang dihasilkan oleh BPS. Nilai IHK merupakan perbandingan harga antara harga saat ini dengan harga sebelumnya, dan periode ini bisa dihitung berdasarkan bulan maupun tahun

$$\text{IHK} = (\text{Pn}/\text{Po}) \times 100\%$$

$$\text{Laju Inflasi tahun } n = (\text{IHK}_{(n)} - \text{IHK}_{(n-1)}) / \text{IHK}_{(n-1)} \times 100\%$$

Dimana :

Pn adalah harga saat ini.

Po adalah harga di tahun sebelumnya.

IHK_(n) adalah IHK pada tahun dasar.

IHK_(n-1) adalah IHK pada tahun sebelumnya.

Dengan memasukkan data IHK ke dalam rumus tersebut, maka.

$$\text{Laju inflasi tahun 2018} = (123.62 - 118.71) / (1/118.71) \times 100\%$$

$$\text{Laju inflasi tahun 2018} = 4.1\%$$

Dari perhitungan dengan menggunakan IHK diperoleh bahwa laju inflasi yang terjadi pada tahun 2018 adalah 4.1%.

Inflasi Berdasarkan Tingkat Keperahan

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (*Closed Inflation*). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (*Open Inflation*). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan:

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)

2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Inflasi Berdasarkan Asalnya

Berdasarkan asal terjadinya inflasi, maka inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. **Inflasi berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)**, misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya panen yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal atau gagalnya pasar yang berakibat harga kebutuhan pokok menjadi mahal.
2. **Inflasi berasal dari luar negeri (*imported inflation*)** adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri bisa pula terjadi melalui kenaikan harga barang-barang ekspor dan saluran-salurannya, hanya sedikit berbeda dengan penularan lewat kenaikan harga barang-barang impor.

Contoh 4 (menghitung inflasi)

Diketahui:

Harga beras pada tahun dasar adalah Rp2.500/kg dan jumlah yang dibeli rata-rata per bulan 50 kg. Harga beras pada tahun pencatatan adalah Rp3.000/kg,

Ditanya:

Hitunglah indeks harga komoditi beras tersebut.

Jawab:

Dengan menggunakan angka *indeks Laspeyres*:

$$L = \frac{\sum P_n Q_0}{\sum P_0 Q_0} \times 100$$

maka diperoleh:

$$L = \frac{3.000 \times 6}{2.500 \times 6} \times 100 = 120$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak tahun dasar harga beras mengalami kenaikan 20 persen atau (120 – 100).

DAMPAK INFLASI

Sebenarnya siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan terjadinya inflasi? Inflasi akan menguntungkan bagi kelompok yang memiliki uang yang lebih karena uang tersebut dapat diinvestasikan pada aset tanah, rumah dan dialokasikan di pasar uang. Bentuk-bentuk aset tersebut akan mengalami kenaikan harga yang jauh lebih cepat daripada bentuk aset lainnya sehingga pemilik aset akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai aset tersebut. Sebaliknya kelompok pendapatan rendah akan mengalami penurunan daya beli uang yang dimiliki untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Uang yang dimiliki akan mengalami penurunan daya beli sehingga secara riil pendapatan orang tersebut akan mengalami penurunan seiring kenaikan inflasi. Pendapatan riil merupakan pendapatan nominal dibagi dengan perubahan harga, atau dapat dituliskan:

$$Y_{riil} = \frac{Y_{nom}}{P}$$

Keterangan:

- Y_{riil} : pendapatan riil
- Y_{nom} : pendapatan nominal
- P : perubahan harga

Peminjam uang (debitur) akan diuntungkan apabila terjadi inflasi, terlebih apabila pinjamannya dalam jangka panjang. Misalnya jumlah pinjamannya 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 10 persen per tahun. Apabila selama setahun tingkat inflasi adalah 30 persen, maka debitur tersebut diuntungkan paling tidak karena nilai uang 100 juta setahun sekarang lebih rendah daripada nilai uang tersebut setahun silam.

Pengusaha yang melakukan pembelian barang pada saat ini dan dijual di waktu yang akan datang juga akan mengalami keuntungan karena harga beli pada waktu yang lalu lebih murah daripada harga jualnya sekarang (dengan asumsi biaya lain-lain tetap).

Bagaimana dengan pemilik tabungan di bank. Pemilik tabungan di bank juga akan mengalami kerugian apabila bunga yang diterima dari tabungan tersebut lebih rendah daripada laju inflasi. Nilai riil tabungan akan terus mengalami pengurangan seiring terjadinya inflasi. Kondisi ini lebih parah apabila masyarakat menyimpan uang di rumah. Di satu sisi masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan bunga apabila menyimpan uangnya di bank (atau surat berharga), di sisi lain uang tersebut secara riil juga mengalami penurunan. Dengan demikian inflasi dapat dikatakan sebagai pajak atas pendapatan sebagian masyarakat karena inflasi akan mengurangi pendapatan masyarakat, terutama pendapatan tetap

Inflasi yang laju kenaikannya sangat besar dan dampaknya dapat membahayakan masyarakat disebut dengan hiperinflasi. Dalam sejarah, hiperinflasi terjadi karena penge-luaran pemerintah yang luar biasa besarnya dan dibiayai dengan pencetakan

uang baru tanpa diimbangi dengan kenaikan produksi. Peperangan yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu juga dapat mengakibatkan hiperinflasi. Pengeluaran perang untuk militer dan mobilisasi masyarakat secara besar-besaran serta pembangunan infrastruktur yang rusak akibat perang merupakan pemicu terjadinya inflasi pada saat itu. Hal ini pernah dialami oleh Amerika semasa revolusi Amerika dan perang saudara pada tahun 1861-1865.

Secara garis besar dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain:

- terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung.
- masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang, karena harga barang mengalami kenaikan.
- jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran, karena pemerintah berusaha untuk menekan harga.
- masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang.
- nilai mata uang turun, karena adanya kenaikan harga barang.



Sources: www.tradingeconomics.com & Statistics Indonesia (BPS)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2016.

Kurva 7.5 Perkembangan Inflasi Indonesia

KEBIJAKAN MENGATASI INFLASI

Inflasi merupakan suatu penyakit dalam sebuah perekonomian yang harus diatasi karena berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah harus melibatkan *stakeholder* untuk mengatasinya, baik oleh pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku ekonomi lainnya. Ada 3 bidang yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi, yaitu kebijakan yang menyangkut bidang moneter, fiskal dan non moneter.

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan perekonomian yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar (JUB). Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga

dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa tindakan, yaitu politik diskonto (*discount rate*), politik pasar terbuka (*open market operation*) dan menaikkan *cash ratio*.

- a. Politik Diskonto ditujukan untuk menaikkan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.
- b. Politik Pasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat membeli surat berharga tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini merupakan upaya agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan jumlahnya.
- c. *Cash Ratio* artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.

Dengan menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank, maka jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

$$\text{RUMUS : } M = 1/CK \times L$$

Dimana

M = jumlah uang yang diedarkan oleh Bank Umum

CK = % cadangan minimum kas

L = alat likuiditas / cadangan kas

Tindakan lain untuk memperketat kebijakan moneter adalah menaikkan persyaratan simpanan baik untuk deposito mata uang lokal maupun mata yang asing di bank-bank Indonesia. Terakhir, BI mengurangi permintaan para investor asing untuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan memperpanjang periode persyaratan kepemilikan SBI dari satu menjadi enam bulan, memperpanjang waktu jatuh tempo dari SBI yang diterbitkan menjadi 9 bulan dan dengan memperkenalkan deposito-deposito dalam konteks tidak dapat diperdagangkan dengan waktu jatuh tempo lebih panjang (yang hanya tersedia untuk bank-bank). Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk memitigasi aliran 'uang panas' ke dalam Indonesia.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah terkait sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada APBN. Kebijakan fiskal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan inflasi adalah dengan cara melakukan pengaturan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Secara rinci bentuk kebijakan ini antara lain:

- a. Pengurangan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*), baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan yang tidak memberikan *multiplier effect* pada perekonomian, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
- b. Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

3. Kebijakan Non-Moneter

Kebijakan non-moneter dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang.

- a. Menaikkan hasil produksi
cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
- b. Kebijakan upah
tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikkan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
- c. Pengawasan harga dan distribusi barang
dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET).

SEJARAH INFLASI DI INDONESIA

Indonesia pernah mengalami sejarah suram dalam hal inflasi. Pada tahun 1966 Indonesia mengalami hiperinflasi mencapai 635,5% karena defisit anggaran belanja pemerintah yang diatasi dengan melakukan pemotongan nilai rupiah dari Rp 1000 menjadi Rp 1. Sistem ekonomi terpimpin yang saat itu terjadi memaksa pemerintah lebih cenderung mengutamakan kepentingan politik. Banyaknya pendanaan untuk proyek negara menyebabkan pengeluaran negara meningkat drastis, padahal tidak semua pendanaan termasuk pengeluaran produktif misalnya konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Karena keluar dari keanggotaan PBB dan IMF, hutang luar negeri Indonesia kepada IMF bertambah dan pemerintah Indonesia beralih mengambil pinjaman dari Cina dan negara blok timur pada saat itu.

Setelah inflasi tahun 1966, Inflasi yang terburuk kedua terjadi pada tahun 1998 akibat pengaruh krisis keuangan Asia dengan tingkat inflasi 77,5%. Saat itu nilai tukar rupiah terjun bebas dari 2.800 menjadi 16.000 terhadap dolar Amerika. Kondisi tersebut diperparah dengan gejolak reformasi yang terjadi menambah ketidakstabilan kondisi

negara yang berakhir dengan turunnya Soeharto sebagai presiden. Sampai saat ini, 1966 dan 1998 merupakan tahun terburuk inflasi di Indonesia. Namun demikian inflasi dari kisaran ringan sampai sedang tetap terjadi dan masih memberikan pengaruh yang berarti bagi perekonomian negeri ini, khususnya masyarakat kecil.

Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia juga mengakibatkan biaya-biaya ekonomi yang tinggi. Hal ini menghambat konektivitas di negara kepulauan ini dan karenanya meningkatkan biaya transportasi untuk jasa dan produk (sehingga membuat biaya logistik tinggi dan membuat iklim investasi negara ini menjadi kurang menarik). Gangguan distribusi karena isu-isu yang berkaitan dengan infrastruktur sering dilaporkan dan membuat Pemerintah menyadari pentingnya berinvestasi untuk infrastruktur negara ini.

Harga-harga bahan pangan sangat tidak stabil di Indonesia (rentan terhadap kondisi cuaca) dan kemudian meletakkan beban yang besar kepada rumah tangga-rumah tangga yang berada di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan. Rumah tangga-rumah tangga ini menghabiskan lebih dari setengah dari pendapatan yang bisa dibelanjakan mereka untuk makanan, terutama beras. Oleh karena itu, harga-harga makanan yang lebih tinggi menyebabkan inflasi keranjang kemiskinan yang serius yang mungkin meningkatkan persentase penduduk miskin. Panen-panen yang gagal dikombinasikan dengan reaksi lambat dari Pemerintah untuk menggantikan produk-produk makanan lokal dengan impor adalah penyebab tekanan inflasi.

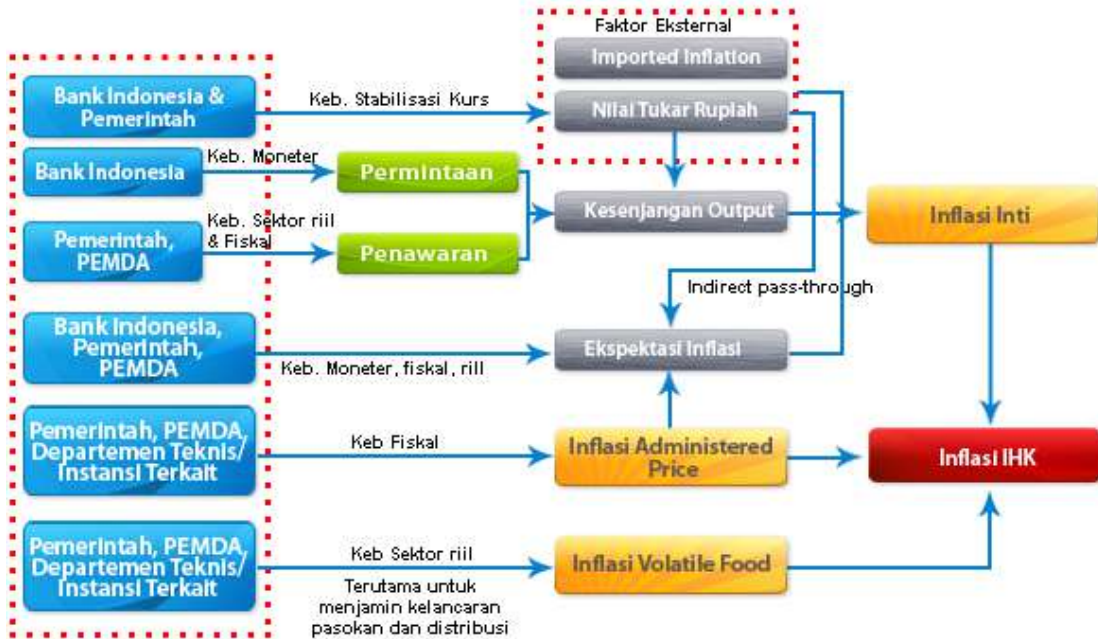
PENGENDALIAN INFLASI ANTARA BI DAN PEMERINTAH

Mekanisme pengendalian inflasi menurut Bank Indonesia, dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dengan menggunakan transmisi melalui kewenangan masing-masing. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, *shocks* terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*).

Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap *shocks* tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat

dan TPID di daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kemendagri.



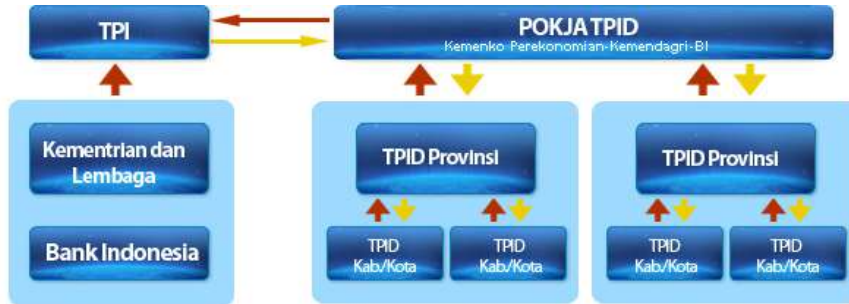
Gambar 7.1. Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Pengendalian Inflasi

Tabel 7.1. Perkembangan Inflasi di Indonesia Selama Tahun 2017

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
Desember 2017	3.61 %
Nopember 2017	3.30 %
Oktober 2017	3.58 %
September 2017	3.72 %
Agustus 2017	3.82 %
Juli 2017	3.88 %
Juni 2017	4.37 %
Mei 2017	4.33 %
April 2017	4.17 %
Maret 2017	3.61 %
Februari 2017	3.83 %
Januari 2017	3.49 %

Sumber: Bank Indonesia

Kerjasama dan peran tim pengendali inflasi dengan kelompok kerja tim pengendali inflasi daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dapat dilihat pada skema berikut ini:



Gambar 7.2. Keterkaitan Antara TPI, Pokjanas TPID dan TPID

ISTILAH PENTING BAB INI

Demand pull inflation
Cost-push inflation
 Based year
War inflation
 Tindakan fiskal
 Tindakan moneter

Teori inflasi Keynes
 Teori inflasi Kuantitas
 Indeks Laspeyres
 Pendapatan riil
 Pendapatan nominal

RANGKUMAN

1. Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara **umum** dan **terus-menerus**. “Umum” berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, terlebih lagi kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar. **Terus-menerus** berarti bahwa kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja, misalnya kenaikan harga barang menjelang hari raya.
2. Penyebab inflasi ada beberapa macam, yaitu: inflasi sisi permintaan dan penawaran, inflasi menurut teori kuantitas, inflasi akibat perang, dan inflasi menurut teori Keynes.
3. Inflasi dapat dihitung dengan menggunakan Angka indeks yang dipakai adalah angka *indeks Laspeyres*, yaitu:

$$L = \frac{\sum P_n Q_0}{\sum P_0 Q_0} \times 100$$

- L : indeks Laspeyres
P_n : indeks harga barang tahun perhitungan
P₀ : harga barang dan jasa tahun dasar (*base year*)
Q₀ : jumlah barang dan jasa pada tahun dasar

4. Inflasi akan menguntungkan bagi kelompok yang memiliki uang yang lebih karena uang tersebut dapat diinvestasikan pada aset tanah, rumah dan dialokasikan di pasar uang. Bentuk-bentuk aset tersebut akan mengalami kenaikan harga yang jauh lebih cepat daripada bentuk aset lainnya sehingga pemilik aset akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai aset tersebut. Sebaliknya kelompok pendapatan rendah akan mengalami penurunan daya beli uang yang dimiliki untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Uang yang dimiliki akan mengalami penurunan daya beli sehingga secara riil pendapatan orang tersebut akan mengalami penurunan seiring kenaikan inflasi.
5. Jumlah uang beredar yang berlebihan merupakan pendorong utama terjadinya inflasi, baik uang kartal maupun uang giral. Ada beberapa sebab terjadinya kelebihan JUB, diantaranya karena terjadinya defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dari mencetak uang. Semakin besar defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dari mencetak uang, maka inflasi yang terjadi semakin parah.

PERTANYAAN UNTUK LATIHAN

SOAL LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Inflasi yang disebabkan oleh tindakan pemerintah yang menambah jumlah uang beredar melebihi dari yang dibutuhkan masyarakat, merupakan penggolongan inflasi menurut:
 - a. teori struktural
 - b. teori kuantitas
 - c. *cost-push inflation*
 - d. *demand pull inflation*
 - e. teori Keynes
2. Berikut ini merupakan kejadian yang dapat digolongkan sebagai inflasi, *kecuali*:
 - a. kenaikan harga daging menjelang lebaran
 - b. kenaikan harga gula dan beras
 - c. kenaikan harga BBM dan harga *input*
 - d. kenaikan harga pakaian menjelang hari natal
 - e. semua jawaban benar
3. Jumlah uang beredar (JUB) yang berlebihan merupakan pendorong utama terjadinya inflasi, baik uang kartal maupun uang giral merupakan pernyataan dari teori inflasi:

- a. teori struktural
 - b. teori kuantitas
 - c. inflasi sisi permintaan
 - d. inflasi sisi penawaran
 - e. inflasi akibat perang
4. Berikut ini adalah tindakan fiskal yang menyebabkan terjadinya inflasi:
- a. meningkatkan pajak penghasilan
 - b. meningkatkan pengeluaran pemerintah
 - c. mencetak uang baru
 - d. likuidasi bank komersial
 - e. jawaban a dan b benar
5. Inflasi yang laju perkembangannya melebihi kondisi psikologis masyarakat, disebut dengan:
- a. hiperinflasi
 - b. *cost-push inflation*
 - c. *demand pull inflation*
 - d. inflasi psikologis
 - e. inflasi permintaan

SOAL LATIHAN ESSAY

1. Harga kelompok bahan pakaian dicatat oleh BPS pada tahun 2003 adalah Rp150.000,- dan jumlah yang dibeli rata-rata per tahun 15 lusin. Harga pada tahun dasar 1995 adalah Rp120.000,-. Dari data itu, hitunglah besarnya inflasi!
2. Diketahui data permintaan dan penawaran selama tahun 2004 adalah:
Diketahui:
Fungsi permintaan QD = $-2,5 P_x + 420$
Fungsi Penawaran QS = $140 + 0,5 P_x$

Ditanya:
 - a. Hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan!
 - b. Bila permintaan naik yang ditunjukkan oleh fungsi permintaan menjadi $Q_S = 1,5 P_x + 55$ dan penawaran tetap, bagaimana pengaruhnya terhadap harga?
 - c. Tunjukkan pengaruh tersebut secara grafis!
3. Jelaskan tindakan fiskal dan tindakan moneter yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi!
4. Apa perbedaan antara *demand pull inflation* dan *cost push inflation*. Jelaskan dengan menggunakan kurva!
5. Bagaimana cara Bank Sentral berperan untuk mengatasi masalah inflasi di suatu negara?

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Ada beberapa penyebab terjadinya inflasi diantaranya menurut teori kuantitas, teori strukturalis, *cost-push*, dan *demand pull*. Menurut Saudara, untuk Indonesia, apa penyebab utama terjadinya inflasi?
2. Bagaimana kondisi psikologis masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya inflasi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia?
3. Menurut Saudara, siapa yang dirugikan dan diuntungkan apabila terjadi inflasi yang sangat tinggi di suatu negara? Jelaskan alasan Saudara!
4. Seberapa besar peranan pemerintah dalam mempengaruhi dan mengendalikan inflasi di Indonesia?
5. Menurut saudara, mengapa dalam sejarah Indonesia bisa terjadi Inflasi yang sangat parah? Bagaimana cara yang dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk menghindari kejadian tersebut?
6. Adakah keterkaitan antara terjadinya inflasi dengan kejadian berikut ini:
 - a. Pengurangan subsidi pemerintah
 - b. Kenaikan tarif dasar listrik
 - c. Kenaikan harga bahan bakar minyak
 - d. Perilaku hidup berlebihan
 - e. Kesenjangan lokasi wilayah dari pusat kegiatan ekonomi

8

KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER

1. Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro
2. Kebijakan Fiskal
3. Kebijakan Moneter
4. Instrumen Kebijakan Moneter
5. Kebijakan Pengendalian Harga
6. Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter

TUJUAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Setiap negara menginginkan kondisi perekonomiannya stabil dan mampu tumbuh sehingga tujuan pembangunan yang dilakukannya dapat dicapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat menggunakan beberapa alternatif kebijakan ekonomi yang mungkin untuk dilaksanakan, yaitu:

- a. Kebijakan fiskal
- b. Kebijakan moneter
- c. Kebijakan penentuan harga
- d. Kebijakan luar negeri

Masing-masing kebijakan memiliki tujuan yang berbeda, tergantung kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Kondisi ideal yang ingin dicapai pemerintah melalui kebijakan tersebut diantaranya adalah:

1. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi

Kondisi perekonomian *full-employment* yang mampu memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam kondisi ini pengangguran mampu ditekan serendah mungkin oleh pemerintah sehingga masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

2. Kapasitas produksi nasional yang tinggi

Kapasitas produksi nasional yang tinggi dapat tercapai apabila seluruh sumber daya yang ada digunakan secara penuh. Pemerintah dengan menggunakan kebijakan fiskal maupun moneter dapat mendorong kegiatan perekonomian lebih besar sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat yang dicerminkan dari tingginya tingkat pendapatan riil masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua macam sifat kebijakan yang akan digunakan, yaitu:

- a. **Kebijakan ekspansif.** Kebijakan yang bersifat ekspansif bertujuan untuk memperbesar dan mendorong kegiatan ekonomi sehingga masalah-masalah yang dihadapi dalam perekonomian tersebut dapat diatasi. Kebijakan yang bersifat ekspansif biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami *underemployment* atau *overcooling*, kelesuan, pengangguran, dan kapasitas produksi nasional belum digunakan secara penuh. Secara umum, tujuan kebijakan yang bersifat ekspansif adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan pengangguran.
- b. **Kebijakan kontraktif.** Kebijakan yang bersifat ekspansif bertujuan untuk menurunkan dan memperlambat kegiatan ekonomi. Kebijakan kontraktif ini biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami *overheating* atau *overemployment*. Perekonomian dikatakan *overemployment* apabila permintaan agregatif melebihi kapasitas produksi

nasional. Tanda perekonomian yang mengalami *overemployment* diantaranya adalah tingginya laju inflasi, defisit neraca pembayaran luar negeri, dan meningkatnya jumlah uang beredar.

KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Segala macam kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal, misalnya kebijakan bidang perpajakan, kebijakan hutang luar negeri, dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah seringkali menghadapi masalah defisit anggaran sehingga memerlukan satu set kebijakan fiskal untuk mengatasinya. Ada beberapa sumber pembiayaan defisit anggaran, diantaranya yaitu:

- a. Pajak
- b. Mencetak uang baru
- c. Pinjaman masyarakat dalam negeri
- d. Pinjaman masyarakat luar negeri

Pada Bab 3 telah dibahas dua macam jenis pajak, yaitu pajak tetap atau *lump-sum tax* dan pajak proporsional. Pajak tetap merupakan pajak yang jumlah dan besarnya tidak tergantung pada tingkat pendapatan, berapapun pendapatan, besarnya pajak sama. Dalam kenyataannya sebagian besar pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung berhubungan erat dengan pendapatan. Pajak pendapatan, pajak perseroan, dan pajak kekayaan merupakan jenis pajak langsung yang sangat berkaitan dengan pendapatan. Begitu pula dengan pajak penjualan, bea masuk, dan cukai merupakan contoh pajak tidak langsung yang besarnya juga tergantung pada tingkat pendapatan dari transaksinya. Dengan kata lain, semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak yang harus ditanggung begitu pula sebaliknya. Dalam bentuk persamaan dapat dituliskan hubungan antara pajak dan pendapatan, yaitu:

$$T = T_0 + tY$$

Karena pajak berkaitan dengan pendapatan, maka penerimaan pemerintah dari pajak sangat tergantung pada tingkat pendapatan masyarakat. Pajak dalam alur perputaran ekonomi digolongkan sebagai variabel kebocoran (*leakages*) sehingga bila pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak, maka konsekuensinya adalah makin tingginya kebocoran. Dengan kata lain, pajak dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena mengurangi pendapatan siap konsumsi (*disposable income*) yang nilainya:

$$Y_d = Y - T_x + T_r$$

Dengan demikian, semakin besar defisit anggaran pemerintah dan bila pemerintah membiayainya dengan meningkatkan pajak, maka daya beli masyarakat akan terus menurun.

Pemerintah dapat juga membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana dari bank sentral. Bank sentral akan membiayai pinjaman tersebut dengan mencetak uang baru. Pembiayaan pinjaman pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang baru akan mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat. Sesuai dengan teori kuantitas, penambahan jumlah uang beredar akan dapat mengakibatkan inflasi. Dengan demikian semakin besar defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang baru, maka semakin besar pula risiko terjadinya inflasi.

Pemerintah dapat menghimpun dan meminjam dana masyarakat dalam negeri untuk membiayai defisit anggarannya. Mekanisme penghimpunan dana itu adalah melalui penerbitan surat hutang atau obligasi pemerintah yang dijual (*float*) kepada masyarakat di pasar uang. Pemerintah akan membayar obligasi itu pada saat jatuh tempo beserta bunga dari obligasi tersebut. Untuk menarik masyarakat mau membeli surat hutang itu, maka biasanya pemerintah menawarkan tingkat bunga yang lebih besar dari pada tingkat bunga yang berlaku di bank umum. Pinjaman kepada masyarakat dalam negeri biasanya dalam bentuk mata uang dalam negeri.

Sumber pembiayaan defisit anggaran yang terakhir adalah pinjaman pada masyarakat luar negeri. Seperti halnya pinjaman pada masyarakat dalam negeri, pinjaman pada masyarakat luar negeri dilakukan dengan cara menjual surat berharga atau obligasi di pasar uang internasional. Dana yang diperoleh dari jenis sumber pembiayaan ini biasanya dalam bentuk mata uang asing dan devisa. Sumber pembiayaan ini cocok untuk membiayai defisit neraca pembayaran internasional.

Kebijakan Fiskal yang Disengaja

Kebijakan fiskal yang disengaja (*discretionary*) adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi gelombang konjungtur dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja ini dapat berupa mengubah aturan tentang perpajakan ataupun mengubah pengeluaran pemerintah. Dari usaha ini terlihat seberapa jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur tangan dalam pengaturan perekonomian.

Kasus 1 berikut menunjukkan bahwa pajak dan transfer yang dilakukan pemerintah akan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi dan tabungan masyarakat. Seperti telah diuraikan pada bab perhitungan nasional, pajak akan mengurangi pendapatan konsumen sehingga berkurangnya pendapatan akan menurunkan daya beli *masyarakat* yang tercermin dari turunnya pengeluaran konsumsi masyarakat. Sebaliknya, transfer pemerintah akan menambah pendapatan masyarakat sehingga pendapatan disposibelnya akan meningkat pula.

Contoh 1 (Pengaruh Pajak pada Konsumsi dan Tabungan)

Fungsi konsumsi masyarakat adalah $C = 40$ miliar rupiah + $0,75 Yd$. Pemerintah menetapkan pajak sebesar $T_x = 30$ miliar rupiah. Dari data tersebut,

Ditanya:

- a. Hitunglah besarnya konsumsi dan tabungan sebelum adanya pajak dari pemerintah!
- b. Hitunglah besarnya pengeluaran konsumsi dan tabungan setelah adanya pajak, apabila tingkat pendapatannya 120 miliar rupiah!

Jawab:

- a. Besarnya C dan S apabila tanpa pajak

Pengeluaran Konsumsi

$$\begin{aligned}C &= 40 + 0,75 Y_d \\C &= 40 + 0,75 (120 - 0 + 0) \\C &= 40 + 90 \\C &= \mathbf{130 \text{ miliar rupiah}}\end{aligned}$$

Jadi pengeluaran konsumsi sebelum adanya pajak adalah sebesar 130 miliar rupiah.

Besarnya Tabungan

$$\begin{aligned}S &= Y_d - C \\S &= (120 - 0) - 130 \\S &= 120 - 130 \\S &= \mathbf{-10}\end{aligned}$$

Jadi besarnya tabungan adalah -10 miliar rupiah, atau dengan kata lain terjadi *dissaving* sebesar 10 miliar rupiah.

- b. Besarnya C dan S apabila pajak = 30 miliar rupiah

Pengeluaran Konsumsi

$$\begin{aligned}C &= C_0 + \Delta C \text{ atau } C = C_0 - c \Delta T_x \\C &= 130 - 0,75 \times 30 \\C &= 130 - 22,5 \\C &= \mathbf{107,5 \text{ miliar rupiah}}\end{aligned}$$

Jadi pengeluaran konsumsi setelah adanya pajak adalah sebesar 107,5 miliar rupiah.

Tabungan

$$\begin{aligned}S &= S_0 + \Delta S \text{ atau } S = S_0 + (1 - c) (-\Delta T_x) \\S &= -10 + (1 - 0,75) (-30) \\S &= -10 + (-7,5) \\S &= \mathbf{-17,5 \text{ miliar rupiah}}\end{aligned}$$

Jadi besarnya tabungan dengan adanya pajak adalah sebesar - 17,5 miliar rupiah.

Dari Contoh 1 di atas dapat dilihat bahwa pajak akan mengurangi pengeluaran konsumsi dan tabungan masyarakat. Sebelum adanya pajak, pengeluaran konsumsi

sebesar 130 miliar rupiah, tetapi setelah adanya pajak sebesar 30 miliar rupiah maka pengeluaran konsumsi masyarakat turun menjadi 107,5 miliar rupiah. Begitupula dengan adanya pajak mengakibatkan tabungan masyarakat akan turun dari -10 miliar rupiah menjadi 17,5 miliar rupiah.

Contoh 2 (Pengaruh Transfer pada Konsumsi dan Tabungan)

Fungsi konsumsi masyarakat adalah $C = 40$ miliar rupiah $+ 0,75 Yd$. Pemerintah menetapkan pajak sebesar $T_x = 30$ miliar rupiah memberikan transfer sebesar $T_r = 40$ miliar rupiah. Dari data tersebut,

Ditanya:

- Hitunglah besarnya pengeluaran konsumsi dan tabungan setelah adanya transfer dari pemerintah, apabila tingkat pendapatannya 120 miliar rupiah!
- Hitunglah besarnya pengeluaran konsumsi dan tabungan setelah adanya pajak dan adanya transfer pemerintah apabila tingkat pendapatannya 120 miliar rupiah!

Jawab:

Dengan menggunakan data konsumsi dan tabungan sebelum adanya pajak dan transfer pada kasus 1, maka:

- Besarnya C dan S apabila ada transfer

Pengeluaran Konsumsi

$$C = C_0 + \Delta C \text{ atau } C = C_0 + c \Delta Tr$$

$$C = 130 + 0,75 \times 40$$

$$C = 130 + 30$$

$$\mathbf{C = 160 \text{ miliar rupiah}}$$

Jadi pengeluaran konsumsi setelah dengan adanya transfer sebesar 40 adalah sebesar 160 miliar rupiah.

Tabungan

$$S = S_0 + \Delta S \text{ atau } S = S_0 + (1 - c) (\Delta Tr)$$

$$S = -10 + (1 - 0,75) (40)$$

$$S = -10 + 10$$

$$\mathbf{S = 0}$$

Jadi besarnya tabungan dengan adanya transfer adalah sebesar nol.

- Besarnya C dan S apabila ada transfer dan ada pajak

Pengeluaran Konsumsi

$$C = C_0 + \Delta C \text{ atau } C = C_0 + c (\Delta Tr - \Delta Tx)$$

$$C = 130 + 0,75 (40 - 30)$$

$$C = 130 + 7,5$$

$$\mathbf{C = 137,5 \text{ miliar rupiah}}$$

Jadi pengeluaran konsumsi setelah dengan adanya transfer sebesar 40 dan pajak 30 adalah sebesar 137,5 miliar rupiah.

Tabungan

$$S = S_0 + \Delta S \text{ atau } S = S_0 + (1 - c) (\Delta Tr - \Delta Tx)$$

$$S = -10 + (1 - 0,75) (40 - 30)$$

$$S = -10 + 2,5$$

$$S = -7,5$$

Jadi besarnya tabungan dengan adanya transfer dan pajak adalah sebesar -7,5 miliar rupiah.

Berkebalikan dengan pajak, transfer berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi dan tabungan. Dengan adanya transfer sebesar 40 miliar rupiah, maka pengeluaran konsumsi naik dari 130 miliar menjadi 160 miliar rupiah. Begitupula dengan tabungan, dengan adanya transfer, maka tabungan naik dari -10 miliar rupiah menjadi nol.

Dari contoh 1 dan 2 tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah dapat mempengaruhi besarnya pendapatan nasional melalui pajak dan transfer. Tingkat pendapatan nasional yang paling ideal adalah tingkat pendapatan pada kondisi pengerjaan penuh (*full employment*).

Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Tujuan Pajak

Secara umum, tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah, untuk memodifikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, serta untuk memobilisasi surplus ekonomi. (Seligman, 1925 dalam Brotodihardjo, 2003:1)

Dalam pencapaian tujuan negara, pemerintah perlu memegang azas-azas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Waluyo (2008:13) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak, diantaranya yaitu:

(1) *Equity*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.

- (a) Pendekatan Keadilan
Asas *equity* (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima dari negara.
 - (b) Asas Keadilan dalam Pajak Penghasilan
Keadilan dalam pajak penghasilan terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Sedangkan asas keadilan vertikal terpenuhi ketika wajib pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomi yang berbeda diperlakukan tidak sama.
- (2) *Asas Revenue Productivity*
- Asas ini merupakan asas yang lebih terfokus pada pemerintah sehingga asas ini bagi pemerintah dianggap sebagai asas yang sangat penting. Dalam hal pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan, maka dalam pemungutannya harus selalu memegang teguh asas produktivitas penerimaan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
- (3) *Asas Ease of Administration*
- Asas ini sangat penting baik untuk Petugas Pajak maupun Wajib Pajak. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan Wajib Pajak enggan membayar pajak dan bagi petugas pajak, akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
- (a) *Asas Certainty*
Asas *Certainty* (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Yang dalam hal ini, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
 - (b) *Asas Convenience*
Asas *Convenience* (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran, pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan/memudahkan Wajib Pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain. Asas ini juga bisa dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan.
 - (c) *Asas Efficiency*
Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi petugas pajak pemungutan, di mana pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien ketika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

- (d) *Asas Simplicity*
Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan.

(4) *Asas Neutrality*

Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi-baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang.

Fungsi Pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetary* (penerimaan) dan fungsi *regulatory* (mengatur).

(1) Fungsi *Budgetary* (penerimaan)

Pajak mempunyai fungsi *budgetary* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

(2) Fungsi *Regulatory* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak yaitu:

(1) Asas Domisili (tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak

yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

- (2) **Asas Kebangsaan**
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang bersangkutan tanpa memandang apakah bertempat tinggal di dalam negeri atau di luar negeri.
- (3) **Asas Sumber**
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

Syarat–Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- (1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
- (3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
- (4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
- (5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanya hubungan kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan (Tjahjono dan Husein, 2005:18). Beberapa landasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak adalah:

- (1) **Teori Asuransi**
Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.
- (2) **Teori Kepentingan**
Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta bendanya. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

- (3) Teori Gaya Pikul
Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama besarnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.
- (4) Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)
Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu perkumpulan dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dari sudut pandang rakyat, membayar pajak kepada negara merupakan bukti rasa baktinya rakyat/warga kepada negaranya.
- (5) Teori Asas Daya Beli
Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik ini sebagai dasar keadilannya. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan bukan pula untuk kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) *Official Assesment system*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat per pajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang per pajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparat per pajakan. Masyarakat (wajib pajak) baru akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparat per pajakan (peranan dominan ada pada aparat per pajakan).
- (2) *Self Assesment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang per pajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan per pajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Di sini Petugas Pajak hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

(3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Presiden dan Peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber pada:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah.
- b. Dana Perimbangan, terdiri atas:
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 2) Dana Alokasi Umum;
 - 3) Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan, yang terdiri atas pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6, terdiri dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan

4. Lain-lain PAD yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di atas memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap penerimaan PAD secara keseluruhan. Namun demikian, kontribusi terbesar dalam menyumbang penerimaan PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sidik (2001) menyatakan, pajak daerah (*regional tax*) dan retribusi daerah, merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam penggalan PAD, karena selalu menjadi sumber penerimaan utama daerah. Secara langsung pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama merupakan komponen pembentuk pendapatan asli daerah yang terkait dengan kemampuan pendanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagaimana anggarannya ditentukan oleh APBD yang ditetapkan. Peran pajak dan retribusi dalam APBD suatu daerah sangatlah penting. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi akan dapat meningkatkan dana bagi pembangunan daerah yang bersangkutan. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan unsur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sangat berpengaruh bagi optimalisasi pembangunan daerah.

Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah:

- a). Jenis pajak Provinsi, terdiri atas:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan; dan
 5. Pajak Rokok.
- b). Jenis pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tolok Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Sutedi (2008:36-42) menyatakan bahwa pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggabungkan ukuran-ukuran sebagai berikut:

- (1) Hasil (*Yield*)
Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.
- (2) Keadilan (*Equity*)
Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horisontal, artinya baban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda, tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang lebih sedikit memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
- (3) Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)
Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.
- (4) Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*)
Dalam hal ini, berarti harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan Objek Pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak Daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha Pajak Daerah.
- (5) Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)
Suatu pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan tata usaha.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah

Menurut Soemitro (1990), peningkatan Pajak Daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

- (1) Intensifikasi Pajak
Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu Subjek dan Objek Pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:
 - (a) Penyempurnaan administrasi pajak.

- (b) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.
 - (c) Penyempurnaan Undang-Undang Pajak.
- (2) Ekstensifikasi Pajak
- Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas Subjek dan Objek Pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:
- (a) Perluasan Wajib Pajak
 - (b) Penyempurnaan Tarif
 - (c) Perluasan Objek Pajak

Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan yang cukup besar perannya dalam menyumbang terbentuknya PAD adalah Retribusi Daerah. Menurut Munawir (1992), retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran itu, misalnya retribusi pasar, parkir, dan sebagainya.

Definisi retribusi yang lain dikemukakan oleh Mangkoesoebroto (1994) adalah pungutan pemerintah kepada masyarakat karena masyarakat (pembayar retribusi) menerima jasa tertentu dari pemerintah. Pungutan parkir, pembayaran listrik, pembayaran air bersih dan sebagainya merupakan bentuk-bentuk retribusi. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Usman dan Subroto (1989) menyebutkan, retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata kepada masyarakat tersebut.

Pengertian retribusi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Ciri-ciri pokok retribusi daerah, berdasarkan beberapa pengertian diatas yaitu:

- (a) Retribusi dipungut oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah;
- (b) Terdapat jasa balik atau kontra prestasi langsung yang dapat ditunjuk;
- (c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja baik orang pribadi maupun badan yang merasakan atau memperoleh manfaat yang disediakan oleh daerah.

Pada Pasal 108 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa-jasa pelayanan tersebut dibagi atas tiga golongan yang berlaku pada Kabupaten/Kota, yang meliputi (a) Jasa Umum; (b) Jasa Usaha; dan (c) Perizinan Tertentu. Rincian retribusi daerah tersebut meliputi:

- (a) Jenis Retribusi Jasa Umum, merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang termasuk Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b). Jenis Retribusi Jasa Usaha, dapat dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Yang termasuk dalam Retribusi Jasa Usaha adalah:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 4) Retribusi Terminal;
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- c). Jenis Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

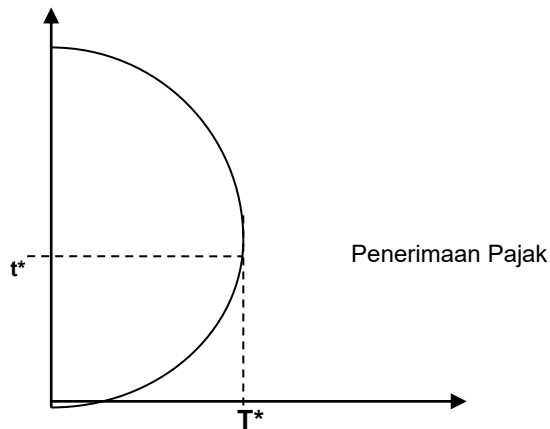
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;

- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Model Leviathan

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah pada dasarnya perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu (i) dasar pengenaan pajak dan (ii) tarif pajak. Pemerintah daerah cenderung menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respons konsumen, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan. Dengan asumsi bahwa biaya administrasi retribusi dianggap tidak signifikan dan ceteris-paribus level pelayanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besaran pajak.



Gambar 8.1. Model Leviathan

Model Leviathan ini memberikan pelajaran bahwa peningkatan penerimaan Pajak Daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai *Total Penerimaan Maksimum*. Model Leviathan ini dapat dikembangkan untuk menganalisis hubungan lebih lanjut antara tarif dan dasar pengenaan pajak untuk mencapai Total Penerimaan Pajak Maksimal.

Dalam rangka pengawasan, Perda-perda tentang pajak yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Dalam hal Perda-perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri

Keuangan dapat membatalkan perda dimaksud dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan dimaksud. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 5A dan pasal 25A UU No 34 Tahun 2000 juncto Pasal 80 ayat (2) PP No.65 Tahun 2001 dan Pasal 17 ayat (2) PP No.66 Tahun 2001.

Model *The Tiebout*

Model *The Tiebout* menjelaskan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan pemerintah. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara layanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak sesuai pada kebijakan pemerintah lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik, maka ada dua pilihan bagi masyarakat, yaitu pindah dari daerah tersebut atau tetap tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah daerah.

Kemandirian Daerah dan Kinerja Keuangan

Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986: 199).

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri (Hirawan, 1990: 26). Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 1986: 99).

- 1) Kemampuan struktural organisasinya
Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
- 2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah
Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

- 3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.
- 4) Kemampuan keuangan daerah
Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return Of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada "*Net Profit*". Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu: memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dan Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR). DOF dapat diukur dengan menghitung:

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100$$

Melalui perspektif pembiayaan daerah, kemampuan keuangan daerah tercermin dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR). Radianto (1997) dalam Munir dkk PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya. IKR diketahui dengan menghitung:

$$IKR = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Belanja Rutin}} \times 100$$

Tolak ukur kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dalam skala interval DOF dan IKR yaitu

Tabel 8.1.
Kategori Kemampuan Daerah

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan	IKR (%)
0,00 – 10,00	Sangat Kurang	0,00 – 10,00
10,01 – 20,00	Kurang	10,01 – 20,00
20,01 – 30,00	Sedang	20,01 – 30,00
30,01 – 40,00	Cukup	30,01 – 40,00
40,01 – 50,00	Baik	40,01 – 50,00
> 50,01	Sangat Baik	> 50,01

Selanjutnya Brown (1993) dalam Andayani (2007, h.254), menyarankan untuk menggunakan analisa rasio keuangan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah. Beberapa analisis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat daerahnya. Rasio kemandirian keuangan daerah diukur menggunakan:

$$KKD = \frac{\text{Total Penerimaan PAD}}{\text{Total Bantuan Daerah dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Mahmudi, 2010:142). Tolak ukur rasio kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan skala seperti dalam Tabel 8.2. di bawah ini:

Tabel 8.2.
Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	RKKD	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0,00% - 25,00%	Instruktif
Rendah	25,01% - 50,00%	Konsultatif
Sedang	50,01% - 75,00%	Partisipatif
Tinggi	75,01% - 100%	Delegatif

Jika, RKKD (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) menurun maka, hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah cenderung menurun walaupun PAD meningkat sebab peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan bantuan dan sumbangan. Semakin sedikit sumbangan dari pusat, semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah yang menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Adapun pola hubungan keuangan daerah tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) *Pola Hubungan Instruktif*: peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) *Pola Hubungan Konsultatif*: campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- 3) *Pola Hubungan Partisipatif*: peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) *Pola Hubungan Delegatif*: campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b) Rasio Efektivitas

Efektifitas adalah rasio dari realisasi penerimaan pajak/retribusi dengan target atau realisasi penerimaan pajak/retribusi dengan potensi pajak/retribusi atau dengan formula:

$$\text{Efektifitas 1} = \frac{\text{Realisasi Pajak/Retribusi}}{\text{Target Pajak/Retribusi}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas 2} = \frac{\text{Realisasi Pajak/Retribusi}}{\text{Potensi Pajak/Retribusi}} \times 100\%$$

Perhitungan efektifitas apabila menunjukkan hasil persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak/Retribusi semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase, hasilnya menunjukkan pemungutan Pajak/Retribusi semakin tidak efektif. Adapun tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori (Nurlan, 2006 :49), yaitu:

Lebih dari 100% : Sangat efektif
 90%-100% : Efektif
 80%-90% : Cukup efektif
 60%-80% : Kurang efektif
 Kurang dari 60% : Tidak efektif

c) Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Formula pengukuran rasio ini diformulasikan seperti:

$$\text{Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

d) Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, Belanja Rutin, dan Belanja Pembangunan (Mahmudi, 2010:145):

$$R = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Dimana:

P_n = Data yang dihitung pada tahun ke-n
 P_0 = Data yang dihitung pada tahun ke-0
 R = Pertumbuhan

Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya.

KEBIJAKAN MONETER

Kerangka Kebijakan Moneter

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan *Inflation Targeting Framework* (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (*base money*) sebagai sasaran kebijakan moneter. Dalam kerangka ITF, Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan sejumlah informasi yang dapat menggambarkan kondisi inflasi ke depan. Jika proyeksi inflasi sudah tidak kompatibel dengan sasaran, Bank Indonesia melakukan respon dengan menggunakan instrumen yang dimiliki. Misalnya jika proyeksi inflasi telah melampaui sasaran, maka Bank Indonesia akan cenderung melakukan pengetatan moneter.

Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara *forward looking*, artinya perubahan *stance* kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik.

Secara operasional, *stance* kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (*BI Rate*) yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi *output* dan inflasi.

Secara reguler, Bank Indonesia menjelaskan kepada publik mengenai asesmen terhadap kondisi inflasi dan *outlook* ke depan serta keputusan yang diambil. Jika sasaran inflasi tidak tercapai maka diperlukan penjelasan kepada publik dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengembalikan inflasi sesuai dengan sasarannya.

Dengan telah dilepaskannya sistem nilai tukar dengan band intervensi nilai tukar (*crawling band*) di tahun 1997, Bank Indonesia memerlukan jangkar nominal (*nominal anchor*) baru dalam rangka menjalankan kebijakan moneter. Jangkar nominal adalah variabel nominal (seperti indeks harga, nilai tukar, atau uang beredar) yang ditargetkan secara eksplisit oleh bank sentral sebagai dasar/patokan bagi pembentukan harga lainnya. Misalnya kalau nilai tukar dijadikan target, maka inflasi luar negeri akan menjadi inflasi domestik.

Mengapa kebijakan moneter memerlukan jangkar nominal? Karena tanpa adanya jangkar nominal, tidak ada kejelasan kemana kebijakan moneter akan diarahkan sehingga masyarakat tidak memiliki pedoman dalam membuat ekspektasi inflasi. Ibarat kapal yang mengapung di lautan tanpa kejelasan ke arah mana kapal

dilabuhkan. Sebaliknya, dengan adanya jangkar nominal masyarakat akan membuat ekspektasi inflasi yang diperlukan dalam kalkulasi usahanya sesuai dengan jangkar nominal tersebut. Dengan mengumumkan sasaran inflasi dan Bank Indonesia secara konsisten dapat mencapainya akan meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter yang pada gilirannya ekspektasi inflasi masyarakat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan BI.

Ada sejumlah alasan mengapa menggunakan jangkar nominal dengan ITF.

1. ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan sasaran inflasi secara eksplisit masyarakat akan memahami arah inflasi. Sebaliknya dengan sasaran base money, apalagi jika hubungannya dengan inflasi tidak jelas, masyarakat lebih sulit mengetahui arah inflasi kedepan.
2. ITF yang memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia.
3. ITF bersifat *forward looking* sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang memerlukan time lag.
4. ITF meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter mendorong kredibilitas kebijakan moneter. Aspek transparansi dan akuntabilitas serta kejelasan akan tujuan ini merupakan aspek-aspek *good governance* dari sebuah bank yang telah diberikan independensi.
5. ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang beredar, output dan inflasi. Sebaliknya, ITF merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah variabel informasi tentang kondisi perekonomian.

Tabel 8.3.
Perkembangan Besaran Moneter
dalam Rupiah

No	Items	Nov 2017	Dec 2017
1	Uang Primer	1,030,560	1,098,512
	antara lain : Uang Kertas dan Uang Logam yang Diedarkan	635,174	694,830
	antara lain : Saldo Giro Bank pada BI	309,449	337,807
2	Posisi Aktiva Luar Negeri Bersih 1)	1,666,541	1,727,853
3	Aktiva Domestik Bersih 2)	-635,981	-629,341
	antara lain : Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat	59,151	41,560
	antara lain : Kredit Likuiditas 3)	57	56
	antara lain : Operasi Pasar Terbuka	-288,263	-257,174
4	Memorandum item: Cadangan Devisa (konsep IRFCL) 4) dalam juta USD	125,967	130,196

Transmisi Kebijakan Moneter

Dalam laman Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru

yaitu *BI 7-Day Repo Rate*, yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain *BI Rate* yang digunakan saat ini, pengenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang diterapkan.

Mengapa BI memperkenalkan suku bunga acuan BI baru? Hal itu agar suku bunga kebijakan dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

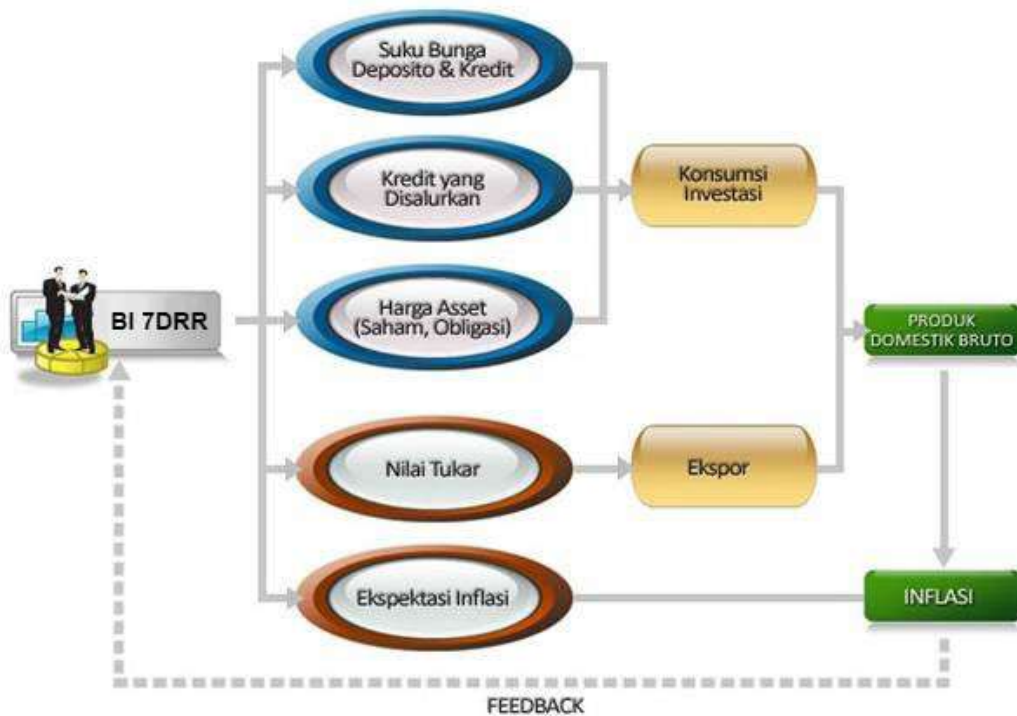
Pada masa transisi, *BI Rate* akan tetap digunakan sebagai acuan bersama dengan *BI Repo Rate 7 Hari*.

Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan *best practice* internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Khususnya untuk menjaga stabilitas harga.

Penguatan kerangka operasi moneter juga mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang kondusif dalam beberapa waktu terakhir, yang memberikan momentum bagi upaya penguatan kerangka operasi moneter.

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan *BI 7DRR* sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan *BI 7DRR* sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (*time lag*).

Mekanisme bekerjanya perubahan *BI 7DRR* sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan *BI 7DRR* mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi.



Gambar 8.2. Transmisi Kebijakan Moneter

Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI 7DRR menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI 7DRR untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI 7DRR juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI 7DRR, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan

mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.

Perubahan suku bunga BI 7DRR mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi.

Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (*time lag*). *Time lag* masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI 7DRR biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter

INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang beredar (JUB) yang dilakukan oleh bank sentral. Dalam mengendalikan jumlah uang beredar, ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang biasa digunakan, diantaranya adalah:

Tabel 8.4
Instrumen Kebijakan Moneter Kuantitatif dan Kualitatif

Instrumen Kuantitatif	Instrumen Kualitatif
a. Operasi pasar terbuka b. Suku bunga diskonto c. Tingkat cadangan wajib	a. Kredit selektif b. Bujukan moral

Operasi pasar terbuka (*open market operation*). Instrumen kebijakan operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara **menjual** atau **membeli** surat berharga, misalnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Bank sentral menentukan untuk menjual ataupun membeli surat berharga, tergantung pada kondisi perekonomian yang dihadapi. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, bank sentral akan menambah jumlah uang beredar dengan cara membeli surat berharga. Dengan membeli surat berharga, maka bank sentral akan membayar sejumlah surat berharga yang dibelinya tersebut sehingga jumlah cadangan yang ada di bank umum akan bertambah. Dengan bertambahnya jumlah uang beredar, maka diharapkan perputaran kegiatan ekonomi lebih meningkat. Sebaliknya dalam kondisi *overemployment*, bank sentral akan menjual surat berharga yang mereka miliki sehingga sebagian jumlah uang beredar akan masuk ke rekening bank sentral dan jumlah tabungan giral milik masyarakat dan cadangan bank umum akan berkurang. Ada dua syarat agar instrumen operasi pasar terbuka ini berhasil mengatasi masalah *overemployment* dan *underemployment*, yaitu:

- a. **Bank umum tidak memiliki kelebihan cadangan.** Kelebihan cadangan yang dimiliki bank umum dapat digunakan untuk membeli surat berharga yang ada di bank sentral. Dalam kondisi seperti ini bank umum tidak mengurangi jumlah uang giral yang mereka miliki sehingga jumlah uang beredar tidak mengalami perubahan.
- b. **Ada cukup banyak surat berharga yang dapat diperjualbelikan.** Dengan banyaknya surat berharga yang beredar dan dimiliki bank sentral, maka ada keleluasaan bank sentral untuk melakukan jual beli atas surat berharga tersebut. Lemahnya pasar uang dan sedikitnya jumlah surat berharga akan menghambat bekerjanya instrumen kebijakan moneter ini.

Suku bunga diskonto (*discount rate*). Bank umum dalam menjalankan kegiatannya memerlukan kepercayaan dari masyarakat, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka bank umum tidak mungkin mampu berkembang. Salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat, bank harus mampu menyediakan dana yang ditarik oleh masyarakat. Apabila bank umum mengalami kekurangan dana, maka bank umum dapat meminjam dana dari bank sentral. Dalam memberikan pinjaman, bank sentral menetapkan tingkat bunga diskonto pada bank umum tersebut. Tingkat diskonto ini dapat digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan perekonomian. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, maka bank sentral seharusnya menurunkan tingkat diskonto. Penurunan diskonto akan mendorong bank umum untuk meminjam dana lebih banyak karena biaya bunga yang harus ditanggung lebih ringan. Sebaliknya dalam kondisi perekonomian mengalami *overemployment*, maka bank sentral akan meningkatkan tingkat diskontonya. Peningkatan diskonto ini akan menghambat bank umum untuk meminjam dana yang lebih banyak pada bank sentral.

Tingkat cadangan wajib (*reserve requirement*). Kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank umum akan mengakibatkan ketidakberhasilan instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto. Untuk itu, bank sentral dapat mewajibkan bank umum untuk

meningkatkan persentase cadangan wajib yang harus diserahkan ke bank sentral. Dengan meningkatkan persentase cadangan wajib, maka kelebihan cadangan milik bank umum dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan. Setelah kelebihan cadangan milik bank umum dikurangi dan dihilangkan, maka instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto dapat bekerja lebih efektif. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, maka bank sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib bank umum, sebaliknya dalam kondisi perekonomian *overemployment*, bank sentral meningkatkan persentase cadangan wajib.

Kredit selektif (*selective credit*). Bank umum diberi kebebasan untuk menentukan jenis dan tingkat suku bunga atas pinjaman yang mereka salurkan kepada masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum mengenai penyaluran kredit mereka dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Misalnya pemerintah ingin mendorong perkembangan industri kecil dan menengah (IKM), pemerintah dapat membuat aturan ataupun himbauan kepada bank umum untuk menyalurkan sebagian kreditnya untuk industri kecil dan menengah. Misalnya kredit tersebut bersifat lunak, baik tingkat bunganya maupun jangka waktu pengembaliannya.

Bujukan moral (*moral suation*). Berbeda dengan instrumen operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, dan tingkat cadangan wajib, instrumen bujukan moral tidak mewajibkan bank umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Bank sentral hanya memberikan bujukan, ajakan, ataupun himbauan kepada bank untuk membantu pemerintah melaksanakan program tertentu yang akan dilaksanakan. Misalnya bujukan itu berupa himbauan kepada bank umum untuk mengurangi kredit untuk sektor tertentu dan meningkatkan atau menurunkan suku bunga pinjaman bank umum. Karena instrumen ini hanya bersifat kualitatif, maka keberhasilan kebijakan moneter sangat tergantung pada kemauan bank umum untuk menuruti himbauan pemerintah melalui bank sentral.

Secara ringkas, bank sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengatasi masalah *overemployment* dan *underemployment* seperti terlihat pada Tabel 8.5 berikut ini.

Tabel 8.5
Instrumen Kebijakan Moneter untuk Mengatasi *Overemployment* dan *Underemployment*

Instrumen Kebijakan Moneter	Kondisi <i>Overemployment</i>	Kondisi <i>Underemployment</i>
Operasi pasar terbuka	Menjual surat berharga	Membeli surat berharga
Suku bunga diskonto	Ditingkatkan	Diturunkan
Tingkat cadangan wajib	Ditingkatkan	Diturunkan
Kredit selektif	TMP	EMP
Bujukan moral	-	-

Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan *Standing Facilities*. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dalam rangka mengurangi (*smoothing*) volatilitas suku bunga PUAB o/n. Sementara instrumen

Standing Facilities merupakan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka membentuk koridor suku bunga di PUAB o/n. OPT dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia, sementara *Standing Facilities* dilakukan atas inisiatif bank.



Gambar 8.3. Operasi Moneter Bank Indonesia

Keterangan:

PUAB atau Pasar Uang Antar Bank adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya. Suku bunga PUAB merupakan harga yang terbentuk dari kesepakatan pihak yang meminjam dan meminjamkan dana. Kegiatan di PUAB dilakukan melalui mekanisme *over the counter* (OTC) yaitu terciptanya kesepakatan antara peminjam dan pemilik dana yang dilakukan tidak melalui lantai bursa. Transaksi PUAB dapat berjangka waktu dari satu hari kerja (overnight) sampai dengan satu tahun.

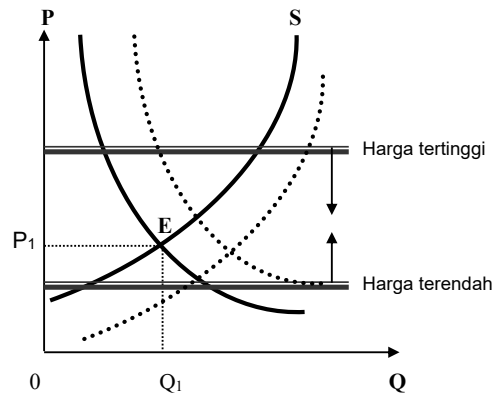
KEBIJAKAN PENGENDALIAN HARGA

Selain kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, ada jenis kebijakan lain yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kebijakan pengendalian harga. Kebijakan pengendalian harga ini ditujukan untuk memperkecil fluktuasi harga produk tertentu sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Ada dua bentuk kebijakan pengendalian harga, yaitu:

- a. Kebijakan harga tertinggi (*ceiling price*)
- b. Kebijakan harga terendah (*floor price*)

Jenis produk yang diatur dalam kebijakan terutama untuk barang yang bersifat strategis dan dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Kebijakan harga tertinggi ditujukan untuk menjaga apabila terjadi kenaikan harga, tidak melebihi tingkat harga

kewajaran. Sebaliknya kebijakan harga terendah ditujukan untuk menjaga agar harga tidak turun begitu rendahnya. Kedua jenis kebijakan ini ditujukan untuk melindungi konsumen maupun produsen. Misalnya untuk beras diperlakukan kebijakan *ceiling price* dan *floor price*. Karena beras dibutuhkan oleh seluruh penduduk dari kelompok penduduk berpenghasilan rendah sampai dengan kelompok penduduk berpenghasilan tinggi, maka harga beras perlu diatur agar tidak melebihi harga kewajaran. Begitu pula sebaliknya apabila harga beras turun karena panen raya, maka petani perlu dilindungi agar harga beras tidak menjadi sangat murah. Secara grafis, kebijakan harga tertinggi dan kebijakan harga terendah dapat dilihat pada Kurva 8.1 berikut ini.



Kurva 8.1. Kebijakan Pengaturan Harga

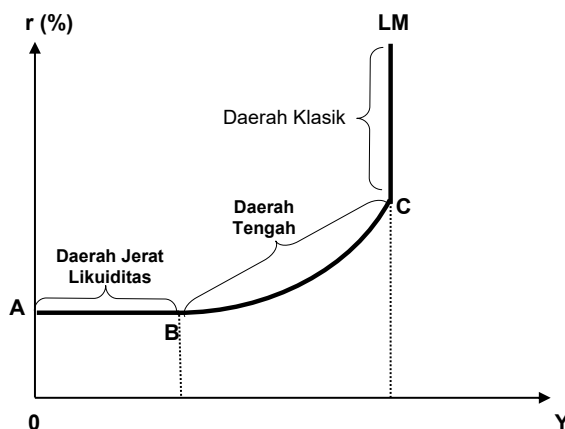
Dalam kondisi keseimbangan di titik E, jumlah keseimbangan adalah P_1 dan harga keseimbangan Q_1 , pergeseran permintaan dan penawaran akan mengakibatkan harga berfluktuasi. Apabila permintaan naik, maka diharapkan kenaikan harga tidak melebihi harga tertinggi agar konsumen terlindungi. Sebaliknya melimpahnya penawaran tidak mengakibatkan harga turun di bawah harga terendah sehingga produsen terlindungi.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Kurva LM seperti yang telah dibahas pada Bab. 6, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Daerah Klasik atau *classical range*. Daerah klasik pada kurva LM adalah bagian yang sejajar dengan sumbu tingkat bunga (titik C ke atas).
- b. Daerah jerat likuiditas atau *liquidity trap*. Daerah jerat likuiditas adalah kurva LM yang sejajar dengan tingkat pendapatan nasional riil. Pada daerah ini tingkat bunga sedemikian rendahnya sehingga harga obligasi menjadi tinggi. Dalam kondisi ini, masyarakat meramalkan akan terjadi penurunan harga obligasi sehingga uang yang dimiliki tidak digunakan untuk membeli obligasi tetapi diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk tabungan atau uang tunai.

- c. Daerah tengah atau *intermediate*. Daerah tengah merupakan bagian kurva LM yang berada antara daerah klasik dan jerat likuiditas.



Kurva 8.2. Kurva LM dan Pembagiannya

a. Efektivitas Kebijakan Fiskal

Untuk melihat efektivitas kebijakan fiskal, perhatikan Kurva 8.3. Dengan mensimulasikan pergeseran kurva IS, efektivitas kebijakan fiskal dapat dilihat dari pengaruhnya meningkatkan pendapatan nasional riil.

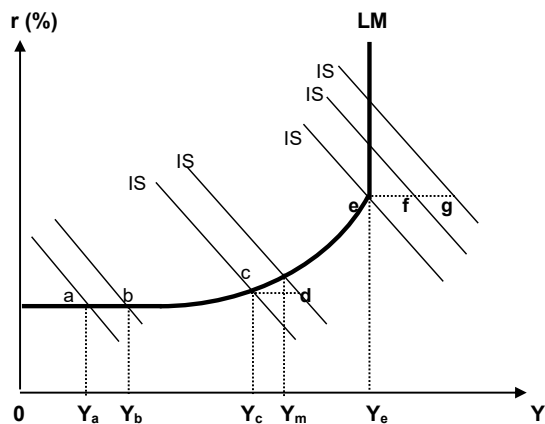
- Daerah jerat likuiditas** kebijakan fiskal **sangat efektif**. Dengan menggeser kurva IS sejauh a b , akan berakibat pada kenaikan pendapatan nasional riil juga sebesar ab . Kenaikan pendapatan nasional ini terjadi dari Y_a ke Y_b .
- Daerah tengah** kebijakan fiskal **kurang efektif**. Pergeseran kurva IS sejauh cd hanya akan berhasil meningkatkan pendapatan nasional keseimbangan kurang dari jarak cd tersebut, yaitu dari Y_c ke Y_m .
- Daerah Klasik** kebijakan fiskal **tidak efektif**. Meskipun kurva IS digeser sejauh e f ataupun e g , tingkat pendapatan nasional riil tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar Y_e .

b. Efektivitas Kebijakan Moneter

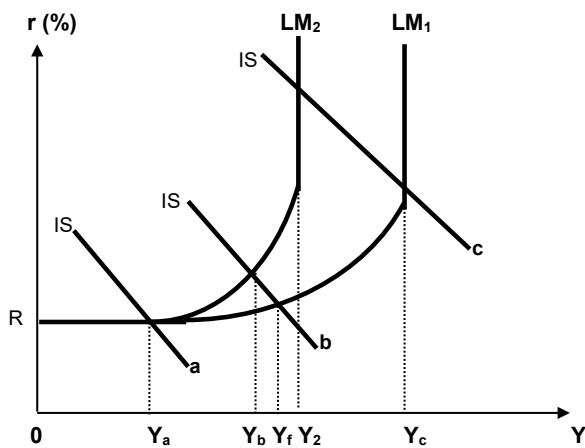
Efektivitas kebijakan moneter ditunjukkan Kurva 8.4. Dengan mensimulasikan pergeseran kurva IS dan kurva LM, efektivitas kebijakan moneter akan berpengaruh di tiga daerah, yaitu:

- Daerah jerat likuiditas** kebijakan moneter **tidak efektif**. Pergeseran kurva LM dari LM_1 ke LM_2 tidak dapat meningkatkan tingkat bunga. Tingkat bunga tetap pada tingkat R sedangkan tingkat pendapatan nasional riil juga tidak mengalami perubahan.
- Daerah tengah** kebijakan moneter **kurang efektif**. Kebijakan moneter hanya menggeser sedikit tingkat pendapatan nasional riil.

- c. **Daerah Klasik** kebijakan moneter **sangat efektif**. Pergeseran kurva IS akan mengakibatkan pendapatan nasional naik lebih besar, yaitu dari Y_2 ke Y_e .



Kurva 8.3. Kurva LM dan Efektivitas Kebijakan Fiskal



Kurva 8.4. Kurva IS-LM dan Efektivitas Kebijakan Moneter

ISTILAH PENTING BAB INI

Kebijakan ekspansif

Kebijakan kontraktif

Overcooling

Overemploymnet

Lump-sum tax

Leakage

Disposable income

Discretionary

Open market operation

Discount rate

Reserve requirement

Selective credit

Moral suation

Sertifikat bank Indonesia

Surat berharga pasar uang

Tight money policy

Easy money policy

Floor price

Ceiling price

RANGKUMAN

1. Ada beberapa alternatif kebijakan yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, diantaranya adalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan pengendalian harga, dan kebijakan luar negeri. Pada dasarnya, kebijakan itu bertujuan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan mencapai kapasitas produksi nasional yang tinggi.
2. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Segala macam kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal, misalnya kebijakan bidang perpajakan, kebijakan hutang luar negeri, dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah.
3. Pemerintah sering menghadapi defisit anggaran, untuk membiayai defisit anggaran tersebut, ada beberapa alternatif pembiayaan, yaitu melalui pajak, mencetak uang baru, pinjaman pada masyarakat dalam negeri dan pinjaman pada masyarakat luar negeri.
4. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang beredar (JUB) yang dilakukan oleh bank sentral. Dalam mengendalikan jumlah uang beredar, ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang biasa digunakan, diantaranya adalah: operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan wajib, kredit selektif, dan bujukan moral.
5. Kebijakan pengendalian harga ditujukan untuk melindungi konsumen maupun produsen. Ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu kebijakan harga tertinggi dan kebijakan harga terendah.

PERTANYAAN UNTUK LATIHAN

SOAL LATIHAN PILIHAN BERGANDA

1. Berikut ini adalah instrumen kebijakan moneter, *kecuali*:
 - a. cadangan wajib
 - b. tingkat diskonto
 - c. penentuan pajak
 - d. cadangan wajib
 - e. *moral suation*

2. Kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara menjual dan membeli surat berharga di pasar uang adalah pengertian dari:
 - a. cadangan wajib
 - b. tingkat diskonto
 - c. penentuan pajak
 - d. *moral suation*
 - e. *open market operation*

3. Bentuk kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah *overemployment* adalah:
 - a. meningkatkan cadangan wajib
 - b. meningkatkan tingkat diskonto
 - c. menjual surat berharga
 - d. menetapkan kredit secara selektif
 - e. semua jawaban diatas benar

4. Berikut ini adalah jenis kebijakan fiskal, *kecuali*:
 - a. peningkatan pajak
 - b. *tax holiday*
 - c. penundaan cicilan hutang
 - d. pembayaran transfer
 - e. meningkatkan cadangan bank

5. Berikut ini merupakan jenis kebijakan yang bersifat ekspansif, *kecuali*:
 - a. menurunkan tingkat bunga
 - b. mendorong investasi asing
 - c. meningkatkan suku bunga pinjaman
 - d. memberikan kredit murah pada perusahaan
 - e. meningkatkan jumlah uang beredar

SOAL LATIHAN ESSAY

1. Apa beda antara instrumen kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dan kualitatif?
2. Kapan instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto efektif mengendalikan jumlah uang beredar?
3. Jelaskan bagaimana mekanisme kebijakan moneter mengatasi kondisi *overcooling* dan *overheating*!
4. Mengapa kebijakan pengendalian harga diperlukan untuk mengendalikan stabilitas perekonomian? Jelaskan!
5. Jelaskan keterkaitan antara kebijakan moneter dan inflasi!

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Menurut Saudara, sejauh mana peranan Bank sentral dalam mengendalikan perekonomian makro Indonesia?
2. Jelaskan keterkaitan antara kemajuan pasar uang dengan keberhasilan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia!

9

PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

1. Konsep Pengangguran
2. Penyebab Pengangguran
3. Hubungan Pengangguran dan Inflasi
4. Profil Pengangguran di Indonesia
5. Alternatif Strategi Mengatasi Pengangguran
6. Konsep Dasar Kemiskinan
7. Penyebab dan Ukuran Kemiskinan
8. Garis Kemiskinan dan Konsep Kemiskinan Lainnya

PENGANGGURAN

Konsep Pengangguran

Pengangguran (*unemployment*) merupakan masalah yang selalu hampir ada dalam setiap perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja (*labor force*) untuk memperoleh pekerjaan sesuai yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Dengan kata lain, pengangguran merujuk pada situasi atau keadaan di mana seseorang menghadapi ketiadaan kesempatan kerja. Pengangguran tidaklah selalu identik dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang sudah memiliki pekerjaan dan menjalankan pekerjaannya juga dapat digolongkan sebagai pengangguran karena konsep pengangguran dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu:

- a. Waktu
- b. Intensitas pekerjaan
- c. Produktivitas

Orang yang sudah bekerja dapat digolongkan sebagai setengah pengangguran apabila pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya sehingga hasil akhir dari pekerjaannya di bawah produktivitas yang seharusnya. Secara lebih rinci, setengah pengangguran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Setengah penganggur kentara (*visible under-employment*) yang mencerminkan kondisi orang yang bekerja tetapi mengalami ketidakcukupan dalam volume pekerjaan yang dilakukan. Adapun kriteria setengah pengangguran kentara dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
 1. Bekerja kurang dari jam kerja normal
 2. Melakukan pekerjaan secara terpaksa
 3. Sudah bekerja tapi masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia menerima pekerjaan tambahan.
- b. Setengah penganggur tak kentara (*invisible under-employment*) dapat tercermin dari adanya ketidaktepatan dalam penempatan sumber daya manusia, atau adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan faktor produksi. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, keterampilan yang kurang dimanfaatkan, dan rendahnya tingkat produktivitas.

Setengah penganggur, baik yang kentara maupun yang tidak kentara dapat dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk yang setengah menganggur pada tahun t dengan jumlah angkatan kerja pada tahun yang bersangkutan.

$$\text{Setengah Penganggur} = \frac{\text{Setengah Penganggur Tahun } t}{\text{Angkatan Kerja Tahun } t} \times 100$$

Selain itu, Edgar O. Edwards menggolongkan pengangguran menjadi 5 bentuk, yaitu:

1. Pengangguran terbuka (*open unemployment*)

Pengangguran terbuka dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penganggur sukarela

Pengangguran sukarela merupakan kelompok angkatan kerja yang memilih tidak bekerja karena tidak bersedia digaji pada jumlah tertentu maupun mengharapkan pekerjaan yang lebih baik.

b. Penganggur terpaksa

Pengangguran terpaksa merupakan kelompok angkatan kerja yang bersedia bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Besarnya tingkat penganggur terbuka, dihitung dengan cara membagi jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja pada tahun yang bersangkutan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Penganggur Terbuka} = \frac{\text{Penganggur Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100$$

2. Setengah penganggur (*underemployment*)

Tenaga kerja yang termasuk setengah menganggur adalah kelompok tenaga kerja yang lamanya bekerja (dalam satuan hari, jam, ataupun minggu) kurang dari yang seharusnya mereka bisa kerjakan. Misalnya orang yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi orang tersebut malas-malasan, datang terlambat, maupun mendahului pulang.

3. Bekerja secara tidak penuh

a. Pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*)

Contoh pengangguran tak kentara adalah petani yang bekerja di sawah selama sehari penuh dari pagi sampai sore. Bila dilihat dari jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan di sawah, pekerjaan tersebut tidaklah perlu dilakukan sehari penuh, melainkan cukup setengah hari saja.

b. Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*)

Penyebab pengangguran tersembunyi adalah orang yang bekerja tidak sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikannya sehingga orang tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal.

c. Pensiun awal

Pensiun awal memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk memberi kesempatan tenaga kerja baru yang memiliki pemikiran yang lebih aplikatif maupun mengurangi tenaga kerja tua yang produktivitasnya mulai menurun.

4. Tenaga kerja lemah (*impaired*)

Kelompok ini sebenarnya memiliki pekerjaan dan bekerja secara penuh, tetapi intensitasnya rendah. Jenis pengangguran ini dikarenakan kurang gizi maupun menderita penyakit tertentu.

5. Tenaga kerja tidak produktif

Kelompok angkatan kerja ini sebenarnya sudah memiliki pekerjaan dan mampu bekerja secara produktif, tapi karena kurangnya fasilitas yang dimiliki perusahaan mengakibatkan mereka menghasilkan pekerjaan yang tidak memuaskan. Misalnya mesin yang dimiliki sudah usang, kondisi pabrik yang tidak nyaman, maupun bahan baku yang tidak tersedia secara rutin.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konsep angkatan kerja dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia lebih dari 16 tahun yang siap mencari pekerjaan dan memperoleh pendapatan
 1. Angkatan kerja
 2. Bukan angkatan kerja
- b. Penduduk bukan usia kerja

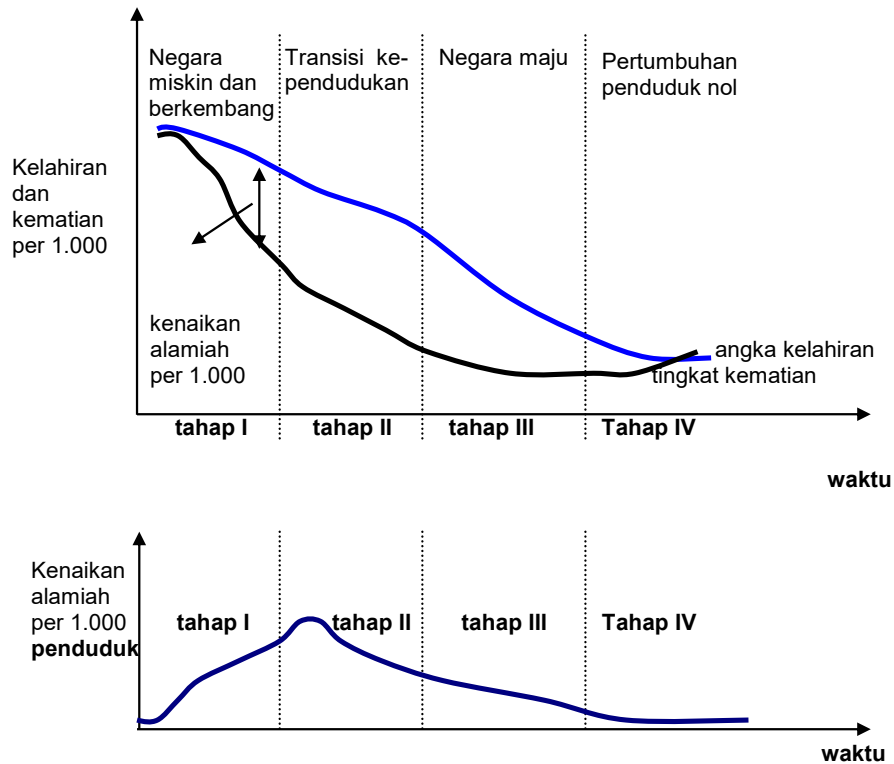
Penyebab Pengangguran

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi masalah pembangunan yang serius apabila penduduk tersebut tidak memiliki keahlian dan perekonomian tidak mampu menyerapnya di pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kemampuan perekonomian menyediakan lapangan pekerjaan akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang yang lebih tinggi daripada negara maju merupakan salah satu pemicu terjadinya pengangguran, selain kemampuan negara maju yang mampu menyediakan kesempatan kerja bagi penduduknya. Dilihat dari pola perkembangannya di masa datang, pertumbuhan penduduk di negara berkembang akan mengalami penurunan seperti yang terlihat melalui tahapan-tahapan pada Gambar 9.1.

Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan penduduk yang tinggi diiringi dengan tingkat kematian yang tinggi pula sehingga pertumbuhan penduduk lamban. Setelah itu pada tahap II terjadi peningkatan taraf hidup dan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat sehingga mengakibatkan angka kematian mengalami penurunan dan pertumbuhan penduduk mulai meningkat serta usia harapan hidup (*life expectancy*) semakin lama. Kondisi ini apabila tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai bagi mereka akan mengakibatkan pengangguran yang bersifat alamiah.

Negara maju, pada tahap III tingkat kelahiran mengalami penurunan dan di sisi lain tingkat kematian juga mengalami penurunan. Penurunan tingkat kelahiran lebih besar daripada penurunan tingkat kematian sehingga pertumbuhan penduduk sangat lambat. Lambatnya pertumbuhan penduduk di negara maju didukung oleh kemampuan negara dalam menciptakan kesempatan kerja menyebabkan permasalahan pengangguran tidak separah seperti yang dialami oleh negara maju.



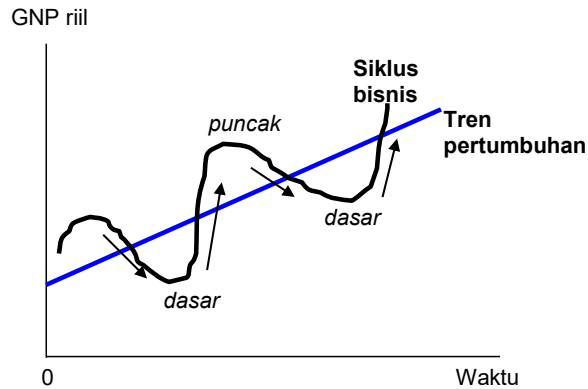
Gambar 9.1. Pola Perkembangan Kependudukan

2. Rendahnya laju investasi produktif

Rendahnya investasi di negara berkembang merupakan salah satu penyebab rendahnya kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Meskipun sumber daya alam yang dimiliki melimpah, tetapi kapasitas produksi dan sumber daya yang ada belum digunakan secara penuh (*underemployment*) sehingga terjadi *idle capacity*.

3. Siklus bisnis yang melemah

Dalam siklus bisnis, ada gelombang fluktuasi kegiatan ekonomi secara umum yang dikenal sebagai gelombang konjungtur. Siklus bisnis secara aktual diukur dari GNP riil yang merupakan nilai pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan selama satu tahun. Pada saat puncak kegiatan bisnis (*peak*), kebutuhan akan tenaga kerja sangat besar sehingga pada kondisi ini jumlah pengangguran relatif rendah. Setelah kondisi puncak, siklus bisnis mengalami kelesuan dan pada kondisi puncak kelesuan (*trough*) kebutuhan akan tenaga kerja sangat sedikit, sehingga tenaga kerja yang ada tidak dipekerjakan sehingga mengalami pengangguran. Ada kalanya pengangguran semacam ini bersifat hanya sementara saja selama kondisi siklus bisnis mengalami kelesuan.



Kurva 9.2. Siklus Bisnis

Pada saat terjadi depresi berat (*great depression*) antara tahun 1929 dan 1932, produksi sektor industri di dunia mengalami penurunan sampai dengan 37 persen. Negara terparah yang mengalami depresi adalah Amerika Serikat dan Jerman. Penurunan produksi untuk beberapa pada masa depresi berat itu adalah sebagai berikut:

Tabel 9.1
Persentase Penurunan Output Beberapa Negara

Negara	Persentase Penurunan Pada Output
Chili	-22
Perancis	-31
Jerman (Barat)	-47
Inggris Raya	-17
Jepang	-2
Norwegia	-7
Spanyol	-12
Amerika Serikat	-46

Kelesuan perekonomian seperti yang terjadi di Indonesia akibat krisis moneter seperti yang terjadi pada akhir tahun 1997 juga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran secara drastis. Dengan demikian, penyebab terjadinya pengangguran salah satunya adalah gelombang konjungtur kegiatan ekonomi dan bisnis yang melemah. Pengangguran semacam ini dikenal dengan pengangguran siklikal.

4. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat

Pengangguran dapat terjadi karena masyarakat tidak mampu memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia. Ketidakmampuan dalam memanfaatkan kesempatan kerja tersebut, salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian

keahlian yang dibutuhkan dengan keahlian tenaga kerja yang dimiliki. Di sebagian negara berkembang, rendahnya keahlian angkatan kerja dikarenakan rendahnya kualitas pendidikan yang diperoleh masyarakat. Dengan demikian, kesempatan kerja yang tersedia itu akan dimanfaatkan oleh tenaga kerja yang berasal dari luar daerah tersebut, atau bahkan dari luar negeri. Pengangguran yang terjadi disebabkan karena rendahnya kualitas pendidikan dari angkatan kerja yang bersangkutan, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.

5. Strategi industri yang *labor saving*

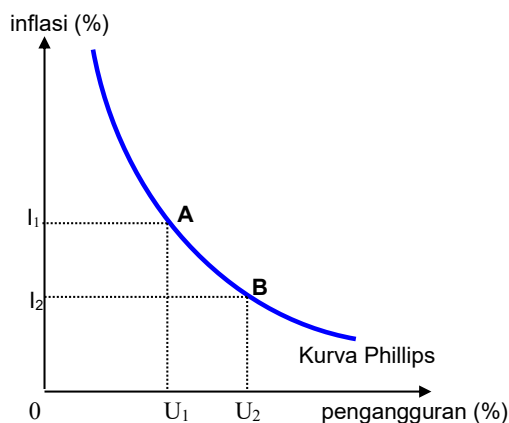
Kemajuan teknologi yang terjadi di satu sisi mengakibatkan meningkatnya jumlah *output* yang mampu dihasilkan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kemajuan teknologi kadang juga diikuti dengan penghematan penggunaan tenaga kerja (*labor saving*) pada suatu proses produksi dan menggunakan modal secara intensif (*capital intensive*) yang pada akhirnya akan menimbulkan pengangguran.

Hubungan Pengangguran dan Inflasi

Inflasi dan pengangguran merupakan dua masalah ekonomi yang sangat krusial, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Lebih parah lagi, antara inflasi dan pengangguran sering kali terjadi *trade-off* pada saat yang bersamaan, artinya apabila kebijakan pemerintah diarahkan untuk menurunkan inflasi, maka pengangguran akan mengalami peningkatan. Sebaliknya apabila pemerintah ingin menurunkan pengangguran, maka inflasi akan meningkat.

Mekanisme transmisinya jelas, pembangunan memerlukan investasi dan peningkatan pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan permintaan efektif barang dan jasa meningkat. Peningkatan permintaan efektif tanpa diikuti perluasan kapasitas produksi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa. Pengangguran dapat memperlunak laju inflasi di suatu negara karena dengan adanya pengangguran, maka daya beli masyarakat akan menurun sehingga akan mengurangi permintaan efektif yang pada akhirnya menurunkan harga. Hubungan antara inflasi dan pengangguran ini diteliti oleh ekonom Inggris yang bernama A.W. Phillips seperti Kurva 9.3.

Sumbu vertikal menunjukkan persentase kenaikan harga barang dan jasa sedangkan sumbu horizontal menunjukkan persentase pengangguran dalam persentase dari seluruh angkatan kerja. Misalnya pemerintah mengerahkan investasi dan meningkatkan pengeluaran pemerintah secara besar-besaran dengan harapan tingkat pengangguran turun dari U_2 menjadi U_1 . Kenaikan pengeluaran pemerintah ini akan meningkatkan permintaan efektif akan barang dan jasa sehingga harga barang dan jasa naik dari I_2 ke I_1 .



Kurva 9.3. Kurva Phillips

Kenaikan harga barang dan jasa secara akumulatif dari waktu ke waktu akan mengakibatkan kemampuan daya beli masyarakat akan menurun. Penurunan ini akan berdampak pada bergesernya permintaan efektif masyarakat sehingga barang dan jasa yang dihasilkan tidak terbeli. Kondisi ini selanjutnya akan berdampak pada pengurangan produksi oleh perusahaan yang tentunya konsekuensi langsungnya adalah pengurangan tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja secara akumulatif akan menambah angka pengangguran, baik pengangguran sementara maupun pengangguran permanen. Pengangguran jelas akan mengakibatkan kemiskinan, atau metode transmisinya tergambar pada Gambar 9.2. berikut ini.



Gambar 9.2. Keterkaitan Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan

PROFIL PENGANGGURAN DI INDONESIA

Masalah pengangguran, yang terbuka maupun yang samar-samar, merupakan penyakit yang bersifat struktural dan kronis yang melanda seluruh negara berkembang. Bersifat struktural berarti masalah pengangguran ini berkaitan dengan berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun aspek sosial, politik, dan kemasyarakatan. Sedangkan pengangguran bersifat kronis, artinya masalah pengangguran dari waktu ke waktu bukannya mengalami perbaikan, akan tetapi justru permasalahan pengangguran semakin parah dan jumlahnya pun terus meningkat. Penyebab yang paling mendasar adalah pencari kerja setiap tahun terus bertambah, sedangkan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka tidak mencukupi, walaupun bertambah tidaklah sebanding dengan tambahan pencari kerja tersebut. Akibatnya, setiap tahun jumlah penganggur yang benar-benar terbuka terus meningkat.

a. Pengangguran Berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki, pengangguran terbuka di Indonesia didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Di sisi lain, jumlah angkatan kerja di Indonesia sebagian besar merupakan tamatan SD dan tidak tamat SD. Secara lengkap, kondisi pengangguran menurut tingkat pendidikan tahun 2002 adalah sebagai berikut:

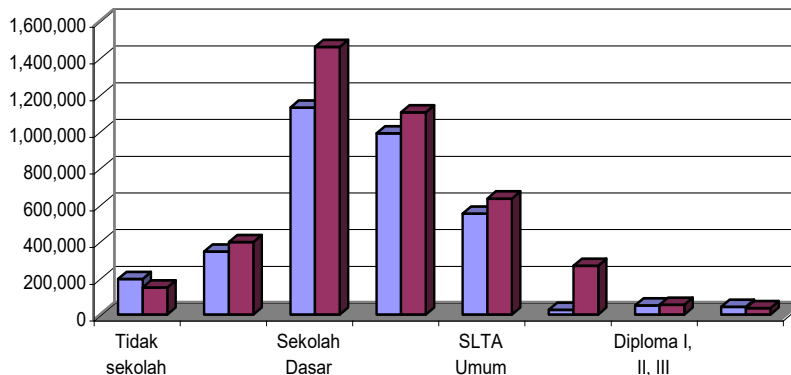
Tabel 9.2
Pengangguran di Indonesia Tahun 2017

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun 2017 s/d Februari		Tahun 2017 s/d Agustus	
	Pengangguran	Angkatan kerja	Pengangguran	Angkatan kerja
Tidak/belum pernah sekolah	92,331	4,171,034	3,807,374	3,870,358
Tidak/belum tamat SD	546,897	17,881,642	15,947,147	16,351,582
SD	1,292,234	32,462,200	31,223,380	32,127,941
SLTP	1,281,240	23,902,836	21,716,713	22,991,130
SLTA Umum/SMU	1,552,894	22,075,299	21,131,391	23,042,220
SLTA Kejuruan/SMK	1,383,022	14,922,120	12,587,547	14,208,949
Akademi/Diploma	249,705	3,931,890	3,286,551	3,529,488
Universitas	606,939	12,197,090	11,322,320	11,941,078
Total	7,005,262	131,544,111	121,022,423	128,062,746

:Catatan

*) tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, termasuk juga mempersiapkan usaha/pekerjaan, tidak sama dengan alasan tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja.

Dilihat pada Grafik 9.1 berikut ini, profil pengangguran menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang tamat sekolah dasar tidak dapat memperoleh kesempatan kerja formal dibandingkan dengan penduduk yang menamatkan pendidikan yang lebih tinggi.



Grafik 9.1. Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari elastisitas penyerapan tenaga kerja persektor, maka sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar adalah dari sektor jasa dan sektor transportasi dan komunikasi, yaitu masing-masing 0,85. Di sisi lain, sektor yang kurang prospektif menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, bahkan untuk sektor ini, elastisitasnya negatif yaitu 0,05. Kecenderungan ini dapat dipahami karena luas lahan pertanian terus berkurang dari tahun ke tahun. Selain itu, rendahnya nilai tambah (*value added*) sektor pertanian dibandingkan dengan sektor tersier lainnya mengakibatkan terjadinya pergeseran sektoral dari sektor pertanian ke sektor tersier.

b. Pengangguran Berdasarkan Usia

Menurut hipotesis daur hidup, penduduk yang digolongkan sebagai kelompok usia produktif adalah penduduk dengan usia antara 15 tahun sampai dengan kurang dari 60 tahun. Sedangkan penduduk yang berusia lebih dari 60 tahun dan kurang dari 15 tahun digolongkan sebagai usia non-produktif. Meskipun kita menggunakan kriteria daur hidup tersebut, penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya digolongkan sebagai penduduk bukan angkatan kerja.

Dengan menggunakan hipotesis daur hidup, maka untuk pengangguran terbuka tahun 2017, kelompok penduduk usia produktif antara 15-19 tahun (72,46 persen) dan usia 20-24 tahun (83,38 persen) merupakan kelompok usia yang termasuk besar mengalami pengangguran.

Tabel 9.3
Pengangguran Menurut Kelompok Umur,
Tahun 2017

Golongan Umur	Tahun 2017 s/d Februari			Tahun 2017 s/d Agustus		
	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja/AK	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja/AK
15 - 19	1,185,867	6,713,683	82.34	5,142,340	7,096,466	72.46
20 - 24	2,157,591	15,152,712	85.76	10,997,685	13,190,479	83.38
25 - 29	1,121,551	15,933,615	92.96	13,005,071	13,947,457	93.24
30 - 34	600,742	15,830,789	96.21	15,048,964	15,579,183	96.60
35 - 39	412,185	15,989,429	97.42	17,202,398	17,633,583	97.55
40 - 44	376,225	15,441,370	97.56	14,276,271	14,546,532	98.14
45 - 49	384,38	13,864,506	97.23	13,660,154	13,869,367	98.49
50 - 54	297,844	11,632,097	97.44	11,394,107	11,572,695	98.46
55 - 59	278,554	8,776,843	96.83	8,814,593	8,969,414	98.27
60 +	190,323	12,209,067	98.44	11,480,840	11,657,570	98.48
Total	7,005,262	131,544,111	94.67	121,022,423	128,062,746	94.50

:catatan

- *) tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, termasuk juga mempersiapkan usaha/pekerjaan, tidak sama dengan alasan tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja.

C. Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral

Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 1996, distribusi kesempatan kerja berpeluang besar di delapan sektor, yaitu sektor pertanian dengan jumlah kesempatan kerja 37 juta orang, perdagangan 16,1 juta orang, jasa 11,7 juta orang, industri 10,7 juta orang, angkutan 3,9 juta orang, konstruksi 3,8 juta orang, keuangan 0,7 juta orang, dan sektor pertambangan 0,6 juta orang. Dengan perekonomian yang hanya tumbuh sekitar 3,5 sampai 4 persen, tenaga kerja yang bisa diserap sekitar 1,3 juta orang dari tambahan angkatan kerja sekitar 2,7 juta orang.

Tabel 9.4
Elastisitas Kesempatan Kerja per Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Elastisitas
Pertanian	(0.05)
Pertambangan	0.63
Manufaktur	0.56
Konstruksi	0.89
Perdagangan, hotel, restoran	0.73
Jasa	0.85
Transportasi dan komunikasi	0.85

Sumber: Tambunan, Tukus, Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, hal. 92

Kondisi ini diperparah lagi dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia yang terjadi di kuartal keempat tahun 1997 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif, yaitu tahun 1998 pertumbuhan antara -13,6% s/d -15% dan tahun 1999 pertumbuhan antara -2% s/d -5,1%. Dengan demikian, kondisi ini akan membuat industri yang ada tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang baru untuk menampung tambahan angkatan kerja.

Alternatif Strategi Mengatasi Pengangguran

Sebenarnya masalah pengangguran jauh lebih *urgent* untuk diselesaikan daripada masalah lain, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hal ini dikarenakan masalah pengangguran bersifat kompleks dan dapat berdampak secara multidimensional, yaitu selain aspek ekonomi, juga pada aspek politik, sosial, dan bahkan budaya.

Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran. **Pertama**, pemerintah hendaknya menjalin kerjasama dengan swasta untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Hal ini dikarenakan swasta mempunyai dana untuk menggerakkan investasi. Investasi akan terjadi apabila investor memiliki kepastian “keamanan” atas dana yang diinvestasikan tersebut, sehingga pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk berusaha.

Kedua, alternatif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi jumlah pengangguran yang terus meningkat itu antara lain pembenahan sektor pendidikan. Ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja berakibat kurang

terserapnya angkatan kerja yang terdidik di pasar kerja. Angkatan kerja memerlukan tambahan keterampilan untuk dapat lebih cepat terserap di pasar kerja. Bentuk tambahan keterampilan itu berupa keahlian yang bersifat aplikatif yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti keahlian komputer, bahasa asing, perbengkelan, dan bentuk keterampilan yang spesifik lainnya

Ketiga, pendorongan motivasi masyarakat untuk berwiraswasta pada berbagai bidang yang memiliki prospek perkembangan. Sudah saatnya mengubah stigma yang ada di masyarakat bahwa setelah mendapat pendidikan formal, maka ukuran keberhasilannya adalah mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau pegawai. Dengan dorongan dan bekal kewiraswastaan, maka akan tercipta kesempatan-kesempatan kerja baru sehingga secara simultan mendorong perkembangan perekonomian secara keseluruhan. Dan **keempat**, mengurangi pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi karena tingginya pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan *burden of dependency ratio* yang tinggi pula.

KEMISKINAN

Konsep Dasar Kemiskinan

Seperti halnya pengangguran, kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan suatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dilihat dari ukurannya. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat *multidimensional*, artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya sangat beragam. Selain itu, dimensi kebutuhan manusia yang beraneka ragam itupun saling terkait satu dengan lainnya.

Indonesia pada masa sebelum terjadinya krisis ekonomi sering dijuluki sebagai “Macan Asia” karena pada masa itu Indonesia diramalkan dapat menjadi salah satu negara di Asia yang mampu tumbuh dan berkembang menyamai Jepang, Korea, dan Cina. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun pada masa itu, masalah kemiskinan sudah ada dalam perekonomian Indonesia. Ada beberapa pendapat yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di suatu negara. Deininger dan Squire (1995) menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan angka kemiskinan. Dalam arti apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, maka di sisi lain akan terjadi *trade-off* dengan tingginya angka kemiskinan. Sebaliknya studi yang dilakukan oleh World Bank (1990), Fields dan Jakobson (1989) dan Ravallion (1995), menunjukkan tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tidak ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Hipotesis **Kuznets** yang menyatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif, sebaliknya hubungan

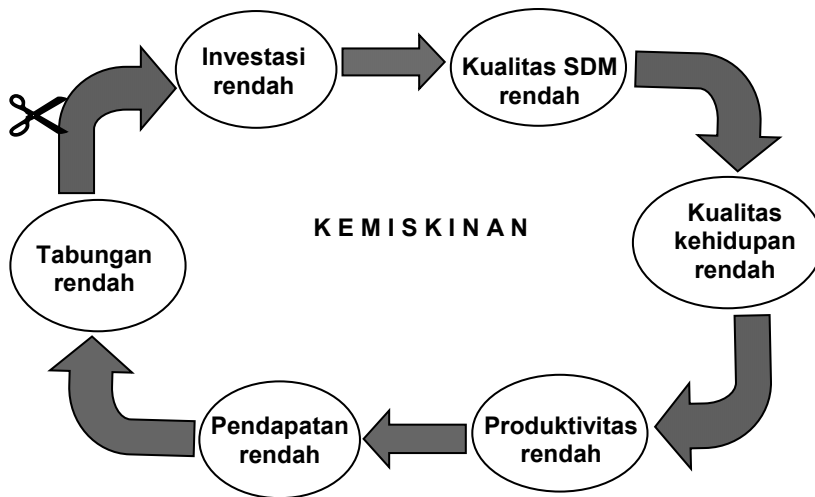
pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Hubungan ini sangat terkenal dengan nama **kurva U terbalik dari kuznets**. Kuznets menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif kemudian menjadi negatif, menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan (*rural*) ke suatu ekonomi perkotaan (*urban*) atau ekonomi industri.

Penyebab Kemiskinan

Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu

1. Kemiskinan kultural
2. Kemiskinan struktural.

Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya, atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang merasa cepat puas akan sesuatu yang telah dicapai, sifat bermalas-malasan, dan cara berpikir masyarakat yang kurang rasional dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. **Kemiskinan struktural** yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam yang kurang menguntungkan sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan. Kondisi alam yang kurang menguntungkan berupa tanah yang tandus, letak daerah yang terpencil, tidak adanya sumber daya mineral dan non-mineral, serta miskinnya fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan.



Gambar 9.3 Lingkaran Penyebab Kemiskinan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, di mana masing-masing faktor saling berkaitan dan memiliki hubungan sebab-akibat (kausalitas). Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan kualitas kehidupan

masyarakat yang rendah pula yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat. Rendahnya produktivitas akan berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat sehingga akumulasi tabungan masyarakat juga akan rendah. Kondisi ini berakibat pada rendahnya investasi produktif karena sebagian dana yang digunakan untuk investasi diperoleh dari tabungan masyarakat yang pada gilirannya kembali mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi inilah yang membentuk lingkaran yang tidak jelas awal dan akhirnya sehingga kondisi ini sering disebut lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Jadi sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah masyarakat yang memang dalam kondisi miskin, yaitu miskin sumber daya, miskin produktivitas, miskin pendapatan, miskin tabungan dan miskin investasi.

Selanjutnya bagaimana cara mengatasi kemiskinan atau memutus lingkaran setan kemiskinan ini? Ada beberapa pendapat dimana seharusnya lingkaran ini dipotong. Salah satu pendapat mengatakan bahwa kondisi “ketidakberdayaan” ini dapat diatasi dengan mendorong terjadinya investasi produktif. Dengan investasi produktif, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan secara sederhana dan umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut
- b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan absolut. Untuk membedakan masyarakat yang digolongkan sebagai kelompok miskin dan tidak miskin berdasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*). Apabila seseorang mampu memenuhi kebutuhan pokok minimalnya, seperti pangan, pakaian, dan perumahan, maka orang tersebut tidak digolongkan sebagai kelompok masyarakat miskin. Kesulitan penggunaan ukuran kemiskinan absolut adalah dalam penentuan kebutuhan pokok atau kebutuhan minimum, karena ada banyak definisi mengenai kebutuhan pokok. Selain itu kebutuhan pokok sangat dipengaruhi oleh kondisi alam (iklim, cuaca, dan geografis), adat dan kebiasaan, serta tingkat kemajuan peradaban suatu masyarakat atau negara.

Organisasi buruh internasional (*International Labor Organization* atau ILO) mendefinisikan kebutuhan pokok terbagi menjadi dua unsur. *Pertama*, kebutuhan minimum tertentu berupa makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, peralatan dan perlengkapan rumah tangga. *Kedua*, kebutuhan akan layanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti air bersih, pendidikan, dan kebutuhan akan budaya. Sementara itu, Maslow memasukkan selain kebutuhan minimum dasar, kebutuhan pokok juga meliputi kebebasan berpendapat (*freedom*), dan pengakuan,

penghargaan, dan aktualisasi diri (*self-esteem*). Dengan beragamnya pengertian kebutuhan pokok, maka garis kemiskinan tidak dapat berlaku umum dan sulit penentuannya secara obyektif.

Kemiskinan relatif. Berbeda dengan kemiskinan absolut, meskipun seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok, tetapi orang tersebut belum dapat dikatakan tidak miskin. Menurut Miller (1977), meskipun kebutuhan seseorang sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, akan tetapi pendapatannya tersebut masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih digolongkan miskin. Dengan demikian, semakin besar **kesenjangan pendapatan** antar kelompok masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang digolongkan sebagai kelompok masyarakat miskin.

Untuk mengukur kesenjangan dalam distribusi pendapatan, ada banyak pendekatan dan rumus yang digunakan. Paling tidak ada tiga alat ukur yang biasa digunakan, yaitu:

1. Indeks entropi atau *generalized entropy* (GE)
2. Indeks Atkinson atau *Atkinson measure*
3. Indeks Gini atau *Gini ratio*

Indeks Entropi. Nilai GE biasanya adalah lebih besar dari pada 0. Semakin besar nilai GE berarti menunjukkan semakin besar tingkat kesenjangan (*gap*) tingkat pendapatan dalam suatu negara. Parameter α mengukur besarnya perbedaan-perbedaan pendapatan dari masing-masing kelompok masyarakat. Secara matematis, indeks entropi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Entropi = \frac{1}{\alpha^2 - \alpha} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{Y_i}{Y} \right)^\alpha - 1 \right]$$

Keterangan:

- N = jumlah individu dalam *sample*
- Y = tingkat pendapatan
- α = ukuran rata-rata pendapatan

Indeks Atkinson. Seperti halnya indeks entropi, Indeks Atkinson juga digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu tempat. Indeks ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Atkinson = 1 - \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{y_i}{y} \right)^{1-\varepsilon} \right]^{1/1-\varepsilon}$$

Parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah ε . Besarnya nilai parameter ketimpangan ini adalah $0 < \varepsilon < 1$, berarti semakin tinggi nilai ε semakin besar ketidakseimbangan pembagian pendapatan antar golongan dalam suatu masyarakat.

Koefisien Gini. *Gini ratio* merupakan alat ukur yang umum dipergunakan dalam studi yang bersifat empiris. Untuk menghitung kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$KG = 1 - \sum_1^N (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

atau

$$KG = 1 - \sum_1^N f_i (Y_{i+1} + Y_i)$$

Keterangan:

KG = angka koefisien Gini

X = proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

f = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

Y = proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

α = ukuran rata-rata pendapatan

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna. Secara rinci, tingkat ketidakmerataan itu adalah sebagai berikut:

- 0,50 – 0,70 : ketidakmerataan tinggi
- 0,36 – 0,49 : ketidakmerataan sedang
- 0,20 – 0,35 : ketidakmerataan rendah

Tabel 9.5

Gini Indeks Perkotaan dan Pedesaan Beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2017

Provinsi	Perkotaan 2017		Pedesaan 2017	
	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
ACEH	0.347	0.334	0.293	0.299
SUMATERA UTARA	0.342	0.365	0.256	0.264
SUMATERA BARAT	0.336	0.309	0.276	0.288
DKI JAKARTA	0.413	0.409	-	-
JAWA BARAT	0.412	0.399	0.324	0.326
JAWA TENGAH	0.386	0.383	0.327	0.323
DI YOGYAKARTA	0.435	0.447	0.34	0.317
JAWA TIMUR	0.418	0.442	0.326	0.317
BANTEN	0.381	0.38	0.267	0.27
BALI	0.382	0.385	0.325	0.302
SULAWESI UTARA	0.405	0.389	0.355	0.346
SULAWESI TENGAH	0.379	0.367	0.309	0.313
SULAWESI SELATAN	0.41	0.444	0.348	0.332
MALUKU UTARA	0.322	0.338	0.265	0.277
PAPUA BARAT	0.349	0.349	0.392	0.386
PAPUA	0.322	0.302	0.395	0.407
INDONESIA	0.407	0.404	0.32	0.32

Selain itu, kemiskinan dapat dilihat dari beberapa indikator yang umum dan selama ini telah digunakan, menurut Badan Pusat Statistik (tahun 2000) kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di

pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Menurut hasil *survey* Susenas (1999), kemiskinan disetarakan dengan pengeluaran untuk bahan makanan dan non makanan sebesar Rp89.845,- /kapita/bulan untuk perkotaan dan Rp69.420,-/kapita/bulan untuk pedesaan. Bank Dunia menggunakan *standard* mata uang dollar Amerika Serikat, yaitu untuk dekade 1980, standar pengeluaran untuk makanan adalah 50 dolar AS untuk pedesaan dan 75 dolar AS untuk per kapita per tahun (berdasarkan kurs dasar dollar 126 terhadap rupiah pada tahun 1971).

Garis Kemiskinan dan Konsep Kemiskinan Lainnya

Garis Kemiskinan

Menurut BPS, garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.

Setiap individu membutuhkan kalori untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari (Indonesia menetapkan batas minimum 2100 kkal per kapita per hari), fasilitas rumah, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan pokok lainnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dan masyarakat mengangkat kaum miskin agar hidup layak. Garis kemiskinan merupakan konsep yang dapat dijelaskan oleh konsep dari BPS sebagai berikut:

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

GK = Garis Kemiskinan
GKM = Garis Kemiskinan Makanan
GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

1. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang *diinflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Dimana :

- GKM_j = Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).
 P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.
 Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.
 V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.
 j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

Dimana :

- K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j
 HK_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

Dimana :

- F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setaradengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan

dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

Dimana:

- NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp).
- V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).
- r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPKKD 2004).
- i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.
- p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Rumus Penghitungan:

$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

Dimana :

- α = 0
- z = garis kemiskina
- y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y_i < z
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = jumlah penduduk

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

: Dimana

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y_i < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*)

Selain garis kemiskinan, ada juga konsep yang disebut dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*). Indeks keparahan kemiskinan ini merupakan informasi yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y_i < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

ISTILAH PENTING BAB INI

Unemployment

Labor force

Visible under-employment

Invisible under-employment

Pengangguran terpaksa

Pengangguran sukarela

Underemployment

Disguised unemployment

Kurva Phillips

Kemiskinan

Kemiskinan struktural

Kemiskinan kultural

Kemiskinan absolut

Kemiskinan relatif

Vicious cycle of poverty

Basic needs

Generalized entropy

Atkinson measure

Gini ratio

RANGKUMAN

1. Pengangguran merupakan masalah yang bersifat struktural dan kronis karena masalah pengangguran berkaitan berbagai aspek, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Selain itu, masalah pengangguran dari waktu ke waktu bukannya mengalami perbaikan, akan tetapi justru permasalahan pengangguran semakin parah dan jumlahnya terus meningkat.
2. Orang yang sudah bekerja dapat digolongkan sebagai pengangguran, karena selain pengangguran terbuka, ada beberapa konsep pengangguran yang lain, yaitu setengah pengangguran, tenaga kerja lemah, dan tenaga kerja tidak produktif.
3. Ada beberapa penyebab pengangguran, di mana setiap negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi perekonomian masing-masing. Secara umum, penyebab pengangguran diantaranya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya laju investasi produktif, siklus bisnis yang melemah, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan strategi industri yang *labor saving*.
4. Keterkaitan antara pengangguran dan inflasi dapat dilihat dari kurva Phillips. Bila pemerintah mendorong investasi dan meningkatkan pengeluaran pemerintah secara besar-besaran dengan harapan tingkat pengangguran turun dari maka kenaikan pengeluaran pemerintah dan peningkatan investasi ini akan mengakibatkan meningkatnya permintaan efektif akan barang dan jasa sehingga harga barang dan jasa naik dan terjadilah inflasi.
5. Dilihat dari tingkat pendidikannya pengangguran tertinggi di Indonesia adalah tamatan Sekolah Dasar dan SLTP. Bila dilihat dari elastisitas penyerapan tenaga kerja per sektor, maka sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar adalah dari sektor jasa dan sektor transportasi dan komunikasi. Selain itu, dilihat dari kelompok usia, kelompok penduduk usia produktif antara 15-19 tahun dan usia 20-24 tahun merupakan kelompok usia yang paling besar mengalami pengangguran.
6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rendah pula yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat. Rendahnya produktivitas akan berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat sehingga akumulasi tabungan masyarakat juga akan rendah. Kondisi ini berakibat pada rendahnya investasi produktif karena sebagian dana yang digunakan untuk investasi diperoleh dari tabungan masyarakat yang pada gilirannya kembali mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi inilah yang membentuk lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*).
7. Untuk menentukan kemiskinan, ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan, yaitu indeks entropi, indeks Atkinson, dan indeks Gini. Sedangkan indikator kemiskinan, dapat menggunakan tingkat konsumsi beras perkapita per tahun, tingkat pendapatan, konsumsi gizi, dan lain-lain.

PERTANYAAN UNTUK LATIHAN

SOAL LATIHAN PILIHAN BERGANDA

1. Kelompok angkatan kerja yang memilih tidak bekerja karena tidak bersedia digaji pada jumlah tertentu maupun mengharapkan pekerjaan yang lebih baik di waktu yang akan datang, merupakan pengertian dari:
 - a. pengangguran terpaksa
 - b. setengah pengangguran tak kentara
 - c. setengah pengangguran kentara
 - d. pengangguran tersembunyi
 - e. tenaga kerja tidak produktif

2. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di negara berkembang, *kecuali*:
 - a. pertumbuhan penduduk yang tinggi
 - b. siklus bisnis yang melemah
 - c. tingginya investasi asing yang masuk ke NSB
 - d. *capital intensive*
 - e. rendahnya kualitas pendidikan

3. Berikut ini merupakan gambaran kondisi pengangguran di Indonesia, *kecuali*:
 - a. pengangguran terbuka lebih besar daripada setengah pengangguran
 - b. pengangguran terbuka tamatan SD lebih besar daripada tamatan SLTA
 - c. berdasarkan tingkat usia, pengangguran terbesar adalah kelompok umur 15-19 tahun.
 - d. sektor pertanian memberikan kesempatan tertinggi dilihat dari elastisitasnya.
 - e. jawaban a dan d benar

4. Kemiskinan yang disebabkan oleh kekurangan sumber daya alam, kurangnya fasilitas produktif, dan keterisolasian suatu daerah, merupakan pengertian dari:
 - a. kemiskinan absolut
 - b. kemiskinan relatif
 - c. kemiskinan struktural
 - d. kemiskinan kultural
 - e. kemiskinan mutlak

5. Berikut ini adalah indikator kemiskinan di Indonesia, *kecuali*:
 - a. konsumsi beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan
 - b. konsumsi beras 480 kg/kapita/tahun di perkotaan
 - c. pengeluaran sebesar Rp.89.845,- /kapita/bulan untuk perkotaan
 - d. pengeluaran sebesar Rp.50.000,-/kapita/bulan untuk pedesaan
 - e. semua jawaban a, b, c, dan d benar

SOAL LATIHAN *ESSAY*

1. Apa yang dimaksud dengan dimensi pengangguran? Jelaskan!
2. Jelaskan penggolongan pengangguran menurut BPS dan menurut Edgar. O. Edwards!
3. Jelaskan hubungan antara inflasi, pengangguran, dan kemiskinan!
4. Mengapa pengangguran terbuka untuk tamatan SLTP jauh lebih besar daripada pengangguran terbuka yang tidak bersekolah?
5. Apa yang dimaksud dengan elastisitas kesempatan kerja per sektor ekonomi. Bagaimana kondisinya di Indonesia?

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang serius dan menuntut untuk segera diatasi. Mengapa masalah pengangguran dapat terjadi di Indonesia dan apa yang menjadi penyebab utamanya. Menurut pendapat saudara, bagaimana *trend* masalah pengangguran ini dalam perspektif waktu sepuluh tahun yang akan datang?
2. Menurut Saudara, sektor apa yang dapat menjadi penyerap tenaga kerja yang potensial di Indonesia setelah era perdagangan bebas (*free-trade*) diberlakukan. Mengapa demikian?
3. Mengapa pengangguran yang terjadi di Indonesia didominasi tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama? Selain itu mengapa penduduk usia 19 – 24 tahun lebih banyak mengalami pengangguran?
4. Dilihat dari potensi ekonomi, Indonesia seharusnya menjadi negara yang makmur dan pemerintah mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Potensi itu berupa sumber daya alam (hutan, minyak dan gas, perikanan, dan lain-lain) maupun jumlah sumber daya manusia. Mengapa dalam kondisi seperti itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu?

10

TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Sistem Merkantilisme
2. Mengapa Perdagangan Internasional Terjadi
3. Ekspor Impor
4. Rintangan dalam Perdagangan Internasional
5. Cara Pembayaran dalam Perdagangan Internasional

SISTEM MERKANTILISME

Perdagangan antarnegara sebenarnya sudah dimulai ratusan tahun yang lalu sebelum adanya sistem merkantilisme sekitar abad 17. Dalam sistem merkantilisme, tujuan utama perdagangan antarnegara adalah untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor sekecil mungkin. Meningkatnya nilai ekspor berarti negara akan memperoleh keuntungan dengan masuknya devisa ke dalam negeri.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam kebijakan perdagangan internasional kaum merkantilisme adalah:

- a. Logam mulia identik dengan kemakmuran dan kekuasaan. Untuk itu dalam perdagangan internasional, diusahakan untuk memperoleh surplus yang kemudian dibayar dengan emas.
- b. Pemerintah membatasi dan bahkan melarang impor barang yang sudah diproduksi dalam negeri. Pembatasan ini bertujuan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Pembatasan dan larangan impor dilakukan dengan tarif dan kuota.
- c. Barang-barang ekspor disubsidi oleh pemerintah dan ekspor bahan mentah dilarang. Untuk meningkatkan daya saing barang ekspor dilakukan dengan menekan upah serendah mungkin.

Ada dua teori perdagangan internasional yang sering menjadi perhatian dalam perkembangannya, *Pertama*, Teori keuntungan mutlak dari Adam Smith. Adam Smith mengkritik paham merkantilisme karena besarnya campur tangan pemerintah dalam kebijakan perdagangan internasional. Ia berpendapat apabila negara menjalankan sistem *laissez faire* di dalam negeri dan melakukan perdagangan bebas dengan negara lain maka kekayaan negara akan bertambah dan dunia akan semakin makmur bila masing-masing negara melakukan spesialisasi.

Kedua, Teori ongkos komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo mengkritik teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Adam Smith. Richardo melihat adanya kelemahan pada teori keuntungan mutlak Adam Smith yaitu jika suatu negara tidak mempunyai keuntungan mutlak sama sekali maka ia tidak melakukan perdagangan internasional. Menurut Ricardo setiap nilai suatu barang ditentukan oleh ongkos tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat barang tersebut. Setiap negara akan melakukan spesialisasi dan mengekspor barang-barang yang mempunyai ongkos komparatif terkecil.

MENGAPA PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERJADI

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lainnya. Pengertian penduduk di sini dapat berupa perorangan, perusahaan atau lembaga negara. Setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, tidak dapat tidak melakukan perdagangan dengan negara lain. Ada beberapa alasan mengapa suatu negara perlu berdagang dengan negara lain, yaitu:

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP.

Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Perdagangan internasional itu sendiri berkaitan dengan beberapa kegiatan yaitu: perdagangan internasional melalui perpindahan barang, jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya yang biasa disebut *transfer of goods and services*. Perdagangan internasional melalui perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri atau yang disebut dengan *transfer of capital* perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja yang disebut dengan *transfer of labour*. Perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain atau yang biasa kita sebut *transfer of technology*. Perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar atau yang disebut dengan *transfer of data* ekonomi internasional menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan negara seperti:

1. Mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang relatif lebih sukar (imobilitas faktor produksi)
2. sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan serta politik yang berbeda faktor-faktor produksi yang dimiliki (faktor *endowment*) berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan.

Oleh karena itu pada dasarnya ekonomi internasional membahas tentang ketergantungan ekonomi antarnegara yang pada dasarnya dipengaruhi dan mempengaruhi hubungan politik, sosial, budaya, dan militer antar negara. Ekonomi internasional berkaitan dengan perdagangan antarnegara akan membahas tentang pola perdagangan internasional, teori perdagangan internasional, *Foreign Direct Investment*, Neraca Perdagangan, kerjasama tarif, blok perdagangan, kebijakan ekonomi internasional, sistem moneter internasional dan *multinational corporation* (MNC).

Memenuhi kebutuhan barang yang tidak dihasilkan sendiri

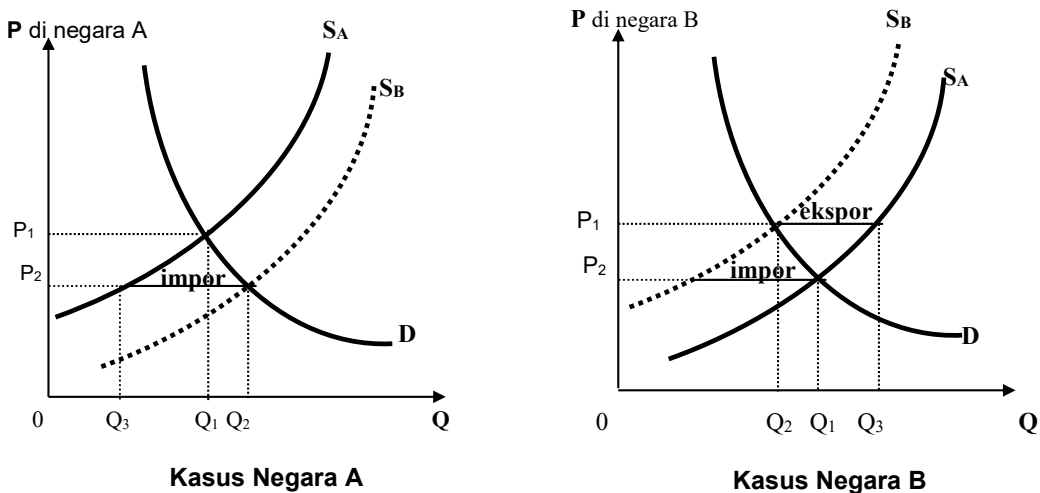
Perdagangan internasional memungkinkan negara memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki keterbatasan untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu.

Keterbatasan itu dapat berupa keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya maupun keterbatasan sumber bahan baku pendukungnya. Dengan kata lain tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu menghasilkan seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Walaupun dapat menghasilkan seluruh barang yang dibutuhkan, perbedaan sumber daya mengharuskan dilakukannya pengkhususan atau spesialisasi produksi untuk beberapa jenis barang saja yang menguntungkan.

Keuntungan harga yang lebih murah

Perdagangan internasional mempertinggi kesejahteraan suatu negara karena perdagangan internasional memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membeli barang dan jasa dengan harga lebih murah daripada barang dan jasa itu dihasilkan sendiri. Adakalanya suatu negara mampu memproduksi suatu jenis barang, tetapi karena ketidakefisienannya maka harga barang tersebut menjadi lebih mahal. Dalam kondisi seperti ini, maka akan lebih menguntungkan apabila negara tersebut tidak memproduksi jenis barang tersebut dan mengimpor dari negara lain. Dengan demikian ada kekhususan atau spesialisasi produksi bagi setiap negara sehingga perdagangan dapat terjadi antarnegara.

Kurva 10.1 menunjukkan kurva permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan P_1 . Kurva 10.1 menunjukkan kurva penawaran dan permintaan di masing-masing negara apabila tanpa terjadi perdagangan. Di negara A penawaran dan permintaan menentukan harga keseimbangan P_1 dan pada tingkat ini, permintaan sama dengan penawaran. Di negara B, produk ini harganya lebih murah karena negara B memproduksi dengan keunggulan komparatif, harganya adalah P_1 dan jumlah yang dikonsumsi Q_1 . Dengan adanya perdagangan internasional, maka harga di kedua negara menjadi sama karena pedagang akan membeli di negara B dan menjualnya di negara A. Karena keterbatasan produksi, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri atas sehingga harga di negara B akan mengalami peningkatan. Proses ini akan berhenti sampai dengan harga di negara A dan negara B sama.



Kurva 10.1. Permintaan dan Penawaran pada Perdagangan Internasional

EKSPOR IMPOR

Impor adalah kegiatan transaksi yang dilakukan antarnegara dengan tujuan untuk membawa barang dari luar negara ke dalam negara yang bersangkutan. Selama ini kegiatan impor masih dipandang sebagai kegiatan yang hanya dilakukan oleh pemerintah, atau lebih spesifiknya instansi pemerintah, namun secara lebih luas pelaku impor atau yang disebut dengan importir terdiri dari instansi pemerintah, perusahaan importir serta perorangan.

Sedangkan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah pabean suatu negara keluar wilayah pabean negara yang dituju. Secara sederhana ekspor berarti mengeluarkan barang dari negara yang ditempati eksportir ke luar negeri. Pelaku ekspor atau yang sering disebut eksportir terdiri dari instansi pemerintah, perusahaan bahkan perorangan. Untuk perusahaan dan perorangan dalam menjalankan ekspor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah bukti atau izin yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengesahkan usaha yang dilakukan oleh pengusaha. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggungjawab perusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri. Sedangkan SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri
2. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) pada prinsipnya Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Keterangan itu dapat meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan. Perlunya Daftar Perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha. Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan, berhak untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan. Petikan resmi itu dapat diperoleh dari kantor pendaftaran perusahaan.
3. Izin usaha departemen teknis/ lembaga non departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dokumen yang disyaratkan untuk menjadi eksportir, eksportir juga harus menyertakan dokumen SKA atau Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang harus disertakan pada saat melakukan ekspor barang. SKA sendiri adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang ekspor dari Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. SKA sendiri terbagi dalam 2 jenis yaitu:

1. SKA preferensi / GSP

yaitu: SKA yang berfungsi sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi, yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk yang diberikan oleh suatu negara / kelompok negara tertentu (ada 10 jenis SKA)

2. SKA non preferensi

yaitu: SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan/atau dokumen penyerta asal barang yang disertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu (ada 9 jenis SKA). Keuntungan menggunakan SKA sendiri bagi importir dan eksportir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan preferensi berupa penurunan atau pembebasan tarif bea masuk ke suatu atau kelompok negara.
2. Sebagai dokumen atau tiket masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor.
3. Untuk mengetahui atau menetapkan negara asal barang (*country of origin*) suatu barang ekspor.
4. Untuk memenuhi persyaratan pencairan *Letter of Credit (L/C)* terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C.
5. Sebagai salah satu alat untuk pelacakan jika terjadi tuduhan dumping.
6. Untuk keperluan data statistik perdagangan ekspor impor.

RINTANGAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada para konsumen dan pelaku penawaran karena lebih banyaknya barang yang diproduksi sehingga harga menjadi relatif lebih murah. Meskipun perdagangan internasional memungkinkan setiap negara yang terlibat di dalamnya memperoleh keuntungan, akan tetapi dalam kenyataannya ada beberapa hambatan dalam perdagangan internasional. Hambatan dalam perdagangan internasional itu terdiri dari:

a. Tarif

Tarif merupakan pajak atau bea yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor dari negara lain. Pembebanan tarif mengakibatkan semakin mahalnya barang yang diimpor. Ada beberapa jenis tarif yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional, yaitu:

1. *Ad valorem duties*, yaitu bea atau pajak yang besarnya dinyatakan dalam persentase dari nilai barang yang masuk ke dalam suatu negara. Misalnya tarif impor gula sebesar 5 persen dari nilai impor gula secara total.
2. *Specific duties*, bea atau pajak yang besarnya ditentukan dari ukuran fisik barang yang masuk ke suatu negara.

3. *Specific ad valorem duties*, besarnya tarif atau bea masuk ditentukan dari ukuran fisik barang dan persentase tertentu dari barang yang diimpor.

Selain jenis tarif yang telah disebutkan di atas, tarif juga digolongkan menjadi:

- a. Bea ekspor (*export duties*). Bea ekspor adalah bea atau pajak yang dibebankan pada barang yang diekspor menuju negara lain. Setiap barang yang keluar dari batas suatu negara akan dikenakan tarif dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan negara yang bersangkutan.
- b. Bea transit (*transit duties*). Bea transit dikenakan pada barang yang melewati wilayah suatu negara dan negara tersebut bukanlah tujuan akhir dari barang tersebut. Misalnya Indonesia mengekspor kopi ke Amerika dengan menggunakan kapal laut. Apabila kapal tersebut melalui Singapura dan transit di negara tersebut, maka Singapura akan mengenakan tarif atau bea transit pada barang ekspor tersebut.
- c. Bea impor (*import duties*). Bea impor dibebankan pada barang yang memasuki wilayah suatu negara dan negara tersebut menjadi tujuan akhir dari barang yang masuk tersebut.

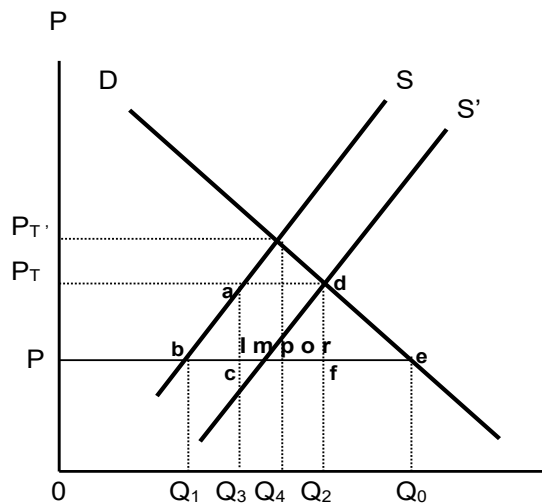
Pemerintah suatu negara berwenang menetapkan tarif bagi barang yang masuk ke negaranya dengan beberapa tujuan, diantaranya yaitu untuk melindungi jenis industri tertentu yang memerlukan perlindungan dari pemerintah terhadap barang-barang dari luar negeri. Jenis industri yang memerlukan perlindungan dari pemerintah ini biasanya adalah jenis industri strategis dan baru berkembang (*infant industries*). Hal ini pernah dilakukan di Korea Selatan yang memberikan perlindungan terhadap industri dalam negerinya dari persaingan global. Perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk beberapa industri di Korea Selatan adalah sekitar 15 tahun, setelah masa itu tarif dihapuskan sehingga industri tersebut mampu bersaing dengan industri dari negara lain. Selain itu, pengenaan tarif juga ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja di dalam negeri. Dengan pengenaan tarif yang tinggi, maka akan menekan impor barang tertentu dari negara lain dan penurunan impor ini akan merangsang industri dalam negeri untuk meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan pasar lokal. Peningkatan produksi di dalam negeri akan memperluas kesempatan kerja di dalam negeri.

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh tarif, semakin besar tarif yang dibebankan oleh pemerintah, maka semakin besar kerugian yang harus ditanggung oleh konsumen. Secara grafis, dampak tarif dapat dilihat pada kurva 10.2 berikut ini. Sebelum adanya kebijakan tarif, tingkat harga di dalam negeri adalah sebesar OP dan jumlah barang yang diproduksi di dalam negeri adalah OQ_1 . Dengan jumlah konsumsi dalam negeri sebesar Q_1 , Q_0 , maka terjadi kekurangan sebesar Q_1 , Q_0 pula sehingga jumlah tersebut harus dipenuhi dengan cara impor. Karena terjadi impor, maka pemerintah menetapkan pembebanan tarif sebesar P , P_T . Dengan pembebanan tarif sebesar itu, maka ada beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu:

- a. Konsumen dirugikan karena terjadi kenaikan harga di dalam negeri dari OP menjadi OP_T . Dengan kata lain, pembebanan tarif oleh pemerintah akan mengakibatkan

harga di dalam negeri menjadi lebih mahal dibandingkan dengan harga di luar negeri. Dampak kenaikan harga ini disebut dengan *price effect*.

- b. Jumlah barang yang diminta di dalam negeri berkurang dari OQ_0 menjadi OQ_2 . Penurunan permintaan ini dikarenakan harga barang lebih mahal sehingga daya beli masyarakat menurun. Dengan demikian maka pengenaan tarif akan berdampak pada penurunan permintaan efektif dan penurunan daya beli masyarakat.
- c. Dampak positif pembebanan tarif terhadap industri dalam negeri adalah terjadinya kenaikan produksi dalam negeri dari OQ_1 menjadi OQ_3 . Kenaikan produksi dalam negeri ini dikarenakan harga barang yang diimpor dari luar negeri terasa lebih mahal atau pengenaan tarif yang tinggi akan mengakibatkan turunnya impor terhadap barang tertentu sehingga untuk memenuhi permintaan dalam negeri, maka produksi dalam negeri perlu ditingkatkan.
- d. Karena pemerintah menetapkan tarif terhadap barang yang diimpor, maka pemerintah akan memperoleh pendapatan sebesar tarif yang ditetapkan tersebut. Pembebanan tarif sebesar $P - P_T$ akan memberikan penerimaan pemerintah sebesar area $a - d - c - f$. dampak ini disebut dengan (*revenue effect*).
- e. Dengan adanya tarif, maka konsumen di dalam negeri akan membayarkan ekstra pendapatan kepada produsen di dalam negeri sebesar $P - P_T$ $b - a$. Dampak ini disebut dengan (*redistribution effect*).



Kurva 10.2. Dampak Tarif Terhadap Perekonomian

b. Kuota

Kuota merupakan suatu bentuk hambatan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara membatasi jumlah barang yang masuk ke suatu negara dan

keluar dari suatu negara. Ada banyak alasan mengapa suatu negara memberikan kuota terhadap barang tertentu, misalnya untuk membatasi dan mencegah membanjirnya barang-barang dari luar negeri yang mengancam kelangsungan industri dalam negeri. Batasan masuknya barang-barang dari luar negeri disebut dengan *kuota impor*. Tujuan lain penetapan kuota adalah untuk membatasi pengiriman barang-barang dari dalam negeri secara berlebihan, misalnya untuk melindungi kelestarian sumber daya alam tertentu ataupun melindungi kebutuhan dalam negeri sehingga tidak mengalami kekurangan.

c. Aturan Administratif dan Karantina

Pemerintah kadang menetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan internasional bersifat menjadi penghalang dalam perdagangan internasional. Misalnya impor ternak dan pakan ternak yang harus melalui prosedur rumit dan sistem karantina serta penelitian mendalam merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Kekhawatiran penularan penyakit melalui impor ternak, seperti penyakit kuku dan mulut, sapi gila (*mad cow*), dan flu burung menjadi alasan larangan impor ternak. Isu pencemaran lingkungan dalam bentuk standarisasi mutu internasional atau *international standard organisation* (ISO) yang gencar disuarakan oleh beberapa negara Eropa, juga merupakan hambatan dalam perdagangan internasional.

d. Subsidi

Kebijakan pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan dalam negeri bertujuan untuk membantu pertumbuhan perusahaan tersebut agar mampu bersaing dengan produk impor dari luar negeri. Pemberian subsidi ini menguntungkan konsumen karena konsumen menikmati harga yang lebih murah serta tidak kehilangan surplus konsumen. Begitu pula dengan produsen yang diuntungkan karena subsidi akan meringankan biaya produksi perusahaan. Subsidi akan kurang bermanfaat apabila pemerintah membiayai subsidi dengan cara meningkatkan pajak, yang pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen sehingga mengurangi daya beli konsumen tersebut.

CARA PEMBAYARAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Ada beberapa cara pembayaran yang biasanya digunakan dalam perdagangan internasional, diantaranya yaitu:

1. Tunai (*cash*)
2. *Open account*
3. *Commercial bills of exchange*
4. *Letters of credit*
5. *Private compensation*

Pemilihan cara pembayaran didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu antara eksportir dan importir. Kondisi tersebut dapat berupa kondisi keuangan, kredibilitas importir ataupun eksportir, dan ketersediaan prasarana secara institusional.

a. Tunai (*Cash*)

Cara pembayaran tunai ini dilakukan apabila kondisi keuangan eksportir masih terbatas dan eksportir tersebut belum begitu mengenal importir yang ada di luar negeri. Biasanya cara pembayaran ini kurang disukai oleh importir karena importir harus menyediakan uang tunai yang cukup untuk melakukan pembayaran tersebut sehingga importir yang modalnya terbatas akan terganggu likuiditasnya. Cara pembayaran tunai ini dapat dilakukan dengan menggunakan cek (*cheque*) ataupun *bank draft*.

b. *Open Account*

Cara pembayaran dengan *open account* ini dilakukan setelah barang yang diekspor diterima oleh importir. Jangka waktu pembayaran disesuaikan kebijakan importir sehingga apabila terjadi risiko, maka yang akan menanggung adalah eksportir. Dengan cara pembayaran semacam ini, eksportir harus memiliki modal yang cukup besar dan mengenal importir dengan baik. Cara pembayaran ini sangat riskan apabila pembayaran dilakukan dalam mata uang asing karena fluktuasi kurs akan memungkinkan kerugian importir ataupun eksportir.

c. *Commercial Bills of Exchange*

Commercial bills of exchange adalah surat yang dikeluarkan oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu tertentu.

Commercial bills of exchange dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Clean drafts*

Clean draft yaitu *draft* yang tidak disertai dengan dokumen barang yang dikirimkan.

b. *Documentary drafts*

Draft yang disertai dengan dokumen barang yang dikirimkan. *Draft* jenis ini biasanya juga disertai dengan kelengkapan asuransi barang yang dikirimkan.

Berkaitan dengan jangka waktu pembayaran *draft*, maka *draft* dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. *Sight draft*

Sight draft yaitu *draft* yang dibayar sesaat setelah *draft* tersebut diperlihatkan (*sight*) kepada importir atau pembeli sehingga mungkin saja jenis *draft* ini dibayar sebelum barang diterima oleh importir.

b. *Arrival draft*

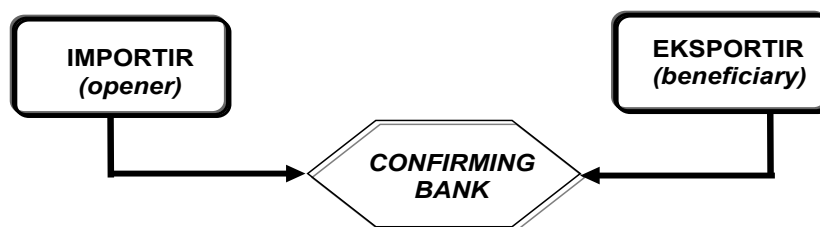
Arrival draft yaitu *draft* yang harus dibayar oleh importir setelah barang yang dikirimkan oleh eksportir datang (*arrived*).

c. *Date draft*

Date draft adalah *draft* yang dibayar pada tanggal (*date*) tertentu yang disepakati oleh importir dan eksportir. *Date draft* ini dapat juga dibayar setelah beberapa hari dari tanggal yang disepakati.

d. *Letters of Credit* (LC)

Letters of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir dan bank tersebut menyetujui untuk membayar sejumlah transaksi tertentu yang akan ditarik oleh eksportir. Jenis pembayaran ini biasa digunakan dalam perdagangan internasional pada saat ini karena jenis pembayaran ini lebih terjamin keamanannya, terutama bagi eksportir. Bank yang menjadi penjamin pembayaran (*issuer*) adalah bank di negara eksportir yang atas permintaan eksportir menjamin pembayaran LC yang dikeluarkan.

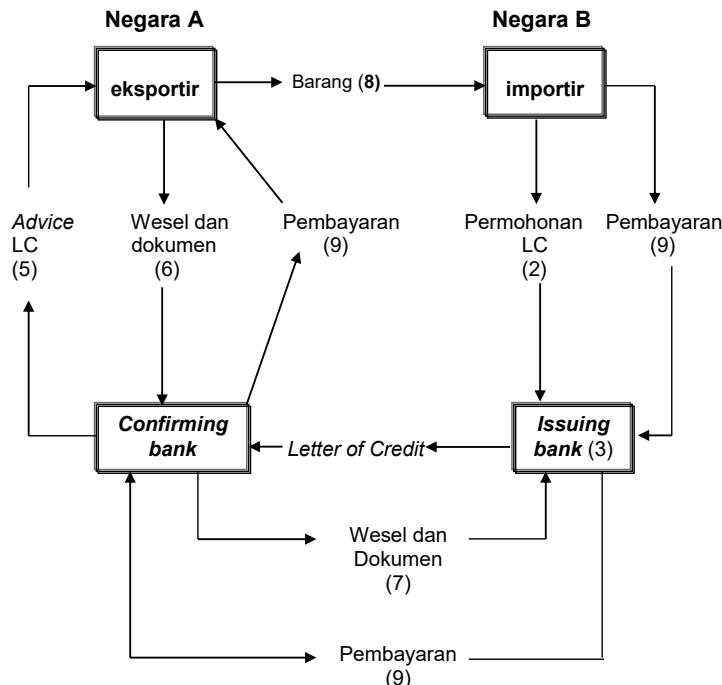


Gambar 10.1. Pihak dalam *Letter of Credit*

Langkah-Langkah Pembayaran dengan LC:

1. Perjanjian tentang tata cara pembayaran dengan LC oleh importir dan eksportir.
2. Importir membuka LC dengan bank di negaranya dengan mengisi permohonan pembukaan LC.
3. Bila permohonan disetujui, LC ditandatangani oleh bank. Dengan demikian bank akan menjamin pembayaran kepada eksportir, dan importir akan menjamin semua pembayaran yang dilakukan oleh bank.
4. Dengan ditandatangani permohonan LC tersebut, maka kredit telah tersedia bagi importir untuk mengimpor barang dari eksportir.
5. Bank (*issuer*) tersebut memerintahkan *confirming bank* untuk memberikan *advice of LC* kepada eksportir. *Confirming bank* lalu membubuhkan namanya pada LC tersebut untuk memperkuat jaminan pembayaran LC.
6. Setelah itu barang dikirim oleh eksportir. Eksportir menarik wesel atas *issuing bank* dan mengirimkan wesel tersebut beserta dokumen-dokumen pengiriman barang. *Confirming bank* memeriksa dokumen tersebut.
7. Wesel dan dokumen tersebut oleh *confirming bank* dikirimkan ke *issuing bank*.
8. Setelah wesel tersebut ditandatangani oleh *issuing bank*, maka barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan dikirimkan ke tempat importir setelah menandatangani *trust receipt*.
9. Pada tanggal yang telah ditentukan dalam wesel tersebut, importir membayar kepada *issuing bank*. Dengan demikian selesailah proses pembayaran dengan menggunakan LC ini.

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pembayaran dengan menggunakan LC, perhatikan Gambar 10.2 berikut ini sesuai dengan tanda panah dan nomor urut.



Gambar 10.2. Mekanisme Perdagangan dengan LC

Karena LC digunakan untuk transaksi Internasional maka aturan dasar dari LC pun mengacu kepada aturan internasional, yaitu:

1. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC)-600* atau biasa disebut UCP 600; adalah acuan/aturan internasional yang digunakan untuk *Commercial L/C* dan *Standby L/C*
2. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits for Electronic Presentations (eUCPDC)* atau biasa disebut eUCP versi I.I; adalah acuan/aturan international yang digunakan untuk *Commercial L/C* dan *Standby L/C* yang mensyaratkan presentasi dokumen elektronik.
3. *International Standby Practice (ISP)-98*; adalah acuan/aturan internasional yang digunakan untuk *Standby L/C*
4. *Uniform Rules for bank to bank Reimbursements under documentary credit (URR)-725*; acuan/ aturan internasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas L/C yang terdapat *Reimbursing Bank*
5. *International Commercial Terms (Incoterms)-2010*; acuan/aturan internasional yang mengatur syarat penyerahan barang dari *Seller* ke *Buyer* berisikan biaya/risiko dari masing-masing pihak.

6. *International Standard Banking Practice (ISBP)-681E*; acuan/aturan internasional dalam hal pemeriksaan dokumen atas dasar L/C.

Menurut sifatnya LC dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. *Revocable LC*: LC yang dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu L/C yang dapat ditarik kembali atau dibatalkan tidak menciptakan suatu ikatan hukum antara pihak bank dan *beneficiary*. Sebenarnya bentuk *revocable* ini kurang tepat apabila disebut L/C karena tidak mengandung jaminan bahwa wesel-weselnya akan dibayar ketika diajukan, mengingat pembatalan mungkin telah terjadi tanpa pemberitahuan kepada *beneficiary*. Oleh karena itu bentuk L/C yang demikian kurang disukai oleh penjual dan jarang dipergunakan.
2. *Irrevocable LC*: LC yang tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, *Irrevocable LC* mengikat *issuing bank* terhadap penerima. Selama jangka waktu berlakunya yang ditentukan dalam L/C, *issuing bank* tetap menjamin untuk membayar, mengaksep, atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut asalkan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan didalamnya terpenuhi.

Pada dasarnya LC bersifat *Irrevocable LC*, kecuali ada perjanjian lain yang memungkinkan bersifat *revocable*

1. *Sight payment LC* yaitu LC yang pembayarannya dilakukan pada saat di unjukkan atau bisa dikatakan L/C yang cara pembayarannya oleh *negotiating bank* dilakukan pada saat wesel-wesel ditunjukkan oleh *beneficiary* disertai dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam L/C. Pada umumnya Sight L/C ditujukan secara khusus kepada bank-bank koresponden di luar negeri di mana bank pembuka L/C mempunyai rekening dan bank penerima L/C sekaligus juga bertindak sebagai paying bank.
2. *Acceptance/usance LC* yaitu LC yang pembayarannya secara berjangka. LC dibayar pada saat pembayaran jatuh tempo, tidak pada saat pengajuan dokumen-dokumen.
3. *Negotiation LC* yaitu LC yang pembayarannya dengan cara membeli wesel dan/ atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima
4. *Deferred Payment LC* yaitu LC yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari. Dalam LC jenis ini, wesel tidak termasuk sebagai dokumen yang diajukan dalam rangka pembayaran

Menurut penunjukan bank/*nominated bank* L/C dapat dibagi menjadi:

1. *Restricted LC* yaitu LC yang hanya menunjuk pada bank tertentu atau hanya 1 (satu) *nominated bank*
2. *Unrestricted LC* yaitu LC yang menunjuk secara bebas bank manapun sebagai *nominated bank* atau sering disebut "*freely negotiation*"
3. *Straight L/C* yaitu L/C yang hanya dapat dibayarkan pada *counter issuing bank*

Menurut jaminan pembayaran dibagi menjadi:

1. *Unconfirm LC* yaitu LC yang pembayarannya hanya dijamin oleh *issuing bank*, asalkan sesuai dengan syarat dan kondisi LC
2. *Confirm LC* yaitu LC yang pembayarannya dijamin oleh *confirming bank* selain oleh *issuing bank*, asalkan sesuai dengan syarat dan kondisi LC. Tanggung jawab bank pengkonfirmasi sama dengan *issuing bank* dan tidak dapat menarik diri dari kewajibannya kepada penerima.

Menurut saat pembayaran/tenor:

1. *Sight LC* yaitu LC yang pembayarannya dilakukan oleh *issuing bank* pada saat dokumen diunjukkan
2. *Usance LC* yaitu LC yang pembayarannya dilakukan oleh *issuing bank* pada saat jatuh tempo draft/kewajiban

Selain bentuk LC seperti di atas, ada bentuk LC Lainnya, yaitu:

1. *Red clause LC* yaitu LC yang memberikan hak kepada *beneficiary* untuk melakukan penarikan pembayaran di muka dengan menyerahkan Kwintansi dan *Letter of Undertaking*. Atau bisa dikatakan L/C di mana *issuing bank*-nya memberikan kuasa kepada *paying bank* untuk membayar uang muka kepada *Beneficiary* sebagian dari jumlah L/C sebelum *beneficiary* menyerahkan dokumen. Artinya L/C ini memiliki klausul dengan tinta merah yang menyatakan bahwa *advising/confirming bank* dapat melakukan pembayaran di muka kepada eksportir/penjual/*beneficiary* sebelum penyerahan dokumen pengiriman barang dilakukan. L/C semacam ini sering digunakan untuk menyediakan dana/kredit bagi eksportir sebelum barang dikapalkan. *Beneficiary* harus membuat pernyataan bahwa dokumen-dokumen yang diminta dalam L/C akan diserahkan pada waktunya. suatu klausul yang memuat makna anti *cipatory* yaitu menyangkut sesuatu hal yang sifatnya didahulukan. Adapun yang didahulukan di sini adalah pembayaran atas L/C oleh bank yang dilakukan sebelum dokumen-dokumen yang disyaratkan diserahkan. Atas dasar inilah maka *red clause L/C* termasuk dalam golongan yang disebut ***anti cipatory credit***.
2. *Green clause LC* yaitu LC yang memberikan hak kepada *beneficiary* untuk melakukan penarikan pembayaran di muka dengan menyerahkan *Warehouse receipt*. *Green ink clause letter of credit* hampir serupa dengan *red clause L/C*, yakni juga memberikan uang muka kepada *beneficiary* sebelum pengapalan barang-barang dilakukan.
3. *Transferable L/C* yaitu L/C yang memberi hak kepada *beneficiary* untuk dapat memindahkan sebagian atau seluruh nilai yang tercantum dalam L/C kepada satu atau lebih pemasok. Pengalihan hanya dapat dilakukan satu kali proses, kecuali L/C menentukan sebaliknya.
4. *Revolving L/C* yaitu L/C yang dipakai berulang ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam L/C yang

bersangkutan, tanpa perlu menerbitkan L/C yang baru atau melakukan perubahan L/C, terdiri dari:

- a. *Cumulative* yaitu Setiap jumlah yang tidak ditarik oleh *Beneficiary* untuk suatu periode yang diberikan akan tersedia untuk periode berikutnya sampai dengan L/C *expire*.
- b. *Non-Cumulative* yaitu Setiap jumlah yang ditarik oleh *beneficiary* untuk suatu periode yang diberikan tidak akan tersedia untuk periode berikutnya.

ISTILAH PENTING BAB INI

<i>Mercantilism</i>	Kuota impor
<i>Laissez faire</i>	<i>International standard organisation</i>
Ongkos komparatif	<i>Open account</i>
Spesialisasi produksi	<i>Commercial bills of exchange</i>
Keunggulan komparatif	<i>Letters of credit</i>
<i>Ad valorem duties</i>	<i>Private compensation</i>
<i>Spesific duties</i>	<i>Bank draft</i>
<i>Specific ad valorem duties</i>	<i>Clean drafts</i>
<i>Export duties</i>	<i>Documentary drafts</i>
<i>Transit duties</i>	<i>Sight draft</i>
<i>Impor duties</i>	<i>Arrival draft</i>
<i>Infant industries</i>	<i>Date draft</i>
<i>Price effect</i>	<i>Confirming bank</i>
<i>Revenue effect</i>	<i>Issuer</i>
<i>Redistribution effect</i>	

RANGKUMAN

1. Ada dua teori perdagangan internasional yang sering menjadi perhatian dalam perkembangannya, *Pertama*, Teori keuntungan mutlak dari Adam Smith. Adam Smith mengkritik paham merkantilisme karena besarnya campur tangan pemerintah dalam kebijakan perdagangan internasional. *Kedua*, Teori ongkos komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut Ricardo setiap nilai suatu barang ditentukan oleh ongkos tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat barang tersebut.
2. Ada beberapa alasan mengapa suatu negara perlu berdagang dengan negara lain, yaitu: Memenuhi kebutuhan barang yang tidak dihasilkan sendiri, Keuntungan harga yang lebih murah.
3. Meskipun perdagangan internasional memungkinkan setiap negara yang terlibat di dalamnya memperoleh keuntungan, akan tetapi dalam kenyataannya ada beberapa hambatan dalam perdagangan internasional. Hambatan dalam perdagangan internasional itu terdiri dari: Tarif, Kuota, Aturan Administratif, Subsidi.

4. Ada beberapa cara yang biasanya digunakan dalam perdagangan internasional, diantaranya yaitu: tunai (*cash*), *open account*, *commercial bills of exchange*, *letters of credit*, dan *private compensation*.
5. *Letters of credit* adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir dan bank tersebut menyetujui untuk membayar sejumlah transaksi tertentu yang akan ditarik oleh eksportir. Jenis pembayaran ini biasa digunakan dalam perdagangan internasional pada saat ini karena jenis pembayaran ini lebih terjamin keamanannya, terutama bagi eksportir. Bank yang menjadi penjamin pembayaran (*issuer*) adalah bank di negara eksportir yang atas permintaan eksportir menjamin pembayaran LC yang dikeluarkan.

PERTANYAAN UNTUK LATIHAN

SOAL LATIHAN PILIHAN BERGANDA

1. Bea atau pajak yang besarnya ditentukan dari ukuran fisik barang yang masuk ke suatu negara, merupakan pengertian dari:
 - a. *ad valorem duties*
 - b. *specific duties*
 - c. *advalorem specific duties*
 - d. *export duties*
 - e. *import duties*
2. Bentuk hambatan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara membatasi jumlah barang yang masuk ke suatu negara dan keluar dari suatu negara, merupakan pengertian dari:
 - a. tarif
 - b. kuota
 - c. subsidi
 - d. *dumping*
 - e. karantina
3. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih cara pembayaran dalam perdagangan internasional adalah, *kecuali*:
 - a. kepemilikan jumlah modal
 - b. kredibilitas importir
 - c. fluktuasi kurs
 - d. kredibilitas eksportir
 - e. semua jawaban di atas adalah benar
4. Institusi yang menjadi penjamin pembayaran atas LC yang dikeluarkan dalam perdagangan internasional adalah:
 - a. *confirming bank*
 - b. *opener*
 - c. *beneficiary*
 - d. *trust receipt*
 - e. departemen perdagangan

5. Teori ongkos komparatif yang dikemukakan oleh:
- a. David Richardo
 - b. Adam Smith
 - c. Leon Walras
 - d. JM. Keynes
 - e. Jawaban a dan b benar

SOAL LATIHAN ESSAY

1. Dalam perdagangan internasional, ada beberapa cara pembayaran. Sebutkan cara pembayaran tersebut dan mana yang paling aman untuk digunakan!
2. Apa manfaat dan kerugian dari adanya perdagangan internasional bagi negara berkembang?
3. Jelaskan dengan menggunakan kurva, proses penyesuaian harga barang antar dua negara apabila terjadi perdagangan internasional!
4. Apa dampak kebijakan tarif dalam perdagangan internasional, apabila ditinjau dari:
 - a. manfaat yang diterima konsumen
 - b. keuntungan yang diterima pemerintah
 - c. bagi perusahaan penghasil produk yang sama di dalam negeri
5. Apa yang dimaksud dengan keuntungan komparatif dan keuntungan mutlak?

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Sebenarnya apabila kaidah dan aturan perdagangan internasional ditaati, maka setiap negara akan memperoleh dari perdagangan tersebut. Dalam kenyataannya, negara berkembang selalu termarginalisasikan dalam perdagangan internasional. Menurut Saudara, apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi?
2. Menurut Saudara, apa dampak terbentuknya blok-blok perdagangan dunia terhadap prospek perdagangan internasional antar kawasan?
3. Untuk mempertinggi daya saing dalam perdagangan internasional, setiap negara perlu melakukan spesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa. Menurut Saudara, sejauh manakah spesialisasi tersebut sudah terbentuk?
4. Menurut Saudara, apa dampak kawasan perdagangan bebas dunia atau *free trade* bagi negara berkembang seperti Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2017. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam angka. Penerbit BPS
- Blanchard, Olivier. 2017. Macroeconomics, 7th Edition, Penerbit Pearson Publisher.
- Bortis, Heinrich. 2004. Money and Inflation; A New Macroeconomic Analysis, Emerald Group Publishing Limited.
- Boediono, 2014. Seri Sinopsis 3 Pengantar Ekonomi, Ekonomi Makro, Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada, cetakan ke 26,.
- , 2014. Seri Sinopsis 6 Pengantar Ekonomi, Ekonomi Internasional, Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada, cetakan ke 26, tahun 2013.
- , 2013. Seri Sinopsis 6 Pengantar Ekonomi, Ekonomi Mikro, Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada, cetakan ke 26,.
- Case, Karl E. et al. 2012. Principles Macroeconomics. Tenth Edition, Penerbit Pearson Education, Incorporation.
- Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, and Richard Startz, Macroeconomics, Sixth Edition, Penerbit McGraw Hill Incorporation Press. Boston
- Mankiw, Gregory, 2011. Principles of Economics, Sixth Edition, Penerbit Cengage Learning.
- Wijaya, Farid, 2000. Ekonomi Makro : Seri Pengantar Ekonomika, Edisi 2, Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Soedijono, Reksoprajitno. 1994. Ekonomi Makro Pengantar; Analisis Pendapatan Nasional. Edisi ke Lima, Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- , 2000. Pengantar Ekonomi Makro. Edisi ke Enam, Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- , . Ekonomi Makro. Edisi Pertama. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta
- Sukirno, Sadono, 2000. Makro Ekonomika Modern, Penerbit PT. Rasa Grafindo Persada : Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Unit Penerbit dan Percetakan UPP STIM YKPN.

- Krugman Paul R. dan Obstfeld Maurice. 2003. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Edisi kelima. Penerbit PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi keempat. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Nordhaus D. William & Samuelson A. Paul. 2010. *Economics*. Edisi ke empatbelas. Penerbit McGraw Hill Incorporation Press. Boston.
- Sadono, Sukirno. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tautan Bank Indonesia: www.bi.go.id

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam angka*. Penerbit BPS.
- Blanchard, Olivier. 2017. *Macroeconomics*. 7th Edition. Penerbit Pearson Publisher.
- Bortis, Heinrich. 2004. *Money and Inflation; A New Macroeconomic Analysis*, Emerald Group Publishing Limited.
- Boediono, 2014. *Seri Sinopsis 3 Pengantar Ekonomi, Ekonomi Makro*. Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada. Cetakan ke-26.
- , 2014. *Seri Sinopsis 6 Pengantar Ekonomi, Ekonomi Internasional*, Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada, cetakan ke-26.
- , 2013. *Seri Sinopsis 6 Pengantar Ekonomi, Ekonomi Mikro*. Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada. Cetakan ke-26.
- Case, Karl E. *et al.* 2012. *Principles Macroeconomics*. Tenth Edition. Penerbit Pearson Education. Incorporation.
- Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, and Richard Startz. *Macroeconomics*. Sixth Edition. Penerbit McGraw Hill Incorporation Press. Boston.
- Mankiw, Gregory, 2011. *Principles of Economics*. Sixth Edition. Penerbit Cengage Learning.
- Wijaya, Farid, 2000. *Ekonomi Makro: Seri Pengantar Ekonomika*, Edisi 2. Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Soedijono, Reksoprajitno. 1994. *Ekonomi Makro Pengantar: Analisis Pendapatan Nasional*. Edisi Kelima, Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- , 2000. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Keenam. Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- , *Ekonomi Makro*. Edisi Pertama. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono, 2000. *Makro Ekonomika Modern*. Penerbit PT. Rasa Grafindo Persada: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

- Krugman Paul R. dan Obstfeld Maurice. 2003. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Edisi kelima. Penerbit PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi keempat. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Nordhaus D. William & Samuelson A. Paul. 2010. *Economics*. Edisi keempatbelas. Penerbit McGraw Hill Incorporation Press. Boston.
- Sadono, Sukirno. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tautan Bank Indonesia: www.bi.go.id

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Teori, Soal, dan Penyelesaiannya

Buku Edisi Kedua ini disempurnakan dengan penyajian yang lebih simpel dan mudah difahami yang dilengkapi dengan soal serta pembahasannya. Buku ini cocok untuk mahasiswa, dosen, dan praktisi dalam memahami konsep dasar ekonomi makro dan penerapannya dalam perekonomian. Dalam edisi kedua ini, materi dilengkapi dengan beberapa tambahan aspek, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Ekonomi Makro Daerah dan Regional (LQ, Klassen, dan *Shift-share*). Dengan penambahan materi ini, buku ini lebih komprehensif dan cocok untuk memahami ekonomi makro secara utuh.



Dr. Suparmono, M.Si. merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UGM dan Pascasarjana Ilmu Ekonomi UGM dengan predikat tercepat dan sangat memuaskan. Gelar Doktor diperoleh dari UNS dengan predikat sangat memuaskan. Lahir di Jambi, 18 Maret 1973, anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Selain sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, sejak tahun 1997 aktif sebagai Tenaga Ahli di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan publik untuk kajian pada kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah. Seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian KPDT, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia NTB dan Semarang, Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

UPP STIM YKPN
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 7
Yogyakarta 55581
Telp.: (0274) 889317,
HP/WA: 08157988210
Email: upp_stimykn@yahoo.com

Ekonomi

ISBN 978-602-1266-63-0



9 786021 286630

Harga P. Jawa Rp 99.000,-